



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, yang dapat disingkat menjadi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan
- (2) Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah :
 - a. Menetapkan Visi, Misi Dan Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah;
 - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan terpadu antara perencanaan dengan Kabupaten Tasikmalaya

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Sistematika RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISI ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X	PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi dan uraian RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
MASA BERLAKU RPJMD

Pasal 6

RJPMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015-2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Desember 2011

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 DESEMBER 2011

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	I - 1
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
	1.3. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 7
	1.4. Sistematika RPJM Daerah	I - 8
	1.5. Maksud dan Tujuan	I - 9
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
	2.1. Aspek Geografis dan Demografi	II - 1
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 6
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II - 14
	2.4. Aspek Daya Saing	II - 24
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan	III - 1
	3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	III - 1
	3.2. Kerangka Pendanaan	III - 19
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis	IV - 1
	4.1. Permasalahan Pembangunan	IV - 1
	4.2. Isu Strategis	IV - 14
	4.3. Isu Strategis Kewilayahan	IV - 15
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V - 1
	5.1. Visi	V - 1
	5.2. Misi	V - 4
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V - 4
BAB VI	Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah	VI - 1
	6.1. Kebijakan Pembangunan	VI - 1
	6.2. Kebijakan Kewilayahan	VI - 9
BAB VII	Kebijakan Umum dan Prgram Pembangunan Daerah	VII - 1
	7.1. Program Prioritas Bupati	VII - 1
	7.2. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	VII - 1
BAB VIII	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII - 1
BAB IX	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan	IX - 1
	9.1. Pedoman Transisi	IX - 1
	9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX - 1
BAB x	Penutup	X - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya	II-1
Tabel 2.1.2	Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011	II-2
Tabel 2.1.3	Wilayah Daerah Aliran Sungai di KABUPATEN Tasikmalaya	II-3
Tabel 2.1.4	Penggunaan LAhan di Kabupaten Tasikmalaya TAhun 2011	II-4
Tabel 2.1.5	Penduduk KABupaten Tasikmalaya menurut Jenis Kelamin Tahun 2006-2010	II-5
Tabel 2.2.1	Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-6
Tabel 2.2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2009	II-7
Tabel 2.2.2.1	APK, APM dan Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-8
Tabel 2.2.2.2	AKB, AKABA, AKI dan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-9
Tabel 2.2.2.3	Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian per Maret 2011	II-10
Tabel 2.3.1.1	Ketersediaan Sarana Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-14
Tabel 2.3.1.2	Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-16
Tabel 2.3.2.1	Panjang Jalan dan Jembatan serta Kondisinya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-18
Tabel 2.3.2.2	Banyaknya Sarana Peribadatan Tahun 2009	II-19
Tabel 2.3.2.3	Data Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-21
Tabel 2.3.2.4	Kondisi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2009	II-23
Tabel 2.3.2.5	Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2009	II-23
Tabel 2.4.2.1	Kondisi Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-26
Tabel 2.4.2.2	Indikator Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-27

Tabel 2.4.2.3	Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-28
Tabel 2.4.2.4	Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010	II-28
Tabel 2.4.4.1	Realisasi Investasi di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2010	II-30
Tabel 3.1.1.1	Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun 2006 Kabupaten Tasikmalaya	III-2
Tabel 3.1.1.2	Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007-2010	III-4
Tabel 3.1.1.3	Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 – 2011	III-7
Tabel 3.1.1.4	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2011	III-10
Tabel 3.1.2.1	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006	III-11
Tabel 3.1.4.1	Analisis Proporsi Belanja Langsung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2010	III-17
Tabel 3.1.5.1	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2010	III-18
Tabel 3.1.5.2	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007-2010	III-18
Tabel 3.1.5.3	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2010	III-19
Tabel 3.2.1.1	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2010	III-20
Tabel 3.2.2.1	Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2011-2015	III-20
Tabel 6.2.1	Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	VI-10
Tabel 6.2.2	Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya	VI-14
Tabel 6.2.3	Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	VI-15

Tabel 6.2.4	Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya	VI-17
Tabel 8.1	Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015	I-3
Gambar 1.3.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 3.1.1.1	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007-2010	III-10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (duapuluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan secara nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kerangka pendanaannya

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006-2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

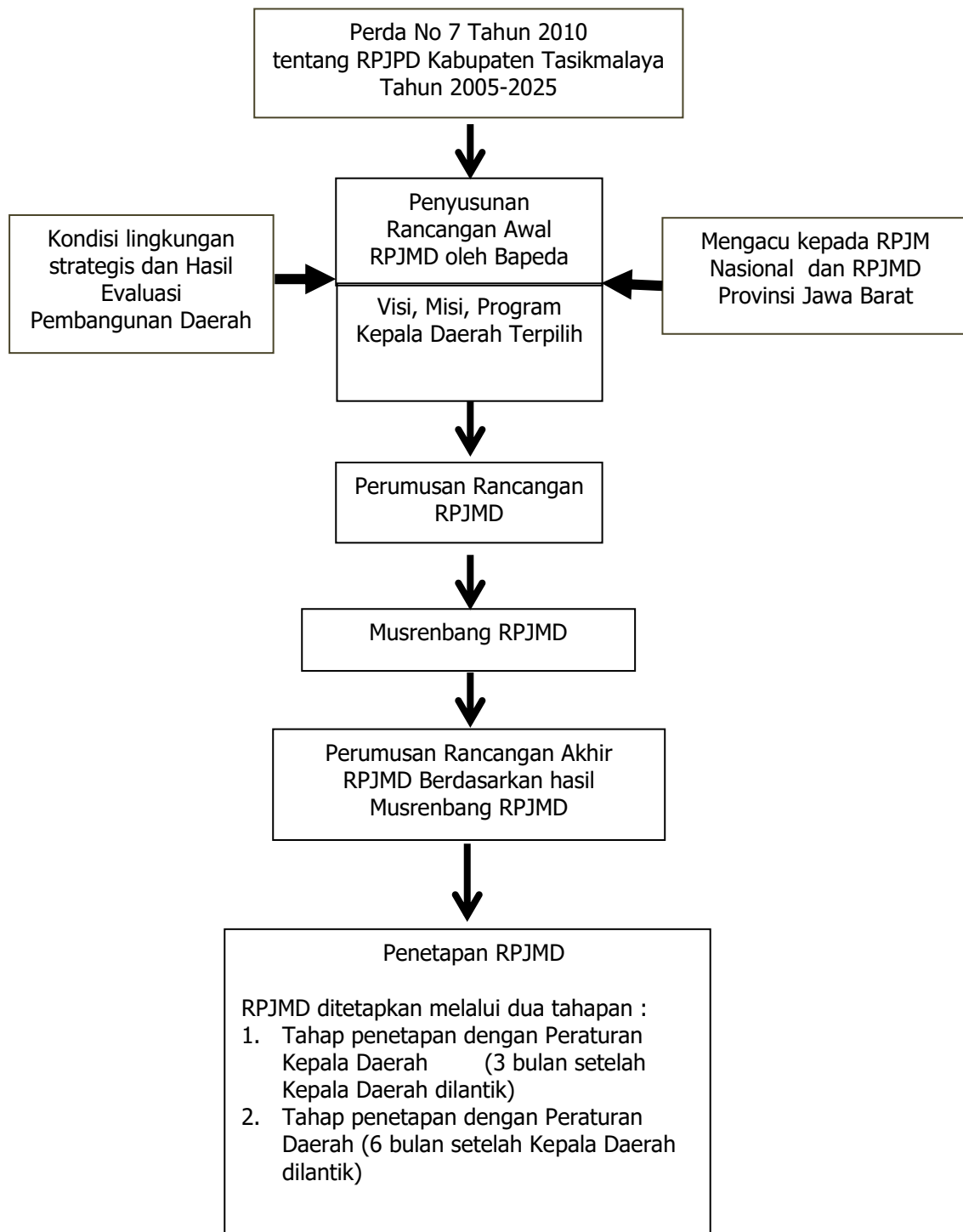
1. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir, asumsi, dan metode ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;
4. **Atas-bawah (*top-down*)** dan **bawah-atas (*bottom-up*)**, kedua pendekatan *ini* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
5. **Sosio Kultural**, adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Tahapan proses penyusunan secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1.1

Gambar 1.1.1

Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015



- Sumber :
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
 - Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015, berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 110);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

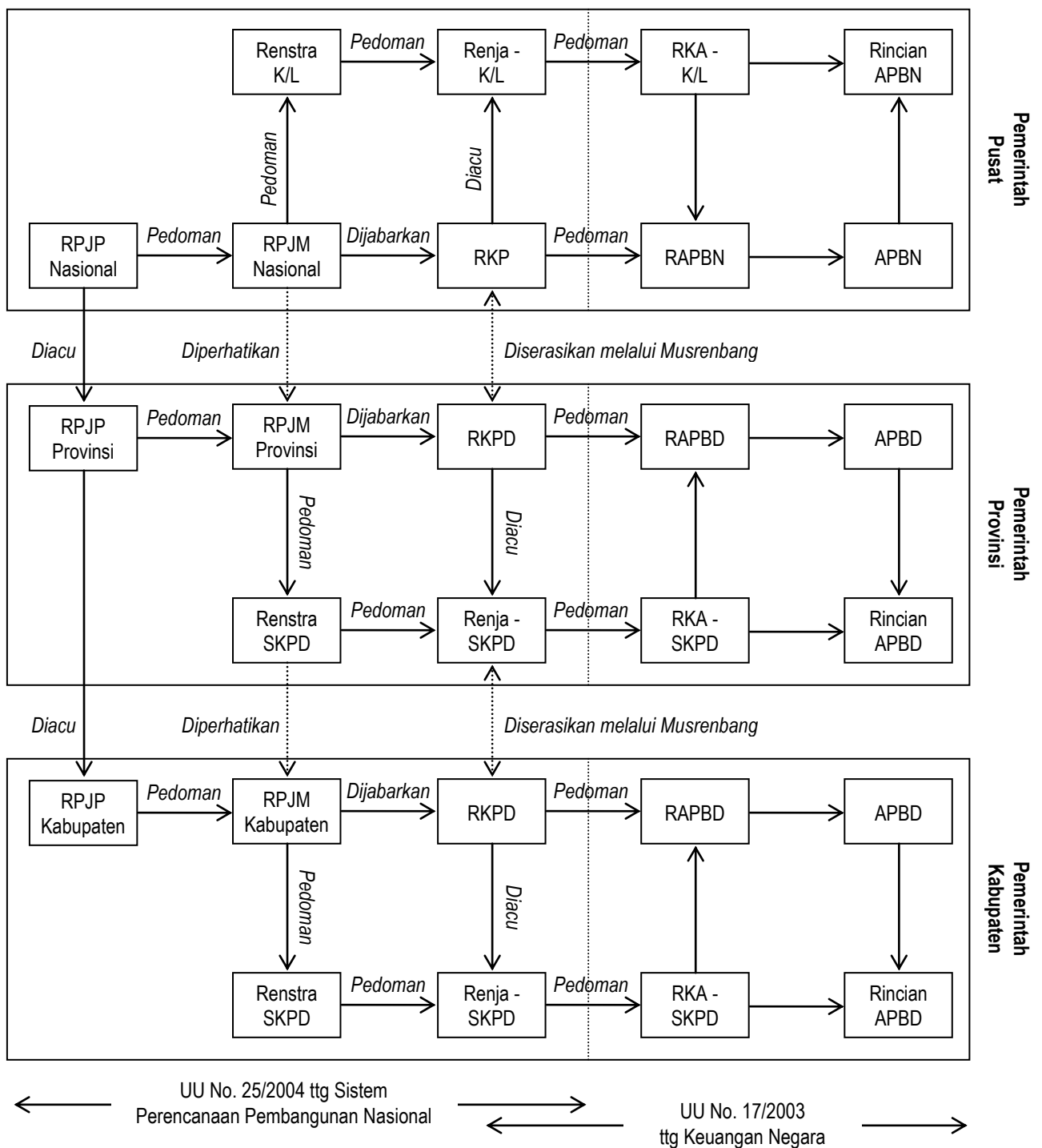
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang signifikan. Langkah perumusan dan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gambar 1.3.1

Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk : (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

1.4. Sistematika RPJM Daerah :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran .

BAB VI. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini memuat program pembangunan daerah serta indikasi kegiatan. Selain itu memuat hubungan urusan pemerintah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB VIII. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator makro dan indikator kinerja setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB IX. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bagian ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

BAB X. PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan daerah jangka menengah
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi Jawa Barat serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara 7°02'29" - 7°49'08" Lintang Selatan dan 107°54'10" - 108°26'42" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.1

Tabel 2.1.1
Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
1	Cipatujah	238,95	8,82
2	Karangnunggal	153,73	5,68
3	Cikalong	160,47	5,92
4	Pancatengah	160,73	5,93
5	Cikatomas	144,60	5,34
6	Cibalong	61,67	2,28
7	Parungponteng	50,72	1,87
8	Bantarkalong	64,77	2,39
9	Bojongasih	49,83	1,84
10	Culamega	86,42	3,19
11	Bojonggambir	133,37	4,92
12	Sodonghilir	97,20	3,59
13	Taraju	64,10	2,37
14	Salawu	74,01	2,73
15	Puspahiang	57,37	2,12
16	Tanjungjaya	37,21	1,37
17	Sukaraja	47,42	1,75
18	Salopa	106,54	3,93
19	Jatiwaras	87,77	3,24
20	Cineam	72,18	2,66

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
21	Karangjaya	48,09	1,78
22	Manonjaya	42,81	1,58
23	Gunungtanjung	47,77	1,76
24	Singaparna	19,48	0,72
25	Mangunreja	28,08	1,04
26	Sukarame	16,47	0,61
27	Cigalontang	141,56	5,23
28	Leuwisari	30,03	1,11
29	Padakembang	19,92	0,74
30	Sariwangi	40,15	1,48
31	Sukaratu	42,81	1,58
32	Cisayong	50,69	1,87
33	Sukahening	29,45	1,09
34	Rajapolah	15,22	0,56
35	Jamanis	17,52	0,65
36	Ciawi	46,65	1,72
37	Kadipaten	43,18	1,59
38	Pagerageung	63,35	2,34
39	Sukaresik	16,55	0,61
Jumlah		2.708,81	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2011

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut ketinggian dapat dilihat pada Tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2
Sebaran Ketinggian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
0 – 500	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cikalong, Cikatomas, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras, Kadipaten, Karangjaya, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Manonjaya, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Pancatengah, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya, dan Taraju
500 – 1.000	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Ciawi, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cipatujah, Cisayong, Culamega, Gunungtanjung, Jamanis, Jatiwaras, Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang, Pagerageung, Parungpoteng, Puspahiang, Rajapolah, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukaratu, Sukaresik, Tanjungjaya,

Ketinggian (m dpl)	Sebaran (Kecamatan)
	dan Taraju
1.000 – 1.500	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Sukahening, Sukaratu, dan Taraju
1.500 – 2.000	Ciawi, Cigalontang, Cisayong, Kadipaten, Leuwisari, Pagerageung, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu
2.000 -2.500	Cigalontang, Cisayong, Sariwangi, Sukahening, dan Sukaratu

Sumber : Hasil Analisis Peta RBI 1 : 25.000, 2011

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat Curam (> 40 %) sebesar 1,39 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 40 %) sebesar 25,35 %, Curam (5 % - 15 %) sebesar 27,11 %, Landai (2 % - 5 %) sebesar 13,27 %, dan Datar (0 % - 2 %) sebesar 32,87 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan datar sampai dengan agak curam, dengan kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah.

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran sungai-besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi. Wilayah Aliran Sungai dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.

Tabel 2.1.3

Wilayah Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

No	Nama DAS	Wilayah Aliran Sungai
1	Cilangla	Bantarkalong, Bojongasih, Bojonggambir, Cibalong, Cipatujah, Culamega, Karangnunggal, Parungponteng, Sodonghilir, Taraju
2	Cimedang	Cikalong, Cikatomas, Cineam, Jatiwaras, Pancatengah, Salopa
3	Cipatujah	Bojonggambir, Cipatujah, Culamega,
4	Cikaengan	Bojonggambir, Cipatujah
5	Citanduy	Ciawi, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Gunung tanjung, Jamanis, Jatiwaras, Kadipaten, Karangjaya, Leuwisari, Manonjaya, Pagerageung, Salopa, Sukahening, Sukaratu, Sukaresik
6	Ciwulan	Bantarkalong, Bojongasih, Cibalong, Cigalontang, Cineam, Cisayong, Cikatomas, Gunungtanjung, Jatiwaras, Karangnunggal, Leuwisari, Mangunreja, Padakembang Pancatengah, Parungponteng, Puspahiang, Salawu, Salopa, Sariwangi, Singaparna, Sodonghilir, Sukahening, Sukaraja, Sukarame, Sukaratu, Taraju, Tanjungjaya,

Sumber : Hasil Analisis Peta, 2011

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari: hutan, kebun, lading/tegalan, pasir pantai, permukiman, sawah, semak/belukar, tambak/empang, dan tubuh air. Penggunaan lahan yang terbesar yaitu berupa kebun sebesar 79.905,43 Ha atau sekitar 29,51% disusul dengan jenis penggunaan hutan dan sawah dengan masing – masing penggunaan seluas 51.061,13 Ha tau 18,85% dan 47.158,86 Ha atau sebesar 17,41%. Sedangkan untuk penggunaan lahan yang paling sedikit pada tahun 2011 ini dihasilkan dari tambak/empang, permukiman, dan semak belukar. Luas lahan untuk jenis penggunaan tambak/ empang adalah sebesar 36,78 ha atau sekitar 0,01%, untuk penggunaan permukiman termasuk didalamnya pekarang rumah adalah sebesar 16.592,35 ha atau 6,13%. Yang terakhir adalah lahan yang tidak terawat berupa semak belukar, yang mempunyai luas 36.039,28 ha atau sekitar 13,31%. Untuk lebih jelasnya, jenis penggunaan lahan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.1.4 berikut.

Tabel 2.1.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	%
1	Hutan	51.061,13	18,85
2	Kebun	79.905,43	29,51
3	Ladang/Tegalan	37.510,15	13,85
4	Pasir Pantai	279,61	0,10
5	Permukiman	16.592,35	6,13
6	Sawah	47.158,86	17,41
7	Semak/Belukar	36.039,28	13,31
8	Tambak/Empang	36,78	0,01
9	Tubuh Air	2.234,75	0,83
Jumlah		270.818,33	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2011

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Geologi Landscape Depresi

Daerah ini terisi oleh material-material vulkanis akibat munculnya vulkanis Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Galunggung Cakrabuana

2. Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan

Batuan di daerah ini berbeda-beda, baik dari jenis maupun sifatnya dan dapat dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama : Batuan Kapur
- b. Golongan kedua : Batuan Pasir Laut

3. Geologi *Landscape* dataran Pantai Selatan

Material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur, dan sedimen pasir pantai yang kadang-kadang dalam bentuk rawa pantai.

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan, yaitu:

1. Satuan Vulkanik Ber-relief Tinggi

Sebagian besar batuanannya terbentuk dari hasil erupsi vulkanik dan berpola aliran radier. Hampir seluruh anak sungai dari satuan ini ditampung oleh aliran Sungai Ciwulan. Satuan ini membentang seperti tapak kuda yang melingkar dan terbuka ke arah Selatan.

2. Satuan Perbukitan Sedimen

Satuan ini tersebar berrelief tinggi dan sedang dengan batuan yang berupa sedimen klastika, berpola aliran dentritik dan hampir paralel. Daerah satuan ini dialiri oleh sungai yang agak besar sebanyak lima buah dan hampir paralel ke arah Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dari tapak kuda satuan perbukitan vulkanik.

3. Satuan Kara Ber-relief Sedang

Satuan ini terdiri dari batu gamping, secara keseluruhan berpola aliran dentritik dan beberapa sungai ada yang mengalir di bawah permukaan tanah. Satuan ini menyebar di bagian bawah permukaan tanah dalam lingkaran dari satuan perbukitan sedimen terlipat.

4. Satuan *Peneplain*

Satuan ini terdiri dari batuan vulkanik dan sedimen klastika yang berumur paling tua yang terdapat di Tasikmalaya, mempunyai relief rendah, berpola aliran hampir paralel menuju sungai yang menampungnya.

Kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah darat/tanah bukan sawah dan selebihnya merupakan sawah. Kabupaten Tasikmalaya di wilayah dataran rendah mempunyai temperatur umumnya 34°C dengan kelembaban 50%. Sedangkan pada daerah dataran tinggi mempunyai temperatur 18° - 22° C dengan kelembaban berkisar antara 61% - 73%. Curah hujan rata-rata per tahun 2.171,95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan Oktober dan musim kemarau terjadi antara bulan Juni – September.

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 1.675.554 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 637 jiwa/Km². Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2006 sampai tahun 2010 sebagaimana tertera pada Tabel 2.1.5 berikut :

Tabel 2.1.5
Penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut Jenis Kelamin Tahun 2006-2010

Tahun	Jumlah Penduduk		Total	<i>Sex Ratio</i>	LPP
	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2006	833.018	835.563	1.668.581	99,77	1,37
2007	831.381	855.252	1.686.633	97,21	1,08
2008	840.877	866.420	1.707.297	97,05	1,23
2009	860.382	868.560	1.728.942	99,06	1,26
2010	835.052	840.492	1.675.554	99,35	0,88

Sumber BPS Kab Tasikmalaya

Pada tahun 2010, penduduk laki-laki sebanyak 835.052 jiwa dan perempuan sebanyak 840.492 jiwa. Adanya sedikit perbedaan jumlah penduduk antara tahun 2010 dan 2009 dikarenakan jumlah penduduk tahun 2009 didapatkan dari proyeksi hasil Sensus

Penduduk tahun 2000. Menurut kelompok umur, pada tahun 2006 hingga 2010 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun 2006 sampai 2010. Demikian juga indikator makro lain yang merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang meliputi, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB/PDRB perkapita, dan pengangguran terbuka, angkanya semakin membaik dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 2.2.1 Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2006-2010

NO	INDIKATOR MAKRO	2006	2007	2008	2009	2010
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,74	70,70	71,56	71,67	71,88
	Angka Harapan Hidup (th)	67,45	67,50	67,81	67,92	68,23
	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	7,00	7,00	7,12	7,14	7,16
	Angka Melek huruf (%)	98,37	98,80	99,07	99,11	99,14
	Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp)	548.087	558.928	565.942	566.321	566.530
	Indeks Pendidikan	81,14	81,42	81,87	81,94	82,01
	Indeks Kesehatan	70,75	70,83	71,35	71,54	72,05
	Indeks Daya Beli	57,33	59,84	61,46	61,55	61,59
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.666.196	1.686.633	1.707.297	1.727.320	1.675.544
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,02	1,22	1,23	1,26	0,88
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	469.524	481.579	480.809	376.045	318.353
	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)	28,18	28,55	28,02	21,75	19
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	8,11	9,26	10,33	11,66	11,82
6	PDRB Per kapita (berlaku) (Rp.)	4.958.151	5.601.223	6.086.501	6.816.354	6.885.155
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000)	4,01	4,33	4,02	4,13	4,15
8	Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)	685.583	760.904	707.984	681.594	756.064
	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	41,15	45,11	41,47	39,92	45,12
9	Pengangguran Terbuka (%)	6,79	7,92	4,79	4,88	7,79

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2006-2009, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,01% pada tahun 2006 menjadi 4,13% pada tahun 2009. Menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga dan bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Inflasi pada tahun 2009 tercatat sebesar 4,17%, turun dari 12,07% pada tahun 2008. Angka inflasi ini merupakan inflasi Kota Tasikmalaya yang merupakan rujukan dari inflasi di daerah Priangan Timur. Inflasi yang tinggi pada tahun 2008 disebabkan oleh kenaikan harga sektor pangan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006-2009 dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.2.1.1

Tabel 2.2.1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2006-2009

Uraian	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,01	4,33	4,02	4,13

Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2006-2009

Peningkatan LPE yang cukup signifikan ini tentunya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut belum sepenuhnya dapat memengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tasikmalaya.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut tercermin pada pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas.

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Bukti keberhasilan pembangunan bidang pendidikan bisa terlihat dari meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yakni dari 7,00 tahun pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 7,14 tahun pada tahun 2009. Di samping itu, Angka Melek Huruf (AMH) pun meningkat, yakni dari 98,37% pada tahun 2006, dan meningkat menjadi 99,11% pada tahun 2009.

Angka Melek Huruf pada tahun 2009 mencapai 99,11%, berarti hampir seluruh penduduk Kabupaten Tasikmalaya telah melek huruf, tersisa 0,89% yang akan diselesaikan

pada pada lima tahun ke depan. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 7,14 tahun atau tidak tamat SMP.

Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melanjutkan menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Begitu pula Angka Melanjutkan Sekolah setiap tahun terus meningkat. Pada tingkat SD/MI, Angka Partisipasi Murni pada tahun 2009 telah melebihi 100%, yaitu 101,47 % hal ini berarti semua anak usia 7-12 tahun berada di sekolah. Pada tingkat SMP/MTs, anak usia 13-15 tahun yang berada di sekolah baru mencapai sekitar 88,50 %, ada 12,50 % masih menjadi pekerjaan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk tingkat SLTA atau yang sederajat baru mencapai 28,25 %, hal ini merupakan pekerjaan rumah dalam rangka menjelang Program Pendidikan Dasar 12 Tahun.

Tabel 2.2.2.1
APK, APM dan Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010

No	Angka Partisipasi Sekolah	2006	2007	2008	2009	2010
1.	APK TK dan Sederajat	13,1%	13,6%	15,7%	19,3%	26,51%
2.	APM TK dan Sederajat	13,0%	13,4%	15,5%	19,1%	25,77%
3.	Angka Melanjutkan TK ke SD	4.281	3.680	4.631	4.747	4.780
4.	APK SD/MI Sederajat	100,72%	101,26%	101,31%	103,34%	101,40%
5.	APM SD/MI Sederajat	96,62%	98,35%	99,48%	101,47%	100,89%
6.	APK SMP/MTs Sederajat	81,95%	85,12%	88,91%	91,85%	93,65%
7.	APM SMP/MTs Sederajat	78,37%	82,13%	85,67%	88,50%	91,12%
8.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	90,78%	91,40%	92,28%	96,85%	82,6%
9.	APK SMA/MA/SMK Sederajat	20,79%	21,88%	23,11%	34,12%	40,22%
10.	APM SMA/MA/SMK Sederajat	20,12%	20,97%	22,22%	28,25%	38,92%
11.	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	42,36%	51,11%	53,85%	58,41%	48,95%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Tasikmalaya

Secara umum, kondisi kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari capaian Indeks Kesehatan pada tahun 2006 sebesar 70,75 menjadi 71,54 pada tahun 2009. Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 67,45 pada tahun 2006 menjadi 67,92 pada tahun 2009.

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan terus dilakukan, namun pencapaian beberapa indikator kesehatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2009, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 12,9/1000 KH, sedangkan AKB Provinsi Jawa Barat sebesar 38,51/1000 KH (Target Nasional AKB 24/1000 KH pada tahun 2014 dan target MDGs AKB 23/1000 KH pada tahun 2015) . Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2010 adalah 134,8/100.000 KH, sedangkan AKI Provinsi Jawa Barat sebesar

321,15/100.000 (Target Nasional AKI 150/100.000 KH pada tahun 2010 dan target MDGs AKI 102 /100.000 KH pada tahun 2015). Data tahun 2009 menunjukkan jumlah kematian ibu maternal di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 51 ibu dari 37.814 kelahiran hidup, dan jumlah kematian bayi 486 bayi dari 37.814 KH. Namun demikian cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari 55,98% pada tahun 2006 menjadi 79,18% pada tahun 2009.

Tabel 2.2.2.2
AKB, AKABA, AKI, dan Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 - 2010

No	Indikator Kesehatan	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Menurunnya AKB dari 40.26/1000 KH menjadi 20/1000 KH tahun 2011	AKB per 1000 Kelahiran Hidup	9.37	10.2	15.11	13.85	12
2.	Menurunnya AKABA dari 50/1000 Balita jadi 30/1000 Balita thn 2011	AKABA per 1000 Balita	0.079	0.097	0.11	0.2	1
3.	Menurunnya AKI dari 321.15/100.000 menjadi 150/100.000 KH tahun 2011	AKI per 100.000 Kelahiran Hidup	88.57	156.07	153.53	134.87	116
4.	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	% Persalinan ditolong Nakes	55,98%	58,13%	61,35%	79,18%	76,44%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2006 sebanyak 469.524 jiwa (28,16%), sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%). Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006 sejumlah 685.583 orang (41,15%) dan pada tahun 2009 menjadi 681.594 orang (39,92 %). Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2006 dihitung berdasarkan penduduk berumur 10 tahun ke atas, sedangkan pada tahun 2009 dihitung berdasarkan penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Tabel 2.2.2.3 Data Penduduk Berdasarkan Mata Peneharian per Maret 2011

No	KECAMATAN	MATA PENCAHARIAN									
		PNS	TNI POLRI	PETANI	BURUH TANI	BURUH SWASTA	PEDAGANG	PENGRAJIN	PETERNAK	NELAYAN	PENG ANGKTN
1	CIPATUJAH	650	2	24.196	8.459	1.787	1.985	853	851	772	168
2	KR NUNGGAL	970	721	10.932	10.932	1.837	1.437	2.069	930	-	538
3	CIKALONG	651	-	30.159	18.893	8.030	895	399	541	433	122
4	PANCATENGAH	317	-	10.394	4.402	840	407	417	724	-	176
5	CIKATOMAS	562	-	17.364	3.050	1.258	1.226	411	455	-	153
6	CIBALONG	526	-	7.652	4.612	4.481	723	-	-	-	-
7	PR PONTENG	301	-	5.665	5.164	2.446	200	75	167	166	391
8	BANTARKALONG	315	-	5.519	5.382	3.595	1.889	306	368	-	351
9	BOJONGASIH	100	-	4.885	4.094	1.318	696	268	249	-	32
10	CULAMEGA	123	-	5.057	7.873	1.707	971	210	109	-	20
11	BOJONGGAMBIR	299	-	8.203	10.553	2.064	1.453	278	639	-	-
12	SODONGHILIR	563	-	11.497	14.248	2.899	1.436	424	280	-	14
13	TARAJU	422	-	5.597	8.485	2.043	2.516	123	154	1	194
14	SALAWU	651	-	6.847	13.071	3.461	1.878	1.652	917	-	124
15	PUSPAHIANG	504	-	5.983	10.653	365	821	232	456	-	146

No	KECAMATAN	MATA PENCAHARIAN									
		PNS	TNI POLRI	PETANI	BURUH TANI	BURUH SWASTA	PEDAGANG	PENGRAJIN	PETERNAK	NELAYAN	PENG ANGKTN
16	TANJUNGPURA	286	-	11.182	8.720	2.963	3.153	196	133	-	54
17	SUKARAJA	558	-	821	4.028	1.399	1.506	240	240	-	149
18	SALOPA	323	-	8.693	7.149	1.426	1.287	342	397	-	153
19	JATIWARAS	334	-	7.210	6.988	3.630	1.059	1.374	329	-	210
20	CINEAM	505	-	23.937	4.429	1.776	1.304	687	265	-	719
21	KARANGJAYA	144	-	2.526	2.179	476	750	79	1	-	143
22	MANONJAYA	1.347	-	6.327	5.219	3.896	2.930	2.372	174	446	56.001
23	GN TANJUNG	90	-	4.558	4.647	729	1.386	1.559	285	-	37
24	SINGAPARNA	1.414	-	75	6.501	5.228	6.512	392	537	-	133
25	MANGUNREJA	373	-	4.594	8.259	1.411	1.703	319	244	-	221
26	SUKARAME	538	-	3.566	7.205	5.155	2.002	214	38	-	97
27	CIGALONTANG	474	-	9.023	13.610	3.463	3.037	596	350	-	206
28	LEUWISARI	460	-	4.475	5.338	1.947	1.153	458	148	-	474
29	PADAKEMBANG	560	36	7.509	9.612	2.271	1.076	365	296	-	133
30	SARIWANGI	368	-	3.220	4.351	2.373	2.246	234	181	-	186
31	SUKARATU	264	288	13.570	4.334	1.926	1.926	472	562	-	157

No	KECAMATAN	MATA PENCAHARIAN									
		PNS	TNI POLRI	PETANI	BURUH TANI	BURUH SWASTA	PEDAGANG	PENGRAJIN	PETERNAK	NELAYAN	PENG ANGKTN
32	CISAYONG	533	-	11.742	1.993	2.438	450	386	386	-	59
33	SUKAHENING	454	6	4.522	5.366	1.901	4.434	779	45	-	71
34	RAJAPOLAH	845	-	2.385	5.501	2.903	2.818	2.303	591	-	134
35	JAMANIS	203	-	2.901	5.876	1.471	3.880	157	323	-	8
36	CIAWI	484	21	3.579	7.364	2.103	2.960	137	803	21	196
37	KADIPATEN	2.005	-	4.269	1.860	3.030	348	348	163	159	18.848
38	PAGERAGEUNG	584	584	11.932	12.021	1.463	4.140	363	2.956	-	8.630
39	SUKARESİK	376	-	6.300	3.138	4.203	481	282	274	-	225
	JUMLAH	20.476	1.658	318.866	275.559	97.712	71.074	22.371	16.561	1.998	89.673

Sumber : Dinas Sosial Kependudukan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Tiga terbesar pekerjaan yaitu : petani sebanyak 318.866 orang atau 34,81%; buruh tani sebanyak 275.559 orang atau 30,08%; dan buruh swasta sebanyak 97.712 orang atau 10,67%. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%), kemungkinan besar berprofesi sebagai buruh tani. Karena buruh tani sangat rentan terhadap gejolak ekonomi yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengakses pangan, layanan pendidikan dan kesehatan. Juga kategori keluarga miskin menurut BPS sangat cocok dengan keadaan buruh tani di lapangan.

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (penduduk usia 15-34 tahun) pada tahun 2009 di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 549.789 jiwa atau 31,83% dari jumlah penduduk. Untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, diperlukan berbagai wadah untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya.

Untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga, diperlukan upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat serta meningkatkan pembinaan olahraga, dukungan sarana dan prasarana, baik sarana olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar nasional. Sampai saat ini, Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai sarana olahraga terpadu berstandar nasional.

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai keragaman seni dan budaya yang cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Salah satunya yaitu Kampung Naga di Kecamatan Salawu, yang mempunyai ciri yang khas yang tidak ada di daerah lain. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tasikmalaya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda sebagai bahasa ibu masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian, upaya peningkatan jatidiri masyarakat Kabupaten Tasikmalaya seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Tasikmalaya telah mengarah pada kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran dan toleransi antar umat beragama. Kondisi tersebut menciptakan hubungan

yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat dan diharapkan dapat mengantisipasi masuknya paham yang merusak kerukunan hidup beragama.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pelayanan Dasar

Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Pendidikan juga sebagai salah satu gerbang yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Jumlah penduduk yang sedemikian besar dengan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak di Kabupaten Tasikmalaya. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan dalam upaya menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan guru. Pada tahun 2009, tersedia 1.089 sekolah dasar untuk 187.201 siswa yang berarti 1 sekolah melayani 171 siswa. Sedangkan untuk ketersediaan guru sekolah dasar yaitu 9.355 guru, yang berarti 1 guru melayani 20 murid. Untuk pendidikan menengah, tersedia 178 sekolah menengah pertama untuk 55.011 siswa yang berarti 1 sekolah melayani 309 siswa. Sedangkan untuk ketersediaan guru sekolah menengah yaitu 3.917 guru, yang berarti 1 guru melayani 14 murid. Selain itu, meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa biaya pendidikan masih relatif mahal dan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Tabel 2.3.1.1
Ketersediaan Sarana Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010

No	Ketersediaan Sarana Pendidikan	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Terpenuhinya Kebutuhan Ruang Kelas SD	Rasio rombel ruang kelas	1,20	0,59	1,05	1,44	1,3
3	Terpenuhinya Kebutuhan Ruang Kelas SMP	Rasio rombel ruang kelas	1,04	1,12	1,11	1,11	1,07
3	Terpenuhinya Kebutuhan Ruang Kelas SMA/MA/SMK	Rasio rombel ruang kelas	2,76	2,74	3,09	2,31	1,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Tasikmalaya

Kesehatan

Upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar serta ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya pencapaian indikator kesehatan adalah masih rendahnya pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Masih rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2009 bisa dilihat diantaranya dari cakupan pemeriksaan ibu hamil (K4) sebesar 78,87%, cakupan bumil risti / komplikasi tertangani sebesar 20,43%, cakupan bayi baru lahir (neonatusristi) sebesar 34,77%, cakupan bayi Berat Badan Lahir Rendah yang ditangani 83,54%, cakupan bayi diimunisasi campak sebesar 80%.

Dari seluruh balita yang ada sebanyak 207.473 yang tercatat ditimbang di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2009, sebanyak 130.795, terdiri 89,35% memiliki status gizi baik, 9,04% gizi kurang, dan 1,03% gizi lebih dan sisanya 0,56% gizi buruk. Angka tersebut sudah lebih baik dari Angka Target Nasional prevalensi gizi-kurang pada anak balita menjadi 15% pada tahun 2014 dan target MDGs 18,8% pada tahun 2015. Sedangkan kematian balita pada tahun 2009 yaitu 42 balita dari jumlah balita sebanyak 207.473 dengan penyebab utama yaitu ISPA. Jumlah penderita TB paru pada tahun 2009 yaitu 9.020 orang, Pneumonia 51.695 orang, HIV/AIDS 40 orang, IMS 306 orang, DBD 563 orang dan diare 6.841 orang.

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan hal penting yang harus dipenuhi adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar antara lain jumlah Puskesmas pada tahun 2009 berjumlah 40 unit dengan rasio 1 (satu) unit Puskesmas per 46.504 penduduk (Standar 1 per 30.000 penduduk) idealnya Kabupaten Tasikmalaya memiliki 62 Puskesmas, tetapi kurangnya jumlah Puskesmas dapat ditutupi dengan ada dan tersebarnya Puskesmas Pembantu sebanyak 151 unit, Puskesmas Keliling 50 unit, Polindes 223 unit serta Praktek Swasta BP 50 dan Rumah Bersalin 2 unit, (*Sumber Profil Dinas Kesehatan tahun 2009*), dalam rangka penyelamatan ibu dan anak telah dilaksanakan pengembangan pelayanan kegawat-daruratan kebidanan dan bayi baru lahir melalui Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED). Pada Tahun 2009 Jumlah Puskesmas PONED adalah 10 buah (Standar Puskesmas PONED adalah 1/50.000 penduduk) berarti Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan sekitar 37 Puskesmas mampu PONED. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Tasikmalaya secara kuantitas tidak mencukupi yaitu dengan adanya 1 RSUD dan 15 PUSKESMAS DTP.

Sedangkan kondisi tenaga kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2009 adalah, jumlah dokter di Puskesmas adalah 66 orang dari kebutuhan Dokter 80 orang. (Standar 1 PKM 2 Dokter). Sedangkan tenaga bidan di Puskesmas yang ada 347 bidan dari

kebutuhan bidan 120 (Standar 1 PKM 3 Bidan). Kecukupan tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas masih memprihatinkan.

Tabel 2.3.1.2
Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 - 2010

No	Indikator Kesehatan Masyarakat	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Rumah Tangga Sehat (RT ber-PHBS)	Prosentase Desa RT ber-PHBS	12,64%	45,44%	35,8%	45,44%	43,14%
2	Desa/keluarga dg KLB Gizi buruk dilaporkan dlm waktu < 24 jam	Prosentase Desa/klg dg KLB Gizi Buruk	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase balita BGM (KEP Gizi)	Prersentase balita BGM (KEP Gizi)	17.48%	16.19%	12.2%	10.50%	10,57%
4	Prevalensi balita gizi buruk	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.74%	0.72%	0.62%	0,54%	0,96
5	Pelayanan kesehatan antenatal (K4)	Persentase pelayanan kes antenatal (K4)	60,33%	66,20%	64,95%	78,87%	76,09
6	Cakupan Kunjungan Bayi 0-28 hari Neonatal (N2)	Persentase Kunjungan Bayi 0-28 hr Neonatal	70,97%	75,77%	77,78%	88,33%	84,06
7	Cakupan bayi baru lahir/ neonatus risti/komplikasi tertangani	Persentase bayi baru lahir tertangani	95,14%	80,52%	76,16%	34.77%	7,61
8	Cakupan bumil risti/komplikasi tertangani	Persentase ibu hamil risti tertangani	64%	61,27%	42.75%	20.43%	18,53
9	Cakupan bayi BBLR yang ditangani	Persentase BBLR ditangani	100%	81%	79%	83,54%	42,14
10	Cakupan desa UCI	Persen ds tercapai UCI	70%	72%	68%	100%	85,75%
11	Cakupan Campak	Persen bayi diimunisasi Campak	77%	86%	84%	80%	94,6%
12	Cakupan DPT III	Persen bayi diimunisasi DPT III	49%	90%	86%	100%	93,7%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya

Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kondisinya juga masih sangat memprihatinkan bila dilihat dari Proporsi penduduk dengan akses air minum layak yang baru mencapai 37,37 % dan proporsi penduduk dengan akses sanitasi dasar sebesar 24,97 %.

Berdasarkan kondisi diatas untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain adalah pertama peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) melalui pembenahan sistem rujukan dengan melaksanakan pengembangan RS Rujukan Regional

Kabupaten Tasikmalaya yang didukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan dasar swasta lainnya, kedua peningkatan Puskesmas mampu PONEB, ketiga Peningkatan Jumlah Mutu dan Penyebaran tenaga kesehatan, keempat peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Kabupaten Tasikmalaya, kelima peningkatan kemandirian untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat, keenam memperkuat sistem kewaspadaan dini dan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, serta ketujuh mengembangkan sistem regulasi untuk menjamin kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta menjamin terciptanya lingkungan sehat.

Lingkungan Hidup

Pelayanan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya secara umum masih sangat rendah dimana cakupan pelayanan persampahan pada tahun 2009 baru mencapai 22 desa. dan pengolahan sampah di TPA masih dilakukan secara *open dumping*. Selain itu kondisi sarana angkutan persampahan masih belum memadai dibandingkan dengan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilayani.

Selama ini Tempat Pembuangan Akhir sampah di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat terbatas yaitu di TPA Cinangsi, TPA Nangkaleah dan TPA Guranteng. Oleh karena itu, untuk memenuhi luasnya cakupan pelayanan pembuangan sampah dan dalam upaya mengantisipasi meningkatnya volume sampah di masa yang akan datang perlu membangun TPA yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah. Selain itu, untuk mengurangi volume sampah agar menjadi bermanfaat dapat dilakukan melalui pengolahan sampah menjadi kompos dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbunan sampah.

Kondisi sarana dan prasarana permukiman hingga akhir tahun 2009 masih belum memadai. Pada tahun 2009 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari air kemasan/ledeng/pompa sebesar 37,37 %. Rendahnya cakupan pelayanan air minum disebabkan oleh masih tingginya angka kebocoran air, terbatasnya sumber air baku khususnya di wilayah perkotaan, tarif/retribusi air yang belum berorientasi pada *cost recovery*, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, serta terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Selama periode 2006-2009, peningkatan cakupan pelayanan air minum difokuskan ke masyarakat perdesaan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Strategi penyediaan air minum berbasis masyarakat ini dirasakan telah cukup mampu mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun.

2.3.2 Sarana dan Prasarana Umum

Perhubungan/Transportasi

Aspek infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Kondisi infrastruktur transportasi darat pada tahun 2006, dari panjang jalan 1.304,73 km, yang kondisinya baik sepanjang 439,78 km (33,70 %). Sedangkan pada tahun 2010, yang kondisinya baik hanya 228,71 km (22,13%), kondisi sedang 265,46 km (20,34%), kondisi rusak ringan 277,64 km (21,28%), kondisi rusak berat 472,93 km (36,25%). Penurunan panjang jalan yang kondisinya baik diakibatkan karena minimnya anggaran pemeliharaan jalan serta kelebihan tonase kendaraan.

Tabel 2.3.2.1
Panjang Jalan dan Jembatan serta Kondisinya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010

No	Jalan, Jembatan dan Kondisi	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
A	Jumlah Panjang jalan Kabupaten	Km	1,304.73	1,304.73	1,304.73	1,304.73	1,304.73
	a. Kondisi Baik	Km	439.78	404.89	404.89	276.095	288.71
	b. Kondisi Sedang	Km	255.34	212.32	212.32	249.998	265.46
	c. Rusak Ringan	Km	287.28	387.23	387.23	287.005	277.64
	d. Rusak Berat	Km	322.33	300.29	300.29	491.63	472.93
B	Jumlah Jembatan	Buah	392	392	392	392	392
	a. Kondisi Baik	Buah	328	337	362	362	366
	b. Kondisi rusak ringan	Buah	49	40	15	15	11
	c. Rusak rusak berat	Buah	15	15	15	15	15
	d. Jumlah jembatan yang diperbaiki	Buah	15	9	4	4	4
C	Panjang Jembatan	m	3,983.70	3,983.70	3,983.70	3,983.70	3,983.70
	a. Kondisi Baik	m	3,134	3,134	3,149	3,134	3,241
	b. Kondisi rusak ringan	m	596	596	405	596	581
	c. Kondisi rusak berat	m	254	254	430	254	162
	d. Panjang jembatan yang diperbaiki	m	739	81	79	79	35

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Tasikmalaya

Sarana Lembaga Keagamaan

Ketersediaan sarana lembaga keagamaan merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sarana keagamaan yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2009 antara lain yaitu mesjid 4.578 buah, mushala 4.747 buah, pesantren 761 buah, madrasah diniyah 3.505 buah, dan gereja 3 buah.

Tabel 2.3.2.2 Banyaknya Sarana Peribadatan Tahun 2009

Kecamatan	Mesjid	Langgar	Mushola	Gereja	Kelenteng	Pura	Kuil
01. Cipatujah	193	216	185	3	-	-	-
02. Karangnunggal	202	226	190	-	-	-	-
03. Cikalong	181	166	198	-	-	-	-
04. Pancatengah	101	86	90	-	-	-	-
05. Cikatomas	141	266	220	-	-	-	-
06. Cibalong	111	182	176	-	-	-	-
07. Parungponteng	116	171	164	-	-	-	-
08. Bantarkalong	101	106	109	-	-	-	-
09. Bojongasih	71	66	97	-	-	-	-
10. Culamega	124	95	75	-	-	-	-
11. Bojunggambir	144	164	145	-	-	-	-
12. Sodonghilir	202	102	105	-	-	-	-
13. Taraju	117	180	150	-	-	-	-
14. Salawu	140	220	189	-	-	-	-
15. Puspahiang	123	201	178	-	-	-	-
16. Tanjungjaya	115	201	125	-	-	-	-
17. Sukaraja	127	156	115	-	-	-	-
18. Salopa	194	135	117	-	-	-	-
19. Jatiwaras	129	103	186	-	-	-	-
20. Cineam	114	103	142	-	-	-	-
21. Karangjaya	92	78	65	-	-	-	-
22. Manonjaya	108	175	120	-	-	-	-
23. Gunungtanjung	94	70	10	-	-	-	-
24. Singaparna	125	190	127	-	-	-	-
25. Sukarame	69	121	89	-	-	-	-
26. Mangunreja	104	165	115	-	-	-	-
27. Cigalontang	169	236	205	-	-	-	-
28. Leuwisari	79	102	77	-	-	-	-
29. Sariwangi	118	136	87	-	-	-	-
30. Padakembang	77	111	65	-	-	-	-
31. Sukaratu	111	150	110	-	-	-	-
32. Cisayong	114	295	73	-	-	-	-
33. Sukahening	74	100	86	-	-	-	-
34. Rajapolah	88	188	125	-	-	-	-
35. Jamanis	102	138	15	-	-	-	-
36. Ciawi	79	211	130	-	-	-	-
37. Kadipaten	62	127	29	-	-	-	-
38. Pagerageung	94	196	175	-	-	-	-
39. Sukaresik	73	98	88	-	-	-	-
Kab. Tasikmalaya	4.578	6.032	4.747	3	-	-	-

Sumber : Deperteman Agama Kab. Tasikmalaya

Pos, Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, terjadi penurunan jumlah pelanggan sambungan tetap PT TELKOM dari 58.234 pada tahun 2006 menjadi 18.168 SST pada tahun 2009. Hal ini diakibatkan oleh kemudahan mendapatkan akses telepon seluler yang sudah merambah sampai ke perdesaan. Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Surat kabar nasional yang beredar berjumlah 5, sedangkan jumlah surat kabar regional 3, surat kabar lokal sebanyak 10 surat kabar. Untuk penyiaran radio dan TV yang masuk ke daerah adalah sebanyak 10 buah stasiun radio dan 11 penyiaran TV.

Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Kabupaten Tasikmalaya memang tidak begitu dominan, tetapi dalam menunjang pembangunan di daerah ini cukup besar. Tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak semaju seperti sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa Pos semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang menggunakan teknologi *wireless* terus berkembang pesat.

Pada aspek telekomunikasi, terjadi penurunan jumlah pelanggan untuk telepon tetap (telepon rumah) dari 58.234 SST pada tahun 2006 menjadi hanya 18.168 SST pada tahun 2009. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi telepon seluler dengan harga yang terjangkau serta cakupan pelayanannya yang hampir ke seluruh pelosok perdesaan.

Pada tahun 2009, jumlah surat, paket dan wesel yang dikirim lewat Pos mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2009 surat yang dikirim berjumlah 1.338.265 surat, meningkat 6,75% dibanding tahun 2007 yang berjumlah 1.253.687 surat. Wesel yang dikirim pada tahun 2009 sebanyak 18.263 wesel dengan nilai Rp 15.768.388.548, meningkat lebih dari 200% dibandingkan tahun 2006 yang hanya berjumlah 13.114 wesel dengan nilai Rp 5.094.988.066. Sedangkan jumlah paket pos yang dikirim pada tahun 2009 sebanyak 28.310 paket, meningkat 127% dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebanyak 12.456 paket.

Perpustakaan

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya 1 buah perpustakaan Pemerintah Daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.

Tabel 2.3.2.3
Data Perpustakaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006-2010

No	Sarana Perpustakaan	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Perpustakaan Desa	Unit	10	65	105	114	139
2.	SDM Pengelola Perpustakaan Desa	Orang	10	65	105	114	139
3.	Koleksi bahan perpustakaan Desa/Kelurahan	Buku	10.000	75.000	180.000	294.000	433.000
4.	Koleksi bahan perpustakaan umum	Buku (Eks)	1.900	3.621	3.621	4.601	5.307
5.	Pemanfaatan perpustakaan Desa/Kelurahan	Rak	21	21	31	71	111
6.	Sarana dan Prasarana						
	• Mobile Pusling	Unit	1			1	
	• Motor Pinter	Unit					1

Sumber : Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kab. Tasikmalaya

Penataan Ruang

Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, untuk RTRW Tahun 2011-2031, kawasan lindung di Kabupaten Tasikmalaya harus mencapai 64,32% dalam rangka mewujudkan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Barat 45%. Sedangkan untuk proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan adalah sebesar 30%.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Membangun masyarakat dan desa merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan desa selain ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan juga ditentukan dengan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana di dalamnya masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan pembangunan, sehingga masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan tapi juga sebagai subjek/pelaku pembangunan. Hal ini bertujuan untuk tetap

terpeliharanya sifat kegotong-royongan masyarakat melalui pemberdayaan, karena saat ini dirasakan sifat kegotong-royongan masyarakat cenderung mulai menurun.

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi Pamong Praja, linmas dan pos kamling. Jumlah anggota satuan linmas di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010 sebanyak 12.342 orang yang tersebar di 351 desa yang ditunjang dengan adanya pos kamling di setiap kedusunan.

Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi, hingga penerapannya.

Gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang sering terjadi di Kabupaten Tasikmalaya di antaranya adalah penyalahgunaan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, pencurian kendaraan bermotor, perampokan, penipuan, penganiayaan, pemerasan. Kondisi ini memerlukan penanganan yang berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) dan ketahanan lingkungan keluarga masing-masing, serta segenap komponen masyarakat.

Selanjutnya, konflik antar dan internal umat beragama yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tasikmalaya bisa dikendalikan dan sampai saat ini kerukunan kehidupan beragama cukup kondusif, hal ini tidak lepas dari peran serta ulama dan *umaro* dalam melayani dan mengayomi umat beragama di Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi tersebut bisa dilihat dalam indikator peningkatan fasilitas pencapaian *halaqoh* dalam berbagai forum keagamaan.

Kesiap-siagaan petugas dalam deteksi dini dan penggulangan tanggap darurat bencana juga memadai hal ini ditandai dengan jumlah anggota linmas tiap desa dengan populasi cukup disertai dengan pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personal linmas dalam melayani masyarakat khususnya korban bencana alam.

Tabel 2.3.2.4
Kondisi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
Kabupaten Tasikmalaya 2006-2009

No	URAIAN	SATUAN	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan	orang	800	920	850	-
2	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama	orang	-	150	50	200
3	Jumlah konflik antar umat beragama	kali	-	-	-	-
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	-	-	-	75,70
5	Jumlah peserta dalam mengikuti bintek keuangan parpol	orang	-	-	-	30
6	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemilu legislatif dan pilpres	Orang	-	-	-	6250
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pilbup	orang	-	-	-	-
8	Jumlah peserta bintek ormas/ LSM	orang	100	-	-	-
9	Jumlah pertemuan kominda	kali	6	6	6	6
10	Jumlah peserta orientasi deteksi dini	orang	-	50	-	50
11	Jumlah unjuk rasa/ konflik	kali			8	19
12	Jumlah orpol, ormas dan LSM	organisasi	96	96	115	125
14	Jumlah satlinmas yang telah mengikuti latihan suskalak	organisasi	50	50	50	-
15	Jumlah masyarakat yang meninggal akibat bencana	orang	92	124	95	40
16	Monev bencana	kali	-	-	4	4
17	Jumlah pos induk/ pos kamling di desa	buah	-	-	-	-

Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kab. Tasikmalaya

Tabel 2.3.2.5 Jumlah Pelaku Kejahatan menurut Kecamatan
Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
01. Cipatujah	9	-	9
02. Karangnunggal	10	-	10
03. Cikalong	15	-	15
04. Pancatengah	6	-	6
05. Cikatomas	4	-	4
06. Cibalong	5	-	5
07. Parungponteng	2	-	2
08. Bantarkalong	3	-	3
09. Bojongasih	-	-	-
10. Culamega	-	-	-
11. Bojonggambir	1	-	1
12. Sodonghilir	1	-	1
13. Taraju	8	1	9
14. Salawu	8	-	8
15. Puspahiang	6	2	8
16. Tanjungjaya	5	1	6
17. Sukaraja	13	-	13
18. Salopa	-	-	-

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
19. Jatiwaras	4	-	4
20. Cineam	-	-	-
21. Karangjaya	-	-	-
22. Manonjaya	-	-	-
23. Gunungtanjung	-	-	-
24. Singaparna	14	-	14
25. Sukarame	6	-	6
26. Mangunreja	4	-	4
27. Cigalontang	5	-	5
28. Leuwisari	8	-	8
29. Sariwangi	4	-	4
30. Padakembang	7	-	7
31. Sukaratu	-	-	-
32. Cisayong	-	-	-
33. Sukahening	-	-	-
34. Rajapolah	-	-	-
35. Jamanis	-	-	-
36. Ciawi	-	-	-
37. Kadipaten	-	-	-
38. Pagerageung	-	-	-
39. Sukaresik	-	-	-
Jumlah	148	4	152

Sumber : POLRES dan POLRESTA Tasikmalaya

2.4 Aspek Daya Saing

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi ekspor antara lain: Padi Organik (SRI) dengan sentra di 7 (tujuh) Kecamatan. (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan pada sektor industri adalah kerajinan dengan sentra di Rajapolah dan bordir dengan sentra di Sukaraja.

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana

permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

Transportasi

Dari jalan kabupaten sepanjang 1.303,323 km yang kondisinya baik hanya 340,855 km (26,15%), kondisi sedang 270,958 km (20,79%), kondisi rusak ringan 269,635 km (20,69), kondisi rusak berat 421,875 km (32,37%). Kondisi tersebut berpengaruh pada daya saing dalam pengembangan perekonomian daerah karena menghambat arus barang dan jasa serta mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya. Namun demikian, kondisi ini tidak menutup daya saing daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Pemerintah Daerah berusaha untuk terus memperbaiki jalur jalan yang rusak dan membuka jalur jalan ke daerah-daerah yang dianggap cukup bisa mengembangkan potensi perekonomian, diantaranya pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Ciawi ke Singaparna yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Selain itu, didukung juga lintasan jalur jalan propinsi yang menghubungkan Jawa Barat dengan Jawa Tengah yang sangat potensial mendukung arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tasikmalaya, termasuk dengan adanya rencana pengembangan jalur jalan Jabar selatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan mengejar ketertinggalan masyarakat pesisir serta mendukung pendistribusian hasil komoditas sumber daya alam di wilayah Tasikmalaya Selatan.

Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Kabupaten Tasikmalaya yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum optimal.

Untuk mendukung pembangunan di bidang pertanian, telah dilaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta sumber daya air, yang kegiatannya antara lain operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pemerintah maupun irigasi perdesaan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembinaan kepada P3A/GP3A Mitra Cai serta pengelolaan Daerah Irigasi dan Situ. Pemerintah Daerah telah berhasil meningkatkan jumlah bendung yang kondisinya baik dari 36 buah pada tahun 2006 menjadi 53 buah pada tahun 2010. Demikian juga dengan panjang saluran yang kondisinya baik telah meningkat dari 29.502,3 meter pada tahun 2006 menjadi 30.034,86 meter pada tahun 2010. Demikian juga luas sawah irigasi desa meningkat dari 25.751 ha pada tahun 2006 menjadi 48.725 ha pada tahun 2010.

Listrik dan Energi

Pada aspek infrastruktur listrik, terjadi peningkatan jumlah jaringan sehingga pelanggan yang terlayani semakin bertambah. Pada tahun 2009, pelanggan yang terlayani berjumlah 266.749 sambungan, meningkat 16% dibanding tahun 2006 yang berjumlah 229.868 sambungan. Pelanggan yang mendapatkan pelayanan listrik ini terdiri dari Rumah Tangga dan Sosial 252.670 sambungan, Usaha 3.068 sambungan, Instansi Pemerintah 317 sambungan, Peribadatan/Sekolah 9.165 sambungan, Industri 45 sambungan, dan PJU 1.484 sambungan.

Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sektor Pariwisata. Kabupaten Tasikmalaya mempunyai 11 objek wisata yang telah ditetapkan oleh Perda dan menghasilkan PAD melalui penarikan retribusi, yaitu sebagai berikut : Cipanas Galunggung, Pantai Karangtawulan, Lokasi Khas Pamijahan, Lokasi Khas Kampungnaga, Pantai Cipatujah, Pantai Sindangkerta, Wanawisata Galunggung, Pantai Pamayangsari, Taman Bubujung Indah, Makam Syech Tbg. Anggariji, Cipanas – Cipacing, Cipanas – Cigunung. Jumlah wisatawan pada tahun 2009 berjumlah 731.666 orang yang terdiri dari : 3.457 wisatawan mancanegara dan 728.209 wisatawan domestik. Dari jumlah wisatawan tersebut dihasilkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 732.519.850.

Tabel 2.4.2.1
Kondisi Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya 2006-2010

No	Indikator Pariwisata	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Buah	7	7	8	8	8
2	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata (Kompepar)	Orang	216	216	263	263	309
3	Jumlah sarana prasarana pendukung pariwisata (Perlengkapan ODTW)	Buah	-	13	36	22	3
4	Tingkat mutu dan pelayanan pariwisata (SDM)	Orang	100	450	500	250	-
5	Ketersediaan informasi pariwisata (Booklet/leaflet/kalender/peta)	Buah	-	8.014	21.372	4.953	1.272
6	Tingkat penyerapan tenaga kerja pariwisata	Orang	356	370	385	397	418
7	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Tasikmalaya	Orang	650.768	695.936	730.208	731.666	632.643

Sumber : Dinas Pariwisata Kab Tasikmalaya

Sumber Daya Energi

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi berbagai jenis sumber daya alam yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan. Sementara untuk sumberdaya terbaharukan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi panas bumi sekitar di Karaha Bodas

30 MW di lahan seluas 42 Ha. Untuk memanfaatkan potensi ini, PT Pertamina Geothermal Energy telah menanamkan modal sebesar 60 Juta Dollar \$ dan diharapkan panas bumi ini dapat digunakan pada tahun 2013.

Tabel 2.4.2.2
Indikator Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2006 - 2010

No	Indikator Pertambangan dan Energi	Satuan	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
A	Pertambangan						
1	Jumlah usaha penambangan yang dibina	Buah	120	100	124	100	90
2	Jumlah hasil produksi pertambangan umum	Rp	211.152.996	82.251.453	360.880.255	363.986.322	306.500.000
3	Jumlah ijin usaha pertambangan	IUP	60	54	124	92	80
B	Air Bawah Tanah						
1	Jumlah sumur bor dan penurapan mata air	Buah	1	4	13	11	-
2	Tingkat pengawasan dan pengendalian air tanah	Kec	12	10	12	12	-
C	Energi dan Ketenagalistrikan						
1	Jumlah jaringan yang dibangun	SUTM	3.293	10.505	18.556	8.888	2.979
		SUTR	4.317	23.821	41.895	30.118	2.979
		Gardu	8	12	12	2	
		KK	595	2.544	4.500	1.748	248
2	Jumlah pelanggan Listrik	KK	8.543	13.797	13.880	4.992	275.934
3	Jumlah Desa yang terjangkau listrik	Desa	350	350	350	351	351
4	Jumlah pengembangan sumber daya energi alternatif (Biogas)	Unit	-	80	125	143	-
5	Jumlah pengembangan sumber daya energi alternatif (Mikro Hidro)	Unit	1	2	1	-	-

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya

Penataan Wilayah

Tata ruang Provinsi Kabupaten Tasikmalaya merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Sementara kondisi pola ruang diuraikan dalam kondisi kawasan budidaya sawah dan kawasan lindung.

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Kawasan Perkotaan Singaparna dan Kawasan Perkotaan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk PKN dan PKW tidak ditetapkan karena tidak berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), ditentukan oleh Kabupaten.

Kawasan Lindung

Upaya mewujudkan fungsi 64,32% Kawasan Lindung Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari target Kawasan Lindung Provinsi Jawa Barat sebesar 45%. Kawasan Lindung ini terdiri dari Kawasan Lindung Hutan dan Kawasan Lindung non Hutan. Kawasan Lindung Hutan terdiri dari : Hutan produksi dan Hutan Produksi terbatas. Sedangkan Kawasan Lindung non Hutan terdiri dari : Kawasan Resapan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Rawan Bencana Alam, serta Kawasan Cagar Alam dan Geologi.

Lingkungan Hidup

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup ditandai dengan menurunnya luas lahan kritis dan luas kawasan lindung yang rusak, bertambahnya luas hutan rakyat, meningkatnya hutan meningkatnya jumlah industri yang memiliki IPAL, serta semakin terkendalinya pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan.

Tabel 2.4.2.3 Penanganan Lahan Kritis Di Kabupaten Tasikmalaya 2006-2010

No	Indikator Rehabilitasi Lahan Kritis	Sat	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Berkurangnya lahan kritis	Ha	8.410	6.998	5.438	4.433	2.933
2.	Penangana Lahan Kritis	Ha	1.090	1.412	1.560	1.005	1.500
3.	Rehabilitasi Sempadan Mata Air (Cathmen Area)	Ha	200,00	150,00	100,00	32,50	297,95

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tabel 2.4.2.4 Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 – 2010

No	Indikator Lingkungan Hidup	Satuan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Perusahaan yang memiliki IPAL	buah	5	5	5	15	30
2.	Jumlah Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	buah	44	20	18	64	105
3.	Kegiatan Adipura	buah	1	1	1	1	2
4.	Jumlah Kajian di Bidang Lingkungan Hidup	buah	2	5	5	4	20
5.	Jumlah industri yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara	buah	1	1	1	1	2

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Tasikmalaya melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada periode tahun 2006–2009 memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa iklim investasi di Kabupaten Tasikmalaya cukup memberikan peluang bagi para penanam modal untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk menyederhanakan proses perijinan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 16 Tahun 2008 Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Terpadu Kabupaten Tasikmalaya. Diharapkan dengan adanya KPPT, investor dapat lebih mudah menanamkan modalnya di Kabupaten Tasikmalaya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2009 secara total hanya 4,15%, namun ada tiga sektor yang nilainya lebih besar dari LPE Nasional yaitu sektor Sektor Perdagangan (8,27%), Hotel dan Restoran, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum (8 %), serta Sektor Bangunan (6,20%). Oleh karena itu sektor-sektor tersebut layak untuk dijadikan tujuan investasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Pada tahun 2008 jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 742.428.858.000,- pada tahun 2009 sebesar Rp 865.475.447.000,-, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 945.498.553.000,-. Dari angka tersebut didapatkan bahwa laju pertumbuhan investasi dari tahun 2008-2010 berturut-turut : 16,57%; 9,25%; 12,91%

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk lumayan besar di wilayah Priangan Timur, sehingga merupakan aset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia produktif (15-60 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk usia di atas 60 tahun, yaitu masing-masing sebesar 60,58%, 31,09%, dan 8,33%. Dari potensi tenaga kerja, kualitas tenaga kerja merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan mengingat tenaga kerja usia 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD sebesar 0,32 %, SMP sederajat sebesar 2,43%, SMA/SMK sebesar 23,85% dan Perguruan Tinggi sebesar 23,40%.

Dengan demikian, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai daya saing dalam bidang sumber daya manusia baik dari jumlah penduduk usia produktif maupun tingkat pendidikan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi.

Tabel 2.4.4.1 Realisasi Investasi di Kabupaten Tasikmalaya 2008-2010

NO	URAIAN	2008	2009	2010	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	Sektor : Koperasi				Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan
1	Pelaku/Unit Usaha	629	640	653	
2	Tenaga Kerja (orang)	1.448	1.530	1.618	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	88.205.993	102.418.894	110.774.500	
B.	Sektor : Industri				Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan
1	Pelaku/Unit Usaha	11.017	13.721	13.856	
2	Tenaga Kerja (orang)	93.365	106.252	106.404	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	82.805.867	94.524.530	78.872.450	
C.	Sektor : Perdagangan				Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan
1	Pelaku/Unit Usaha	9.059	9.637	10.479	
2	Tenaga Kerja (orang)	18.118	19.274	20.959	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	543.759.300	629.681.103	681.161.103	
D.	Sektor : Pertambangan				Sumber : Dinas Pertambangan & Energi
1	Pelaku/Unit Usaha	124	89	80	
2	Tenaga Kerja (orang)	1.033	956	9.134	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	17.666.000,00	16.845.000,00	53.000.000,00	
E.	Sektor : Pariwisata				Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan
1	Pelaku/Unit Usaha	2	3	4	
2	Tenaga Kerja (orang)	10	18	24	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	775.000,00	1.350.000,00	2.000.000,00	
F.	Sektor : Peternakan				Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
1	Pelaku/Unit Usaha	40	33	68	
2	Tenaga Kerja (orang)	951	785	690	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	7.041.698,40	14.914.500,00	12.370.000,00	

NO	URAIAN	2008	2009	2010	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
G.	Sektor : Perikanan				Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
1	Pelaku/Unit Usaha	20	25	16	
2	Tenaga Kerja (orang)	539	553	150	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	2.175.000,00	3.741.420,00	2.320.500,00	
H.	Sektor : Perkebunan				Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1	Pelaku/Unit Usaha	-	-	1	
2	Tenaga Kerja (orang)	-	-	40	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	-	-	1.000.000,00	
I.	Sektor : Pertanian				Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
1	Pelaku/Unit Usaha	-	1	1	
2	Tenaga Kerja (orang)	-	60	100	
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	-	2.000.000	4.000.000	
Total :					
Pelaku/Unit Usaha		20.891,00	24.149,00	25.158,00	
Tenaga Kerja (orang)		115.464,00	129.428,00	139.119,00	
Nilai Investasi (Rp.000)		742.428.858,40	865.475.447,00	945.498.553,00	
Laju Pertumbuhan Investasi		16,57	9,25	12,91	

Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, Setda Kabupaten Tasikmalaya

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, digunakan sebagai dasar dalam rencana RPJMD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

Pendapatan dalam penyusunan APBD Tahun 2011 diperkirakan menurun sebesar 10,63% dibandingkan dengan perubahan APBD Tahun 2010, pada perubahan Tahun 2010 sebesar Rp 1.342.089.983.270,74 dan pada penyusunan tahun 2011 menjadi

Rp. 1.199.397.190.893,82. Penurunan secara signifikan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 41,64 % yaitu sebesar Rp 78.594.418.880,62 pada perubahan tahun 2010 menjadi Rp 45.864.108.805,62 pada Penyusunan tahun 2011, sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang mengalami kenaikan sebesar 26,98%, yaitu dari Rp 60.545.500.000,00 pada perubahan tahun 2010 menjadi Rp 76.880.600.000,00 pada penyusunan tahun 2011. Sementara itu Dana Alokasi Umum mengalami penurunan 4,28% dari Rp 921.404.109.200,00 perubahan tahun 2010 menjadi Rp 881.979.959.000,00 tahun 2011.

Dari sisi Belanja mengalami penurunan sebesar 10,04% dari Rp 1.475.450.894.021,74 perubahan tahun 2010 menjadi Rp 1.327.292.517.937,82 tahun 2011. Dari pos Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan 11,07 % yaitu dari Rp 1.086.855.500.779,74 dalam perubahan tahun 2010 menjadi Rp 966.563.558.472,83 pada tahun 2011, Belanja Langsung menurun sebesar 7,17% dari Rp 388.595.393.242,00 dalam perubahan tahun 2010 menjadi Rp 360.728.959.465,00 pada tahun 2011. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial menurun 63,27% yaitu dari Rp 115.300.785.706,00 dalam perubahan tahun 2010 menjadi Rp 42.346.240.000,00 pada tahun 2011. Berikut disajikan gambaran selengkapnya pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan daerah Tahun 2006 – 2011 pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.1
Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2006

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN 2006	REALISASI	LEBIH / KURANG
1				PENDAPATAN	817.011.950.885,35	857.371.582.393,42	40.359.631.508,07
1	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.846.209.826,81	35.440.575.080,30	12.594.365.253,49
1	1	01		Pajak Daerah	4.201.588.500,00	4.270.787.417,00	69.198.917,00
1	1	02		Retribusi Daerah	7.540.658.940,00	6.932.195.686,00	(608.463.254,00)
1	1	03		Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.318.141.187,81	5.305.544.023,46	(12.597.164,35)
1	1	04		Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	5.785.821.199,00	18.932.047.953,84	13.146.226.754,84
1	2			DANA PERIMBANGAN	794.165.741.058,54	803.105.005.413,12	8.939.264.354,58
1	2	01		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.672.765.990,00	46.047.486.886,00	8.374.720.896,00
1	2	02		Dana Alokasi Umum	648.149.000.000,00	648.149.000.000,00	-
1	2	03		Dana Alokasi Khusus	49.160.000.000,00	49.160.000.000,00	-
1	2	04		Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	59.183.975.068,54	59.748.518.527,12	564.543.458,58
1	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	-	18.826.001.900,00	18.826.001.900,00
1	3	01		Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	18.826.001.900,00	18.826.001.900,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2006	REALISASI	LEBIH / KURANG
2	BELANJA	896.206.076.732,55	768.323.437.485,50	(127.882.639.247,05)
2	1 BELANJA APARATUR DAERAH	221.157.425.383,04	150.516.162.961,50	(70.641.262.421,54)
2 1	1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	181.504.588.552,04	114.260.954.547,50	(67.243.634.005)
2 1 01	Belanja Pegawai / Personalia	160.716.105.552,04	95.160.970.482,00	(65.555.135.070,04)
2 1 02	Belanja Barang Dan Jasa	11.576.769.000,00	10.852.784.613,50	(723.984.386,50)
2 1 03	Belanja Perjalanan Dinas	3.130.870.000,00	2.523.564.300,00	(607.305.700,00)
2 1 04	Belanja Pemeliharaan	6.080.844.000,00	5.723.635.152,00	(357.208.848,00)
2 2	1 BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	14.750.560.881,00	11.805.510.614,00	(2.945.050.267,00)
2 2 01	Belanja Pegawai / Personalia	4.403.292.600,00	4.073.139.400,00	(330.153.200,00)
2 2 02	Belanja Barang Dan Jasa	8.206.557.631,00	5.956.514.764,00	(2.250.042.867,00)
2 2 03	Belanja Perjalanan Dinas	1.939.845.000,00	1.616.639.500,00	(323.205.500,00)
2 2 04	Belanja Pemeliharaan	200.865.650,00	159.216.950,00	(41.648.700,00)
2 3	1 BELANJA MODAL	24.902.275.950,00	24.449.697.800,00	(452.578.150,00)
2 3 01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2 3 02	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	-
2 3 03	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-
2 3 04	Belanja Modal Instalasi	8.500.000,00	8.500.000,00	-
2 3 06	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.450.211.600,00	7.419.529.000,00	(30.682.600,00)
2 3 08	Belanja Modal Alat-Alat Besar	80.250.000,00	80.250.000,00	-
2 3 09	Belanja Modal Alat Angkutan	12.843.175.000,00	12.536.050.000,00	(307.125.000,00)
2 3 12	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.832.732.150,00	1.736.114.600,00	(96.617.550,00)
2 3 13	Belanja Modal Alat Studio Dan Alat Komunikasi	736.479.000,00	727.774.200,00	(8.704.800,00)
2 3 16	Belanja Modal Buku Perpustakaan	148.878.200,00	148.480.000,00	(398.200,00)
2 3 17	Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan	47.050.000,00	38.000.000,00	(9.050.000,00)
2	2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK	675.048.651.349,51	617.807.274.524,00	(57.241.376.825,51)
2 1	2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM	340.255.132.500,00	305.506.357.763,00	(34.748.774.737,00)
2 1 01	Belanja Pegawai / Personalia	335.267.730.000,00	300.650.584.278,00	(34.617.145.722,00)
2 1 02	Belanja Barang Dan Jasa	4.111.272.500,00	3.985.876.985,00	(125.395.515,00)
2 1 03	Belanja Perjalanan Dinas	121.630.000,00	119.030.000,00	(2.600.000,00)
2 1 04	Belanja Pemeliharaan	754.500.000,00	750.866.500,00	(3.633.500,00)
2 2	2 BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	40.363.604.215,00	36.602.732.152,00	(3.760.872.063,00)
2 2 01	Belanja Pegawai / Personalia	6.512.405.300,00	5.538.731.300,00	(973.674.000,00)
2 2 02	Belanja Barang Dan Jasa	22.820.265.089,00	20.514.611.909,00	(2.305.653.180,00)
2 2 03	Belanja Perjalanan Dinas	2.945.993.000,00	2.548.402.500,00	(397.590.500,00)
2 2 04	Belanja Pemeliharaan	8.084.940.826,00	8.000.986.443,00	(83.954.383,00)
2 3	2 BELANJA MODAL	208.873.937.985,00	203.397.147.560,00	(5.476.790.425,00)
2 3 01	Belanja Modal Tanah	77.658.119.320,00	77.651.304.320,00	(6.815.000,00)
2 3 02	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56.761.779.700,00	55.399.079.402,00	(1.362.700.298,00)
2 3 03	Belanja Modal Bangunan Air	11.416.980.000,00	11.261.048.511,00	(155.931.489,00)
2 3 04	Belanja Modal Instalasi	3.988.000.000,00	3.747.937.600,00	(240.062.400,00)
2 3 05	Belanja Modal Jaringan	2.142.015.280,00	2.137.882.970,00	(4.132.310,00)
2 3 06	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.896.523.760,00	33.631.891.797,00	(3.264.631.963,00)
2 3 07	Belanja Modal Monumen	204.000.000,00	196.114.780,00	(7.885.220,00)
2 3 08	Belanja Modal Alat-Alat Besar	400.365.500,00	393.675.730,00	(6.689.770,00)
2 3 09	Belanja Modal Alat Angkutan	1.131.425.000,00	983.021.000,00	(148.404.000,00)
2 3 10	Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur	84.472.600,00	84.185.640,00	(286.960,00)
2 3 11	Belanja Modal Alat Pertanian	939.462.000,00	930.295.530,00	(9.166.470,00)
2 3 12	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	4.396.087.825,00	4.250.389.850,00	(145.697.975,00)
2 3 13	Belanja Modal Alat Studio Dan Alat Komunikasi	198.725.000,00	196.400.380,00	(2.324.620,00)
2 3 14	Belanja Modal Alat-Alat Kedokteran	4.168.450.000,00	4.071.900.000,00	(96.550.000,00)
2 3 15	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.339.482.000,00	3.315.245.050,00	(24.236.950,00)
2 3 16	Belanja Modal Buku Perpustakaan	4.912.800.000,00	4.912.800.000,00	-
2 3 18	Belanja Modal Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	235.250.000,00	233.975.000,00	(1.275.000,00)
2 4	2 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	66.317.354.000,00	60.698.654.349,00	(5.618.699.651,00)
2 4 02	Belanja Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi untuk Desa	972.105.000,00	972.105.000,00	-
2 4 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	8.980.670.000,00	8.901.910.000,00	(78.760.000,00)
2 4 05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan (Lembaga Sosial, Kegiatan Sosial dan Sarana Keagamaan-	25.371.800.000,00	24.150.191.895,00	(1.221.608.105,00)
2 4 06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi	4.920.524.000,00	4.920.326.000,00	(198.000,00)
2 4 07	Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan	18.712.255.000,00	18.555.854.827,00	(156.400.173,00)
2 4 08	Belanja Bantuan Keuangan Untuk Parpol / Kegiatan Pemilu /Pilkada	7.360.000.000,00	3.198.266.627,00	(4.161.733.373,00)
2 5	2 BELANJA TIDAK TERSANGKA	19.238.622.649,51	11.602.382.700,00	(7.636.239.949,51)
2 5 01	Belanja Tidak Tersangka	19.238.622.649,51	11.602.382.700,00	(7.636.239.949,51)
	SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN	(79.194.125.847,20)	89.048.144.907,92	168.242.270.755,12

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN 2006	REALISASI	LEBIH / KURANG
3		PEMBIAYAAN	79.194.125.847,20	(89.048.144.725,92)	(168.242.270.573,12)
3	1	PENERIMAAN DAERAH	92.319.125.847,20	128.157.719.167,20	35.838.593.320,00
3	1	01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	85.319.125.847,20	85.319.125.847,20	-
3	1	12 Pembiayaan Penerimaan Daerah Dari Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	3.909.883.537,00	3.909.883.537,00
3	1	13 Pembiayaan Penerimaan Daerah Dari Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		16.728.412,00	16.728.412,00
3	1	39 Pembiayaan Penerimaan Daerah Dari Dana Cadangan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-
3	1	53 Pembiayaan Penerimaan Daerah Dari Bagian Lancar Utang Pajak dan Pegawai		31.911.981.371,00	31.911.981.371,00
3	1	66 Pembiayaan Penerimaan Daerah Dari Utang Belanja Modal Tanah			
3	1	99 Transfer antar rekening Kas			
3	2	PENGELUARAN DAERAH	13.125.000.000,00	217.205.863.893,12	204.080.863.893,12
3	2	07 Pembiayaan Pengeluaran Daerah Untuk Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-
3	2	11 Pembiayaan Pengeluaran Daerah Untuk Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dr Propinsi	-	2.356.756.329,12	2.356.756.329,12
3	2	14 Pembiayaan Pengeluaran Daerah Untuk Penyertaan Modal Daerah	13.125.000.000,00	13.125.000.000,00	-
3	2	52 Pembiayaan Pengeluaran Daerah Untuk Bagian Lancar Utang Pajak dan Pegawai		31.911.981.371,00	31.911.981.371,00
3	2	99 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan		169.812.126.193,00	169.812.126.193,00
		TOTAL PEMBIAYAAN	79.194.125.847,20	(89.048.144.907,92)	(168.242.270.755,12)

Tabel 3.1.1.2
Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2007-2011

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	Penyusunan 2011	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	%
I	PENDAPATAN DAERAH	941.942.271.579,14	1.021.128.667.451,00	1.185.100.366.999,00	1.342.089.983.270,74	1.199.397.190.893,82	51.490.983.862,94	0,90
1.1	Pendapatan Asli Daerah	29.170.929.239,50	37.695.483.605,00	46.873.279.735,00	78.594.418.880,62	45.864.108.805,62	3.338.635.913,22	1,40
	Pajak Daerah	4.918.340.200,00	8.588.320.683,00	10.936.636.452,00	12.619.413.496,00	13.605.466.625,00	1.737.425.285,00	3,43
	Retribusi Daerah	8.032.652.690,00	10.834.181.445,00	14.135.548.650,00	15.212.464.494,00	14.116.285.614,00	1.216.726.584,80	1,95
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.242.471.939,50	8.211.701.462,00	10.972.049.873,00	13.775.190.756,62	13.735.190.756,62	1.698.543.763,42	3,27
	Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.977.464.410,00	10.061.280.015,00	11.009.044.760,00	36.987.350.134,00	4.407.165.810,00	(1.314.059.720,00)	(1,79)
1.2	Dana Perimbangan	834.813.157.742,89	911.355.295.767,00	936.590.768.557,00	1.056.722.200.438,00	1.027.681.957.556,35	38.573.759.962,69	0,81
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.478.157.742,89	54.484.935.767,00	57.341.325.557,00	74.772.591.238,00	56.630.265.088,20	2.030.421.469,06	0,70
	Dana Alokasi Umum	718.561.000.000,00	789.565.360.000,00	801.713.443.000,00	921.404.109.200,00	881.979.959.000,00	32.683.791.800,00	0,79
	Dana Alokasi Khusus	69.774.000.000,00	67.305.000.000,00	77.536.000.000,00	60.545.500.000,00	76.880.600.000,00	1.421.320.000,00	0,40
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77.958.184.596,75	72.077.888.079,00	201.636.318.707,00	206.773.363.952,12	138.042.258.000,00	12.016.814.680,65	1,73
	Pendapatan Hibah	-	-	274.471.000,00	146.724.308,00	-	(63.873.346,00)	(15,16)
	Dana Darurat	-	-	33.834.220.000,00	-	-	-	-

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	Penyusunan 2011	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop.dan Pemerintah daerah Lainnya	15.660.615.000,00	20.226.954.434,00	26.470.317.576,00	29.572.300.550,12	28.954.112.000,00	2.658.699.400,00	2,20
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	11.000.000.000,00	6.325.900.480,00	25.123.551.531,00	28.523.685.094,00	-	3.504.737.018,80	4,94
	Bantuan Keuangan dari Prop.atau pemerintah daerah lainnya	51.297.569.596,75	45.525.033.165,00	115.933.758.600,00	148.530.654.000,00	109.088.146.000,00	11.558.115.280,65	2,46
	BELANJA DAERAH					1.327.292.517.937,82	265.458.503.587,56	20,00
II	Belanja Tidak Langsung	1.102.015.994.205,14	1.169.020.242.762,00	1.346.966.049.184,00	1.475.450.894.021,74	966.563.558.472,82	(27.090.487.146,46)	(0,45)
2.1	Belanja Pegawai	712.303.034.330,14	804.514.793.663,01	985.208.638.768,00	1.086.855.500.779,74	842.274.053.772,82	25.994.203.888,54	0,59
	Belanja Bantuan Sosial	585.151.965.146,00	685.681.793.741,50	674.398.028.270,00	870.430.440.073,24	42.346.240.000,00	(108.561.145.029,20)	(3,80)
	Belanja Hibah	-	-	-	-	33.940.676.000,00	-	-
	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	6.963.278.700,00	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	79.184.640.000,00	47.807.500.000,00	36.039.310.000,00	(14.381.776.666,67)	(8,82)
	Belanja Tidak Terduga	98.906.793.449,75	77.918.561.369,00	192.091.652.498,00	115.300.785.706,50	5.000.000.000,00	(18.781.358.689,95)	(3,84)
	Belanja Langsung	1.322.797.000,00	5.245.738.268,50	6.494.618.000,00	6.815.775.000,00	360.728.959.465,00	71.881.232.493,00	18,89
	Belanja Pegawai	10.408.070.000,00	12.755.340.000,00	21.434.700.000,00	34.501.000.000,00	39.483.071.800,00	5.815.000.360,00	4,90
2.2	Belanja Barang & Jasa	16.513.408.734,39	22.913.360.284,01	11.605.000.000,00	12.000.000.000,00	169.269.689.319,00	30.551.256.116,92	13,15
	Belanja Modal	389.712.959.875,00	364.505.449.098,99	361.757.410.416,00	388.595.393.242,00	151.976.198.346,00	(47.547.352.305,80)	(2,87)
	Jumlah Belanja	50.666.493.235,00	43.986.944.400,00	32.881.938.660,00	26.567.777.300,00	1.327.292.517.937,82	255.325.204.940,56	17,24
	Surplus/(Defisit)	93.611.042.119,00	100.380.343.213,99	106.872.613.045,00	120.207.952.468,00	-127.895.327.044,00	(44.301.273.832,60)	(15,11)
		245.435.424.521,00	220.138.161.485,00	222.002.858.711,00	241.819.663.474,00		(49.087.084.904,20)	(5,28)
	PEMBIAYAAN DAERAH					127.895.327.044,00	-	-
	Penerimaan Pembiayaan	160.073.722.626,00	147.891.575.311,00	161.865.682.185,00	133.360.910.751,00	128.645.327.044,00	(6.285.679.116,40)	(0,86)
	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	200.927.767.166,36	182.391.575.311,00	177.150.286.185,00	135.369.499.951,00	128.645.327.044,00	(14.456.488.024,47)	(1,75)
III	Pencairan Dana Cadangan	169.812.126.193,00	182.391.575.311,00	154.150.286.185,00	135.369.499.951,00	-	(8.610.656.560,50)	(1,34)
3.1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	28.854.044.540,36	-	23.000.000.000,00	-	-	(2.927.022.270,18)	(5,64)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Penrimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.261.596.433,00	-	-	-	128.645.327.044,00	63.191.865.305,50	48,27236301
	Pengeluaran Pembiayaan	40.854.044.540,36	34.500.000.000,00	15.284.604.000,00	2.008.589.200,00	750.000.000,00	(8.020.808.908,07)	(8,59)
	Pembentukan Dana Cadangan	24.854.044.540,36	25.500.000.000,00	-	-	-	322.977.729,82	0,64
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	16.000.000.000,00	9.000.000.000,00	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	(3.050.000.000,00)	(8,91)
3.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	8.784.604.000,00	8.589.200,00	-	(4.388.007.400,00)	(49,90)
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Daerah	941.942.271.579,14	1.021.128.667.451,00	1.185.100.366.999,00	1.342.089.983.270,74	750.000.000,00	-8.657.078.942,75	(0,19)

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	Penyusunan 2011	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	%
I	PENDAPATAN DAERAH	941.942.271.579,14	1.021.128.667.451,00	1.185.100.366.999,00	1.342.089.983.270,74	1.199.397.190.893,82	60.625.172.320,46	0,06
1.1	Pendapatan Asli Daerah	29.170.929.239,50	37.695.483.605,00	46.873.279.735,00	78.594.418.880,62	45.864.108.805,62	2.784.644.907,16	0,09
	Pajak Daerah	4.918.340.200,00	8.588.320.683,00	10.936.636.452,00	12.619.413.496,00	13.605.466.625,00	2.107.698.910,25	0,32
	Retribusi Daerah	8.032.652.690,00	10.834.181.445,00	14.135.548.650,00	15.212.464.494,00	14.116.285.614,00	1.642.723.714,25	0,20
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.242.471.939,50	8.211.701.462,00	10.972.049.873,00	13.775.190.756,62	13.735.190.756,62	2.121.074.796,66	0,27
	Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.977.464.410,00	10.061.280.015,00	11.009.044.760,00	36.987.350.134,00	4.407.165.810,00	(3.086.852.514,00)	(0,12)
1.2	Dana Perimbangan	834.813.157.742,89	911.355.295.767,00	936.590.768.557,00	1.056.722.200.438,00	1.027.681.957.556,35	47.187.169.054,34	0,05
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.478.157.742,89	54.484.935.767,00	57.341.325.557,00	74.772.591.238,00	56.630.265.088,20	1.507.995.937,30	0,04
	Dana Alokasi Umum	718.561.000.000,00	789.565.360.000,00	801.713.443.000,00	921.404.109.200,00	881.979.959.000,00	40.854.739.750,00	0,05
	Dana Alokasi Khusus	69.774.000.000,00	67.305.000.000,00	77.536.000.000,00	60.545.500.000,00	76.880.600.000,00	1.776.650.000,00	0,03
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	77.958.184.596,75	72.077.888.079,00	201.636.318.707,00	206.773.363.952,12	138.042.258.000,00	13.701.141.726,00	0,37
	Pendapatran Hibah	-	-	274.471.000,00	146.724.308,00	-	-	
	Dana Darurat	-	-	33.834.220.000,00	-	-	(62.500.000,00)	(48,26)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop.dan Pemerintah daerah Lainnya	15.660.615.000,00	20.226.954.434,00	26.470.317.576,00	29.572.300.550,12	28.954.112.000,00	3.325.905.500,00	0,18
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	11.000.000.000,00	6.325.900.480,00	25.123.551.531,00	28.523.685.094,00	-	(4.130.951.000,00)	1,22
	Bantuan Keuangan dari Prop.atau pemerintah daerah lainnya	51.297.569.596,75	45.525.033.165,00	115.933.758.600,00	148.530.654.000,00	109.088.146.000,00	14.568.687.226,00	0,35
	BELANJA DAERAH					1.327.292.517.937,82	96.893.907.564,21	0,09
II	Belanja Tidak Langsung	1.102.015.994.205,14	1.169.020.242.762,00	1.346.966.049.184,00	1.475.450.894.021,74	966.563.558.472,82	95.394.710.544,39	0,15
2.1	Belanja Pegawai	712.303.034.330,14	804.514.793.663,01	985.208.638.768,00	1.086.855.500.779,74	842.274.053.772,82	93.182.896.286,64	0,15
	Belanja Bantuan Sosial	585.151.965.146,00	685.681.793.741,50	674.398.028.270,00	870.430.440.073,24	42.346.240.000,00	(11.338.410.481,75)	0,09
	Belanja Hibah	-	-	-	-	33.940.676.000,00	8.485.169.000,00	(0,46)
	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	6.963.278.700,00	1.472.720.489,50	0,95
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	79.184.640.000,00	47.807.500.000,00	36.039.310.000,00	6.422.827.500,00	0,33
	Belanja Tidak Terduga	98.906.793.449,75	77.918.561.369,00	192.091.652.498,00	115.300.785.706,50	5.000.000.000,00	(2.830.492.250,00)	(0,19)
	Belanja Langsung	1.322.797.000,00	5.245.738.268,50	6.494.618.000,00	6.815.775.000,00	360.728.959.465,00	1.499.197.019,81	(0,00)
	Belanja Pegawai	10.408.070.000,00	12.755.340.000,00	21.434.700.000,00	34.501.000.000,00			0,01

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	Penyusunan 2011	RATA - RATA PERTUMBUHAN	
							(Rp.)	%
						39.483.071.800,00	(934.814.372,44)	
2.2	Belanja Barang & Jasa	16.513.408.734,39	22.913.360.284,01	11.605.000.000,00	12.000.000.000,00	169.269.689.319,00	21.271.101.022,25	0,18
	Belanja Modal	389.712.959.875,00	364.505.449.098,99	361.757.410.416,00	388.595.393.242,00	151.976.198.346,00	(18.837.089.630,00)	(0,09)
	Jumlah Belanja	50.666.493.235,00	43.986.944.400,00	32.881.938.660,00	26.567.777.300,00	1.327.292.517.937,82	96.893.907.564,21	0,09
	Surplus/(Defisit)	93.611.042.119,00	100.380.343.213,99	106.872.613.045,00	120.207.952.468,00	(127.895.327.044,00)	(36.268.735.243,75)	(1,29)
		245.435.424.521,00	220.138.161.485,00	222.002.858.711,00	241.819.663.474,00		-	
	PEMBIAYAAN DAERAH					127.895.327.044,00	(9.329.158.584,00)	(0,07)
	Penerimaan Pembiayaan	160.073.722.626,00	147.891.575.311,00	161.865.682.185,00	133.360.910.751,00	128.645.327.044,00	(18.300.884.826,75)	(0,12)
	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	200.927.767.166,36	182.391.575.311,00	177.150.286.185,00	135.369.499.951,00	128.645.327.044,00	(10.291.699.787,25)	(0,07)
III	Pencairan Dana Cadangan	169.812.126.193,00	182.391.575.311,00	154.150.286.185,00	135.369.499.951,00	-	(1.620.808.776,25)	(1,00)
3.1	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	28.854.044.540,36	-	23.000.000.000,00	-	-	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	(599.958.796,75)	(1,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.261.596.433,00	-	-	-	128.645.327.044,00	(18.300.884.826,75)	(0,12)
	Pengeluaran Pembiayaan	40.854.044.540,36	34.500.000.000,00	15.284.604.000,00	2.008.589.200,00	750.000.000,00	(8.971.726.242,75)	(0,93)
	Pembentukan Dana Cadangan	24.854.044.540,36	25.500.000.000,00	-	-	-	(6.409.226.242,75)	(0,50)
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	16.000.000.000,00	9.000.000.000,00	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	750.000.000,00	(2.562.500.000,00)	(0,83)
3.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	8.784.604.000,00	8.589.200,00	-	-	0,50
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	941.942.271.579,14	1.021.128.667.451,00	1.185.100.366.999,00	1.342.089.983.270,74	750.000.000,00	(8.657.078.942,75)	(0,78)

Sumber : DPPKAD

Tabel 3.1.1.3
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2007-2011

NO	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2007	2008	2009	2010	Realisasi	
I	PENDAPATAN DAERAH	956.896.501.612,00	1.036.755.812.743,00	1.227.079.796.070,00	1.309.528.239.959,00	88.157.934.586,75	1,95
1.1	Pendapatan Asli Daerah	34.725.529.177,00	47.194.342.024,00	49.657.867.201,00	48.338.061.521,00	3.403.133.086,00	1,89

NO	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2007	2008	2009	2010	Realisasi	
	-Hasil Pajak Daerah	5.174.670.984,00	10.190.910.668,00	11.851.184.022,00	12.088.798.564,00	1.728.531.895,00	4,40
	-Hasil Retribusi Daerah	7.545.390.757,00	12.715.454.416,00	14.216.585.300,00	14.311.790.523,00	1.691.599.941,50	3,47
	-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.250.891.570,00	8.145.101.462,00	10.545.049.873,00	13.750.890.325,00	2.124.999.688,75	5,64
	-Lain-lain PAD Yang Sah	16.754.575.866,00	16.142.875.478,00	13.045.048.006,00	8.186.582.109,00	(2.141.998.439,25)	(3,96)
1.2	Dana Perimbangan	838.933.281.339,00	912.656.608.607,00	948.170.972.648,00	1.058.189.564.045,00	54.814.070.676,50	1,46
	-Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.598.281.339,00	55.786.244.607,00	68.921.529.648,00	76.259.954.845,00	6.415.418.376,50	2,55
	-Dana Alokasi Umum	718.561.000.000,00	789.565.364.000,00	801.713.443.000,00	921.384.109.200,00	50.705.777.300,00	1,57
	-Dana Alokasi Khusus	69.774.000.000,00	67.305.000.000,00	77.536.000.000,00	60.545.500.000,00	(2.307.125.000,00)	(0,84)
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	83.237.691.096,00	76.904.862.112,00	229.250.956.221,00	203.000.614.393,00	29.940.730.824,25	5,05
	-Pendapatan Hibah	-	-	365.389.385,00	148.363.496,00	(108.512.944,50)	(21,12)
	-Dana darurat	250.000.000,00	2.500.000.000,00	31.334.220.000,00		(62.500.000,00)	(0,18)
	--Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	15.650.490.000,00	21.941.591.078,00	28.145.956.076,00	25.830.911.803,00	2.545.105.450,75	2,78
	-Dana Penyusutan dan otonomi khusus	16.523.804.000,00	6.325.900.480,00	52.792.395.160,00	28.523.685.094,00	2.999.970.273,50	2,88
	-Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	50.813.397.096,00	46.137.370.554,00	116.612.995.600,00	148.497.654.000,00	24.421.064.226,00	6,75
II	BELANJA DAERAH	939.716.887.681,00	1.030.497.101.869,00	1.253.770.095.370,00	1.362.716.080.298,00	105.749.798.154,25	2,31
2.1	Belanja Tidak Langsung	584.984.716.295,25	690.854.419.621,00	967.572.649.634,00	1.048.124.150.442,00	115.784.858.536,69	3,52
	-Belanja Pegawai	469.542.468.626,25	593.091.586.999,00	672.531.768.955,00	838.564.402.989,00	92.255.483.590,69	3,58
	--Belanja Hibah	-	-	76.715.470.000,00	47.239.846.355,00	(14.737.811.822,50)	(31,20)
	-Belanja Bantuan Sosial	87.699.881.927,00	64.895.912.830,00	185.745.655.357,00	109.891.265.989,00	5.547.846.015,50	1,24
	-Belanja bagi hasil kepada Prov/kab/kota dan pemerintah desa	1.072.396.742,00	4.748.539.792,00	5.713.442.246,00	6.556.689.095,00	1.371.073.088,25	7,58
	-Belanja Bankeu kepada Prov/kab/kota dan Pemerintah Desa	10.348.000.000,00	12.741.132.000,00	21.013.499.076,00	34.100.008.014,00	5.938.002.003,50	7,59
	-Belanja Tidak Terduga	16.321.969.000,00	15.377.248.000,00	5.852.814.000,00	11.771.938.000,00	(1.137.507.750,00)	(2,31)
2.2	Belanja Langsung	354.732.171.385,75	339.642.682.248,00	286.197.445.736,00	314.591.929.856,00	(10.035.060.382,44)	(0,77)
	-Belanja Pegawai	43.222.329.289,75	39.292.428.100,00	27.757.086.930,00	23.275.365.004,00	(4.986.741.071,44)	(3,73)
	-Belanja Barang Jasa	84.185.285.230,00	88.671.133.552,00	93.342.214.053,00	105.686.353.757,00	5.375.267.131,75	1,45

NO	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2007	2008	2009	2010	Realisasi	
	-Belanja Modal	227.324.556.866,00	211.679.120.596,00	165.098.144.753,00	185.630.211.095,00	(10.423.586.442,75)	(1,32)
						-	
III	PEMBIAYAAN	165.211.961.380,00	147.891.575.311,00	162.059.799.251,00	163.884.457.095,00	(331.876.071,25)	(0,05)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	201.848.866.351,00	182.391.575.311,00	177.303.956.051,00	165.893.046.295,00	(8.988.955.014,00)	(1,24)
	-SILPA Tahun Sebelumnya	169.812.126.193,00	182.391.575.311,00	154.150.286.185,00	135.369.499.951,00	(8.610.656.560,50)	(1,34)
	-Pencairan Dana Cadangan	29.636.904.971,00	-	23.153.669.866,00	30.523.546.344,00	221.660.343,25	0,27
	-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
	-Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
	-Penerimaan Piutang Daerah	2.399.865.187,00	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	36.636.904.971,00	34.500.000.000,00	15.244.156.800,00	2.008.589.200,00	(8.657.078.942,75)	(9,79)
	-Pembentukan Dana Cadangan	25.636.904.971,00	25.500.000.000,00	-	-	(68.452.485,50)	(0,13)
	-Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.000.000.000,00	9.000.000.000,00	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.250.000.000,00)	(7,89)
	-Pembayaran Pokok Utang	-	-	8.744.156.800,00	8.589.200,00	(2.183.891.900,00)	(24,95)
	-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
		-					

Kenaikan Realisasi Anggaran dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan telah optimalnya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya intensifikasi baik dalam bentuk kegiatan maupun secara tupoksi disamping adanya penerimaan yang bersifat bantuan dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Tetapi pada tahun 2010 anggaran pendapatan tidak tercapai dan alasan ketidaktercapaian tersebut dikarenakan adanya ketidakrelevansian pengakomodiran pencairan dana abadi yang semula diakomodir di kode rekening lain-lain PAD yang sah tetapi berdasarkan hasil audit BPK dinyatakan tidak relevan dan harus dimasukkan ke kode rekening Pembiayaan, oleh karena itu untuk kedepan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku.

Perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 2006 - 2010, menunjukkan kenaikan dengan rata-rata sebesar 33,35%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD yaitu berkisar dari 100,42% sampai 125,20% (Tabel 3.1.1.4 dan

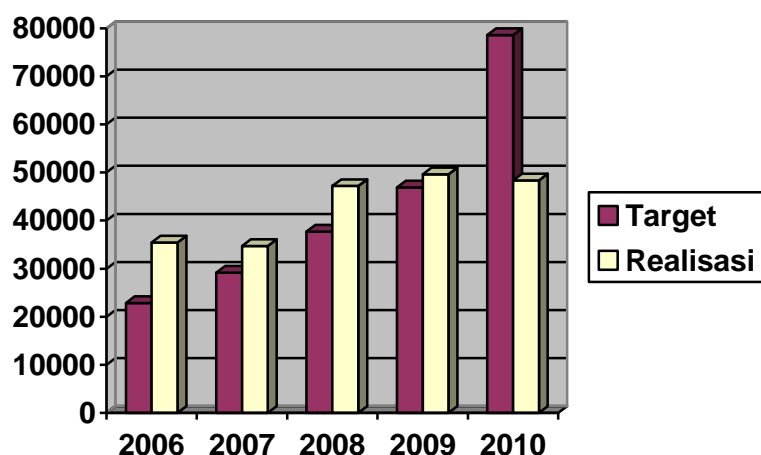
Gambar 3.1.1.1). Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berusaha maksimal dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Tabel 3.1.1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006–2010.

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
2006	22.846.209.826,81		35.440.575.080,30		155,13
2007	29.170.929.239,50	27,68	34.725.529.177,00	(2,02)	119,04
2008	37.695.483.605,00	29,22	47.194.342.024,00	35,91	125,20
2009	46.873.279.735,00	24,35	49.657.867.201,00	5,22	105,94
2010	78.594.418.880,62	67,67	48.338.061.521,00	(2,66)	61,50
Rata-rata Per Tahun		37,23		9,11	

Sumber : DPPKAD

Gambar 3.1.1.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Kab. Tasikmalaya 2006–2010



3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-

undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya selama kurun waktu 2006-2010 seperti dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.2.1
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah
Kab. Tasikmalaya Tahun 2006

Kode	Uraian	2006
4.	AKTIVA	1.484.218.800.153,08
4.1	AKTIVA LANCAR	175.290.782.289,24
4.1.01	Kas	169.812.126.193,00
4.1.04	Persediaan Bahan Habis Pakai/Material	3.006.360.917,12
4.1.08	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	62.338.850,00
4.1.12	Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	2.356.756.329,12
4.1.14	Piutang Lain-Lain	53.200.000,00
4.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	53.822.881.203,42
4.2.02	Penyertaan Modal Daerah	49.202.793.203,42
4.2.04	Investasi Jangka Panjang Kredit Program melalui PD BPR	4.620.088.000,00
4.3	AKTIVA TETAP	1.230.955.136.660,42
4.3.01	Tanah	299.991.401.491,00
4.3.02	Jalan dan Jembatan	463.644.620.068,00
4.3.03	Bangunan Air (Irigasi)	25.221.905.023,26
4.3.04	Instalasi	5.643.863.602,00
4.3.05	Jaringan	5.208.612.924,00
4.3.06	Bangunan Gedung	332.975.000.435,16
4.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah	417.416.616,00
4.3.08	Alat-alat Besar	7.622.707.134,00
4.3.09	Alat-alat Angkutan	39.938.301.921,00
4.3.10	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	828.939.814,00
4.3.11	Alat-alat Pertanian	1.750.696.145,00
4.3.12	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	25.314.782.722,00
4.3.13	Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	2.389.801.527,00
4.3.14	Alat-alat Kedokteran	6.245.745.917,00
4.3.15	Alat-alat Laboratorium	5.653.923.686,00
4.3.16	Buku/Perpustakaan	6.353.868.114,00
4.3.17	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	311.223.501,00
4.3.18	Hewan dan Ternak serta Tanaman	1.290.790.019,00
4.3.19	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1,00
4.3.20	Aktiva Tetap Lainnya	151.536.000,00
4.4	Dana Cadangan	5.250.000.000,00
4.4.01	Dana Cadangan	5.250.000.000,00
4.5	AKTIVA LAIN-LAIN	18.900.000.000,00
4.5.12	Dana Abadi	18.900.000.000,00
	JUMLAH HUTANG DAN EKUITAS DANA	1.484.218.800.153,17
5.	HUTANG	-
5.1	HUTANG LANCAR	-
5.1.03	Bagian Lancar Utang Pegawai	-
5.2	HUTANG JANGKA PANJANG	-
6.	EKUITAS DANA	1.484.218.800.153,17
6.1	EKUITAS DANA UMUM	1.461.228.145.312,96
6.1.01	Ekuitas Dana Umum	1.461.228.145.312,96
6.2	EKUITAS DANA DICADANGKAN	5.250.000.000,00
6.2.02	Ekuitas Dana Dicapangkan	5.250.000.000,00
6.3	EKUITAS DANA DONASI	17.740.654.840,21
6.3.01	Ekuitas Dana Donasi	17.740.654.840,21

Tabel 3.1.2.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah
Kab. Tasikmalaya Tahun 2007-2010

Kode	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	ASET	1.742.196.081.763,61	1.967.603.054.047,73	2.098.727.550.554,46	2.233.021.999.504,46
1.1.	ASET LANCAR	187.472.812.518,49	162.068.209.033,27	143.393.328.366,00	12.057.392.565
1.1.1.	Kas	182.391.575.311,00	154.501.690.000,00	135.390.207.497,00	110.663.383.081,00
1.1.2.	Piutang	-	950.000,00	69.033,00	0
1.1.3.	Piutang lain-lain	554.556.290,00	63.256.290,00	14.451.971,00	0
1.1.4.	Persediaan	4.526.680.917,49	7.502.312.743,27	7.988.599.865,00	9.909.629.484
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	70.045.356.675,80	73.829.058.832,14	80.329.058.832,14	82.329.058.832,14
1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	4.620.088.000,00	4.620.088.000,00
1.2.2	Investasi Permanen	7.045.356.675,80	73.829.058.832,14	75.708.970.832,14	77.708.970.832,14
1.3.	ASET TETAP	1.478.864.847.113,32	1.679.328.571.709,32	1.844.426.716.462,32	2.030.056.927.557,32
1.3.1.	Tanah	313.047.033.169,40	318.941.413.469,40	322.890.829.032,40	324.904.900.991,40
1.3.2.	Peralatan dan mesin	125.018.760.018,00	156.227.458.253,00	170.081.462.793,00	191.045.373.384
1.3.3.	Gedung dan bangunan	396.439.160.546,92	460.826.210.268,92	538.354.000.118,92	599.421.519.078,92
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	604.340.837.045,00	711.141.583.634,00	780.801.098.734,00	872.614.823.319
1.3.5.	Aset tetap lainnya	20.019.056.334,00	31.657.476.084,00	32.299.325.784,00	32.368.404.784,00
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0	534.430.000,00	0	9.701.906.000,00
1.4.	Dana Cadangan	25.636.904.971,00	52.207.617.288,00	30.523.546.344,00	-
1.4.1	Dana Cadangan	25.636.904.971,00	52.207.617.288,00	30.523.546.344,00	0
1.5.	ASET LAINNYA	176.160.486,00	169.597.185,00	54.900.550,00	63.000.550,00
1.5.1.	Tagihan penjualan angsuran		-	0	0
1.5.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	56.738.850,00	50.175.550,00	54.900.550,00	63.000.550,00
1.5.3.	Kemitraan dengan pihak kedua		-	0	0
1.5.4.	Aset tak berwujud		-	0	0
1.5.5.	Aset Lain-Lain	119.421.635,00	119.421.635,00	0	0
	JUMLAH ASET DAERAH	1.742.196.081.763,61	1.967.603.054.047,73	2.098.727.550.554,46	2.233.021.999.504,46
2.	KEWAJIBAN	7.127.500,00	9.136.007.815,00	29.296.746,00	412.192,00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.127.500,00	9.136.007.815,00	29.296.746,00	412.192,00
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	0	351.403.815,00	20.707.546,00	412.192,00
2.1.2.	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.127.500,00	8.784.604.000,00	8.589.200,00	15.724.360.210
3.	EKUITAS DANA	1.742.188.154.263,61	1.958.467.046.232,73	2.098.698.253.808,46	2.217.297.227.102,46
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	187.465.685.018,49	152.932.201.218,27	143.364.031.620,00	104.848.240.163

Kode	Uraian	2007	2008	2009	2010
3.1.1.	SILPA	182.391.575.311,00	154.150.286.185,00	135.369.499.951,00	110.662.970.889
3.1.2.	Cadangan piutang	554.556.290,00	64.206.290,00	14.521.004,00	-
3.1.3.	Cadangan persediaan	4.526.680.917,49	7.502.312.743,27	7.988.599.865,00	9.909.629.484
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan		-	0	0
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(7.127.500,00)	(8.784.604.000,00)	(8.589.200,00)	(15.724.360.210)
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	1.529.086.364.274,12	1.753.327.227.726,46	1.924.810.675.844,46	2.112.448.986.939,46
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	1.458.864.847.113,32	1.679.328.571.709,32	1.844.426.716.462,32	2.030.056.927.557,32
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	176.160.485,00	73.829.058.832,14	54.900.550,00	63.000.550,00
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	70.045.356.675,80	169.597.185,00	80.329.058.832,14	82.329.058.832,14
3.3.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA CADANGAN	25.636.904.971,00	52.207.617.288,00	30.523.546.344,00	-
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana cadangan	25.636.904.971,00	52.207.617.288,00	30.523.546.344,00	-
	Jumlah Ekuitas Dana	1.742.188.954.263,61	1.958.467.046.232,73	2.098.698.253.808,46	2.217.297.227.102,46
	Total Pasiva	1.742.196.081.763,61	1.967.603.054.047,73	2.098.727.550.554,46	2.233.021.999.504,46

Sumber : DPPKAD

3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi/pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

(SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan OPD Penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan serta administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah hingga tahun 2016 mendatang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru diberlakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta

pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi :

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan pihak swasta melalui perjanjian yang disepakati.
- c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal.
- d. Optimalisasi Pelaksanaan Perijinan Pelayanan Terpadu (PPT) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan.
- e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2011-2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan melalui gerakan membangun desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
9. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah akan mengarahkan pada pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, optimalisasi kegiatan dalam upaya pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 64,12%, mitigasi bencana dan pengendalian alih fungsi lahan.
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*).
11. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

3.1.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2007-2011, rata-rata presentase proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah 28,88%. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2007-2011 adalah 71,12%, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Tabel 3.1.4.1
Analisis Proporsi Belanja Langsung
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007-2010

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Langsung (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2007	389.712.959.875,00	1.142.870.038.745,50	34,10

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Langsung (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
2	Tahun Anggaran 2008	364.505.449.098,99	1.203.520.242.762,00	30,29
3	Tahun Anggaran 2009	361.757.410.416,00	1.362.250.653.184,00	26,56
4	Tahun Anggaran 2010	388.595.393.242,00	1.477.459.483.222,74	26,30
5	Tahun Anggaran 2011	360.728.959.465,00	1.328.042.517.937,82	27,16
	Rata-rata			28,88

Sumber : DPPKAD

3.1.5. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun Tahun 2006-2010 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.1.5.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.5.1
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2006-2010

NO	Uraian	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	857.371.582.393,00	956.896.501.612,00	1.036.755.812.743,00	1.227.079.796.070,00	1.340.118.447.552,00
2.	Belanja Daerah	768.323.437.485,50	939.716.887.681,00	1.030.497.101.869,00	1,253,770,095,370.00	1.362.816.387.414,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	217.205.863.893,12	36.636.904.971,00	34.500.000.000,00	15.244.156.800,00	2.008.589.200,00
	Defisit riil	(19.457.291.040,00)	(19.457.291.040,00)	(28.241.289.126,00)	(41.934.456.100,00)	(24.706.529.062,00)

Sumber : DPPKAD

Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada Tabel 3.1.5.2 berikut ini.

Tabel 3.1.5.2
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007-2010

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil			
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	872,24	645,83	367,60	547,91
2.	Pencairan Dana Cadangan	152,32	-	55,21	-

Sumber : DPPKAD

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2009-2010, gambaran dua tahun terakhir dapat terlihat pada Tabel 3.1.5.3.

Tabel 3.1.5.3
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2009-2010

No.	Uraian	2009		2010	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	135,369,499,951.00	100.00	110,662,970,889.00	100.00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	2,784,587,466.00	2.06	333,850,233.38	0,31
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	11,580,204,091.00	8.56	1,467,363,607.00	1.32
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	27,614,637,514.00	20.40	(3,772,749,559.12)	-3.41
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	93,195,953,814.00	68.84	112,634,506,607.74	101.78
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan				
7.	Pembiayaan Netto	194,117,066.00	0.14	-	
8.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD

Dari Tabel di atas terlihat bahwa selama 2 tahun terakhir (2009-2010), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kondisi ini, sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.2. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik Pemerintah Daerah yang dibebankan pada keuangan daerah pada tahun 2009-2010, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.2.1.1
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Pemerintah Kab. Tasikmalaya Tahun 2009 -2010

No	Uraian	2009	2010	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	
A	Belanja Tidak Langsung	866,982,028,668.00	1,040,354,500,779.74	8.33
1	Belanja Pegawai	674,398,028,270.00	870,430,440,073.24	24.68
2	Belanja Hibah	79,184,640,000.00	47,807,500,000.00	(38.42)
3	Belanja Bantuan Sosial	106,904,742,398.00	115,300,785,706.50	(40.82)
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	6,494,618,000.00	6,815,775,000.00	14.76
B	Belanja Langsung	127,315,414,730.00	50,973,669,126.76	9.95
1	Belanja fasilitas Dasar dan Administrasi umum (fixedcost)	127,315,414,730.00	50,973,669,126.76	9.95
C	Pembiayaan Pengeluaran	15,284,604,000.00	2,008,589,200.00	(86.82)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,500,000,000.00	2,000,000,000.00	(69.23)
2.	Pembayaran Pokok Utang	8,784,604,000.00	8,589,200.00	(99.90)
	TOTAL (A+B+C)	1.009.582.047.398,00	1.093.336.759.106,50	7.55

Sumber : Diolah dari Buku Raperda APBD Tahun 2009 dan Tahun 2010

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai dengan tahun 2010, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2015 mendatang (Tabel 3.2.2.1).

Tabel 3.2.2.1
Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Pada Kurun Tahun 2011-2015

No.	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,271,299,439,343.82	1,334,864,411,311.01	1,401,607,631,876.56	1,471,688,013,470.39	1,545,272,414,143.91
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	110,000,000,000.00	107,800,000,000.00	105,644,000,000.00	103,531,120,000.00	101,460,497,600.00
	Jumlah A	1,381,299,439,343.82	1,442,664,411,311.01	1,507,251,631,876.56	1,575,219,133,470.39	1,646,732,911,743.91

No.	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,002,154,728,237.82	1,016,624,754,849.71	1,067,455,992,592.19	1,120,828,792,221.81	1,174,520,764,187.94
Jumlah B		1,002,154,728,237.82	1,016,624,754,849.71	1,067,455,992,592.19	1,120,828,792,221.81	1,174,520,764,187.94
Kapasitas riil kemampuan keuangan		379,144,711,106.00	426,039,656,461.30	439,795,639,284.37	454,390,341,248.58	472,212,147,555.97

Sumber : DPPKAD

Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pendanaan pembangunan daerah 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD Tahun 2011-2015, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2011 sebesar Rp. 379,144,711,106.00 atau sebesar 27 % dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2012 sebesar Rp. 426,039,656,461.30 atau sebesar 30 % dari total penerimaan.
3. Proyeksi Tahun 2013 sebesar Rp. 439,795,639,284.37 atau sebesar 29 % dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 454,390,341,248.58 atau sebesar 29 % dari total penerimaan.
5. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 472,212,147,555.97 atau sebesar 29 % dari total penerimaan.

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi/Misi Daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar

serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

- c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tabel 3.2.2.1 diatas maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan terhadap urutan prioritas.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR).

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Bidang Kependudukan

Dalam bidang kependudukan, beberapa permasalahan yang masih perlu ditangani antara lain pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penataan administrasi kependudukan, belum terbentuknya kelembagaan yang sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), serta masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Dalam bidang kependudukan ini hak-hak sipil warga untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan masih memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup:

- 1) Peningkatan pelayanan pendidikan yang terkait dengan penekanan angka putus sekolah, penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dan terbatasnya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi,
- 2) Masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi rusak disebabkan anggaran terbatas;
- 3) Tidak meratanya penempatan tenaga pengajar dan kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan bidang studi.
- 4) Belum semua masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak
- 5) Perlunya rintisan Wajar Dikdas 12 tahun untuk meningkatkan kualitas
- 6) Belum adanya SPM Pendidikan

c. Bidang Kesehatan

Permasalahan mendasar dalam pengembangan kesehatan, antara lain:

- 1) Masih perlunya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan, tenaga kesehatan, jaminan pembiayaan kesehatan, serta kondisi geografis yang berbeda;

- 2) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta masih tingginya angka kesakitan dan kematian yang diderita oleh masyarakat, baik berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS).
- 4) Belum mempunyai Rumah Sakit Umum Daerah yang memadai.

d. Bidang Ketenagakerjaan :

Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu masih terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha. Hal lain yang masih perlu perhatian adalah upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya.

e. Bidang Olah Raga dan Kepemudaan :

Permasalahan pembangunan keolahragaan saat ini berkaitan dengan pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Tasikmalaya dalam pentas kompetisi olahraga nasional serta terbatasnya sarana dan prasarana olahraga di masyarakat yang memadai. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya masih terbatasnya akses terhadap kesempatan usaha, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu masih adanya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

g. Bidang Kebudayaan :

Permasalahan dalam pengembangan bidang kebudayaan antara lain :

- 1) masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global.

- 2) Pemahaman masyarakat tentang arti penting kebudayaan dalam kehidupan belum berkembang dengan baik
- 3) Proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah masih rendah
- 4) Kekayaan budaya belum terkelola secara sinergis dalam rangka pembangunan daerah
- 5) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif.

h. Bidang Sosial :

Permasalahan bidang sosial adalah adanya kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masih terjadinya perselisihan akibat dari konflik antar/inter pemeluk agama. Peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial masih perlu ditingkatkan sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkapkan permasalahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masih terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan anggaran pemerintah untuk penanganan masalah-masalah sosial.

i. Bidang Keagamaan :

Dalam bidang keagamaan, permasalahan yang masih dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

- 1) Masih banyaknya lembaga pendidikan keagamaan khususnya Madrasah Diniyah yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan sarana dan prasarannya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya.
- 2) Perlu adanya kurikulum dan mata pelajaran agama yang proporsional dalam pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Belum optimalnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

4.1.2. Ekonomi

a. Bidang Investasi dan Penanaman Modal

Bidang Investasi yang mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya masih belum begitu banyak diminati mengingat kondisi dan letak geografis serta belum tergalinya potensi investasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum kondisi infrastruktur yang ada dirasakan masih terbatas (Kondisi infrastruktur yang memadai merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah). Disamping itu terdapat beberapa permasalahan lain, antara lain :

- 1) Perspektif investor bahwa prosedur perizinan dipandang perlu dipermudah dengan tidak mengesampingkan regulasi yang berlaku.

- 2) Pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan investasi sedangkan pelibatan swasta dalam berbagai program masih relatif kecil.
- 3) Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal.
- 4) Kajian potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor masih terbatas.
- 5) Iklim investasi yang kurang kondusif karena faktor perijinan dan keamanan,
- 6) Belum adanya pusat promosi dan pemasaran produk unggulan
- 7) Belum adanya Investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi pengangguran dan tidak merusak lingkungan
- 8) Perlu adanya regulasi tentang investasi yang dapat mengakomodir baik kepentingan investor maupun masyarakat.
- 9) Belum optimalnya peran KADIN
- 10) Citra Kabupaten Tasikmalaya yang kurang baik dimata investor

b. Bidang Pertanian :

Kendala dalam pengembangan pertanian secara umum mencakup, antara lain:

- 1) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani yang diakibatkan :
 - pada umumnya petani sebagai buruh tani (*database kelompok tani yang anggotanya petani penggarap dan petani pemilik*).
 - tingkat kepemilikan lahan petani relatif terbatas (kurang dari 0,5 Ha)
 - Skala usaha pertanian relatif terbatas.
- 2) Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian; Koordinasi antar institusi lintas sektoral dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan aktivitas usaha agribisnis hulu sampai hilir masih perlu ditingkatkan. Rendahnya pengembangan usaha agribisnis perdesaan
- 3) Input produksi pertanian relatif terbatas; pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha.
- 4) Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian
- 5) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas diakibatkan oleh terbatasnya sarana prasarana, rendahnya SDM petani, terbatasnya penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya.
- 6) Alih fungsi lahan pertanian yang mengurangi produksi dan produktivitas hasil pertanian.
- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen
- 8) Masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan
- 9) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
- 10) Nilai Tambah hasil pertanian yang masih rendah disebabkan produk yang dijual masih berupa bahan mentah belum melalui proses pengolahan dan pengemasan.

- 11) Rendahnya nilai tukar petani (NTP).
- 12) Masih lemahnya akses permodalan sehingga mengakibatkan sistem ijon di petani
- 13) Belum konsistennya pelaksanaan Sistem Pertanian Organik.
- 14) Belum optimalnya pemanfaatan lembaga penjamin / UEP untuk hasil produksi / pasca panen
- 15) Masih lemahnya penelitian untuk menghasilkan bibit dan produk unggulan
- 16) Belum adanya sistem pertanian terpadu

Permasalahan dalam *Sub-Bidang Pertanian Tanaman Pangan* :

- 1) masih belum adanya kawasan tanaman hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan,
- 2) belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik,
- 3) serta lahan pertanian yang berkurang kesuburannya akibat penggunaan pupuk anorganik dalam waktu yang lama.
- 4) Belum disertifikasinya produksi buah-buahan lokal

Permasalahan dalam *Sub-Bidang Peternakan*,

- 1) masih terbatasnya hasil produksi daging Kabupaten Tasikmalaya terlihat dari perbandingan antara kebutuhan dan jumlah pasokan,
- 2) masih terbatasnya populasi hewan ternak di Kabupaten Tasikmalaya, usaha peternakan pada umumnya masih dilaksanakan secara subsisten (usaha sampingan) dengan skala kecil, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam hal prasarana dan sarana, kondisi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Unit Perbibitan Ternak masih jauh dari memadai, sehingga pelayanan pemerintah dalam menunjang pembangunan peternakan tidak optimal.
- 4) Juga terbatasnya jumlah tenaga teknis lapangan (penyuluh, paramedic veteriner dan dokter hewan) sehingga pelayanan pembinaan dan penyuluhan belum dapat dilaksanakan secara optimal
- 5) terbatasnya akses peternak terhadap pendanaan di luar pemerintah khususnya dana perbankan dan sektor swasta lainnya yang menyebabkan beban pemerintah dan investasi pembangunan di sektor usaha peternakan menjadi lebih besar.

Permasalahan dalam *Sub-bidang Perikanan* yaitu :

- 1) berkurangnya kualitas, kuantitas, dan debit air di sentra perikanan air tawar sehingga produksi perikanan budidaya pada unit unit pembenihan dan pembesaran tidak optimal.
- 2) Masih rendahnya produksi budidaya perikanan air tawar, khususnya ikan gurame, ikan nilam dan udang galah.
- 3) Belum adanya pusat pembenihan ikan nilam
- 4) Masih lemahnya bantuan modal untuk budidaya perikanan air tawar

Permasalahan dalam Sub-Bidang Kehutanan yaitu :

- 1) Laju deforestasi tidak seimbang jika dibandingkan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya diakibatkan oleh pola/daur tebang pohon yang tidak memenuhi kriteria teknis, banyak pohon yang ditebang belum cukup umur sehingga setiap tahun masih ada lahan kritis yang harus ditangani.
- 2) Tidak terkendalinya penebangan hutan yang dilakukan oleh pemilik
- 3) Masih lemahnya penegakan aturan dalam tata usaha hasil hutan
- 4) Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada

Dalam Sub-Bidang Perkebunan yaitu :

- 1) Masih banyaknya tanaman yang kurang terpelihara,
- 2) Masih rendahnya tingkat produktifitas
- 3) Masih rendahnya kemampuan petani untuk memelihara kebun,
- 4) Harga jual yang fluktuatif.

Sedangkan dalam *Sub-Bidang Ketahanan Pangan :*

- 1) Masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan khususnya beras dan jagung pada saat musim paceklik,
- 2) Rendahnya pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif,
- 3) Rendahnya tingkat kemandirian pangan di desa kategori miskin,
- 4) Masih terbatasnya fasilitas lumbung pangan perdesaan.

c. Bidang Kelautan :

Pengelolaan kegiatan wilayah pesisir pantai selatan Tasikmalaya pada umumnya masih dilakukan secara sektoral, belum terpadu dan cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Belum ada keterpaduan Kerjasama antar sektor untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya.

Pemanfaatan potensi bisnis kelautan merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat Tasikmalaya Bagian Selatan, namun saat ini masih menghadapi beberapa kendala antara lain :

- 1) Dengan kondisi sarana dan prasarana saat ini, maka produksi tangkapan ikan masih jauh dibawah potensi yang ada.
- 2) Pemasalahan pengembangan komoditas kelautan berkaitan dengan investasi yang memerlukan dana sangat besar.
- 3) Jumlah dan kapasitas sarana penangkapan ikan perlu ditingkatkan, termasuk didalamnya pembangunan pangkalan pendaratan ikan yang memadai.

- 4) Masih lemahnya kemampuan kelompok nelayan sehingga belum mempunyai daya tawar yang baik.

d. Bidang Pertambangan :

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertambangan adalah :

- 1) Pemanfaatan potensi pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya belum signifikan menciptakan nilai tambah untuk menunjang pembangunan, mengingat industri hilir yang mengolah bahan tambang pada umumnya dilakukan di luar Kabupaten Tasikmalaya, sehingga nilai tambah terbesar atas bahan tambang tersebut belum dinikmati secara optimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya
- 2) Eksploitasi bahan tambang yang tidak terkendali berdampak pada rusaknya lingkungan dan infrastruktur jalan yang ada di kabupaten Tasikmalaya.
- 3) Belum adanya peta sebaran potensi pertambangan
- 4) Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian eksploitasi pertambangan

e. Bidang Pariwisata :

Kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata antara lain :

- 1) Masih banyaknya potensi wisata yang belum dikembangkan
- 2) Fasilitas dan pelayanan wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya belum cukup memadai.
- 3) Masih rendahnya minat swasta untuk mengelola potensi pariwisata.
- 4) Pemahaman masyarakat terhadap Dampak Ganda (*Multiplier Effect*) dari pengembangan pariwisata masih sempit.
- 5) Belum optimalnya penyebaran informasi dan promosi pariwisata

f. Bidang Koperasi, Industri Kecil dan Menengah :

Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat lahirnya koperasi di Indonesia masih mempunyai permasalahan dalam pengembangan koperasi antara lain :

- 1) rendahnya manajemen usaha koperasi,
- 2) terbatasnya permodalan koperasi,
- 3) rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi

Pengembangan industri kecil dan menengah Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk pengembangan industri kreatif yaitu kerajinan dan bordir. Meskipun demikian, dalam pengembangannya masih menghadapi permasalahan antara lain :

- 1) Rendahnya pengembangan usaha ekonomi produktif.
- 2) Masih rendahnya manajemen pengelolaan usaha.
- 3) Kontinuitas produk kurang terjamin, terutama berkaitan dengan pasokan bahan baku.

- 4) Posisi tawar-menawar yang masih lemah. Hal ini berkaitan dengan aspek permodalan
- 5) Jaringan informasi dan akses pasar ke tingkat nasional maupun internasional masih lemah.
- 6) Kurangnya diversifikasi dan tingkat kreativitas desain produk.
- 7) Belum optimalnya pengembangan produk yang menjadi ciri khas unggulan Kabupaten Tasikmalaya (kerajinan tangan, bordir, dan batik)
- 8) Masih rendahnya kecintaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk menggunakan produksi lokal

g. Bidang Perdagangan :

Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang perdagangan, yaitu :

- 1) Masih kurangnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam perdagangan ekspor
- 2) Masih lemahnya tata niaga perdagangan antar daerah dan ekspor
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan (Pasar).
- 4) Terbatasnya sarana promosi
- 5) Rendahnya jumlah produk unggulan Kab. Tasikmalaya yang sudah dipatenkan
- 6) Masih rendahnya penataan pedagang kreatif

4.1.3. Infrastruktur Wilayah

a. Bidang Pekerjaan Umum

Kabupaten Tasikmalaya memiliki jaringan jalan sepanjang 1.303,323 km, dari panjang jalan tersebut terdapat sepanjang 340,855 km dalam kondisi baik, 270,958 km dalam kondisi sedang, 269,635 km dalam kondisi rusak, dan 421,875 Km dalam kondisi rusak berat.

Permasalahan mendasar pada infrastruktur transportasi antara lain :

- 1) Masih banyaknya pengguna jasa jalan melebihi tonase yang telah ditentukan
- 2) Rendahnya kemantapan jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya,
- 3) Rendahnya optimalisasi fasilitas terminal angkutan penumpang,
- 4) Cakupan pelayanan jaringan jalan belum bisa optimal melayani masyarakat,
- 5) Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang,
- 6) Indeks Aksesibilitas di Kabupaten Tasikmalaya belum optimal dilayani dengan berbagai infrastruktur yang ada.
- 7) Rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan.
- 8) Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan kepada hambatan kondisi alam yang berbukit-bukit serta jangkauan wilayah yang cukup luas. Sehingga pengembangan jalan di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan biaya cukup tinggi.

Adapun permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:

- 1) Rusaknya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam;
- 2) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang ada; dan
- 3) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bidang Energi dan Kelistrikan :

Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah:

- 1) Cakupan elektrifikasi di Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 59,25% yang bersumber dari PLN dan Non PLN
- 2) Masih terbatasnya penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, biogas, tenaga surya, dan tenaga angin.

c. Bidang Telekomunikasi :

Pada bidang telekomunikasi, permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Masih terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel yang disebabkan keterbatasan anggaran dan kondisi geomorfologi Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Untuk layanan berbasis nirkabel sudah menjangkau hampir semua wilayah Kabupaten Tasikmalaya namun belum terimbangi oleh kemampuan masyarakat dalam menikmati layanan tersebut. Akses komunikasi via satelit merupakan salah satu hal mendasar yang bisa dijadikan solusi untuk menjangkau daerah terpencil namun karena biaya instalasi dan operasional yang mahal maka belum bisa teroptimalkan di Kabupaten Tasikmalaya.

d. Bidang Permukiman dan Perumahan :

Permasalahan mendasar di sektor infrastruktur air minum dan air bersih meliputi :

- 1) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum PDAM ;
- 2) Masih tingginya tingkat kebocoran air minum PDAM perkotaan dan perdesaan;
- 3) Belum sesuai kapasitas terpasang dengan kapasitas produksi infrastruktur yang ada;
- 4) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru.
- 5) Masih rendahnya cakupan air bersih khususnya untuk masyarakat perdesaan yang disebabkan karena kondisi geografis, terbatasnya sumber air serta minimnya sarana dan prasarana penunjang air bersih.

Permasalahan yang ada pada infrastruktur pengolahan limbah domestik meliputi :

- 1) Belum seimbangnya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan pertumbuhan penduduk;
- 2) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesanitasian;
- 3) Belum adanya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)

Untuk aspek perumahan, permasalahan yang mendasar adalah :

- 1) masih adanya ketimpangan antara ketersediaan perumahan dengan kebutuhan perumahan (*backlog*),
- 2) masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan.

4.1.4. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan dasar dalam kerangka pengembangan wilayah. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang berkenaan dengan :

- 1) Pengaturan
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;
 - Belum adanya dokumen RDTR untuk kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh serta kawasan potensial
 - Belum semua dokumen perencanaan tata ruang diperdakan
 - Banyaknya peraturan pemerintah pusat yang berkaitan dengan Tata Ruang yang terlambat disosialisasikan ke daerah sehingga produk rencana tata ruang yang telah tersusun terus mengalami evaluasi dan revisi
- 2) Pembinaan
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.
 - Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi mengenai perencanaan tata ruang
- 3) Pelaksanaan
 - Masih tingginya peta konflik antara peta struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi eksisting;
 - Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan daerah rawan bencana secara tidak langsung membatasi peruntukan kawasan budidaya;
 - Masih ditemuinya pengembangan wilayah sektoral yang tidak mengacu pada dokumen tata ruang yang ada;
- 4) Pengawasan
 - Adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan pola ruang;

Adapun permasalahan yang dihadapi pada bidang pertanahan adalah :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap identitas kepemilikan tanah
- 2) Masih banyaknya lahan tidur
- 3) Masih adanya konflik pemilikan tanah diantara masyarakat
- 4) harga tanah di lokasi yang akan dibebaskan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga dana yang sudah dianggarkan tidak mencukupi.

4.1.5. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tasikmalaya terakhir kurang menggambarkan keseimbangan lingkungan hidup yang baik, antara lingkungan ekosistem alami dengan lingkungan ekosistem budidaya/buatan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

- 1) kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan perundangan;
- 2) pembangunan yang tidak sesuai tata ruang;
- 3) kerusakan hutan atau deforestasi akibat penebangan yang tidak terkendali

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain :

- 1) Luas eksisting kawasan lindung masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, yaitu 64,32 % dari total luas wilayah.
- 2) Adanya degradasi pantai yang disebabkan abrasi baik oleh faktor alam maupun manusia.

Masalah persampahan terus mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktifitas perekonomian. Permasalahan sampah sampai saat ini menjadi perhatian. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun permasalahan persampahan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

- 1) Belum ada Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan persampahan
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana operasional persampahan
- 3) Kurangnya pegawai yang mengelola persampahan
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 5) Pengelolaan sampah di TPA masih menggunakan cara-cara *open dumping*.

4.1.6. Politik

Perkembangan kehidupan demokrasi perlu ditunjang dengan penguatan institusi politik dan peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi belum berperan secara maksimal.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 1999, 2004, dan 2009 baik dalam pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tahun 2011. Namun dalam pelaksanaannya, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya cenderung semakin menurun. Permasalahan lain yang dihadapi dalam bidang politik antara lain :

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik
- 2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih perlu ditingkatkan.
- 3) Lembaga politik belum memberikan secara maksimal proses peningkatan kesadaran politik warga (pendidikan politik)

4.1.7. Hukum

Permasalahan Pembangunan Bidang Hukum antara lain :

- 1) Belum adanya *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah,
- 2) Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia di bidang hukum
- 3) Masih rendahnya budaya hukum masyarakat
- 4) Masih banyaknya Produk hukum daerah yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Politik hukum pemerintah daerah belum berorientasi kepada kepentingan pembangunan daerah

4.1.8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun dalam penyampaiannya terkadang menggunakan cara-cara yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain :

- 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan,

- 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.
- 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.
- 4) Adanya tindakan-tindakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.
- 5) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat

4.1.9. Aparatur dan Pelayanan Publik

Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur dan pelayanan publik antara lain:

- 1) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi kurang proporsional,
- 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- 3) Sistem dan prosedur kerja serta pelayanan publik di lingkungan aparaturnya daerah masih perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat melalui peningkatan nilai-nilai etika dan budaya kerja, disiplin kerja, etos kerja, serta produktivitas kerja.
- 4) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
- 5) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai

4.1.10. Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang Keuangan daerah dan Pengelolaan aset daerah antara lain :

- 1) Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca aset yang belum optimal .
- 2) pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi.
- 3) Belum selesainya pembagian dan penyerahan aset Kabupaten yang berada di Wilayah Kota Tasikmalaya
- 4) sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan sehingga perlu adanya upaya menggali sumber pendapatan lain yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- 5) Masih adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi yang dalam pembagiannya tidak proporsional dan cenderung disamaratakan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

- 6) Belum proporsionalnya belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.1.11. Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah belum terlaksana secara optimal serta menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan dari berbagai level pemerintahan serta belum adanya peraturan pelaksanaan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara komprehensif.

Upaya penguatan lembaga kecamatan dalam koridor desentralisasi di Kabupaten Tasikmalaya telah dilakukan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat melalui Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2009, akan tetapi pelaksanaannya saat ini belum optimal karena belum diikuti dengan keberpihakan anggaran, personil dan peralatan atau sarana dan prasarana.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan desa antara lain :

- 1) masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa.
- 2) terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa,
- 3) terbatasnya sumber pendanaan desa, serta belum optimalnya penggalian potensi kekayaan desa
- 4) belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa,
- 5) masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan desa antara lain :

- 1) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
- 2) menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat dalam gerakan pembangunan desa.

4.2. Isu Strategis

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan;
2. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan serta Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman;
3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun;
4. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Perdesaan;
6. Pengendalian Laju Pertumbuhan penduduk;
7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
8. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Proses Produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir;

9. Penanganan Aset Pemerintah Kabupaten yang ada di Wilayah Kota;
10. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan;
11. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produksi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
12. Peningkatan Kualitas penyelenggaraan penataan ruang dalam penyelenggaraan pembangunan
13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
14. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

4.3. Isu Strategis Kewilayahan

Berdasarkan tinjauan kewilayahan dari potensi ekonomi dan sosial, terdapat indikasi bahwa perkembangan wilayah dan kota-kota di bagian Utara dan Tengah lebih cepat dibandingkan dengan wilayah dan kota-kota di bagian Selatan Kabupaten Tasikmalaya. Ketidak merataan terutama karena :

- 1) Belum termanfaatkannya secara optimal potensi produksi yang berada di bagian Selatan.
- 2) Keadaan geografis wilayah bagian Selatan yang menyebabkan belum berkembangnya bagian wilayah Selatan.
- 3) Kondisi fisik dasar yang tidak menunjang untuk pengembangan pertanian.

Menyelesaikan perkembangan wilayah yang belum merata akan memerlukan suatu sistematisasi perwilayahan pembangunan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya pemeranan wilayah yang sudah berkembang untuk menjadi pendorong bagi perkembangan wilayah lainnya.

Dengan dasar ini maka perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Tasikmalaya perlu membuka dan meningkatkan fungsi pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu kesatuan sistem yang sinergis antara wilayah Selatan, Tengah dan Utara dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya

Hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini merupakan modal dasar dan sebagai kekuatan serta peluang untuk meningkatkan pembangunan selanjutnya. Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya alam yang sudah banyak dimanfaatkan, namun demikian potensinya belum secara optimal dapat dikembangkan termasuk di dalamnya sumberdaya pertanian, pertambangan, perindustrian dan pariwisata. Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada, perlu didukung pembangunan infrastruktur dasar yang memadai, diantaranya jalan, jembatan, sumber daya air dan energi listrik.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah : ***"Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius / Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025"***. yang dijabarkan ke dalam 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari.

Karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya, maka visi dan misi RPJMD akan mengacu kepada visi dan misi RPJPD.

5.1. Visi

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 20011-2015 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, listrik, air dan irigasi), keterbatasan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, perkotaan dan kawasan pusat pemerintahan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan perintisan wajar dikdas 12 tahun, revitalisasi pertanian dan kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berbasis perdesaan, meningkatkan prasarana dan sarana pertanian serta mensinergitaskan usaha agribisnis dari hulu sampai hilir, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa, penanganan aset Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah Pemerintah Kota, serta peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan,

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011–2015 adalah:

"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, UNGGUL DAN MANDIRI BERBASIS PERDESAAN"

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut :

Religius Islami :

Religius sesungguhnya secara sederhana merupakan pencerminan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya, jadi makna religius disini mencakup seluruh umat pemeluk agama. Religius disini lebih mengarah kepada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, lebih menekankan kepada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan tidak terjebak dalam bentuk formal keagamaan.

Islami adalah kata sifat dari Islam. Islam secara etimologi berarti kepasrahan dan ketundukan kepada "Sang Khaliq". Islam secara semantik berarti selamat, Islami memberikan pengertian menebarkann keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat dengan dilandasi oleh prinsip keadilan dan persamaan didepan sang Khaliq.

Religius Islami merupakan sikap keberagamaan yg dicerminkan dalam perilaku keseharian di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yg menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, persamaan (equal), menghargai perbedaan (pluralitas) dsb-nya

Pengkalimatan "**Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami...**" sebagaimana terumuskan dalam "visi" dimaksud adalah menjadikan spirit keagamaan Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasayarakat. Nilai-nilai Islam yg universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Unggul dan Mandiri :

Unggul dalam kamus bahasa Indonesia berarti lebih tinggi (pandai, baik, kuat) dari yang lain atau terbaik, sedangkan mandiri berarti dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada pada orang lain.

Unggul sebagaimana terumuskan dalam "visi" adalah unggul dari berbagai aspek, terutama dalam sumberdaya manusia, sedangkan mandiri menunjukkan kepada situasi dan kondisi masyarakat yg mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan kemampuan sendiri.

Unggul dan mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai dengan makin tingginya tingkat pendidikan serta meningkatnya partisipasi pendidikan. Dalam bidang kesehatan ditandai dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali serta kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin dari tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan dan rata-rata pembagian ekonomi suatu daerah menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju.

Berbasis Perdesaan :

Mengingat sebagian besar wilayah dan penduduk kabupaten Tasikmalaya ada di perdesaan, maka perencanaan pembangunan disusun berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada di perdesaan. Penggalan potensi desa tersebut harus diberengi dengan peningkatan sumberdaya masyarakat desa, agar masyarakat desa tidak menjadi penonton terhadap pembangunan yang sedang berlangsung di desa. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa orientasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa. Dengan orientasi pembangunan ke desa, akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas warga desa dan dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan.

5.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis.
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan

memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:

Visi : **"Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius Islami, Unggul dan Mandiri Berbasis Perdesaan"**

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah, Berkualitas dan Mandiri	1. Mewujudkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya nilai-nilai empati masyarakat terhadap kerawanan sosial
		2. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan piritual.
		3. Meningkatnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
		4. Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
	2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan perbaikan tata kelola	1. Tercapainya wajar dikdas 9 tahun
		2. Terlaksananya rintisan wajar 12 tahun
		3. Meningkatnya Lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
		4. Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal
		5. Tersedianya bantuan beasiswa/ keringanan biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu serta siswa berprestasi
		6. Meningkatnya kreatifitas siswa di semua jenjang pendidikan
		7. Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat
	3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat	1. Meningkatnya kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang didukung oleh kemandirian masyarakat
		2. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		3. Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi dan berkembangannya Tanaman Obat Keluarga
		4. Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (Nasional Rp. 9000,-/org/tahun) serta pengawasan obat dan makanan

Misi	Tujuan	Sasaran
		5. Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan /spesialis yang bermutu
		6. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit
		7. Meningkatnya jumlah, jenis, dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar
		8. Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi
	4. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, mandiri dan berbudaya	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas
		2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja.
		3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk
		4. Terwujudnya Data Kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan.
		5. Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
		6. Meningkatnya kualitas dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
		7. Meningkatnya prestasi dalam bidang olahraga
		8. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis	1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa	1. Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/masyarakat
		2. Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan berdasarkan potensi lokal
		3. Terwujudnya pasar agribisnis
	2. Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.	1. Meningkatnya kemampuan dan peran koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah
		2. Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat
		3. Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif
	3. Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas ekonomi, sosial, dan budaya	1. Terwujudnya desa unggulan

Misi	Tujuan	Sasaran
	serta merupakan data base pengambilan kebijakan	
		2. Terwujudnya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)
		3. Terwujudnya Desa sebagai Pusat Pembangunan Daerah
		4. Berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan
		5. Mempertahankan budaya gotong royong dalam penguatan pembangunan desa
		6. Tersedianya data potensi desa
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik	1. Tertatanya kelembagaan Organisasi Perangkat daerah yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik
		2. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		3. Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel
		4. Terwujudnya keselarasan dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya

Misi	Tujuan	Sasaran
		5. Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan
		6. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai
		7. Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan
		8. Terwujudnya sistem Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		9. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan kedepan, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
		10. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
		11. Terkendalinya manajemen pembangunan
	2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja	1. Terpenuhinya kualitas / kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatnya pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi
		3. Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif
	3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	1. Mencegah terjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat
	4. Terwujudnya Penegakan Perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	1. Meningkatnya Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
	5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan	1. Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan	1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.	1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten
		3. Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah yang baik
		4. Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dengan memperhatikan pembangunan perdesaan.	1. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan.
		2. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan yang tertib, aman dan nyaman.
		3. Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perkotaan yang tertib, aman dan nyaman.
		4. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat
		5. Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi antar wilayah.
		6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan.
		7. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.

Misi	Tujuan	Sasaran
	3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya produktivitas sumber daya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan.
	4. Meningkatkan Ketersediaan Energi	1. Meningkatnya ketersediaan energi terutama untuk daerah perdesaan.
	5. Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	1. Terlaksananya mitigasi dan penanggulangan bencana alam.

BAB VI

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap Misi, maka perlu disusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD ini.

6.1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat rawan sosial dan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan serta kesadaran kehidupan beragama.
3. Meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis pesantren
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah
5. Meningkatkan APK dan APM di jenjang pendidikan dasar
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
7. Meningkatkan APK dan APM di jenjang pendidikan menengah
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan menengah
9. Meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
10. Meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
11. Meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitasi untuk pemberian beasiswa di semua jenjang pendidikan
12. Meningkatkan kreativitas siswa melalui berbagai event perlombaan
13. Mengembangkan budaya baca dan perpustakaan khususnya di perdesaan
14. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan lingkungan sehat
15. Meningkatkan pelayanan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
16. Meningkatkan gizi masyarakat dan Keluarga sadar gizi
17. Meningkatkan cakupan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat
18. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya
19. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas

20. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas
21. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita
22. Meningkatkan pelayanan, perlindungan, santunan dan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
23. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja serta fasilitasi perlindungan bagi tenaga kerja
24. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan upaya penyebaran penduduk
25. Meningkatkan pelayanan dan penataan administrasi kependudukan
26. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
27. Peningkatan peran organisasi / lembaga kemasyarakatan di perdesaaan dalam pembangunan desa
28. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah
29. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga serta olahragawan berprestasi secara berkelanjutan
30. Mengembangkan nilai dan pengelolaan budaya lokal

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap
3. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata lokal
4. Meningkatkan daya saing industri kecil
5. Meningkatkan rehabilitasi lahan dan fungsinya yang berkelanjutan (ekonomi, ekologi, sosial)
6. Meningkatkan sumberdaya manusia dan teknologi kehutanan dan perkebunan
7. Meningkatkan sistem usaha agribisnis berbasis komoditas unggulan dengan dukungan permodalan
8. Memperkuat kelembagaan, sumberdaya manusia dan sistem pembiayaan Koperasi dan UMKM
9. Menciptakan BUMD yang sehat
10. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen
11. Mengembangkan pasar-pasar tradisional
12. Meningkatkan kemandirian desa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Meningkatkan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah
2. Menyediakan regulasi / produk hukum daerah yang yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan kapasitas Lembaga legislatif
4. Meningkatkan koordinasi, keselarasan, dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya
5. Meningkatkan pengelolaan dan penyelamatan dokumen / arsip daerah
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
7. Meningkatkan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
8. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
10. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah serta aset daerah
11. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
12. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa
13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan karier aparatur berbasis kompetensi
14. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian
15. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek KKN
16. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
17. Meningkatkan Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
18. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat serta mengembangkan wawasan kebangsaan

Misi 4 :

Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah/Perdesaan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan.

1. Melaksanakan penataan ruang wilayah dengan pendekatan partisipatif
2. Menyusun Landasan Hukum pengaturan rencana tata ruang
3. Meningkatkan kinerja penataan ruang dan pemahaman masyarakat serta aparatur terhadap rencana tata ruang wilayah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi penguasaan dan pemanfaatan tanah
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perdesaan

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana permukiman perdesaan
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana permukiman perkotaan
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi antar wilayah
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengairan
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan
13. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
15. Meningkatkan pelayanan dan ketersediaan energi serta ketenagalistrikan bagi masyarakat
16. Menyusun mitigasi bencana dan fasilitasi serta koordinasi penanggulangan bencana alam

6.2. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya untuk kurun waktu 2011 – 2015 berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan. Kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan misi dan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

1. Bidang Sosial Keagamaan.
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar
 - b. Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - c. Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan
 - d. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan
 - e. Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji
 - f. Mengikutsertakan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional
 - g. Meningkatkan pendidikan keagamaan secara proporsional
 - h. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan koperasi di pondok pesantren
 - i. Meningkatkan lembaga keuangan syariah
 - j. Peningkatan hidup bersih dan sehat
 - k. Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi umat
 - l. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bazda

2. Bidang Pendidikan,
 - a. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar.
 - b. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan menengah
 - c. Peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
 - d. Peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.
 - e. Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu secara selektif dan proporsional serta beasiswa bagi siswa berprestasi.
 - f. Peningkatan kreatifitas disemua disemua jenjang pendidikan ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
3. Bidang Perpustakaan
 - a. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
4. Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat.
 - b. Peningkatan upaya penemuan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular
 - c. Peningkatan gizi keluarga
 - d. Pengembangan penggunaan tanaman obat keluarga
 - e. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
 - g. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu
 - h. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.
 - i. Peningkatan kualitas, kuantitas, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan
 - j. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak dan lansia
5. Bidang Sosial
 - a. Mewujudkan kemandirian pakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Menciptakan administrasi kependudukan yang akuntabel
7. Bidang Transmigrasi
 - a. Peningkatan penyebaran penduduk
8. Bidang Ketenagakerjaan :
 - a. Mengembangkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - b. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diperdesaan dalam pembangunan desa.

10. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
11. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Peningkatan peran pemuda dan organisasi kepemudaan
 - b. Peningkatan pembinaan olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olahraga
12. Bidang Kebudayaan
 - a. Peningkatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah.

Misi 2 :

Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis

1. Bidang Pertanian (termasuk peternakan)
 - a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - b. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan
 - c. Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis
 - d. Mengembangkan usaha agribisnis perdesaan berdasarkan potensi lokal dengan dukungan permodalan
2. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan dan kelautan.
 - b. Pengembangan sentra komoditas unggulan dengan pendekatan kawasan
3. Bidang Pariwisata
 - a. Mengembangkan kawasan wisata dan budaya daerah
4. Bidang Industri
 - a. Mewujudkan sentra-sentra industri kecil dan menengah khususnya dalam bidang industri (Batik, bordir, golok manonjaya, anyaman bambu)
5. Bidang Kehutanan (dan Perkebunan)
 - a. Mengembangkan penanganan rehabilitasi hutan, lahan kebun dan DAS
 - b. Peningkatan fungsi hutan, lahan dan kebun meliputi fungsi produksi (ekonomi) konservasi (ekologi) dan sosial (kesejahteraan)
 - c. Memberikan kesempatan kepada aparat, petani dan pengusaha kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
 - d. Pengembangan agribisnis yang berbasis perdesaan dan pemanfaatan SDA dan SDM
6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri
7. Bidang Penanaman Modal
 - a. Mewujudkan PD. BPR yang berdaya saing dan sehat

- b. Mewujudkan PDAM yang sehat
 - c. Menciptakan peluang investasi bagi investor dan mengembangkan arus investasi.
8. Bidang Perdagangan
- a. Mengamankan jalur distribusi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya melalui pengawasan dan monitoring
 - b. Menginformasikan arti pentingnya Undang- Undang Perlindungan Konsumen
 - c. Menciptakan kelancaran Peneraan UTTP dan BDKT
 - d. Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada pelaku usaha
 - e. Pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan
 - f. Memberikan kemudahan prosedur ekspor dan impor
 - g. Menciptakan sarana perdagangan yang memadai untuk memperlancar aktifitas perdagangan
9. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- a. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu
10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Mewujudkan desa unggul dan mandiri
 - b. Mengembangkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam pembangunan desa
 - c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa
 - d. Pengembangan profil desa yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
11. Bidang Ketahanan Pangan
- a. Distribusi dan Akses Pangan
 - b. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
 - d. Penanganan Kerawanan Pangan

Misi 3 :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
 - b. Penataan sistem hukum di daerah
 - c. Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran lembaga legislatif
 - d. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - e. Pemenuhan biaya rutin kebutuhan dasar operasional kerja SKPD
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan

- g. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan analisis terapan penyelenggaraan pemerintahan
 - h. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - i. Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah
 - j. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa
 - k. Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perencanaan dan pengembangan karier.
 - l. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian dan sistem manajemen kinerja kepegawaian.
 - m. Peningkatan sistem pengawasan internal
 - n. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan KKN
 - o. Penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Bidang Kearsipan
 - a. Peningkatan administrasi kearsipan daerah
 3. Bidang Perencanaan Pembangunan
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
 - b. Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
 5. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - a. Peningkatan teknologi, informasi dan komunikasi pemerintah

Misi 4 :

Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah/Perdesaan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan.

1. Bidang Penataan Ruang
 - a. Menyelenggarakan penataan ruang dengan peran aktif masyarakat
 - b. Pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang
 - c. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat
2. Bidang Pertanahan
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan catur tertib pertanahan
3. Bidang Perumahan

- a. Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perdesaan sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman
 - b. Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perkotaan sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan aman dan nyaman
4. Bidang Pekerjaan Umum
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan
 - b. Peningkatan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah
 - c. Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat.
5. Bidang Perhubungan
- a. Peningkatan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah.
6. Bidang Energi, dan Sumber Daya Mineral
- a. Pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
7. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan
 - b. Peningkatan upaya penanggulangan bencana alam
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan

6.3. Kebijakan Kewilayahan

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2016 tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- c. pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- d. pengembangan sistem perkotaan – perdesaan;

- e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- f. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- g. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah

Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas:

1. Rencana sistem pusat kegiatan
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah
 - a. rencana sistem prasarana utama yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - (2) rencana sistem jaringan perkeretapian; dan
 - (3) rencana sistem jaringan transportasi laut.
 - b. rencana sistem prasarana lainnya, yaitu:
 - (1) rencana sistem jaringan prasarana energi;
 - (2) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - (3) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (4) rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Pengembangan sistem perkotaan tidak terlepas dari pedoman yang menjadi acuan penataan ruang kabupaten yaitu Perda No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Perda Nomor 22 tentang RTRW Provinsi di Kabupaten Tasikmalaya. Sistem perkotaan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada tabel 6.2.1. sebagai berikut:

Tabel 6.2.1. Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Fungsi kota	Kriteria
1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ▪ Diusulkan oleh pemerintah kabupaten

No	Fungsi kota	Kriteria
2.	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp),	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beberapa pusat yang berpotensi/ dipromosikan untuk dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal
3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪ pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi ▪ pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan satu pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWP yaitu Singaparna dan Karangnunggal sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya.
- 2) Mempromosikan beberapa pusat kegiatan lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang berpotensi untuk dikembangkan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), diantaranya:
 - a) Kawasan Perkotaan Manonjaya; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Ciawi.
- 3) Penetapan ibukota kecamatan lainnya yang tidak termasuk dalam PKL dan PKLp di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Rajapolah;
 - b) Kawasan Perkotaan Mangunreja;
 - c) Kawasan Perkotaan Taraju;
 - d) Kawasan Perkotaan Cipatujah;
 - e) Kawasan Perkotaan Bantarkalong;
 - f) Kawasan Perkotaan Cibalong;
 - g) Kawasan Perkotaan Cikatomas; dan
 - h) Kawasan Perkotaan Cineam.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersebut berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan terutama pusat-pusat kegiatan/perkotaan.

Adapun rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya dengan menetapkan 1 (satu) dan atau beberapa desa yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan pada masing-masing wilayah kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan di Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

1. Kecamatan Kadipaten meliputi:
 - a. Desa Mekarsari; dan
 - b. Desa Kadipaten.
2. Kecamatan Pagerageung meliputi:
 - a. Desa Pagerageung; dan
 - b. Desa Sukamaju.
3. Kecamatan Sukaresik meliputi:
 - a. Desa Sukamenak;
 - b. Desa Tanjungsari; dan
 - c. Desa Sukaresik.
4. Kecamatan Jamanis meliputi:
 - a. Desa Condong;
 - b. Desa Karangmulya; dan
 - c. Desa Tanjungmekar.
5. Kecamatan Sukahening meliputi:
 - a. Desa Banyurasa; dan
 - b. Desa Sukahening.
6. Kecamatan Sukaratu meliputi:
 - a. Desa Gunungsari; dan
 - b. Desa Sukaratu.
7. Kecamatan Cisayong meliputi:
 - a. Desa Cisayong;
 - b. Desa Sukasetia; dan
 - c. Desa Sukaraharja
8. Kecamatan Sariwangi meliputi:
 - a. Desa Sukamulih; dan
 - b. Desa Sirnasari.
9. Kecamatan Leuwisari meliputi:
 - a. Desa Ciawang; dan
 - b. Desa Jayamukti.
10. Kecamatan Cigalontang meliputi:
 - a. Desa Sukamanah; dan
 - b. Desa Lengkongjaya.
11. Kecamatan Salawu meliputi:
 - a. Desa Salawu; dan
 - b. Desa Neglasari.
12. Kecamatan Tanjungjaya meliputi:
 - a. Desa Sukanagara; dan

- b. Desa Tanjungjaya.
13. Kecamatan Sukarame meliputi:
 - a. Desa Sukarame; dan
 - b. Desa Wargakerta.
 14. Kecamatan Sukaraja meliputi:
 - a. Desa Mekarjaya; dan
 - b. Desa Janggala.
 15. Kecamatan Padakembang meliputi:
 - a. Desa Rancapaku; dan
 - b. Desa Padakembang.
 16. Kecamatan Puspahiang meliputi:
 - a. Desa Puspahiang; dan
 - b. Puspasari.
 17. Kecamatan Sodonghilir meliputi:
 - a. Desa Cukangkawung;
 - b. Desa Parumasan; dan
 - c. Desa Sodonghilir.
 18. Kecamatan Bojunggambir meliputi:
 - a. Desa Bojunggambir; dan
 - b. Desa Girimukti.
 19. Kecamatan Jatiwaras meliputi:
 - a. Desa Kaputihan; dan
 - b. Desa Jatiwaras.
 20. Kecamatan Cikalong meliputi:
 - a. Desa Singkir; dan
 - b. Desa Cikalong.
 21. Kecamatan Gunungtanjung meliputi:
 - a. Desa Bojongsari; dan
 - b. Desa Gunungtanjung.
 22. Kecamatan Salopa meliputi:
 - a. Desa Karyawangi;
 - b. Desa Kawitan; dan
 - c. Desa Karyamandala.
 23. Kecamatan Karangjaya meliputi:
 - a. Desa Karanglayung; dan
 - b. Desa Karangjaya.
 24. Kecamatan Bojongasih meliputi:
 - a. Desa Bojongasih; dan

- b. Desa Toblongan.
25. Kecamatan Parungponteng meliputi:
- a. Desa Cigunung; dan
 - b. Desa Parungponteng.
26. Kecamatan Culamega meliputi:
- a. Desa Cikuya; dan
 - b. Desa Cintabodas.
27. Kecamatan Pancatengah meliputi:
- a. Desa Tonjong; dan
 - b. Desa Cibongas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat pada Tabel 6.2.2. sebagai berikut :

Tabel 6.2.2. Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Tasikmalaya

No.	Nama Kecamatan	Sistem Perkotaan		Sistem Perdesaan
1	Ciawi		PKLp	
2	Kadipaten			PPL
3	Pagerageung			PPL
4	Sukaresik			PPL
5	Jamanis			PPL
6	Sukahening			PPL
7	Rajapolah			PPK
8	Sukaratu			PPL
9	Cisayong			PPL
10	Singaparna	PKL		
11	Sariwangi			PPL
12	Leuwisari			PPL
13	Cigalontang			PPL
14	Salawu			PPL
15	Mangunreja			PPK
16	Tanjungjaya			PPL
17	Sukarame			PPL
18	Sukaraja			PPL
19	Padakembang			PPL
20	Taraju			PPK
21	Puspahiang			PPL
22	Bojonggambir			PPL
23	Sodonghilir			PPL
24	Manonjaya		PKLp	
25	Jatiwaras			PPL
26	Cineam			PPK
27	Karangjaya			PPL
28	Salopa			PPL
29	Gunungtanjung			PPL
30	Karangnunggal	PKL		
31	Cipatujah			PPK

No.	Nama Kecamatan	Sistem Perkotaan		Sistem Perdesaan
32	Cibalong		PPK	
33	Parungponteng			PPL
34	Bantarkalong		PPK	
35	Bojongasih			PPL
36	Culamega			PPL
37	Cikalong			PPL
38	Pancatengah			PPL
39	Cikatomas		PPK	

Sumber: RTRW Kabupaten Tasikmalaya, Hasil Analisis

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya.

Rencana kawasan lindung dalam lingkup wilayah kabupaten mencapai total luas **173.686,72** ha atau **64,12** %, dan rencana kawasan budidaya, yaitu **97.195,04** ha atau **35,88** %. Uraian selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.2.3**.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan RPJP dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Tabel 6.2.3. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
A	KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Konservasi	24,157	0,01
2	Hutan Lindung	16.102,604	5,94
3	Kaw. Gn Berapi Daerah Bahaya	6.074,870	2,24
4	Kaw. Gn Berapi Daerah Terlarang	1.186,017	0,44
5	Kaw. Rawan Grkan Tanah Rendah	34.994,973	12,92
6	Kaw. Rawan Grkan Tanah Menengah	70.319,677	25,96
7	Kaw. Rawan Grkan Tanah Tinggi	17.389,499	6,42
8	Kaw. Rawan Tsunami	4.848,306	1,79
9	Kaw. Resapan Air	14.686,445	5,42
10	Sempadan Laut	475,330	0,18

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
11	Sempadan Sungai	7.584,843	2,80
	TOTAL KAWASAN LINDUNG	173.686,721	64,12
B	KAWASAN BUDIDAYA		
1	Enclave	788,279	0,29
2	Hutan Produksi	2.852,646	1,05
3	Hutan Produksi Terbatas	25.502,798	9,41
4	Kaw. Pedesaan	13.976,558	5,16
5	Kaw. Perkotaan	2.051,701	0,76
6	Lahan Basah	44.646,370	16,48
7	Lahan Kering	1.195,556	0,44
8	Perkebunan	6.181,129	2,28
	TOTAL KAWASAN BUDIDAYA	97.195,037	35,88
	TOTAL KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA	270.881,758	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Tasikmalaya, Hasil Rencana 2009

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, juga telah ditetapkan Kawasan strategis Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis di Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :

1. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat.
Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Tasikmalaya adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi dari sudut **Pertahanan dan Keamanan**. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional;
 - b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan
 - c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas

Didasari analisa yang bertumpu dari sudut pertahanan dan keamanan, kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berupa kawasan strategis Pulau Manuk di Kecamatan Cicalong.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 6.2.4 berikut ini :

Tabel 6.2.4. Kawasan Strategis di Kabupaten Tasikmalaya

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
1	KSK dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3. Potensi ekspor; 4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; 7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau 8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkotaan Ciawi b. Kawasan Perkotaan Karangnunggal c. Kawasan Perkotaan Manonjaya d. Kawasan Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah e. Kawasan wisata Pantai Karangtawulan f. Kawasan Wisata Alam Galunggung
2	KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 4. Tempat perlindungan peninggalan budaya; 5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 6. Tempat yang memiliki potensi pengembangan kualitas manusia (Akhlaq, Iman dan takwa) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Budaya Kampung Naga b. Kawasan wisata Ziarah Pamijahan
3	KSK dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Strategis Kabupaten Geothermal Karaha Bodas

NO	KRITERIA	SUB KRITERIA	PENETAPAN
	dan/atau Teknologi Tinggi	<p>pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;</p> <p>2. Sumber daya alam strategis;</p> <p>3. Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;</p> <p>4. Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau</p> <p>5. Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.</p>	<p>b. Kawasan Strategis Batu Mulia Jasper di Desa Buni Asih Kecamatan Pancatengah</p> <p>c. Kawasan Plasma Nuftah Sirah Cimunjul</p>

Kawasan pusat pemerintahan yang ditetapkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dilihat dari posisi lokasi dan fungsi serta perannya merupakan kawasan yang sangat strategis dalam upaya pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan.

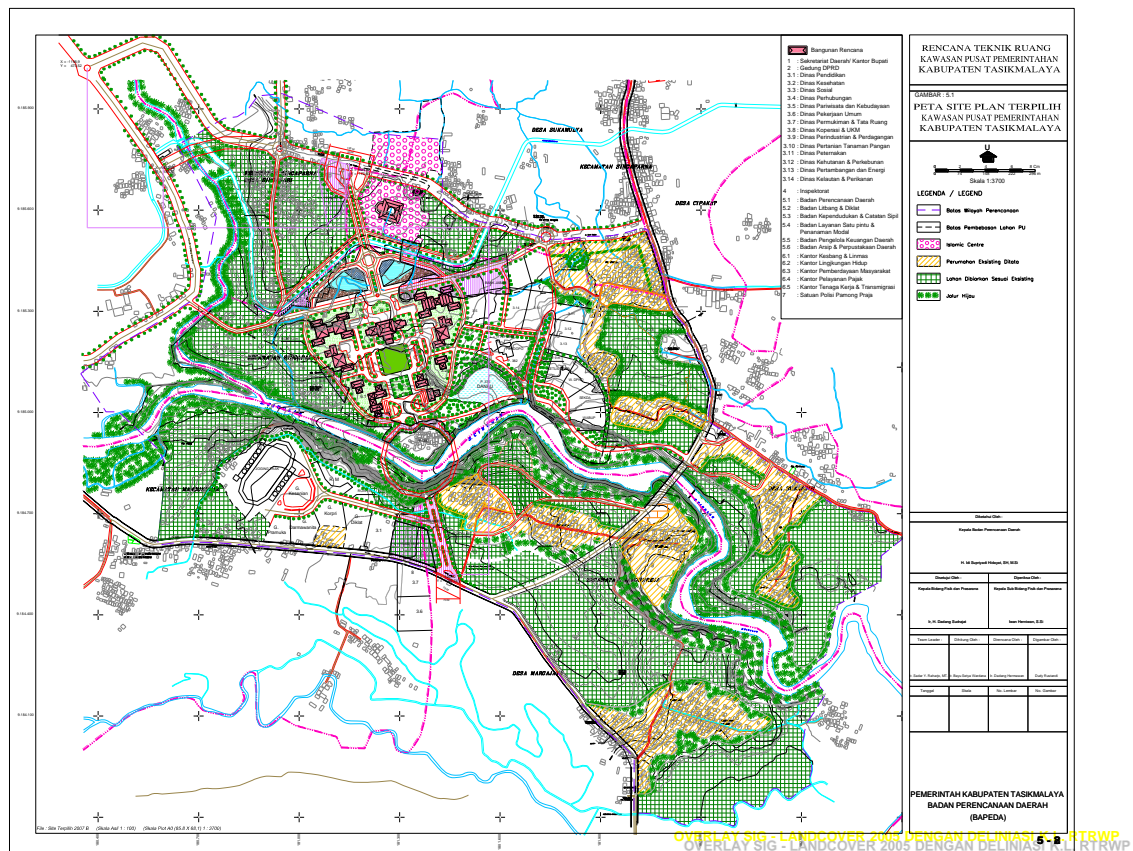
Berdasarkan perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya, mengisyaratkan bahwa Singaparna sebagai kota utama di Kabupaten Tasikmalaya yang akan berperan sebagai gerbang utama pengembangan wilayah, yaitu sebagai Kota Pusat Kegiatan Wilayah (KPKW) dan juga sebagai Kota Pusat Kegiatan Sub Wilayah (KPKSW) dari Wilayah Pengembangan Utama Tengah (WPU-Tengah). Dan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Detail Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Pasal 7, 9, menyatakan bahwa Wilayah Fungsional Ibukota Kabupaten Tasikmalaya seluas \pm 4.139,70 ha, meliputi 16 Desa di 6 Kecamatan yaitu

1. Kecamatan Singaparna: Desa Sukahening, Cikunten, Singasari, Singaparna, Sukamulya, Sukaasih, Cipakat, Cintaraja, Cikunir, dan Cikadongdong.
2. Kecamatan Mangunreja: Desa Mangunreja, dan Margajaya.
3. Kecamatan Sariwangi: Desa Selawangi.
4. Kecamatan Leuwisari :Desa Arjasari.
5. Kecamatan Padakembang: Desa Cilampunghilir;
6. Kecamatan Sukarame: Desa Sukarame.

Adapun Kawasan Pusat Pemerintahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya meliputi area seluas \pm 247 ha, terdiri dari :

- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan terletak di Desa Sukaasih, dan Sukamulya Kecamatan Singaparna.
- Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan terletak di Desa Singasari, Sukamulya, Kecamatan Singaparna, serta Desa Mangunreja dan Margajaya Kecamatan Mangunreja.

RTRK PUSAT PEMERINTAHAN



Untuk mewujudkan kawasan strategis pusat pemerintahan ibukota kabupaten dan menunjang pertumbuhan, perkembangan serta memperkuat dan memperlancar mobilitas, aksesibilitas pergerakan orang maupun barang dari dan ke wilayah Ibukota, direncanakan beberapa prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015 meliputi kegiatan :

1. Pembebasan Lahan
2. Pematangan Lahan dan Pembuatan Badan Jalan
3. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan
4. Pembangunan Gedung Kantor
5. Pembangunan Perkerasan Jalan
6. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman
7. Pembangunan Utilitas
 - a. Jaringan Air Bersih
 - b. Jaringan Listrik
 - c. Jaringan Telepon
 - d. Jaringan drainase perkotaan
 - e. Jaringan teknologi komunikasi dan informasi

6.4. Kebijakan Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun kedepan, maka kebijakan pendanaan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan anggaran berorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji serta belanja tetap.
2. Mengimplementasikan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen).
3. Meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah
4. Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk program pembangunan daerah yang menjadi unggulan, seperti program gerbang desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur wilayah dan pengembangan agribisnis.
5. Konsistensi pengembangan agribisnis melalui alokasi belanja langsung untuk bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar minimal 9 % dari total belanja langsung.
6. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi dan agribisnis, maka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, pengairan dan listrik, akan diarahkan pada sentra-sentra produksi di perdesaan. Proporsi belanja langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini sebesar minimal 18 % dari total belanja langsung.
7. Memberikan perhatian khusus kepada 10 kecamatan yang mempunyai nilai IPM terendah untuk memperoleh prioritas pendanaan atau program pembangunan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 terdiri dari Program Prioritas Bupati, Program Prioritas berdasarkan Misi dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

7.1. Program Prioritas Bupati :

Program prioritas Bupati merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya selama lima tahun ke depan. Dengan memperhatikan kondisi potensi dan permasalahan yang ada, Bupati dan Wakil Bupati merencanakan program pembangunan prioritas yang berpihak kepada masyarakat perdesaan melalui suatu "***Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa)***" Kabupaten Tasikmalaya. Dengan program Gerbang Desa ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya akan kembali pulang ke desa untuk membangun desa, dalam arti memprioritaskan pembangunan perdesaan untuk menjadi Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera.

Dalam Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa), ada 5 (lima) program prioritas yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan, petani, buruh tani, nelayan dan aparaturnya
2. Peningkatan jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa

Dengan kelima program prioritas tersebut, diharapkan akan mempunyai *multiflier effect* terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat perdesaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah :

Selain program prioritas Bupati, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan

kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan misi, urusan pemerintahan dan kebijakan adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertakwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

1. Bidang sosial Keagamaan, kebijakannya adalah :
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar, dilaksanakan melalui program :
 - Fasilitasi bantuan dana fakir miskin dan anak terlantar
 - Pembinaan Anak Terlantar
 - Subsidi Panti Sosial
 - b. Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan, dengan program :
 - Pembinaan nilai-nilai agama dan kebangsaan serta Peningkatan Koordinasi Lembaga Keagamaan
 - c. Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan, dengan program :
 - Fasilitasi pembangunan lembaga keagamaan
 - d. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan, dengan program :
 - Fasilitasi bantuan keagamaan
 - e. Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji, dengan program :
 - Fasilitasi pelaksanaan ibadah haji
 - f. Mengikutsertakan kalifah ketingkat Provinsi dan Nasional, dengan program :
 - Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqoh mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
 - g. Meningkatkan pendidikan keagamaan secara proporsional, dengan program :
 - Peningkatan bantuan lembaga keagamaan
 - h. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan koperasi di pondok pesantren, dengan program :
 - Pemberdayaan usaha kecil dilingkungan Pondok Pesantren
 - i. Meningkatnya lembaga keuangan syariah, dengan program :
 - Peningkatan aksesibilitas pondok pesantren kepada lembaga keuangan syariah.
 - j. Peningkatan hidup bersih dan sehat, dengan program :
 - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilingkungan pesantren

- k. Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi umat, dengan program :
 - Peningkatan peran lembaga-lembaga pengelola zakat, infak, dan shodaqoh
 - l. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bazda, dengan program :
 - Penguatan SDM pengelola Bazda
2. Bidang Pendidikan, kebijakannya adalah :
- a. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar, yang dilaksanakan melalui program :
 - Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun
 - b. Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan menengah, dengan program :
 - Pendidikan Menengah
 - c. Peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dengan program :
 - Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendidikan Non Formal
 - d. Peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik, dengan program :
 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - e. Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu secara selektif dan proporsional serta beasiswa bagi siswa berprestasi, dengan program :
 - Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan Berprestasi
 - f. Peningkatan kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan di tingkat kabupaten, Propinsi dan Nasional
 - Pengembangan kreatifitas siswa
3. Bidang perpustakaan, kebijakannya :
- a. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat, dengan program :
 - Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan
4. Bidang Kesehatan, kebijakannya :
- a. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, dengan program :
 - Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

- b. Peningkatan upaya penemuan, pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular, dengan program:
 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - c. Peningkatan gizi keluarga, dengan program :
 - Perbaiki Gizi Masyarakat
 - d. Pengembangan penggunaan tanaman obat keluarga, dengan program :
 - Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - e. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, dengan program :
 - Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dengan program :
 - Pengawasan Obat dan Makanan
 - Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat
 - g. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan program :
 - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - h. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya, dengan program :
 - Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 - Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
 - i. Peningkatan kualitas, kuantitas, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan, dengan program:
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
 - j. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak dan lansia, dengan program:
 - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Bidang Sosial, kebijakannya :
- a. Mewujudkan kemandirian fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan program :
 - Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Pembinaan Panti asuhan / panti jompo

- Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, kebijakannya :
- a. Menciptakan administrasi kependudukan yang akuntabel, dengan program :
 - Penataan administrasi Kependudukan
7. Bidang Transmigrasi, kebijakannya :
- a. Peningkatan penyebaran penduduk, dengan program :
 - Transmigrasi Lokal
 - Transmigrasi regional
8. Bidang Ketenagakerjaan, kebijakannya :
- a. Mengembangkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan program:
 - Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak, kebijakannya :
- a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan program :
 - Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - b. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan pembangunan desa, dengan program :
 - Peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan
10. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, kebijakannya :
- a. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dengan program :
 - Keluarga Berencana
 - Pelayanan Kontrasepsi
 - Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 - Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
 - Kesehatan Reproduksi Remaja

11. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, kebijakannya :
 - a. Peningkatan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan, dengan program :
 - Peningkatan Peran serta Kepemudaan
 - Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - b. Peningkatan pembinaan olahraga melalui lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi olahraga, dengan program:
 - Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 -
12. Bidang Kebudayaan, kebijakannya :
 - a. Peningkatan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah, dengan program:
 - Pengembangan Nilai Budaya
 - Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Pengelolaan Kekayaan Budaya

Misi 2 :

Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis

1. Bidang Pertanian (termasuk peternakan), kebijakannya :
 - a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan melalui program :
 - Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan hortikultura
 - Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
 - Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan
 - Pengembangan pertanian ramah lingkungan
 - Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian
 - b. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan
 - Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- c. Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis
 - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - d. Mengembangkan usaha agribisnis perdesaan berdasarkan potensi lokal dengan dukungan permodalan, dengan program :
 - Pengembangan agribisnis perdesaan (PUAP)
2. Bidang Pariwisata
- a. Mengembangkan kawasan wisata dan budaya daerah, dengan program :
 - Pengembangan Pemasaran pariwisata
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - Pengembangan Kemitraan
3. Bidang Industri
- a. Mewujudkan sentra-sentra industri kecil dan menengah khususnya dalam bidang industri (Batik, bordir, golok manonjaya, anyaman bambu), dengan program :
 - Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - Kemampuan teknologi industri
 - Penataan struktur industri
 - Pengembangan sentra-sentra industri potensial
4. Bidang Kehutanan (dan Perkebunan)
- a. Mengembangkan penanganan rehabilitasi hutan, lahan kebun dan DAS, dengan program:
 - Perencanaan dan pengembangan hutan dan lahan
 - Rehabilitasi hutan dan lahan
 - Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
 - Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lahan
 - b. Peningkatan fungsi hutan, lahan dan kebun meliputi fungsi produksi (ekonomi) konservasi (ekologi) dan sosial (kesejahteraan), dengan program:
 - Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
 - Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
 - c. Memberikan kesempatan kepada aparat, petani dan pengusaha kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dengan program:
 - Peningkatan kesejahteraan petani
 - Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan/kehutanan.
 - d. Pengembangan agribisnis yang berbasis perdesaan dan pemanfaatan SDA dan SDM, dengan program :
 - Peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan

- e. Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis
 - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri, dengan program :
 - Penciptaan Iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM
 - Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
- 6. Bidang Penanaman Modal
 - a. Mewujudkan PD. BPR yang berdaya saing dan sehat, dengan program :
 - Pengembangan jaringan dan permodalan PD. BPR
 - b. Mewujudkan PDAM yang sehat, dengan program :
 - Pengembangan jaringan pelayanan
 - c. Menciptakan peluang investasi bagi investor dan mengembangkan arus investasi, dengan program :
 - Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- 7. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan dan kelautan, yang dilaksanakan melalui program :
 - Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - b. Pengembangan sentra komoditas unggulan dengan pendekatan kawasan
 - Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Pengembangan Perikanan tangkap
 - Pengembangan Usaha Agribisnis
- 8. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - a. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dengan program :
 - Pelayanan perijinan terpadu
- 9. Bidang Perdagangan
 - a. Mengamankan jalur distribusi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya melalui pengawasan dan monitoring, dengan proram :
 - Pengawasan barang beredar dan monitiring harga serta ketersediaan barang di pasar

- b. Menginformasikan arti pentingnya Undang- Undang Perlindungan Konsumen, dengan program :
 - Monitoring dan Pengawasan
 - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - c. Menciptakan kelancaran Peneraan UTTP dan BDKT, dengan program :
 - Pengawasan dan pendampingan tera dan tera ulang alat UTTP
 - d. Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada pelaku usaha, dengan program :
 - Pembinaan penyederhanaan pengisian formulir pendaftaran perusahaan
 - Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - e. Pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan, dengan program :
 - Penyempurnaan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
 - f. Memberikan kemudahan prosedur ekspor dan impor, dengan program :
 - Peningkatan dan Pengembangan ekspor
 - g. Menciptakan sarana perdagangan yang memadai untuk memperlancar aktifitas perdagangan, dengan program :
 - Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan
10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Mewujudkan desa unggul dan mandiri, dengan program :
 - Percepatan Pembangunan Perdesaan
 - b. Mengembangkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam pembangunan desa, dengan program :
 - Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
 - c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa, dengan program :
 - Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
 - Peningkatan peran perempuan di perdesaan
 - Peningkatan peran serta pemuda dalam kewirausahaan perdesaan
 -
 - d. Pengembangan profil desa yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, dengan program:
 - Pengembangan data informasi / statistik desa
11. Bidang Ketahanan Pangan
- a. Ketersediaan cadangan pangan, dengan Program :
 - Ketersediaan energi dan protein per kapita
 - Penguatan cadangan pangan
 -

- b. Distribusi dan Akses Pangan, dengan program :
 - Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah
 - Stabilitas harga dan pasokan pangan
- c. Penganekaragaman dan keamanan pangan, dengan program :
 - Skor pola pangan harapan (PPH)
 - Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
 - Pengembangan kelompok usaha produktif
- d. Penanganan kerawanan pangan, dengan program :
 - Penanganan daerah rawan pangan
 - Pengembangan desa mandiri pangan

Misi 3 :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, kebijakannya :
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, yang dilaksanakan melalui program :
 - Penataan Kelembagaan
 - Penataan Ketatalaksanaan
 - Peningkatan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah
 - Peningkatan Kerjasama daerah
 - Pemantauan, Pengevaluasian serta pelaporan kegiatan pembangunan daerah
 - b. Penataan sistem hukum di daerah, dengan program :
 - Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Peningkatan kapasitas fungsi dan peran lembaga legislatif, dengan program :
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, dengan program :
 - Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - e. Pemenuhan biaya rutin kebutuhan dasar operasional kerja OPD, dengan program :
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peningkatan disiplin aparatur
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah, dengan program :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - g. Peningkatan Teknologi, informasi dan komunikasi pemerintahan, dengan program:
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa
 - Kerjasama Informasi dengan Media Masa

- h. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan analisa terapan penyelenggaraan pemerintah, dengan program :
 - Peningkatan penelitian dan pengembangan
- i. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan program :
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
 - Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan Pembiayaan
 - Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan
 - Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
 - Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- j. Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah. Dengan program :
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - Pendidikan kedinasan
- k. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan program :
 - Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa
- l. Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perencanaan dan pengembangan karier, dengan program :
 - Pembinaan dan pengembangan aparatur
- m. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian, dengan program :
 - Fasilitas purna tugas PNS
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Pelayanan administrasi perkantoran
 - Pembinaan dan pengembangan aparatur
- n. Peningkatan sistem pengawasan internal, dengan program :
 - Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- o. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan KKN, dengan program:
 - Pendidikan anti KKN bagi Masyarakat
- p. Penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan program yaitu :
 - Peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa

2. Bidang Perencanaan Pembangunan, kebijakannya
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan melalui program :
 - Pengembangan data / informasi / statistik daerah
 - Perencanaan Pembangunan daerah
 - Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh
 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Perencanaan Sosial Budaya
 - Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam
 - Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

3. Bidang Kearsipan
 - a. Peningkatan administrasi kearsipan daerah, dengan program :
 - Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
 - Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan

4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, kebijakannya :
 - a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, yang dilaksanakan melalui program :
 - Peningkatan penegakan Perda
 - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
 - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

 - b. Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, dengan program :
 - Pendidikan Politik Masyarakat
 - Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Misi 4 :

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

1. Bidang Penataan Ruang, kebijakannya meliputi :
 - a. Menyelenggarakan penataan ruang dengan peran aktif masyarakat, dengan program:
 - Perencanaan Tata Ruang
 - b. Pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang, dengan program :
 - Pengendalian dan Pemanfaatan ruang
 - c. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dengan program :
 - Pengendalian pemanfaatan ruang
 - Pemanfaatan ruang
2. Bidang Pertanahan, kebijakannya meliputi :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan catur tertib pertanahan, dengan program :
 - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
3. Bidang Perumahan, kebijakannya meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan program :
 - Pembangunan infrastruktur perdesaan
 - b. Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perdesaan sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman, dengan program :
 - Program Pembangunan infrastruktur perdesaan
 - c. Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perkotaan sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman, dengan program :
 - Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
 - Lingkungan sehat perumahan
 - Pengembangan perumahan
 - Pengelolaan areal pemakaman
 - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
 - d. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan aman dan nyaman, dengan program :
 - Pengembangan perumahan
 - Lingkungan sehat perumahan
 - Pemberdayaan komunitas perumahan
 - Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.
4. Bidang Pekerjaan Umum, kebijakannya meliputi :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan dengan program :
 - Pembangunan Infrastruktur perdesaan

- b. Peningkatan aksesibilitas / kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah, dengan program :
 - Pembangunan jalan dan jembatan
 - Tanggap darurat jalan dan jembatan
 - c. Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat, dengan program :
 - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya
 - Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya
 - Penyediaan dan pengelolaan air baku
5. Bidang Perhubungan, kebijakannya :
- a. Peningkatan aksesibilitas/kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah, dengan program :
 - Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan
 - Pengendalian dan pengamanan lalulintas
 - Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
6. Bidang Energi, dan Sumber Daya Mineral, kebijakannya :
- a. Pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan, dengan program:
 - Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan
 - b. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, dengan program :
 - Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
7. Bidang Lingkungan Hidup, kebijakannya :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan, dengan program :
 - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - Rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
 - Peningkatan Pengendalian Polusi
 - Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - b. Peningkatan upaya penanggulangan bencana alam, dengan program :
 - Penanggulangan bencana alam.
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan
 - Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

7.3. Program Prioritas Pembangunan

Program-program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqulkarimah, Berkualitas dan Mandiri.

1. Program Fasilitasi Bantuan Dana untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar
2. Program Pembinaan nilai-nilai agama dan kebangsaan serta Peningkatan Koordinasi Lembaga Keagamaan
3. Program Fasilitasi pembangunan lembaga keagamaan
4. Program Pemberdayaan usaha kecil dilingkungan Pondok Pesantren
5. Program Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilingkungan pesantren
6. Program Peningkatan aksesibilitas pondok pesantren kepada lembaga keuangan syariah
7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, melalui kegiatan Pengembangan sarana prasarana pendidikan
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
10. Program Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan Berprestasi
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
14. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui kegiatan Peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas PONED di Kecamatan Culamega, Cipatujah, Bantarkalong, Cibalong, Parungponteng, Pancatengah dan Cikalong

17. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan kegiatan Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna, Rintisan Pembangunan Rumah Sakit Regional Tipe B di Ciawi, dan Rintisan Pembangunan RSU Tipe D di Kecamatan Karangnunggal, Cikatomas, Manonjaya dan Ciawi.
18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, melalui kegiatan peningkatan gizi ibu hamil dan penyuluhan mengenai kunjungan K1 sampai dengan K4 untuk ibu hamil
19. Program Penataan Administrasi Kependudukan, melalui kegiatan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (E-KTP).
20. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan
21. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
22. Program Keluarga Berencana, melalui kegiatan penyediaan pelayanan KB dan kontrasepsi khususnya bagi keluarga miskin serta pemberdayaan pos KB Desa beserta kadernya.
23. Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga, melalui kegiatan Pembangunan Stadion Olah Raga di Kawasan Pusat Pemerintahan
24. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Misi 2 :

Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan Peningkatan kapasitas bendung Padawaras dan pencetakan lahan sawah baru yang meliputi Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, Pancatengah dan Bantarkalong
5. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, melalui kegiatan Pembangunan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Kecamatan Cipatujah dan sekitarnya, Penyelesaian pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pamayangsari Kecamatan Cipatujah dan Nusa Manuk Kec Cikalong dan Peningkatan sarana dan armada penangkapan ikan.
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, melalui kegiatan pengembangan obyek pariwisata unggulan daerah (Cipanas Galunggung, Pantai Bubujung, Pantai Sindangkerta dan, Pantai Karangtawulan)

8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
10. Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lahan
11. Program Penciptaan Iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM
12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
13. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
14. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan
15. Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Misi 3 :

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan Pembiayaan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
6. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
7. Program Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah Desa
8. Program Peningkatan sistem pengawasan internal
9. Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, melalui kegiatan Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan pembentukan unit layanan pengadaan (ULP)
10. Program Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
11. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan pembangunan Gedung Kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan
12. Program Pengembangan komunikasi, informasi dan komunikasi, melalui kegiatan Pembangunan sarana teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan fixed line, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi data

Misi 4 :

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

1. Program Perencanaan Tata Ruang,
2. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
3. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan serta pembangunan jaringan air bersih perdesaan dan irigasi perdesaan.

4. Program Peningkatkan kualitas lingkungan perumahan aman dan nyaman
5. Program Pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, melalui kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bendung Padawaras
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan Penyelesaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Ciawi Singaparna, Rintisan Pembangunan Jalan Alternatif Ciawi Kadipaten, dan Peningkatan kualitas jalan dengan prioritas poros Cibalong-Cipatujah serta Poros Salopa-Cikalong
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan Rintisan Pembangunan Terminal Tipe B Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Bantarkalong
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, melalui kegiatan Pengembangan Listrik Masuk Desa, Fasilitasi Pengembangan Geothermal Karaha Bodas, dan Penyediaan energy listrik kawasan pusat pemerintahan.
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya alam, dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Batu Mulia Jasper atau Pembangunan Taman Geologi Jasper di Pancatengah
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
11. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, dengan kegiatan pembinaan dan penertiban usaha pertambangan, Fasilitasi Pembangunan Industri Hasil Tambang di Kecamatan Cipatujah dan Fasilitasi Pembangunan Terminal Khusus Tambang sebagai sarana transportasi bahan tambang lewat laut.
12. Program Penanggulangan Bencana Alam, dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Mitigasi Bencana Alam dan pengadaan sarana dan prasarana mitigasi bencana alam.

Hubungan antara Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan serta indikator capaian kinerja yang diharapkan selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada lampiran.

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi hasil pembangunan daerah tahun 2011-2015 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai tahun 2010, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2015.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Indikator makro serta indikator kinerja daerah lainnya yang disusun berdasarkan bidang urusan.

Target Indikator makro Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1. Target Indikator Makro Kabupaten Tasikmalaya 2011-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,49	72,74	72,92	73,22	73,52	73,82
	Angka Harapan Hidup (th)	68,38	68,41	68,46	68,68	68,89	69,11
	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	7,19	7,22	7,25	7,28	7,31	7,33
	Angka Melek huruf (%)	99,18	99,19	99,20	99,21	99,22	99,23
	Daya Beli (Konsumsi/kapita/tahun) (Rp)	572.930	575.630	577.330	579.330	581.330	583.400
	Indeks Pendidikan	82,10	82,17	82,24	82,32	82,39	82,44
	Indeks Kesehatan	72,30	72,34	72,43	72,79	73,15	73,51
	Indeks Daya Beli	63,08	63,70	64,09	64,56	65,02	65,50
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.690.289	1.704.656	1.718.294	1.731.181	1.743.299	1.755.502
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,88	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	312,703	306,838	292,110	276,989	261,495	245.770
	Proporsinya terhadap jumlah penduduk total (%)	18,5	18	17	16	15	14
5	PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)	12,29	12,78	13,30	13,83	14,38	14,96
6	PDRB Per kapita (berlaku) (Rp.)	7.272.602	7.499.761	7.737.845	7.987.454	8.249.209	8.519.540

NO	INDIKATOR MAKRO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	Nilai Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2000)	4,18	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5	4,5 - 5,5	5 - 6	5 - 6
8	Jumlah Penduduk yang bekerja (Jiwa)	763.165	770.505	778.387	785.956	793.201	800.509
9	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total (%)	45,15	45,20	45,30	45,40	45,50	45,60
10	Pengangguran Terbuka (%)	7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7

Adapun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan bidang urusan adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				2011	2012	2013	2014	2015				
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri												
1.	Bidang Sosial Keagamaan											
	1	Meningkatnya pelayanan pemerintah untuk kaum Duafha (Penanganan Anak Terlantar dan Fakir Miskin)									Dinas Sosial, Bag.Kesra, Kantor Agama	
		- Jumlah anak terlantar yang ditangani	orang	1.759	2.202	2.222	2.262	2.302	2.372	2.372	3.201	
		- Jumlah keluarga fakir miskin yang ditangani	orang	15.878	16.801	19.599	20.599	22.474	23.474	23.474	23.474	
	2	Menurunnya konflik sosial berlatar belakang agama dan etnik	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan										
		- Pondok Pesantren	buah	149	284	394	594	604	703	703	718	
		- Masjid	buah	2.351	2.476	2.501	2.701	2.800	3.025	3.025	3.075	
		- Madrasah Diniyah	buah	208	343	403	703	900	1.350	1.350	1.450	
		- Jumlah bantuan stimulan guru Madrasah Diniyah	Rp.	750.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000	7.500.000.000	2.000.000.000	
2.	Bidang Pendidikan											
	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI sederajat (7-12 thn)	%	101.4	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	2	Meningkatnya APM SD/MI Sederajat (7-12 thn)	%	100.89	100	100	100	100	100	100	100	
	3	Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat (13-15 thn)	%	93.65	95	98	100	100	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
4	Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat (13-15 thn)	%	91.12	93	96	98	100	100	100	100	
5	Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan dasar										
	- Jumlah SD/MI	Unit	1.271	1.268	1.265	1.260	1.256	1.250	1.250	1.250	
	- Jumlah SLTP/MTs	buah	352	352	352	352	352	352	352	352	
	Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SD/MI										
	- Ruang Kelas SD	%	28,16	26,16	24,16	22,16	20,16	18,16	18,16	16,16	
	- Ruang Kelas MI	%	25,33	23,33	21,33	19,33	17,33	15,33	15,33	13,33	
	Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SLTP/MTs										
	- Ruang Kelas SMP	%	14,99	12,99	10,99	8,00	6,99	4,99	4,99	2,99	
	- Ruang Kelas MTs	%	36,83	34,83	32,83	30,83	28,83	26,83	26,83	24,83	
6	Idealnya rasio siswa terhadap ruang kelas										
	Jumlah Siswa										
	- SD/MI	orang	215,056	216,756	218,456	320,155	221,855	223,555	223,555	225,255	
	- SLTP/MTs	orang	85,410	87,110	88,810	90,509	92.209	93,909	93,909	95,609	
	Jumlah Ruang Kelas										
	- SD/MI	buah	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	
	- SLTP/MTs	buah	2,156	2,263	2,337	2,414	2,492	2,609	2,609	2,656	
	Ratio Siswa : Ruang Kelas										
	- SD/MI	%	16,11	20,00	25,00	27,00	29,00	32,00	32,00	32,00	
	- SLTP/MTs	%	39,62	38,50	38,00	37,50	37,00	36,00	36,00	36,00	
7	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SLTA /MA (16-18 thn)	%	40,22	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00	53,33	
8	Meningkatnya APM SLTA/MTs Sederajat (16-18 thn)	%	89.165	90.865	92.565	94.264	95.964	97.664	97.664	99.364	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
9	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	%	35.865	36.163	40.728	43.362	46.063	48.832	48.832	49.682	
10	Meningkatnya daya tampung SMA, SMK dan MA										
	- Jumlah SMA	buah	41	42	44	46	48	50	50	50	
	- Jumlah SMK	buah	65	68	71	74	77	80	80	80	
	- Jumlah MA	buah	59	60	61	62	63	64	64	64	
11	Meningkatnya angka melanjutkan perguruan tinggi	%	20	25	30	40	50	60	60	62	
12	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Tahun	7,16	7,19	7,22	7,23	7,28	7,31	7,31	7,34	
13	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	26,51	52,00	60,00	65,00	80,00	90,00	90,00	95,00	
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini										
	- Jumlah TK	buah	254	258	263	269	275	282	282	289	
	- Jumlah PAUD	buah	330	517	599	613	687	723	723	723	
	- Jumlah TPA	buah	4	5	6	7	8	9	9	10	
15	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,14	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,60	99,70	
16	Terpenuhinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan										
	- jumlah guru SD	orang	9.104	9.286	9.468	9.650	9.832	10.014	10.014	10.196	
	- jumlah guru SMP	orang	4.360	4.578	4.796	5.014	5.232	5.450	5.450	5.668	
	- jumlah tenaga kependidikan SD	orang	9	11	13	14	16	18	18	20	
	- jumlah tenaga kependidikan SMP	orang	783	799	814	830	846	861	861	877	
17	Meningkatnya Nilai Rata-Rata Ujian Nasional / Ujian Sekolah Bertaraf Internasional (UN/USBN)	%									
	- Jenjang SD/MI	%	6,74	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20	7,20	7,30	
	- Jenjang SMP/MTs	%	7,07	7,09	7,11	7,13	7,15	7,17	7,17	7,19	
	- Jenjang SMA/SMK/MA	%	7,42	7,45	7,46	7,50	7,55	7,60	7,60	7,70	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
18	Menurunnya siswa dropout										
	- SD/MI	%	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
	- SLTP/MTs	%	0,63	0,50	0,40	0,35	0,30	0,20	0,20	0,10	
	- SMU/SMK/MA	%	0,59	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30	0,20	
3.	Bidang Perpustakaan										
1	Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan	buah	137	20	20	20	20	20	100	25	Kantor Perpustakaan
2	Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan desa/kelurahan	buah	111	20	20	20	20	20	100	25	
3	Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum	buah	31.097	31.097	1.000	1.500	1.500	1.500	7.000	2.000	
4.	Bidang Kesehatan										
1	Meningkatnya persentase keluarga penghuni rumah yang memenuhi syarat Kesehatan	%	60,11	62,09	64,07	66,05	66,03	70,00	70,00	70,00	Dinas Kesehatan
2	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	41,73	46,33	50,93	55,53	60,13	60,50	60,50	60,00	
3	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	35,00	50,00	65,00	80,00	95,00	110,00	110,00	130,00	
4	Jumlah Desa yang mendeklarasikan STOP BABS(Buang Air Besar Sembarangan) / ODF (Open Devecation Free)	Desa	-	3,00	9,00	19,00	32,00	47,00	47,00	50,00	
5	Meningkatnya % keluarga menggunakan SPAL	%	17,6	32,1	36,6	41,1	45,6	50,0	50,0	50,0	
6	Meningkatnya bayi yang mendapat ASI Eksekutif	%	48,40	56,00	65,00	72,00	80,00	89,00	89,00	90,00	
7	Meningkatnya persentase desa siaga Aktif Utama	%	31,62	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	85,00	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
8	Meningkatnya Rumah Tangga Sehat (RT ber-PHBS)	%	43,70	45,00	47,00	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	
9	Meningkatnya strata Posyandu Purnama Mandiri	%	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	45,00	
10	Meningkatnya Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren)	Pontren	8	18	33	53	78	108	108	108	
11	Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	%	85,80	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	
12	Meningkatnya Cakupan Campak	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
13	Meningkatnya Cakupan DPT III	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
14	Meningkatnya Case Detection Rate TB	%	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
15	Meningkatnya kesembuhan penderita TBC BTA+	%	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	
16	Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun	Kasus	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	
17	Meningkatnya Cakupan penemuan ISPA	%	40,82	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
18	Menurunnya prevalensi HIV dan Sifilis pada kelompok resiko tinggi	Kasus	0,73	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	Meningkatnya Cakupan penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)	%	90	90	92	95	95	95	95	95	
19	Meningkatnya kasus filaria yang ditangani	%	83	83	85	85	85	90	90	90	
20	Meningkatnya persentase balita naik timbangannya (N/D)	%	80,43	82,5	85	87,5	90	92,5	92,5	95,00	
21	Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat (D/S)	%	81,31	85	85	90	90	90	90	92,5	
22	Menurunnya persentase balita BGM (KEP Gizi)	%	2,99	2,5	2,5	2	1,75	1,5	1,5	1	
23	Meningkatnya persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A 2 kali/tahun	%	95,15	100	100	100	100	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
24	Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	%	fe 1 - 86,7	90	90	90	90	100	100	100	
			Fe 3 = 74,83	80	80	81	85	90	90	95	
25	Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MIPASI	%	74,90	100	100	100	100	100	100	100	
26	Menurunnya prevalensi balita gizi buruk	%	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,10	
27	Desa/keluarga dengan KLB Gizi buruk dilaporkan dalam waktu < 24 jam	%	100,00	100	100	100	100	100	100	100,00	
28	Tersedianya Anggaran obat/ kapita Rp 9000/orang/tahun	Rp	9.000,00	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500,00	
29	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya	%	8,7	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
30	Meningkatnya Puskesmas terakreditasi	%	0	5	10	15	20	25	25	30	
31	Meningkatnya Pelayanan pengobatan/perawatan	%	80	90	92,5	96	97,5	100	100	100	
32	Meningkatnya Cakupan rawat jalan di puskesmas	%	-	60	70	80	90	100	100	100	
33	Cakupan rawat inap di puskesmas	%	85	86	87	88	89	90	90	90	
34	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D	buah	0	1	1	2	2	3	3	3	
35	Pembangunan Rumah sakit Regional Type B	buah	0	0	0	1	0	0	1	0	
36	Meningkatnya pelayanan RSUD Kabupaten Tasikmalaya										
	- Pelayanan gawat darurat	%	-	50	60	75	90	100	100	100	
	- Pelayanan rawat jalan	%	-	60	70	80	90	100	100	100	
	- Pelayanan rawat inap	%	-	60	70	90	100	100	100	100	
	- Pelayanan bedah sentral	%	-	-	-	50	60	80	80	90	
	- Pelayanan persalinan, KIA, perinatologi, dan KB	%	-	40	50	80	90	100	100	100	
	- Penyelesaian pembangunan RSUD	%	-	30	60	80	90	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	- Peningkatan kelas RSUD menjadi kelas C	%	-	-	-	-	-	1	1	1	
37	Seluruh Puskesmas memiliki satu dokter umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
38	Penambahan dokter gigi untuk memenuhi Puskesmas memiliki satu orang dokter gigi	%	60	65	70	75	80	85	85	85	
39	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga bidan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	Seluruh desa tersedia bidan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
41	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga nutrisisionis	%	80	80	85	90	95	100	100	100	
42	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga sanitarian	%	85	85	90	95	100	100	100	100	
43	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga perawat	%	70	75	80	85	90	95	100	100	
44	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga perawat gigi	%	80	85	90	95	100	100	100	100	
45	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga epidemiologi	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
46	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga analis kesehatan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
47	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga penyuluh kesehatan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
48	Seluruh Puskesmas tersedia tenaga kefarmasian	%	80	80	85	90	95	100	100	100	
49	Idealnya ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	1/41.250	1/39.285	1/37.250	1/35.869	1/34.375	1/30.000	1/30.000	1/30.000	
50	Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di RSUD										
	Tenaga dokter spesialis	orang	-	2	4	6	8	9	9	10	
	Tenaga dokter umum	orang	-	9	13	15	17	20	20	20	
	Tenaga dokter gigi	orang	-	1	2	2	2	2	2	2	
	Tenaga perawat	orang	-	48	60	102	102	132	132	132	
	Tenaga bidan	orang	-	12	12	18	18	18	18	18	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	Tenaga kefarmasian	orang	-	4	4	4	4	4	4	4	
	Tenaga kesehatan masyarakat	orang	-	3	3	4	4	4	4	4	
	Tenaga sanitarian	orang	-	1	2	2	3	3	3	3	
	Tenaga gizi	orang	-	2	3	4	4	6	6	6	
	Tenaga keterampilan fisik	orang	-	4	5	6	6	8	8	8	
	Tenaga keterampilan medis	orang	-	10	12	14	14	15	15	15	
	Tenaga non kesehatan	orang	-	33	40	67	67	83	83	83	
	Tenaga rekam medis	orang	-	-	3	5	6	8	10	10	
51	Menurunnya AKB	per 1.000 kelahiran hidup	12	12	12	12	12	10	10	9	
52	Menurunnya AKABA	per 1000 balita	1	1	1	1	1	1	1	1	
53	Menurunnya AKI	per 100.000 kelahiran hidup	116	115	114	113	112	112	112	111	
54	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	%	76,44	86	88	89	90	90	90	90	
55	Meningkatnya pelayanan kesehatan antenatal (K4)	%									
56	Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi 0-28 hari Neonatal (N2)	%	84,04	86	86	86	88	90	90	90	
57	Meningkatnya cakupan bayi baru lahir/neonatus risti/komplikasi tertangani	%	15	65	70	75	80	85	85	85	
58	Cakupan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi tertangani	%	18,53	63	67	71,5	75	80	80	80	
59	Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	%	35,2	100	100	100	100	100	100	100	
60	Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi	%	78,66	85	86	87	100	100	100	100	
61	Meningkatnya Cakupan bayi BBLR yang ditangani	%	42,14	100	100	100	100	100	100	100	
62	Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	2	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	75	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
5. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil											
1	Meningkatnya Kepemilikan KTP	%	68,78	80	100	100	100	100	100	100	Dinsosduk-naker
2	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	%	30,37	34,56	38,56	42,46	46,27	49,89	49,89	53,51	
3	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	-	50	100	100	100	100	100	100	
6. Bidang Keluarga Berencana dan dan Keluarga Sejahtera											
1	Meningkatnya Prevalensi peserta KB aktif	%	68.85	68.91	68.94	68.98	69.01	69.04	69.04	69,10	BPMKB
2	Terbinanya Keluarga Pra Sejahtera dan KS1	KK	289.942	289.419	288.944	288.493	288.081	287.081	287.081	266.217	
3	Menurunnya TFR	%	2,60	2,60	2,58	2,56	2,54	2,52	2,52	2,43	
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,69	
5	Terbinanya Pasangan Usia Subur	Pasangan	374.515	385.947	397.447	408.947	420.447	431.947	431.947	432.005	
6	Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru	Akseptor	66.860	83.270	83.880	84.490	85.100	85.710	85.710	85.926	
7	Terbinanya Jumlah peserta KB aktif	Akseptor	257.868	265.937	274.006	282.075	290.144	298.213	298.213	298.517	
8	Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama wanita	Tahun	17	18	19	19	20	20	20	20	
9	Meningkatnya persentase peserta KB Mandiri	%	34,40	37,77	41,14	44,51	47,88	47,90	47,90	48,01	
7. Bidang Ketransmigrasian											
1	Transmigrasi Umum	KK	15	35	45	55	65	80	80	100	Dinsosduk-naker
2	Transimigrasi Swakarsa Mandiri	KK	-	15	20	20	25	25	25	-	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
3	Jumlah Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi	KK	95	125	130	140	155	165	165	165	
4	Jumlah naskah MoU pelaksanaan transmigrasi	buah	1	2	3	4	5	6	6	6	
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Meningkatnya Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	%	1,87	1,90	1,95	2,00	2,20	2,40	2,40	3	
2	Meningkatnya Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	%	97,3	97,5	97,6	97,7	97,8	97,9	97,9	97,8	
3	Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	72,9	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	85,0	86	
4	Jumlah kasus yang dapat ditangani P2TP2A	%	63	67.5	73	78	83	88	88	88	
5	Adanya shelter/rumah aman bagi korban tindak kekerasan	Buah	-	-	1	-	-	-	1	1	
6	Terbentuknya kabupaten layak anak	Kab	-	-	1	-	-	-	1	1	
9. Bidang Sosial											
1	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	80	87	90	93	95	105	105	115	Dinsosduk-naker
2	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial										
	- Korban tindak kekerasan (perempuan dan anak)	orang	32	35	38	42	46	51	51	60	
	- Jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani	orang	64	64	48	100	100	100	412	150	
	- Jumlah Penyandang cacat yang ditangani	orang		300	300	300	300	300	1.500	300	
	- Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani	orang	100	100	120	150	200	200	770	200	
	- Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni yang ditangani	orang	1.134	1.144	1.154	1.163	1.172	1.180	5.813	1.180	
	- Orang dengan HIV/AIDS	orang	48	54	60	75	90	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
10.	Bidang Ketenagakerjaan										
1	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun	orang	204	240	400	400	400	400	1.840	400	Dinsosduk-naker
2	Jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Kab. Tasikmalaya	orang	204	240	400	400	400	400	1.840	400	
3	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,69	78,70	78,73	78,75	79,20	80,00	80,00	80	
4	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total	%	45,12	45,15	45,20	45,30	45,40	45,50	45,50	45,60	
5	Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang	982	1.282	1.682	2.082	2.532	3.032	3.532	3.032	
6	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang tertangani	buah	10	5	5	4	3	2	2	2	
7	Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jamsostek	Orang	1.900	1.980	2.065	2.155	2.265	2.385	2.385	2.385	
8	Meningkatnya Upah Kerja Sesuai dengan Ketentuan	%	82	87	89	91	95	100	100	100	
11.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga										
1	Jumlah induk organisasi olah raga di kabupaten	buah	29	31	33	35	37	39	39	39	
2	Jumlah atlit yang dibina	orang	236	241	246	251	256	261	261	266	
3	Jumlah kompetisi yang digelar	buah	12	12	13	13	14	14	14	14	
4	Jumlah Medali yang diraih dalam:	buah									
	a. PORDA										
	- Emas	buah	17	18	19	20	21	22	23	24	
	- Perak	buah	12	14	16	18	20	22	24	26	
	- Perunggu	buah	16	19	22	25	28	31	31	34	
	b. PON										
	- Emas	buah	1	2	3	4	5	6	7	8	
	- Perak	buah	0	1	2	3	4	5	6	7	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	- Perunggu	buah	0	2	4	6	8	10	12	14	
5	Jumlah atlit berprestasi	orang	46	48	50	52	54	56	58	60	
6	Jumlah Lapangan Olah Raga (sepakbola, bola basket, volley, bulutangkis, tenis lapangan)										
	- Lapangan Bulutangkis	Buah	47	47	47	47	47	47	47	47	
	- Lapangan Sepak Bola	Buah	357	357	357	357	357	357	357	357	
	- Lapangan Bola Basket	Buah	737	737	737	737	737	737	737	737	
	- Lapangan Bola Volli	Buah	49	49	49	49	49	49	49	49	
	- Lapangan Tenis	Buah	23	23	23	23	23	23	23	23	
7	Jumlah Karang Taruna	buah	351	351	351	351	351	351	351	351	
8	Jumlah organisasi kepemudaan	buah	45	45	45	45	45	45	45	54	
9	Jumlah Pemuda Pelopor pembangunan	orang	21	21	21	21	21	21	21	21	
12. Bidang Kebudayaan											
1	Jumlah even seni dan budaya										
	- Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kegiatan	3	3	10	12	14	12	12	14	
	- Pengiriman misi seni dan budaya	Kegiatan	3	6	8	8	8	10	10	12	
2	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni budaya										
	- Sarana Penyelenggaraan Seni (Panggung Seni)	Buah	3	3	6	8	9	10	10	12	
	- Sarana Pengembangan Seni (Alat Seni)	Set	26	-	10	10	15	15	15	17	
3	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan										
	- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada	Buah	41	41	41	41	41	41	41	41	
	- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	Buah	8	-	10	13	17	20	20	20	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis											
1.	Bidang Pertanian (termasuk Peternakan)										
	1 Meningkatnya hasil produksi pertanian : padi dan palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan										Dinas Pertanian
	Padi	Ton GKG	873.541	719.828	724.117	727.810	731.523	735.253	735.253	742.605	
	- Padi sawah	Ton GKG	851.351	699.997	704.184	707.776	711.386	715.014	715.014	722.164	
	- Padi gogo	Ton GKG	22.190	19.831	19.933	20.034	20.137	20.239	20.239	20.441	
	- Padi organik	Ton GKG	31.412	60.990	61.789	62.589	63.391	64.186	64.186	64.827	
	Sisa beras/Surplus	ton	320.020,82	230.950,32	231.871,71	232.530,91	233.280,99	234.122,14	234.122	237.016,66	
	- Jagung	Ton	61.293	61.689	62.618	63.560	64.517	65.488	65.488	66.142	
	- Kedele	Ton	1.735	1.443	1.465	1.487	1.509	1.532	1.532	1.547	
	- Kacang tanah	Ton	81.115	8.561	8.689	8.820	8.953	9.088	9.088	9.178	
	- Ubi kayu	Ton	333.871	340.886	346.016	351.224	356.509	361.875	361.875	365.493	
	- Cabe merah	Ton	24.259	17.248	17.508	17.771	18.039	18.310	18.310	18.493	
	- Mentimun	Ton	18.235	13.853	14.062	14.273	14.488	14.706	14.706	14.853	
	- Tomat	Ton	9.752	4.098	4.160	4.222	4.266	4.350	4.350	4.393	
	- Manggis	Ton	13.507	21.830	22.828	23.171	23.520	23.874	23.874	24.112	
	- Salak	Ton	35.460	117.285	120.248	122.058	123.895	125.759	125.759	127.016	
	- Pisang	Ton	132.707	130.235	138.856	140.946	143.067	145.220	145.220	146.672	
	- Durian	Ton	3.418	3.540	3.593	3.647	3.702	3.758	3.758	3.795	
	2 Meningkatnya hasil produktivitas pertanian : padi dan palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan										

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	- Padi sawah	Kw/Ha	63.56	64.14	64.46	64.79	65,11	65,43	65,43	66,08	
	- Padi gogo	Kw/Ha	45.76	35.04	35.22	35,39	35.57	35.75	35.75	36.10	
	- Jagung	Kw/Ha	58.64	60.22	60.52	60.82	61.13	61.43	61.43	62.08	
	- Kedele	Kw/Ha	14.34	12.65	12.61	12.68	12.74	12.80	12.80	36.10	
	- Kacang tanah	Kw/Ha	15.96	16.01	16.09	16.17	16.25	16.33	16.33	16.49	
	- Ubi kayu	Kw/Ha	198.29	199.43	200.43	201.43	202.44	203.45	203.45	205.48	
	- Cabe merah	Kw/Ha	163.93	165.53	166.36	167.19	168.03	168.87	168.87	170.55	
	- Mentimun	Kw/Ha	114.80	114.87	115.44	116.02	116.50	117.18	117.18	118.35	
	- Tomat	Kw/Ha	112.23	112.27	112.83	113.40	113.96	114.53	114.53	115.67	
	- Manggis	Kw/Ha	110.58	110.62	111.17	111.73	112.29	112.85	112.85	113.97	
	- Salak	Kw/Ha	122.30	123.53	124.15	124.77	125.39	126.02	126.02	127.28	
	- Pisang	Kw/Ha	277.84	283.40	284.82	286.24	287.67	289.11	289.11	292	
	- Durian	Kw/Ha	91,8	95,67	96,15	96,63	97,11	97,60	97,60	98,57	
	3 Tersedianya prasarana dan sarana (infrastruktur) pertanian										
	- JITUT	Ha	200	350	650	1.000	1.400	1.900	1.900	2.090	
	- JIDES	Ha	850	950	1.450	2.000	2.580	8.430	8.430	9.273	
	- Jalan Usaha Tani (JUT)	Km	4	7	10	13	16	19	19	21	
	- Rumah kompos	Unit	11	21	26	31	36	41	41	45	
	- Sawah Baru	Ha	-	-	100	200	300	400	400	440	
	4 Meningkatnya Tingkat Kemampuan Kelompok Tani Berbasis Usaha Tanaman Pangan (Kelompok)	Kel.	1.758	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	
	- Pemula	Kel.	914	923	923	923	923	923	923	923	
	- Lanjut	Kel.	709	739	739	739	739	739	739	739	
	- Madya	Kel.	126	124	124	124	124	124	124	124	
	- Utama	Kel.	9	40	40	40	40	40	40	40	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
5	Meningkatnya Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak, Produktivitas Ternak Unggulan Konsumsi Hasil Ternak dan Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Peternakan										Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
	a. Populasi Ternak										
	- Sapi Potong	ekor	33.548	47.726	51.752	54.339	57.056	59.909	59.909	62.905	
	- Sapi Perah	ekor	2.422	2.542	2.751	3.025	3.329	3.396	3.396	3.464	
	- Kerbau	ekor	17.111	17.111	17.398	17.892	18.491	19.166	19.549	19.744	
	- Kambing	ekor	68.021	69.363	71.837	74.598	78.134	82.041	82.041	84.502	
	- Domba	ekor	271.191	273.835	282.555	302.062	328.123	344.529	344.529	361.755	
	- Ayam Buras	ekor	1.664.912	1.713.509	1.768.830	1.837.802	1.912.003	1.988.483	1.988.483	2.087.907	
	- Ayam Ras Pedaging	ekor	5.221.400	5.523.500	5.909.970	6.382.770	7.008.230	7.568.800	7.568.800	8.325.680	
	- Ayam Ras Petelur	ekor	361.800	383.900	413.300	451.200	502.500	532.650	532.650	559.283	
	- Itik	ekor	163.772	168.312	175.497	184.497	194.093	199.860	199.860	205.586	
	b. Hasil Ternak										
	- Daging	ton	49.479,53	52.448,30	52.448,30	55.595,20	58.590,91	62.466,77	62.466,77	70.188,00	
	- Telur	ton	8.215,94	8.544,58	9.057,25	9.618,80	10.244,03	10.930,38	10.930,38	11.864,57	
	- Susu	ton	3.967,24	4.046,58	4.167,98	4.334,70	4.551,43	4.779,00	4.779,00	5.065,74	
	- Surplus/Defisit Daging		18.667,02	21.147,91	21.741,50	23.449,52	25.279,17	27.238,05	27.238,05	29.351,99	
	- Surplus/Defisit Telur		8.026,48	8.501,81	9.002,25	9.527,98	10.079,41	10.657,46	10.657,46	11.270,32	
	- Surplus/Defisit Susu		3.619,46	3.870,09	4.020,07	4.173,80	4.352,28	4.558,06	4.558,06	4.819,46	
	c. Tingkat Konsumsi Hasil Ternak Perkapita										
	- Daging	Kg/Kap /Thn	11.14	11.92	12.75	13.65	14.60	15.62	15.62	16.72	
	- Telur	Kg/Kap /Thn	4.79	5.03	5.28	5.55	5.82	6.11	6.11	6.42	
	- Susu	Kg/Kap /Thn	2.16	2.29	2.36	2.43	2.51	2.61	2.61	2.75	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	d. Produktivitas Ternak Unggulan Sapi Potong dan Sapi Perah										
	- Jumlah Akseptor IB Sapi Potong	ekor	12,082	13,800	15,870	18,250	20,990	22,000	22,001	25,000	
	- Jumlah Kelahiran IB Sapi Potong	ekor	6,968	8,004	9,205	10,585	12,174	12,760	12,761	14,500	
	- Jumlah Akseptor IB Sapi Perah	ekor	1,353	1,421	1,492	1,567	1,645	1,727	1,728	1,800	
	- Jumlah Kelahiran IB Sapi Perah	ekor	594	824	865	909	954	1,002	1,002	1,004	
	- Produksi Susu Per Ekor Per Hari	Ltr/Ekor/Hari	11.80	12.15	12.52	12.89	13.28	13.68	13.68	14.09	
	e. Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Usaha Peternakan										
	- Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	RTP	26,541	33,833	36,197	37,928	39,776	41,427	41,427	43,056	
	- Ternak Kecil (Kambing, Domba, Kelinci)	RTP	67,842	68,640	70,878	75,332	81,251	85,314	85,314	89,252	
	- Ternak Unggas (Ayam, Itik dan Aneka Unggas)	RTP	741,188	778,922	826,760	885,627	961,677	1,028,979	1,028,979	1,117,873	
6	Tersedianya pasar/terminal agribisnis	unit	-	-	-	1	-	-	1	1	
7	Meningkatnya jumlah usaha agribisnis perdesaan (PUAP)	Gapoktan	40	40	50	70	74	351	-	-	
2.	Bidang Kelautan dan Perikanan										
	1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pemanfaatan potensi pesisir dan laut, Sarana Prasarana Penangkapan, Penyerapan tenaga kerja dan Sarana Pemasaran hasil perikanan									Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	
	a. Produksi Ikan Budidaya										
	- Ikan Konsumsi hasil budidaya	ton	33,343.38	37,822.40	41,630.87	45,664.08	50,030.46	55,033.53	55,033.53	60,536	
	- Benih	Juta Ekor	1,898	2,467	3,208	4,170	5,421	7,047	7,047	8,456	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	b. Produksi Ikan Perairan Umum	ton	818.59	686	694	702	710	718	718	727	
	c. Produksi Ikan Laut	ton	883,41	897	908	919	930	941	941	952	
	Surplus/Defisit Ikan Konsumsi	ton	(4.969,74)	(4.336,04)	(3.570,47)	(2.794,49)	(1.914,68)	(643,57)	(643,57)	865,37	
	Surplus/Defisit benih Ikan	Juta Ekor	569	740	962	1.668	2.168	3.171	3.171	3.805	
	d. Penyerapan Tenaga Kerja										
	- Perikanan Budidaya	RTP	89.200	91.710	91.939	92.169	92.400	92.631	92.631	92.863	
	- Nelayan Perairan Umum	RTP	3.950	4.008	4.088	4.170	4.253	4.338	4.338	4.425	
	- Nelayan Laut	RTP	3.853	3.865	3.875	3.910	3.964	3.992	3.992	4.129	
	e. Jumlah Armada Penangkapan										
	- Kapal Motor (GT)	unit	-	2	4	6	8	10	10	12	
	- Perahu Motor Tempel	unit	149	187	212	237	262	287	287	302	
	- Perahu Tanpa Motor	unit	113	232	222	212	202	192	192	175	
	f. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	buah	1	2	2	3	3	4	4	4	
	g. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	buah	3	3	3	4	4	4	4	4	
	h. Jumlah alat tangkap :										
	- Jaring Insang	pieces	9.959	10.341	11.042	11.740	12.400	13.140	13.140	14.253	
	- Pancing Rawai	basket	915	1.015	1.055	1.097	1.140	1.185	1.185	1.276	
	- Pintur	buah	1.726	2.126	2.317	2.525	2.752	2.999	2.999	3.213	
3.	Bidang Pariwisata										
1	Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya	orang	632,643	670,601	676,928	683,254	689,580	695,907	695,907	702,234	Dinas Pariwisata
	- Wisatawan Nusantara	orang	624,743	662,228	668,475	674,722	680,970	687,217	687,217	693,465	
	- Wisatawan Mancanegara	orang	7,900	8,373	8,453	8,532	8,610	8,690	8,690	8,769	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	2 Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	buah	8	8	9	10	11	12	12	13	
4.	Bidang Industri										
	1 Jumlah unit usaha industri										Diskoperindag
	Industri Kecil	Unit	13.853	13.901	13.949	13.997	14.045	14.093	14.093	14.130	
	Industri Kecil Menengah	unit	16	16	19	22	25	28	28	31	
	2 Jumlah tenaga Kerja industri kecil dan menengah										
	Industri Kecil	orang	15900	16160	16420	16680	16940	17200	17200	17210	
	Industri Kecil Menengah	orang	510	544	578	612	646	680	680	730	
	3 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,35	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	4 Pertumbuhan Industri	%	5	5,3	5,3	5,4	5,4	5,45	5,45	5,45	
5.	Bidang Kehutanan (dan Perkebunan)										
	1 Berkurangnya Lahan Kritis	ha	10.974	9.499	8.024	6.549	5.074	3.599	3.599	2.124	Dishutbun
	a. Penanganan Lahan Kritis	ha	1.942	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	7.375	1.475	
	b. Rehabilitasi Sumber Mata Air	ha	595,9	100	100	100	100	100	500	95,9	
	2 Meningkatnya hasil hutan kayu dan non kayu										
	- Hutan Rakyat	Ha	38.729	40.204	41.679	43.154	44.629	46.104	46.104	45.579	
	• Produksi Kayu		393.154	397.085	401.056	405.067	409.118	413.209	413.209	417.341	
	• Kapasitas Pabrik/Kebutuhan		512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	
	• Kekurangan/Kelebihan Pasokan		(118.846)	(114.945)	(110.944)	(106.933)	(102.882)	(98.791)	(98.791)	(94.659)	
	- Jamur Kayu	Log	179.560	181.355,60	183.169,16	185.000,85	186.850,86	188.719,36	188.719,36	190.606,56	
		kg	89.780	90.678	91.585	92.500	93.425	94.386	94.386	95.503	
	- Lebah Madu	Stup	356	359,74	363,34	366,97	370,64	374,35	374,35	378,09	
		kg/ltr	233	236	238	240	243	245	245	247	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	- Bambu	Ha	5.166	5.217,79	5.269,97	5.322,67	5.375,90	5.429,65	5.429,65	5.484,00	
		batang	1.764.912	1.782.561	1.800.391	1.818.391	1.836,575	1.854,940	1.854,940	1.873,490	
3	Meningkatnya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan TM										
	- Kelapa	Ha	25.006	25.256	25.508,62	25.763,71	26.021,34	26.281,56	26.281,56	26.544,37	
	- T e h	Ha	6.651	6.718	6.784,69	6.852,53	6.921,06	6.990,27	6.990,27	7.060,17	
	- Kopi	Ha	970	980	989,50	999,39	1.009,39	1.019,48	1.019,48	1.029,67	
	- Cengkeh	Ha	1.463	1.492,41	1.492,41	1.507,33	1.522,40	1.537,63	1.537,63	1.553,00	
	- Karet	Ha	102	124,00	124,00	136,00	149,00	164,00	164,00	181,00	
4	Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan										
	- Kelapa	ton	24,513	24,758	25,005.71	25,255.77	25,508.33	25,763.41	25,763.41	26,021.04	
	- T e h	ton	10,220	10,322	10,425.42	10,529.68	10,634.97	10,741.32	10,741.32	10,848.74	
	- Kopi	ton	998	1,008	1,018.06	1,028.24	1,038.52	1,048.91	1,048.91	1,059.40	
	- Cengkeh	ton	450	455	459.05	463.64	468.27	472.95	472.95	477.68	
	- Karet	ton	66	71.68	80.60	89.76	98.34	109.88	109.88	120.87	
5	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan										
	- Kelapa (PSP.1,5 ton/ha/thn)	ton/Ha	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.04	
	- T e h (PSP.2 ton/ha/thn)	ton/Ha	1.54	1.55	1.57	1.58	1.60	1.61	1.61	1.63	
	- Kopi (PSP.1,3 ton/ha/thn)	ton/Ha	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.08	1.09	
	- Cengkeh (PSP. 0,3 ton/ha/thn)	ton/Ha	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	
	- Karet (PSP.1,3 ton/ha/thn)	ton/Ha	0.64	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	
6	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja komoditi unggulan perkebunan	Orang	112,776	113,340	113,907	114,476	115,048	115,624	115,624	116,780	
7	Meningkatnya Jumlah dan Kelas Kelompok Tani Kehutanan/ Perkebunan										

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	- Pemula	Kel	823	823	823	819	819	819	819	884	
	- Lanjut	Kel	255	255	255	257	257	257	257	259	
	- Madya	Kel	37	37	37	38	38	38	38	39	
	- Utama	Kel	4	4	4	5	5	5	5	6	
6. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
1	Meningkatnya Jumlah koperasi baru per tahun		26	12	14	16	18	21	21	23	Diskoperindag
2	Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat	buah	117	128	137	145	152	160	160	162	
3	Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif	buah	323	371	396	423	452	483	483	483	
4	Meningkatnya Jumlah Koperasi	buah	664	676	690	706	724	745	745	745	
5	Meningkatnya Jumlah Anggota	orang	148,617	149,360	150,106	151,606	152,364	153,125	153,125	153,125	
6	Meningkatnya Jumlah Modal	Rp (ribuan)	112,952,508	114,646,795	116,366,495	118,111,992	119,883,671	121,681,926	121,681,926	122,681,926	
7	Meningkatnya Jumlah Karyawan	orang	1,517	1,547	1,582	1,621	1,664	1,713	1,713	1,783	
8	Meningkatnya Total asset	Rp (ribuan)	244,958,984	246,183,778	248,645,615	251,629,362	254,900,543	258,724,051	258,724,051	259,030,062	
9	Meningkatnya Volume usaha	Rp (ribuan)	141,980,329	142,690,230	144,117,132	145,846,537	147,888,380	150,106,705	150,106,705	152,106,705	
10	Meningkatnya Rugi/Laba	Rp (ribuan)	5,499,336	5,581,076	5,692,697	5,835,014	6,126,764	6,463,736	6,463,736	6,873,500	
11	Meningkatnya Jumlah UKM	Unit	27,586	29,138	30,595	32,125	33,731	35,418	35,418	35,418	
7. Bidang Penanaman Modal											
1	Kontribusi keberadaan BUMD (PD. BPR) :										Bag. Penanaman Modal
	Total aset	Rp (000,-)	245,851,287	270,436,415.65	297,480,057.21	327,228,062.94	359,950,869.23	395,945,956.15	395,945,956.15	395,945,956.15	
	Kredit yang disalurkan	Rp (000,-)	196,378,866	216,016,752.35	237,618,427.59	261,380,270.35	287,518,297.38	316,270,127.12	316,270,127.12	316,270,127.12	
	Rugi/Laba	Laba	10,419,872	11,461,859.16	12,608,045.07	13,868,849.58	15,255,734.54	16,781,307.99	16,781,307.99	16,781,307.99	
2	Kontribusi keberadaan BUMD (PDAM) :										

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	Total aset	Rp.(000)	23,472,229.56	25,819,452.52	28,401,397.77	31,241,537.55	34,365,691.30	37,802,260.44	37,802,260.44	37,802,260.44	
	Air yang terjual	Rp.(000)	19,663,434.73	21,629,778.20	23,792,756.02	26,172,031.62	28,789,234.79	31,668,158.26	31,668,158.26	31,668,158.26	
	Rugi/Laba	Rp.(000)	2,278,696.77	2,506,566.45	2,757,223.09	3,032,945.40	3,336,239.94	3,669,863.93	3,669,863.93	3,669,863.93	
3	Kontribusi keberadaan PDUP :										
	Total aset	Rp.(000)	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	4,862,025	5,105,126	5,105,126	5,105,126	
	Rugi/Laba	Rp.(000)	250,000	262,500	275,625	289,406	303,877	319,070	319,070	319,070	
8.	Bidang Perdagangan										
1	Jumlah wajib daftar perusahaan	unit	651	684	718	753	790	829	829	846	Diskoperindag
2	Jumlah sarana dan prasarana promosi perdagangan yang memadai										
	- Rumah Tasik		-	-	1	-	-	-	1	1	
	- Workshop Golok		-	-	-	1	-	-	1	1	
3	Volume dan nilai ekspor Kab.Tasikmalaya	US \$	3.617.967.24	3.690.326.58	3.764.133.11	3.839.415.77	3.916.20.08	3.994.528.16	3.994.528.16	4,074,419	
4	Laju Pertumbuhan ekspor Kab.Tasikmalaya	%	2	2.5	3	3.5	4	4.5	4.5	5	
5	Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kab.Tasikmalaya (PMA & PMDN) per tahun	Orang	50	-	100	100	100	100	100	100	
6	Laju Pertumbuhan Investasi		2	2	2	2	2	2	10	2 / 10	
7	Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang memadai										
	- Pasar Kabupaten	Buah	5	5	6	6	7	7	7	8	
	- Pasar Desa	Buah	67	67	72	77	82	87	87	92	
9.	Bidang Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum										
1	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	KPPT
2	Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
10.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Jumlah desa yang mendapatkan dana stimulan desa unggul dan mandiri per tahun	Desa	0	0	39	39	39	39	156	39	BMPKB
2	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki BUMDES	buah	8	9	10	11	12	13	13	13	
3	Meningkatnya Prestasi dalam Lomba Desa	Keg	0	5	4	3	2	1	1	1	
4	Meningkatnya kemandirian pangan, ketersediaan cadangan pangan, fasilitasi lumbung pangan perdesaan, dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat										Bag. Ketahanan Pangan
	- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Gapoktan	6	3	3	3	3	3	21	3	
	- Tersedianya Lumbung Pangan Perdesaan	Poktan	20	15	10	10	10	10	75	10	
	- Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	desa/kelompok	46		40			40	126		
	- Tersedianya peta rawan pangan	paket	0		1			1	1	1	
5	Meningkatnya jumlah Kelompok Simpan Pinjam melalui mekanisme kegiatan lumbung desa	Kelompok	2	0	3	4	5	6	6	7	
6	Meningkatnya jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Kelompok	12,860	12,865	12,870	12,875	12,880	12,885	12,885	12,890	BMPKB
7	Jumlah Desa yang sudah memiliki profil desa	desa	351	351	351	351	351	351	351	351	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)											
1.	Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	Kesesuaian OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku	%	92% (yang belum sesuai Inspektorat dan Ketahanan Pangan)	92	100	100	100	100	100	100	Bag. Organisasi
2	Jumlah SKPD yang telah dianalisis beban kerjanya	0	0 (penataan kelembagaan belum didasarkan pada analisa beban kerja)	0	5	10	20	67	67	67	
3	Meningkatnya Jumlah SKPD yang bersertifikat ISO	buah	65 (25 + 1 +39)	65	67	67	67	67	67	67	
4	Urusan yg sdh diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yg diterbitkan oleh pemerintah	buah	0	-	3	5	9	13	13	13	
5	Ketepatan waktu penyampaian LPPD, ILPPD, LKPJ berdasarkan PP no. 3 thn 2007	Tepat/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bag. Organisasi, Bag. Pemerintahan
6	Meningkatnya Status kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat	Rendah sedang, tinggi, sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	tinggi	
7	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja instansi pemerintah daerah	Tepat/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
8	Jumlah MOU Kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya	buah	2	3	4	5	6	7	7	7	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
9	Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki efektivitas pemerintahan	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda	Bagian Hukum
			45 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	200 Perda	40 Perbup	
			292 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	150 Perda	300 Keppub	
10	Jumlah sosialisasi/penyuluhan hukum terhadap masyarakat.	kali	15	10	10	10	10	10	50	10	
11	Jumlah produk hukum yang aspiratif dan berpihak pada publik	buah									
12	Jumlah perda yang disetujui	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda	
			45 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	200 Perbup	40 Perbup	
			292 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	1500 Keppub	300 Keppub	
13	Jumlah perda inisiatif	buah	0	2	3	3	3	3	3	3	
14	Tingkat efisiensi realisasi belanja daerah, yang terdiri dari :										DPPKAD
	a. Efisiensi Realisasi Belanja Daerah (dengan realisasi input ≤ 100% tercapai dan outcome ≥ 100%)	%	92,36	92,5	92,75	93	93,3	93,7	94	94	
	b. Efektifitas Realisasi Belanja daerah (dengan realisasi input ≤ 100% tercapai dan outcome ≥ 100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah	WDP/WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
16	Proporsi belanja yang dialokasikan ke desa	%	2,98	3,25	3,29	3,32	3,37	3,38	3,4	3,4	
17	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah	%	77,07	78,67	80,21	81,70	83,12	84,47	84,47	85,74	
18	Tingkat kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Terealisasinya target pendapatan asli daerah setiap tahun: a. Pajak daerah, b. Retribusi daerah, c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang	%	61,5	100	100	100	100	100	100	100	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah										
20	Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	1,05	0,09	1,05	1,14	1,23	1,32	1,32	1,41	
21	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	%	3,6	3,75	3,58	3,64	4,31	4,38	4,38	4,45	
22	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keungan Pemerintah Daerah yang Handal, Reliable, dan Relevan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Tersusunnya APB Desa yang akuntabel	%	0	0	50	75	100	100	100	100	
24	Terpenuhinya keseimbangan rasio antara pegawai yang memenuhi kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada.										BKPLD
	Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural :										
	1) Eselon II	%	92,59	100	100	100	100	100	100	100	
	2) Eselon III	%	75,96	97,81	100	100	100	100	100	100	
	3) Eselon IV	%	32,44	33,66	100	100	100	100	100	100	
25	Jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis	orang	98	0	400	300	230	250	250	250	
26	Jumlah Aparatur desa yang telah mengikuti diklat	orang	116	66	60	60	60	60	422	60	
27	Tersusunnya pedoman penyusunan formasi dan pengadaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan (rightsizing)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1	
28	Tersusunnya standar/pola pengembangan karier pegawai yang baku (PERDA/PERBUP)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
29	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Obdit	168	142	142	142	142	142	142	142	Inspektorat
30	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	54	100	100	100	100	100	100	100	
31	Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dan Pemutakhiran Data	%	46	100	100	100	100	100	100	100	
32	Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilaksanakan	paket	0	45	Pengadaan Barang/jasa dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku						Bag. Bina Program
2. Bidang Kearsipan											
1	Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	SKPD	1	2	4	6	8	10	10	10	Kantor Arsip
2	Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat	orang	20	50	75	100	125	150	150	150	
3. Bidang Telekomunikasi dan Informatika											
1	Web Site milik pemerintah daerah (updating fitur)	paket	1	26	13	13	13	13	26	13	Kantor Litbang
2	Adanya media informasi pemda yg dpt diakses oleh publik (Buletin Sukapura)	buah	-	-	3000	4000	5000	6000	6000	6525	Bag. Humas
3	Jumlah pemberitaan di Media Cetak (Pusat, Regional, dan Lokal) dan Media Elektronik	buah	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6000	6525	
4	Jumlah pemberitaan / siaran melalui (RSPD)	buah	0	200	225	250	275	300	300	300	
4. Bidang Perencanaan Pembangunan											
1	Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda, BPS,
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	orang	353	360	360	360	360	360	360	360	Bappeda

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
3	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		
4	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan Perbup	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		
5	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100		
6	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan Kab.Tasikmalaya dengan OPD	%	100	100	100	100	100	100	100		
5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
1	Menurunnya Pelanggaran Perda / angka kriminalitas										Kantor Pol PP, Kesbang linmas
	Pencurian Berat	Kasus	43	41	39	37	35	33	33	31	
	Pencurian Biasa	Kasus	8	7	6	5	3	3	3	1	
	Pencurian Kekerasan	Kasus	3	2	1	0	0	0	0	0	
	Pencurian kendaraan bermotor	Kasus	44	42	40	38	36	34	34	32	
	Penggelapan	Kasus	2	1	0	0	0	0	0	0	
	Pembunuhan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penipuan	Kasus	25	24	23	22	21	20	20	19	
	Uang Palsu	Kasus	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Narkotika	Kasus	14	13	12	11	10	9	9	8	
	WTS	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perkosaan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Jumlah pos induk/pos kamling di desa	buah	2,754	2,793	2,832	2,871	2,910	2,800	2,800	2,839	
3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	%	0.0073	0.0075	0.0080	0,0085	0,0090	0,0095	0,0095	0,0100	
4	Menurunnya tindakan anarkis dan konflik	Kali	40	35	30	25	20	15	15	10	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
5	Jumlah Satuan Linmas yang aktif dan terlatih	Orang	1001	140	390	390	390	390	2701	390	
6	Jumlah Orpol,	Buah	29	29	29	29	29	29	29	34	
7	Jumlah, Ormas /LSM	Buah	185	205	210	215	220	225	225	230	
8	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu										KPU
	a. Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati	%	66,22 (2006)	66,92	0	0	0	0	66,92	70	
	b. Pemilu Kada Gubernur/Wakil Gubernur	%	68,28 (2008)	0	0	69	0	0	69	0	
	c. Pemilu kada Legislatip	%	75,25 (2009)	0	0	0	70	0	70	0	
	d. Pemilu Kada Presiden / Wapres	%	75,71 (2009)	0	0	0	70	0	70	0	

MISI 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan

1. Bidang Penataan Ruang											
1	Tersusunnya Dokumen RTRW	Buah	1	-	-	-	-	1	1	0	Bappeda
2	Jumlah RDTR Kawasan Strategis Kabupaten	KSK	0	-	2	6	10	13	13	13	Distarkim
3	Jumlah RTRK dan atau RTBL Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, potensial	RTR	1	1	2	3	4	5	5	5	
4	Jumlah RDTR Kawasan Perkotaan	KP	1	4	5	6	7	8	8	8	
5	Jumlah Zoning Regulation yang dapat disusun	ZR	3	3	5	7	9	11	11	11	
6	Jumlah Perda rencana tata ruang	Buah Perda	2	3	5	8	10	12	12	15	
7	Prosentase perwujudan Kawasan Lindung	%	30	32	34	36	38	40	40	41	
8	Prosentase perwujudan Kawasan Budidaya	%	40	45	50	55	60	65	65	65	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
9	Jumlah penerbitan permohonan perijinan (IMB)	Pemohon	-	500	1000	1500	2000	2500	2500	500	KPPT
10	Prosentase jumlah penerbitan sertifikat tanah	%	40	45	50	55	60	65	65	65	BPN
2. Bidang Pekerjaan Umum											
1	Jumlah Alokasi Dana Desa	Desa	351	351	351	351	351	351	351	351	BPMKB
2	Panjang jalan desa yang dibangun / direhabilitasi	Ruas	107	150	150	150	200	200	200	200	Bina Marga
3	Jumlah sarana dan prasarana air bersih perdesaan	%	10	20	30	40	50	60	60	70	Distarkim
4	Panjang saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi	meter	750	1500	2000	2500	3000	3000	3000	1000	Bina Marga
5	Prosentase cakupan pelayanan irigasi perdesaan	%	20	25	30	35	40	45	45	50	
6	Jumlah saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi	buah	50	52	54	56	58	60	60	62	
7	Terbangunnya jalan Ciawi-Singaparna	%	50	55	60	65	70	100	100	100	
8	Terbangunnya jalan alternatif Ciawi-Kadipaten	%	0	-	-	-	-	10	10	30	
9	Kondisi jalan kabupaten :										
	1. Kondisi Baik.	km	340.855	370.855	410.855	450.855	490.855	530.855	530.855	550.85	
	2. Kondisi sedang	km	270.958	160.958	130.958	100.958	70.958	40.958	40.958	39.958	
	3. Kondisi rusak ringan	km	269.635	369.635	379.635	389.635	399.635	409.635	409.635	410.64	
	4. Kondisi rusak berat	km	421.875	401.875	381.875	361.875	341.875	321.875	321.875	301.875	
	Kondisi jembatan kabupaten :										
	1. Kondisi Baik.	buah	337	339	345	350	355	360	360	364	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
	2. Kondisi sedang	buah	11	10	9	8	7	6	6	6	
	3. Kondisi rusak ringan	buah	23	20	17	15	13	11	11	10	
	4. Kondisi rusak berat	buah	21	66	64	62	60	58	58	55	
10	Jumlah pembangunan jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna, Jembatan masuk RSUD dan Jembatan pada ruas jalan strategis Kabupaten	buah	11	19	22	25	28	28	28	30	
11	Panjang peningkatan jalan	km	30	30	30	35	35	40	170	40	
12	Panjang jalan yang ditangani melalui kegiatan rehabilitasi jalan	km	75	45	45	50	50	50	240	50	
13	Banyaknya jembatan yang ditangani melalui rehabilitasi jembatan	buah	2	1	5	5	5	5	21	5	
14	Persentasi penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	%	20	20	20	20	20	20	20	20	
15	Jumlah Daerah Irigasi	buah	276	276	276	276	276	276	276	276	
	1. Jumlah DI yang dikelola oleh Kabupaten (layanan luas areal s/d 1.000ha)	buah	264	264	264	264	264	264	264	264	
	2. Jumlah DI yang dikelola oleh Propinsi (lintas kabupaten)	buah	10	10	10	10	10	10	10	10	
	3. Jumlah DI Strategis	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	
16	Jumlah Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	buah DI	30	30	30	30	30	30	30	30	
17	Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya yang terehabilitasi	buah	5	5	5	5	5	5	5	5	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
3.	Bidang Perumahan										
	1 Prosentase panjang Jalan Desa terhadap luas kawasan permukiman perdesaan	%	15	18	21	24	27	30	30	35	Distarkim
	2 Prosentase cakupan pelayanan air bersih	%	35	40	45	50	55	60	60	65	
	3 Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah	%	5	10	15	20	25	30	30	35	
	4 Prosentase produk sampah yang tertangani	%	26	29	32	35	38	41	41	44	
	5 Prosentase luas Jalan Perkotaan terhadap luas kawasan permukiman perkotaan	%	20	21	22	23	24	25	25	27	
	6 Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan	%	25	28	31	34	37	40	40	43	
	7 Prosentase Penataan dan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan	%	5	5	15	25	35	45	45	65	
	8 Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan	%	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5	52.5	54	
	9 Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan	%	35	40	45	50	55	60	60	65	
	10 Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
	11 Persentase luas cakupan pelayanan air minum terhadap luas wilayah perkotaan	%	38	40	42	44	46	48	48	50	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
12	Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran	%	-	10	15	20	25	30	30	35	
13	Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	%	60	65	70	75	80	85	85	85	
14	Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah	%	25	30	35	40	45	50	50	55	
15	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/pembangunan baru	Unit	-	150	300	450	600	750	750	150	
16	Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih	%	38	42	46	50	54	58	58	60	
17	Berkurangnya jumlah titik kawasan kumuh	Titik Kawasan	5	4	4	3	2	2	2	2	
4 Bidang Perhubungan											
1	Pembangunan Terminal Type B Kabupaten Tasikmalaya	unit	-	-	-	1	-	-	1	-	Dinas Perhubungan
2	Tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)										
	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	buah	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2250	2250	
	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	buah	300	400	500	600	700	800	800	800	
	Pengadaan Warning Light dan Traffic Light		4	9	14	19	24	29	29	33	
	Pengadaan Marka Jalan	meter	-	-	100	200	300	400	400	400	
	Pengadaan Traffic Cones	buah	100	100	200	300	400	500	500	550	
	Pengadaan Guard Rail	meter	100	500	1000	1500	2000	2500	2500	2500	
	Pengadaan Patok Pengaman	buah	-	-	100	200	300	400	400	450	
	Pengadaan Reapeter	buah	-	-	1	-	-	-	1	-	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
3	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan bermotor Keliling	paket	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2250	2250	
4	Optimalisasi Terminal Kabupaten Tasikmalaya (Terminal Pagerageung, Ciawi, Rajapolah, Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Taraju, Bojonggambir, Sodonghilir, Sukaraja, Salawu, Cikatomas, Pancatengan, Cikalong, Tanjungjaya dan Cineam)	buah	-	-	1	4	4	6	15	3	
5	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral										
1	Jumlah jaringan listrik dibangun										Dinas Pertambangan
	- JTM	kms	102.734	1.892	9.082	10.500	9.094	7.369	37.937	6.026	
	- JTR	kms	164.737	15.714	28.340	2.644	41.715	50.236	138.649	27.343	
	- Trafo	buah	49	8	11	12	12	8	51	10	
2	Jumlah Pelanggan listrik	KK	248	1.594	1.455	1.639	2.241	2.056	8.985	1.095	
3	Jumlah desa yang terjangkau pelayanan listrik	desa	351	351	351	351	351	351	351	351	
4	Jumlah Penerangan Sarana umum	unit	98	100	150	170	180	200	200	200	
5	Jumlah usaha penambangan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit	Buah	80	60	60	60	60	60	60	60	

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal RPJMD (2010)	Target Indikator Kinerja (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi akhir RPJMD (2015)	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015			
6	Bidang Lingkungan Hidup										
1	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	buah	105	110	115	120	125	130	130	135	Kantor LH
2	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	buah	105	110	115	120	125	130	130	135	
3	Jumlah usaha/kegiatan pertambangan yang telah melakukan reklamasi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah industri yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara	buah	2	4	6	8	10	12	12	14	
5	Jumlah perusahaan yang memiliki ijin pengumpulan sementara limbah B3	buah	1	1	-	-	-	-	1	1	
6	Terbangunnya Taman Geologi Jasper	%	-	-	-	30	60	80	80	100	
7	Jumlah Sumber mata air yang dikonservasi	buah	5	-	10	15	20	25	25	27	
8	Jumlah dan cakupan pengujian kualitas lingkungan										
	- Kualitas air	sungai	10	10	10	10	10	10	10	10	
	- Kualitas udara (bergerak)	titik	1	5	5	5	5	5	5	5	
9	Jumlah RTH	buah	1	2	4	6	8	10	10	10	

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1. Program Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 akan menjadi pedoman penyusunan rencana sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2016 tetap mengacu RPJM Daerah tahun 2011 - 2015, sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD ini ditambahkan rancangan program dan target indikator kinerja untuk satu tahun kedepan, yaitu tahun 2016. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati hasil Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan oleh peraturan bupati dan peraturan daerah hendaknya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJMD) Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya, serta menjamin konsistensi antara RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan RPJMD 2011-2015, Renstra SKPD, dan RKPD
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD

(Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD, sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2015 dapat dicapai dengan maksimal.

4. RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2015 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
6. RKPD Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. RKPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
8. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
9. Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 setiap SKPD perlu memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

BAB X

PENUTUP

Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. Karena itu RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, memiliki kesinambungan dengan program pembangunan pemerintahan sebelumnya, serta mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang. RPJM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ini merupakan dokumen perencanaan, yang berkaitan dengan arah kebijakan dan program-program yang hendak diimplementasikan selama lima tahun ke depan (2011-2015), termasuk di dalamnya target-target yang hendak dicapai dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap bidang pembangunan.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan prioritas pembangunan melalui suatu Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa.
2. Peningkatan Jalan Desa
3. Listrik Masuk Desa
4. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan
5. Telekomunikasi dan informasi masuk desa

Prioritas pembangunan tersebut disinergikan dengan program-program lain guna mencapai visi besar Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai pada tahun 2015 yaitu : **"Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan"**. Untuk pencapaian misi tersebut dilaksanakan 4 misi, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqlkarimah, Berkualitas dan Mandiri
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran, guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang sinergis, terpadu, berkesinambungan.

Betapapun baiknya sebuah RPJMD, tidak akan memiliki makna yang berarti bila tidak diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2011-2015.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran					
1. Mewujudkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan	1.1 Meningkatnya nilai-nilai empati masyarakat terhadap kerawanan sosial	1 Meningkatnya pelayanan pemerintahan untuk kelompok dhuafa	1.1.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar	1 Fasilitasi bantuan dana untuk fakir miskin dan anak terlantar	1 Tersalurkannya bantuan dana untuk fakir miskin dan anak terlantar	1. Setda, 2. Kantor Kementerian Agama 3. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja	
		Jumlah anak terlantar		2 Pembinaan Anak Terlantar	1 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar		
		Jumlah anak terlantar yang ditangani		3 Subsidi Panti Sosial	1 Pemberian bantuan tambahan permakanan		
		Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak yang mendapat bantuan					
		Jumlah Panti Sosial Penyandang cacat yang mendapat bantuan					
		Jumlah Panti Sosial Jompo / Lansia terlantar yang mendapat bantuan					
		Jumlah keluarga fakir miskin					
		Jumlah keluarga fakir miskin yang ditangani					
		2 Menurunnya konflik sosial berlatarbelakang agama dan etnik	1.1.2 Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan	1 Pembinaan nilai-nilai agama dan kebangsaan serta Peningkatan koordinasi lembaga keagamaan	1 Adanya kurikulum dan mata pelajaran agama yang proporsional		
					2 Membina lembaga-lembaga keagamaan		
					3 Peningkatan dan pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		
	1.2 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual	3 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan	1.2.1 Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan	1 Fasilitasi pembangunan lembaga keagamaan	1 Pengembangan sarana dan prasarana lembaga keagamaan		
		- Pondok Pesantren					
		- Mesjid					
		- Madrasah					
		- Jumlah Bantuan Stimulan Guru Madrasah Diniyah					
		- Jumlah Guru Madrasah Diniyah					
		- Majelis Talim					

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	1.2.2 Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan	1 Fasilitasi bantuan keagamaan	1 Peningkatan syiar agama dalam kegiatan keagamaan	
		5 Meningkatnya jumlah jemaah haji	1.2.3 Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji	1 Fasilitasi pelaksanaan ibadah haji	1 peningkatan jumlah jemaah haji setiap tahun	
		6 Meningkatnya prestasi keagamaan	1.2.4 mengikutsertakan kalifah ketingkat provinsi dan Nasional	1 Fasilitasi penyelenggaraan Musabaqoh mulai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	1 Peningkatan kualitas musabaqoh	
	1.3 Meningkatnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat	1 Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Lembaga Keagamaan	1.3.1 Meningkatkan pendidikan keagamaan secara proporsional	1 Peningkatan bantuan lembaga keagamaan	1 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan	
		2 Meningkatkan jumlah koperasi pondok pesantren	1.3.2 Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan koperasi di Pondok Pesantren	1 Pemberdayaan Usaha Kecil dilingkungan Pondok Pesantren	1 Terlayannya anggota koperasi pondok pesantren	
		3 Meningkatnya Pondok Pesantren yang mempunyai BMT	1.3.3 Meningkatnya lembaga keuangan syariah	1 Peningkatan aksesibilitas pondok pesantren kepada lembaga keuangan syariah	1 Terpenuhinya kebutuhan permodalan mikro dilingkungan	
		4 Meningkatnya Pondok Pesantren yang mempunyai Pos kesehatan Pesantren (Poskestren)	1.3.4 Peningkatan hidup bersih dan sehat	1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan pesantren	1 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesehatan	
	1.4 Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq dan sadaqah	1.4.1 Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi umat	1 Peningkatan peran lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan sadaqah	1 Peningkatan pengumpulan, pegelolaan yang amanah, dan akurasi pendayagunaan	
		2 Meningkatkan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shodakoh	1.4.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan Bazda	2 Penguatan SDM Pengelola Bazda	1 Pelatihan dan Sosialisasi Pengelola Bazda	
2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan perbaikan tata kelola	2.1 Tercapainya wajar dikdas 9 tahun	1 Meningkatnya APK SD/MI Sederajat	2.1.1 Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan dasar	1 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Pembangunan/rehabilitasi / pemeliharaan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratotium, dan bangunan sekolah lainnya pada jenjang SD, SMP dan yang sederajat	Dinas Pendidikan
		2 Meningkatnya APM SD/MI Sederajat			2 Pengadaan/pemeliharaan jaringan instalasi listrik, air bersih dan sanitary pada jenjang SD dan SMP dan yang sederajat	
		3 Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat			3 Penyediaan/pengadaan meubelair, buku pelajaran / bacaan, alat praktek dan peraga siswa pada jenjang SD, SMP dan yang sederajat	
		4 Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat			4 Penyediaan/pengadaan buku raport, alat tulis siswa dan pakaian seragam sekolah pada jenjang SD, SMP dan yang sederajat	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		5 Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar			5 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD, SMP dan yang sederajat	
					6 Merger tingkat satuan pendidikan SD	
		6 Idealnya rasio siswa terhadap ruang kelas			7 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk jenjang SD, SMP dan yang sederajat	
		7 Idealnya rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas			8 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	
		8 Idealnya rasio guru terhadap rombongan belajar			9 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	
		9 Meningkatnya Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Standar Nasional			10 Pengembangan materi dan metode pelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	
		10 Meningkatnya Sekolah Dasar Standar Nasional			11 Pengembangan Teknologi, Informasi dan komunikasi Pendidikan Dasar	
		11 Meningkatnya Sekolah Dasar Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)				
		12 Meningkatnya Sekolah Dasar bertaraf Internasional (SBI)				
		13 Meningkatnya SMP/MTs Rintisan berstandar Nasional				
		14 Meningkatnya SMP/MTs berstandar Nasional				
		15 Meningkatnya SMP/MTs Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)				
		16 Meningkatnya sekolah yang berbasis TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar				
	2.2 Terlaksananya rintisan wajar 12 tahun	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA	2.2.1 Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan menengah	1 Pendidikan Menengah	1 Pembangunan/rehabilitasi / pemeliharaan ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratotium, dan bangunan sekolah lainnya pada jenjang SMU dan yang sederajat	
		2 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SLTA/MA			2 Pengadaan/pemeliharaan jaringan instalasi listrik, air bersih dan sanitary pada jenjang SMU dan yang sederajat	
		3 Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA			3 Penyediaan/pengadaan meubelair, buku pelajaran / bacaan, alat praktek dan peraga siswa pada jenjang SMU dan yang sederajat	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		4 Meningkatnya SMA/MA/SMK Rintisan Sekolah berstandar Nasional			4 Penyediaan/pengadaan buku raport, alat tulis siswa dan pakaian seragam sekolah pada jenjang SMU dan yang sederajat	
		5 Meningkatnya SMA/MA/SMK berstandar Nasional			5 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SMU dan yang sederajat	
		6 Meningkatnya SMA/MA/SMK Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)			6 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk jenjang SMU dan yang sederajat	
		7 Meningkatnya daya tampung SMA,SMK dan MA			7 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	
		8 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia SSN dan SBI SMA/SMK			8 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	
		9 Meningkatnya angka melanjutkan perguruan tinggi			9 Pengembangan materi dan metode pelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	
		10 Jumlah perguruan tinggi			10 Pembangunan sekolah kejuruan berbasis agro industri, kelautan dan pariwisata.	
		11 Meningkatnya rata-rata lama sekolah			11 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	
		12 Meningkatnya sekolah yang berbasis TIK dalam proses pembelajaran pendidikan menengah			12 Pengembangan Teknologi, Informasi dan komunikasi Pendidikan Menengah	
	2.3 Meningkatnya lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	2.3.1 Peningkatan lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	1 Pendidikan Anak Usia Dini	1 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	
		2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini			2 Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	
		3 Meningkatnya angka melek huruf		2 Pendidikan Non Formal	1 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	
		4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM)			2 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kecakapan Hidup	
		5 Meningkatnya jumlah lembaga kursus			3 Penyelenggaraan Paket A setara SD	
		6 Jumlah peserta program paket A			4 Penyelenggaraan Paket B setara SMP	
		7 Jumlah peserta program paket B			5 Penyelenggaraan Paket C setara SMU	
		8 Jumlah peserta program paket C			6 Life Skill / Pendidikan Kecakapan Hidup	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran					
2.4 Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal		1 Terpenuhinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	2.4.1 Peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik	1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan		
		2 Meningkatnya tingkat pendidikan guru			2 Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan		
		3 Meningkatnya jumlah guru yang sudah mempunyai bersertifikasi			3 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)		
					4 Mapping Guru		
		4 Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi			2 Manajemen Pelayanan Pendidikan		1 Penetapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
		5 Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS)					2 Pelaksanaan Ujian Nasional
		6 Meningkatnya Nilai Rata-Rata Ujian Nasional / Ujian Sekolah Beraraf Internasional (UN/USBN)					3 Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi ilmiah di bidang pendidikan
	7 Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru		4 Pemberdayaan komite sekolah				
2.5 Tersedianya bantuan beasiswa / keringanan biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu serta siswa berprestasi		1 Meningkatnya jumlah beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar	2.5.1 Pemberian beasiswa/keringanan biaya pendidikan terhadap masyarakat yang tidak mampu secara selektif dan proporsional serta beasiswa bagi siswa berprestasi	1 Beasiswa pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi	1 Penyediaan beasiswa transisi untuk siswa yang tidak mampu		
		2 Meningkatnya jumlah penerima beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar			2 Penyediaan beasiswa untuk anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu		
		3 Meningkatnya jumlah beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi			3 Penyediaan beasiswa untuk anak yang berprestasi		
		4 Meningkatnya jumlah penerima beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi					
		5 Menurunnya jumlah siswa dropout					
2.6 Meningkatnya kreatifitas siswa di semua jenjang pendidikan		1 Meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba kreatifitas di tingkat propinsi dan nasional	2.6.1 Peningkatan kreatifitas siswa di semua jenjang pendidikan di tingkat kabupaten, Propinsi dan Nasional	1 Pengembangan kreatifitas siswa	1 Olimpiade Sciene dan Matematika, Olimpiade Olahraga dan Seni, Lomba Kreatifitas Siswa, Liga Pelajar Indonesia dan Lomba kreatifitas lainnya.		
2.7 Meningkatnya kemampuan dan budaya baca masyarakat		1 Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan	2.7.1 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	1 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca pada masyarakat	Kantor Perpustakaan	
		2 Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan			2 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah		

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		3 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan desa/kelurahan			3 Penyediaan bahan pustaka untuk perpustakaan umum daerah	
		4 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum				
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat	3.1 Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang didukung oleh kemandirian masyarakat	1 Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	3.1.1 Peningkatan kemandirian masyarakat dalam kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	1 Pengembangan Lingkungan Sehat	1 Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
		2 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas			2 Melaksanakan sosialisasi dan monitoring pada penduduk pengguna air	
		3 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan.			3 Monitoring dan pengambilan sampel air serta pemeriksaan bakteriologi	
		4 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat			4 Monitoring dan sosialisasi pada masyarakat dan stimulan jamban sehat	
		5 Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			5 Ada pemicuan, natural lider dan monitoring dilokasi pemicuan	
		6 Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum			6 Monitoring sosialisasi dan pengambilan sampel air	
		7 Jumlah Puskesmas yang memiliki Water Test KIT			7 Monitoring dan pemeriksaan air menggunakan water test kit	
		8 Jumlah Desa yang di advokasi			8 Sosialisasi dan advokasi ke desa	
		9 Jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABs (Buang Air Besar Sembarang)/ ODF = Open Defaction Free			9 Monitoring dan deklarasi STOP BABS/ODF	
		10 Meningkatnya % keluarga menggunakan SPAL			10 Monitoring dan sosialisasi SPAL	
		11 Meningkatnya persentase tempat-tempat umum dan Industri (TTUI) yang memenuhi syarat kesehatan			11 Monitoring dan sosialisasi TTUI	
		12 Meningkatnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan			12 Monitoring dan sosialisasi	
		13 Meningkatnya depot air minum yang mempunyai laik sehat			13 Sosialisasi dan pembinaan pada Lokasi Depot Air Minum	
		14 Meningkatnya yang mendapat ASI Eksekutif		2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Sosialisasi dan penyuluhan tentang ASI Eksekutif	
		15 Meningkatnya persentase desa siaga			2 Sosialisasi & penyuluhan serta pembangunan media promosi & informasi desa siaga	
		16 Meningkatnya Rumah Tangga Sehat (RT ber-PHBS)			3 Sosialisasi dan Penyuluhan serta pengembangan media promosi & informasi perilaku hidup bersih dan sehat PHBS	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		17 Meningkatnya strata Posyandu Purnama Mandiri			4 Sosialisasi dan penyuluhan serta pengembangan media promosi di tingkat Posyandu	
		18 Meningkatnya Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren)			5 Pelatihan santri husada (Santri Poskentren)	
		19 Meningkatnya Pengembangan Saka Bhakti Husada (SBH)			6 Pelatihan Kader Saka Bhakti Husada	
	3.2 Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1 Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	3.2.1 Peningkatan upaya penemuan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian kasus penyakit menular dan tidak menular	1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	
		2 Meningkatnya Cakupan Campak			2 Pengadaan vaksin penyakit menular	
		3 Meningkatnya Cakupan DPT III			3 Pelayanan vaksinasi dan Imunisasi	
		4 Meningkatnya Case Detection Rate TB			4 Pencegahan penularan penyakit endemik	
		5 Meningkatnya kesembuhan penderita TBC BTA+			5 Pemusnahan / karantina sumber penyebab penyakit menular	
		6 Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun			6 Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	
		7 Meningkatnya cakupan penemuan ISPA			7 Peningkatan komunikasi , informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	
		8 Meningkatnya cakupan balita dengan pneumonia ditangani				
		9 Meningkatnya Kasus DBD tertangani				
		10 Meningkatnya Penyelidikan Epid DBD				
		11 Meningkatnya Angka bebas jentik				
		12 Menurunnya prevalensi HIV dan Sifilis pada kelompok resiko tinggi				
		13 Meningkatnya Cakupan klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS				
		14 Meningkatnya Cakupan infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati				
		15 Menurunnya prevalensi penderita kusta < 1/10.000 penduduk				
		16 Meningkatnya Cakupan penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)				
		17 Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditemukan dan ditangani				
		18 Menurunnya kasus rabies				
		19 Meningkatnya Cakupan kasus gigitan yang ditangani				

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		20 Menurunnya jumlah desa endemis tinggi malaria (high Case Incidence)				
		21 Meningkatnya pengobatan penderita malaria				
		22 Meningkatnya kasus filaria yang ditangani				
		23 Meningkatnya Cakupan penderita diare balita yang ditemukan dan ditangani				
		24 Surveilans Penyakit Tidak Menular (Jantung Hipertensi, Diabetes Meilitus)				
		25 Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				
	3.3 Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi dan berkembangannya Tanaman Obat Keluarga	1 Meningkatnya persentase balita naik timbangannya (N/D)	3.3.1 Peningkatan Gizi keluarga	1 Perbaikan Gizi Masyarakat	1 Pemetaan informasi masyarakat kurang gizi	
		2 Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat (D/S)			2 Pemberian tambahan makanan dan gizi bagi masyarakat miskin	
		3 Menurunnya persentase balita BGM (KEP Gizi)			3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, GAKY, kurang vit. A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	
		4 Meningkatnya persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A 2 kali/tahun			4 Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencapaian keluarga sadar gizi	
		5 Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe			5 Penanggulangan gizi lebih	
		6 Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MIPASI			6 Pemantauan garan yodium di masyarakat	
		7 Meningkatnya gizi buruk mendapat perawatan standar				
		8 Menurunnya prevalensi balita gizi buruk				
		9 Desa/keluarga dengan KLB Gizi buruk dilaporkan dalam waktu < 24 jam				
		10 Jumlah keluarga yang telah memanfaatkan TOGA	3.3.2 Pengembangan Penggunaan Tanaman Obat Keluarga	1 Pengembangan Obat Asli Indonesia	1 Sosialisasi pemanfaatan tanaman obat keluarga	
	3.4 Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (nasional Rp. 9000,-/org/tahun) serta pengawasan obat dan makanan	1 Tersedianya Anggaran obat/kapita Rp 9000/orang/tahun	3.4.1 Peningkatan Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	1 Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	
		2 36 obat esensial terpenuhi di semua kecamatan			2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	
		3 Meningkatnya ketersediaan OGB di sarana distribusi			3 Penyediaan obat dengan harga terjangkau terutama untuk penduduk miskin	
					4 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		4 Meningkatnya cakupan pengawasan obat yang beredar	3.4.2 Peningkatan pengawasan dan pengendalian obat dan makanan yang beredar di masyarakat	1 Pengawasan Obat dan makanan	1 Pemberdayaan masyarakat/konsumen dalam bidang obat dan makanan	
		5 Meningkatnya cakupan pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif.			2 Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	
					3 Pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif.	
		6 Cakupan pengawasan makanan hasil industri dan rumah makan		2 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	1 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil industri, produksi rumah tangga dan rumah makan	
		7 Cakupan pengawasan makanan di sekolah				
	3.5 Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan /spesialis yang bermutu	1 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya	3.5.1 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu	1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1 Pelayanan kesehatan gratis penduduk miskin	- RSUD & Dinas Kesehatan
					2 Pelayanan kesehatan rujukan	- RSUD & Dinas Kesehatan
	3.6 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit	1 Meningkatnya Puskesmas terakreditasi	3.6.1 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya	1 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1 Pembangunan/rehabilitasi / pengadaan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling	
		2 Meningkatnya Pelayanan pengobatan/perawatan			2 Pembanggunan/rehabilitasi posyandu dan polindes	
		3 Meningkatnya Cakupan rawat jalan di puskesmas			3 Pengadaan sarana dan parasana puskesmas, pustu, polindes dan posyandu	
		4 Cakupan rawat inap di puskesmas			4 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	
		5 % pelayanan gangguan jiwa di sarana yankes umum			5 Peningkatan Puskesmas pembantu menjadi puskesmas	
		6 Perizinan/Akreditasi Sarana Yankesdas				
		7 % balai pengobatan (BP) berizin				
		8 % Rumah Bersalin (RB) berizin				
		9 % praktek dokter berizin				
		10 % praktek dokter gigi berizin				
		11 % bidan berizin				
		12 Pembangunan Rumah Sakit Tipe D		2 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Penyelesaian Pembangunan RSUD Tipe D Kabupaten Tasikmalaya	- RSUD & Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					2 Rinitisan pembangunan rumah sakit Tipe D Ciawi dan Karangnunggal, Manonjaya dan Cikatomas	
		13 Pembangunan Rumah sakit Regional Type B			3 Pembangunan Rumah Sakit Regional Type B	
		14 Meningkatnya pelayanan RSUD Kabupaten Tasikmalaya			4 Pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan rumah sakit	
		a Pelayanan gawat darurat			5 Pengadaan meubelair dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	
		b Pelayanan rawat jalan			6 Pengadaan bahan-bahan logistik dan administrasi rumah sakit	
		c Pelayanan rawat inap			7 Pemeliharaan rutin/berkala RSUD Tipe D Kabupaten Tasikmalaya	
		d Pelayanan bedah sentral				
		e Pelayanan persalinan, KIA, perinatologi, dan KB				
		f Pelayanan perawatan intensif				
		g Administrasi dan manajemen				
		h Pelayanan rekam medik				
		i Pelayanan farmasi				
		j Pelayanan laundry dan CSSD				
		k Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal				
		l Pelayanan radiologi				
		m Pelayanan rehabilitasi medik				
		n Pelayanan gizi				
		o Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit				
		p Pelayanan patologi klinik				
		q Pelayanan patologi anatomi				
		r Pelayanan bank darah				
		s Pelayanan sanitasi				
		t Pelayanan ambulans / kereta jenazah				
		u Pencegahan dan pengendalian infeksi				
		v Penyelesaian pembangunan RSUD				
		w Peningkatan kelas RSUD menjadi kelas C				
	3.7 Meningkatnya jumlah, jenis, dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar	1 Seluruh Puskesmas memiliki satu dokter umum	3.7.1 Peningkatan kualitas, kuantitas, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan	1 Peningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	1 Rekrutmen dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya	- RSUD & Dinas Kesehatan
		2 Penambahan dokter gigi untuk memenuhi Puskesmas memiliki satu orang dokter gigi			2 Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		3 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga bidan				
		4 Seluruh desa tersedia bidan desa				
		5 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga nutrisisionis				
		6 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga sanitarian				
		7 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga perawat				
		8 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga perawat gigi				
		9 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga epidemiologi				
		10 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga analis kesehatan				
		11 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga penyuluh kesehatan				
		12 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga kefarmasian				
		13 Idealnya ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk				
		14 Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di RSUD				
		a Tenaga dokter spesialis				
		b Tenaga dokter umum				
		c Tenaga dokter gigi				
		d Tenaga perawat				
		e Tenaga bidan				
		f Tenaga kefarmasian				
		g Tenaga kesehatan masyarakat				
		h Tenaga sanitarian				
		i Tenaga gizi				
		j Tenaga keterampilan fisik				
		k Tenaga keterampilan medis				
		l Tenaga non kesehatan				
		m Tenaga rekam medis				
	3.8 Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi	1 Menurunnya Jumlah Kematian Bayi	3.8.1 Peningkatanan Pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak dan lansia	1 Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	1 Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta bayi dan balita	Dinas Kesehatan
		2 Menurunnya Jumlah Kematian Balita			2 Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui serta bayi dan balita	
		3 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu			3 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	
		4 Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan			4 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		5 Meningkatkan pelayanan kesehatan antenatal (K4)			5 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	
		6 Meningkatkan cakupan Kunjungan Bayi 0-28 hari Neonatal (N2)			6 Kemitraan bidan dan paraji	
		7 Meningkatkan cakupan bayi baru lahir/neonatus risti/komplikasi tertangani			7 Kunjungan Neonatal	
		8 Cakupan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi tertangani			8 Kunjungan Bumil	
		9 Cakupan Pelayanan Nifas			9 Kunjungan Bulin	
		10 Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk			10 Kunjuungan Bayi & Pelatihan BBLR	
		11 Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi			11 Penjaringan anak sekolah dari tingkat SD s.d SLTA	
		12 Cakupan Anak Balita				
		13 Meningkatnya Cakupan bayi BBLR yang ditangani				
		14 Cakupan peserta KB Aktif				
		15 Maningkatnya Cakupan penjaringan anak sekolah				
		16 Pelayanan PONEK di RSUD				RSUD
		17 Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut		2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1 Penyediaan layanan kesehatan bagi lansia 2 Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan bagi lansia	Dinas Kesehatan
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mandiri dan berbudaya	4.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas	1 Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 2 Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Korban tindak kekerasan (perempuan dan anak) Lanjut Usia terlantar Penyandang cacat Korban Penyalahgunaan NAPZA Keluarga berumah Tidak Layak Huni	4.1.1 Mewujudkan Kemandirian Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSKS	1 Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	1 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin dan MPKS Lainnya 2 Pengadaan sarana dan parasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 3 Fasilitasi manajemen dan modal usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 1 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS 2 Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 3 Penanganan masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi para penyandang cacat dan trauma	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		Orang dengan HIV/AIDS			2 Penyediaan sarana dan prasarana perawatan bagi para penyandang cacat dan trauma	
		Jumlah Persediaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Bagi Eks Korban Bencana		4 Pembinaan Panti asuhan / panti jompo	1 Pendidikan dan Pelatihan bagi para penghuni panti asuhan / jompo	
		Jumlah Persediaan Bantuan tanggap darurat (Buffer Stock) per tahun			2 Pemberdayaan Panti asuhan / panti jompo	
		3 Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial		5 Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	1 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	
		- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSS) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Pekerja Sosial			2 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	
		- Tingkat Partisipasi Pilar Masyarakat / Relawan Dalam Penanggulangan Bencana		6 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	
		- Jumlah PKRI/Janda PKRI dan keluarga pahlawan			2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	
	4.2 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	1 Jumlah tenaga kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun	4.2.1 Mengembangkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
		2 Jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Kab. Tasikmalaya			2 Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan Bagi Pencari Kerja	
					3 Peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur Balai Latihan Kerja	
		3 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		2 Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Mengembangkan sistem informasi dan menyebarluaskan informasi bursa tenaga kerja	
		4 Meningkatnya Rasio Penduduk Bekerja			2 Pemberian Kerja Sementara	
		5 Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan			3 Fasilitasi kerjasama / kemitraan antara institusi pendidikan dengan penyedia lapangan kerja	
					4 Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	
		6 Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang tertangani		3 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Sosialisasi dan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	
		7 Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jamsostek			2 Fasilitasi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum serta jaminan sosial ketenagakerjaan	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		8 Meningkatnya Upah Kerja Sesuai dengan Ketentuan			3 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	
	4.3 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk	1 Meningkatnya Prevalensi peserta KB aktif	4.3.1 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1 Keluarga Berencana	1 Penyediaan pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2 Terbinanya Keluarga Pra Sejahtera dan KS1			2 Pelayanan KIE	
		3 Menurunnya TFR			3 Pembinaan Keluarga Berencana	
		4 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			4 Pengadaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana	
		5 Terbinanya Pasangan Usia Subur		2 Pelayanan Kontrasepsi	1 Pelayanan Konseling KB	
		6 Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru			2 Pengadaan dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi	
		7 Terbinanya Jumlah peserta KB aktif		3 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1 Pemberdayaan Pos KB Desa dan para kadernya	
		8 Meningkatnya persentasi peserta KB Mandiri			2 Pembentukan dan Pemberdayaan kelompok masyarakat peduli KB	
		9 Terbinanya Pos KB Desa		4 Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	1 Peningkatan sarana dan prasarana posyandu	
		10 Terbinanya Sub Pos KB Desa			2 Pemberdayaan kader posyandu	
		11 Terbinanya jumlah kelompok UPPKS aktif				
		12 Terbinanya jumlah kelompok BKB aktif				
		13 Terbinanya jumlah kelompok BKR aktif				
		14 Terbinanya jumlah kelompok BKL aktif				
		15 Meningkatnya sarana pelayanan klinik KB				
		16 Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama wanita		5 Kesehatan Reproduksi Remaja	1 Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	
					2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan reproduksi remaja	
					3 Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling	
		17 Transmigrasi Umum	4.3.2 Peningkatan Penyebaran Penduduk	1 Transmigrasi Lokal	1 Penjagaan dan Kerjasama Antar Daerah	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
					2 Penyuluhan, pelatihan dan penempatan transmigrasi lokal	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		18 Transmigrasi Swakarsa Mandiri		2 Transmigrasi regional	3 Penyuluhan, pelatihan dan penempatan transmigrasi regional	
		19 Jumlah transmigran yang mengikuti program transmigrasi				
		20 Jumlah naskah MoU pelaksanaan transmigrasi				
		21 Jumlah warga di 2 UPT yang terlatih				
	4.4. Terwujudnya Data Kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan di bidang kependudukan	1 Meningkatnya Kepemilikan KTP	4.4.1 Menciptakan Administrasi Kependudukan yang akuntabel	1 Penataan administrasi Kependudukan	1 Pengembangan data base kependudukan yang akurat, transparan dan mudah diakses masyarakat	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
		2 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk			2 Pengembangan Sistem Administrasi Administrasi Kependudukan	
		3 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK			3 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	
		4 Jumlah Kecamatan SIAK ON LINE dalam wilayah administrasi Kabupaten			4 Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan kependudukan dan catatan sipil	
		5 Data penduduk yang terkendali oleh sistem administrasi kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab.Tasikmalaya				
	4.5 Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan	1 Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4.5.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1 Peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik/pemerintahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2 Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas			2 Sosialisasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		3 Terbentuknya KLA (Kabupaten Layak Anak)				
		4 Tersusunnya Profil Gender				
		5 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan				
		6 Jumlah kasus yang dapat ditangani oleh P2TP2		2 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	
		7 Meningkatnya jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi gender, perlindungan perempuan & anak			2 Penguatan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		8 Meningkatnya jumlah aparat yang mengikuti keg. Forkom Gender			3 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		9 Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi gender dan perlindungan perempuan & anak		3 Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan	1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	
		10 Jumlah tenaga medis / administrasi yang mengikuti sosialisasi sistem pencatatan & pelaporan kekerasan terhadap perempuan & anak			2 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	
		11 Jumlah aparat & unsur masyarakat yang mengikuti Kelompok Kerja PKTP (Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)				
		12 Jumlah shelter / rumah aman bagi korban tindak kekerasan				
		13 Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan kader Posyandu		4 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 Peningkatan peran serta organisasi perempuan dalam pembangunan	
		14 Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan kader PKK				
		15 Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan & pelatihan keterampilan tata boga, menjahit, baki hantaran dll.				
		16 Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)				
		17 Jumlah desa yang mengikuti Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	4.5.2 Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaaan dalm pembangunan	1 Peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaaan	1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaaan	
		18 Meningkatnya prestasi dalam Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat				
		19 Meningkatnya Tingkatan Posyandu sesuai kriteria				
		20 Meningkatnya prestasi dalam Lomba Posyandu di Tingkat Provinsi Jawa Barat				
	4.6 Meningkatnya kualitas dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah	1 Jumlah Karang Taruna	4.6.1 Peningkatan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1 Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
		2 Jumlah organisasi kepemudaan			2 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi generasi muda	
		3 Jumlah pemuda pelopor pembangunan			3 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	
				2 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1 Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan serta ketrampilan bagi pemuda	
					2 Pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan	
				3 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 Sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya narkoba dan miras	
					2 Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
1. Mewujudkan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan	1.1 Meningkatnya nilai-nilai empati masyarakat terhadap kerawanan sosial	1 Meningkatkan pelayanan pemerintah untuk kaum Duafha (Penanganan Anak Terlantar dan Fakir Miskin)										1. Setda, 2. Kantor Kementerian Agama 3. Dinas Sosial
		Jumlah anak terlantar	orang	6,156	6,210	6,262	6,312	6,359	6,403	6,403	6,403	
		Jumlah anak terlantar yang ditangani	orang	1,759	2,202	2,222	2,262	2,302	2,372	2,372	3,201	
		Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak yang mendapat bantuan	buah	77	86	90	94	98	102	102	102	
		Jumlah Panti Sosial Penyandang cacat yang mendapat bantuan	buah	2	2	2	2	2	2	2	4	
		Jumlah Panti Sosial Jompo / Lansia terlantar yang mendapat bantuan	buah	1	1	1	1	1	1	1	2	
		Jumlah keluarga fakir miskin	KK	98,760	97,008	95,188	90,619	85,928	81,121	81,121	76,314	
		Jumlah keluarga fakir miskin yang ditangani	KK	15,878	16,801	19,599	20,599	22,474	23,474	23,474	23,474	
		2 Menurunnya konflik sosial berlatar belakang agama dan etnik	kasus	-	-	-	-	-	-	0		
	1.2 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan spiritual	1 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan						106,048		106,048		
		- Pondok Pesantren	Buah	149	284	394	594	604	703	703	718	
		- Mesjid	Buah	2,351	2,476	2,501	2,701	2,800	3,025	3,025	3,075	
		- Madrasah Diniyah	Buah	208	343	403	703	900	1,350	1,350	1,450	
		- Majelis Talim	Buah	17	147	202	502	696	850	850	860	
		- Jumlah bantuan stimulan guru Madrasah Diniyah	Rp	750,000,000	1,000,000,000	1,250,000,000	1,500,000,000	1,750,000,000	2,000,000,000	7,500,000,000	2,000,000,000	
		- Jumlah guru Madrasah Diniyah	Orang	14,758	16,402	16,402	16,402	16,502	16,603	16,603	16,623	
		2 Meningkatnya jumlah nilai dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan	Buah	2,725	3,250	3,500	4,500	5,000	5,616	5,616	5,626	
		3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	Rp.	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,400,000,000	1,600,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	
		4 Meningkatnya jumlah jemaah haji	Orang	1,326	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	
		5 Meningkatnya prestasi keagamaan										
		- STQ	Rangking	-	4	-	3	-	2	2	2	
		- MTQ	Rangking	5	-	4	-	3	-	3	2	
		- Mufakat	Rangking	1	1	-	1	-	1	1	1	
	1.3 Meningkatnya peran lembaga-lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat	1 Meningkatnya kuantitas sarana dan prasana lembaga keagamaan										
		Jumlah lembaga keagamaan										
		a Pondok Pesantren	Buah	830	838	845	860	875	990	990	1,005	
		- Jumlah Pondok Pesantren Salafiyah	Buah	525	528	530	535	540	645	645	650	
		- Jumlah Pondok Pesantren Khalafiyah	Buah	225	226	227	229	231	233	233	235	
		- Jumlah Pondok pesantren Kombinasi	Buah	80	84	88	96	104	112	112	115	
		b Masjid	Buah	20,112	20,192	20,237	20,277	20,317	20,357	20,357	20,365	
		- Masjid Jamie	Buah	4,630	4,650	4,665	4,675	4,685	4,695	4,695	4,705	
		- Mushola	Buah	4,633	4,853	4,863	4,873	4,883	4,893	4,893	4,910	
		- Langgar	Buah	6,019	6,039	6,049	6,059	6,069	6,079	6,079	6,089	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)						Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015							
		c	Madrasyah Diniyah	Buah	3,505	3,508	3,511	3,514	3,517	3,520	3,520	3,523				
		d	Majelis Taklim	Kegiatan	4,630	4,650	4,665	4,675	4,685	4,695	4,695	4,705				
		2	Jumlah Koperasi Pondok Pesantren	Buah	22	25	28	31	34	38	38	40				
		3	Jumlah Pondok Pesantren yang mempunyai BMT	Buah	-	10	15	20	25	30	30	33				
		4	Jumlah Pondok Pesantren yang memiliki Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)	Buah	17	19	21	23	25	27	27	30				
	1.4 Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka penanggulangan kemiskinan	1	Meningkatnya jumlah pembayar zakat dan nilai zakat, infaq dan sadaqah													
		a.	Jumlah Muzaki Zakat													
			- Zakat Fitrah	Orang	1,033,920	1,072,812	1,301,043	1,351,043	1,401,043	1,451,043	1,451,043	1,451,541				
			- Zakat Profesi	Orang	1,550	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800	1,800	1,900				
			b.	Jumlah ZIS (Zakat Infaq Shodakoh) yang dikelola oleh Bazda												
				- Zakat Fitrah	Rp	610,342,143	711,819,433	811,819,433	911,819,433	1,011,819,433	1,111,819,433	1,111,819,433	1,211,819,433			
				- Zakat Profesi	Rp	630,317,851	693,349,636	762,684,600	838,953,060	922,848,366	1,015,133,202	1,015,133,202	1,115,133,202			
			2	Jumlah pendayagunaan ZIS												
				- Zakat Fitrah	Rp.	610,342,143	711,819,433	811,819,433	911,819,433	1,011,819,433	1,111,819,433	1,111,819,433	1,211,819,433			
				- Zakat Profesi	Rp.	630,317,851	693,349,636	762,684,600	838,953,060	922,848,366	1,015,133,202	1,015,133,202	1,115,133,202			
2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui perluasan akses, peningkatan mutu dan perbaikan tata kelola	2.1	Tercapainya wajar dikdas 9 tahun	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ sederajat									Dinas Pendidikan			
				- APK SD/MI (Usia 7-12 Tahun)	%	101.40	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
				- Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	Orang	212,472	214,172	215,872	217,571	219,271	220,971	220,971	222,671			
				- Siswa SD/MI	Orang	215,446	214,172	215,872	217,571	219,271	220,971	220,971	222,671			
				2	Meningkatnya APM SD/MI Sederajat											
					- APM SD/MI (Usia 7-12 Tahun)	%	100.89	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
					- Siswa SD/MI Usia 7-12 tahun	Orang	214,367	216,067	217,767	219,466	221,166	222,866	222,866	224,566		
					3	Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat										
						- APK SLTP/Mts(Usia 13 – 15 tahun)	%	93.65	95.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
						- Penduduk 13-15 tahun	Orang	95,996	97,696	99,396	101,095	102,795	104,495	104,495	106,195	
						- Siswa SLTP/MTs	Orang	89,901	92,811	97,408	101,095	102,795	104,495	104,495	106,195	
						4	Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat									
						- APM SLTP/MTs(Usia 13 – 15 tahun)	%	91.12	93.00	96.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
						- Siswa SLTP/MTs Usia 13-15 tahun	Orang	87,475	90,857	95,420	99,073	102,795	104,495	104,495	106,195	
						5	Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan dasar									
				- Jumlah SD/MI	Unit	1,271	1,268	1,265	1,260	1,256	1,250	1,250	1,250			
				- Jumlah SLTP/MTs	buah	352	352	352	352	352	352	352	352			
				Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SD/MI												
				- Ruang Kelas SD	%	28.16	26.16	24.16	22.16	20.16	18.16	18.16	16.16			

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		- Ruang Kelas MI	%	25.33	23.33	21.33	19.33	17.33	15.33	15.33	13.33	
		Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SLTP/MTs										
		- Ruang Kelas SMP	%	14.99	12.99	10.99	8.99	6.99	4.99	4.99	2.99	
		- Ruang Kelas MTs	%	36.83	34.83	32.83	30.83	28.83	26.83	26.83	24.83	
		Pembangunan ruang kelas baru SD/MI per tahun	ruang	6	56	56	56	56	56	280	56	
		Pembangunan ruang kelas baru SLTP/MTs per tahun	ruang	13	15	20	25	30	35	125	35	
		Prosentase Ruang Perpustakaan SD/MI	%	22.9	27.9	32.9	37.9	42.9	47.9	47.9	52.93	
		Prosentase Ruang Perpustakaan SMP/MTs	%	39.9	44.9	49.9	54.9	59.9	64.9	64.9	52.84	
		Prosentase Lab IPA SLTP/MTs	%	30.8	35.8	40.8	45.8	50.8	55.8	55.8	60.78	
		Prosentase Lab Komputer SLTP/MTs	%	19.3	24.3	29.3	34.3	39.5	44.3	44.3	49.29	
	6	Idealnya rasio siswa terhadap ruang kelas										
		Jumlah Siswa										
		- SD/MI	orang	215,056	216,756	218,456	220,155	221,855	223,555	223,555	225,255	
		- SLTP/MTs	orang	85,410	87,110	88,810	90,509	92,209	93,909	93,909	95,609	
		Jumlah Ruang Kelas										
		- SD/MI	buah	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	13,348	
		- SLTP/MTs	buah	2,156	2,263	2,337	2,414	2,492	2,609	2,609	2,656	
		Ratio Siswa : Ruang Kelas										
		- SD/MI	%	16.11	20.00	25.00	27.00	29.00	32.00	32.00	32.00	
		- SLTP/MTs	%	39.62	38.50	38.00	37.50	37.00	36.00	36.00	36.00	
	7	Idealnya rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas										
		Jumlah Rombongan Belajar										
		- SD/MI	buah	7,274	6,774	6,827	6,880	6,933	6,986	6,986	6986	
		- SLTP/MTs	buah	2,312	2,420	2,467	2,514	2,561	2,609	2,609	2609	
		Ratio Rombel : Ruang Kelas										
		- SD/MI	%	0.50	0.70	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	
		- SLTP/MTs	%	1.10	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	8	Idealnya rasio guru terhadap rombongan belajar										
		Jumlah Guru										
		- SD/MI	orang	11,307	11,533	11,759	11,985	12,212	12,438	12,438	12664	
		- SLTP/MTs	orang	6,432	6,561	6,689	6,818	6,947	7,075	7,075	7204	
		Ratio Guru : Rombel										
		- SD/MI	%	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	
		- SLTP/MTs	%	2.8	2.5	2.0	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		9 Meningkatkan Sekolah Dasar Rintisan Sekolah Standar Nasional	buah	32	34	36	38	40	45	45	46	
		10 Meningkatkan Sekolah Dasar Standar Nasional	buah	1	2	3	4	5	6	7	7	
		11 Meningkatkan Sekolah Dasar Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)	buah	1	2	2	3	3	4	4	4	
		12 Meningkatkan Sekolah Dasar bertaraf Internasional (SBI)	buah	-	-	1	1	2	2	2	2	
		13 Meningkatkan SMP/MTs Rintisan berstandar Nasional	buah	15	17	20	24	26	27	27	28	
		14 Meningkatkan SMP/MTs berstandar Nasional	buah	24	26	28	30	32	34	34	35	
		15 Meningkatkan SMP/MTs Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)	buah	1	2	2	3	3	4	4	5	
		16 Meningkatkan sekolah yang berbasis TIK dalam proses pembelajaran										
		SD/MI	Sekolah	17	39	65	90	116	142	142	150	
		SD/MI	%	1.3	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0	11.0	12.0	
		SMP/MTs	Sekolah	53	53	57	64	70	77	77	85	
		SMP/MTs	%	16	17	19	21	23	25	25	25	
	2.2 Terlaksananya rintisan wajar tahun	12										
		1	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SLTA /MA									
			APK SLTA/MA (Usia 16 – 18 tahun)	%	40.22	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	53.0	
			- Penduduk 16-18 tahun	Orang	89,165	90,865	92,565	94,264	95,964	97,664	99,364	
			- Siswa SMU/SMK/MA	Orang	35,865	36,163	40,728	43,362	46,063	48,832	49,682	
		2	Meningkatnya APM SLTA/MTs Sederajat									
			APM SLTA/MTs (Usia 16 – 18 tahun)	%	38.92	41	42	43	44	45	50	
			- Siswa SMU/SMK/MA Usia 16-18 th.	Orang	34,699	37,255	38,877	40,534	42,224	43,949	44,714	
		3	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	%	48.95	50	55	60	65	70	75	
		4	Meningkatnya SMA/MA/SMK Rintisan Sekolah berstandar Nasional	buah	20	23	25	27	30	32	33	
		5	Meningkatnya SMA/MA/SMK berstandar Nasional	buah	-	2	4	6	8	10	11	
		6	Meningkatnya SMA/MA/SMK Rintisan Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)	buah	2	2	3	3	4	4	4	
		7	Meningkatnya daya tampung SMA,SMK dan MA									
			- Jumlah SMA	buah	41	42	44	46	48	50	50	
			- Jumlah SMK	buah	65	68	71	74	77	80	80	
			- Jumlah MA	buah	59	60	61	62	63	64	64	
			Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SMA	%	7.61	6	6	5	5	3	2	
			Kondisi Kerusakan Ruang Kelas SMK	%	7.30	6	6	5	5	3	2	
			Kondisi Kerusakan Ruang Kelas MA	%	11.20	10	7	6	5	3	2	
			Pembangunan ruang kelas baru SMA per tahun	ruang	21	18	20	22	24	26	110	
			Pembangunan ruang kelas baru SMK per tahun	ruang	15	12	20	25	30	35	122	
			Pembangunan ruang kelas baru MA per tahun	ruang	6	5	7	9	12	15	48	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		8 Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia SSN dan SBI SMA/SMK										
		a. guru S1	orang	2,196	2,306	2,416	2,525	2,635	2,745	2,745	2855	
		b. guru S2	orang	68	75	82	88	95	102	102	109	
		9 Meningkatnya angka melanjutkan perguruan tinggi	%	20	25	30	40	50	60	60	62	
		10 Jumlah perguruan tinggi	buah	7	7	8	8	9	9	9	9	
		11 Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Tahun	7.16	7.19	7.22	7.25	7.28	7.31	7.31	7.33	
		12 Meningkatnya sekolah yang berbasis TIK dalam proses pembelajaran pendidikan menengah										
		SMA/MA/SMK	Sekolah	30	55	63	70	76	83	83	90	
		SMA/MA/SMK	%	18	33	38	42	46	50	50	60	
	2.3 Meningkatnya lembaga pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan luar sekolah yang merata, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat	1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	26.51	52	60	65	80	90	90	95	
		2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini										
		Jumlah TK	buah	254	258	263	269	275	282	282	289	
		Jumlah PAUD	buah	330	517	599	613	687	723	723	723	
		Jumlah TPA	buah	4	5	6	7	8	9	9	10	
		3 Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH)	%	99.14	99.19	99.20	99.21	99.22	99.23	99.23	99.24	
		4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM)	buah	63	70	73	76	79	82	82	82	
		5 Meningkatnya Jumlah Lembaga Kursus	buah	70	75	80	85	90	90	90	95	
		6 Jumlah Peserta Paket A	Orang	390	400	410	420	430	440	440	440	
		7 Jumlah Peserta Paket B	Orang	4,491	4,940	5,358	5,838	6,287	6,737	6,737	7186	
		8 Jumlah Peserta Paket C	Orang	2,499	2,749	2,999	3,249	3,499	3,749	3,749	3998	
	2.4 Meningkatnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal	1 Terpenuhi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan										
		a. jumlah guru SD	orang	9,104	9,286	9,468	9,650	9,832	10,014	10,014	10,196	
		b. jumlah guru SMP	orang	4,360	4,578	4,796	5,014	5,232	5,450	5,450	5,668	
		c. jumlah tenaga kependidikan SD / penjaga sekolah	orang	9	11	13	14	16	18	18	20	
		d. jumlah tenaga kependidikan SMP	orang	783	799	814	830	846	861	861	877	
		2 Meningkatnya tingkat pendidikan guru										
		jumlah guru berkualifikasi S1	orang	11,899	12,494	13,089	13,684	14,279	14,874	14,874	15,469	
		jumlah guru berkualifikasi S2	orang	183	201	220	238	258	275	275	293	
		3 Meningkatnya jumlah guru yang sudah mempunyai bersertifikasi										
		guru TK	%	5.5	8.5	11.5	14.5	17.5	20.5	20.5	23.5	
	guru SD	%	22.2	42.2	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6	50.0		
	guru SMP	%	29.0	59.0	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	70.0		
	guru SMA	%	39.6	69.6	81.4	81.4	81.4	81.4	81.4	85.0		

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		guru SMK	%	8.9	58.9	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	65.0	
		4 Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi										
		TK	%	19.3	23.2	27.1	30.9	34.8	38.7	38.7	42.54	
		RA	%	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.41	
		SD	%	72.2	77.3	82.3	87.4	92.4	97.5	97.5	100	
		SMP	%	46.9	56.2	65.6	75.0	84.3	93.7	93.7	100	
		MTs	%	16.9	20.3	23.6	27.0	30.4	33.8	33.8	37.15	
		SMA	%	90.2	92.0	93.8	95.7	97.5	99.3	99.3	100	
		SMK	%	36.2	43.4	50.6	57.9	65.1	72.3	72.3	79.57	
		MA	%	33.9	40.7	47.5	54.2	61.0	67.8	67.8	74.58	
		5 Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	60.0	70.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		6 Meningkatnya Nilai Rata-Rata Ujian Nasional / Ujian (UN/USBN)										
		- Jenjang SD/MI	%	6.74	6.80	6.90	7.00	7.10	7.20	7.20	7.30	
		- Jenjang SMP/MTs	%	7.07	7.09	7.11	7.13	7.15	7.17	7.17	7.19	
		- Jenjang SMA/SMK/MA	%	7.42	7.45	7.46	7.50	7.55	7.60	7.60	7.70	
		7 Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru	Rp	115,866,397,200	115,866,397,200	115,866,397,200	115,866,397,200	115,866,397,200	115,866,397,200	579,331,986,000	122,818,381,032	
	2.5 Tersedianya bantuan beasiswa / keringanan biaya bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu serta siswa berprestasi	1 Meningkatnya jumlah beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar	Rp	6,974,100,000	6,974,100,000	6,974,100,000	6,974,100,000	6,974,100,000	6,974,100,000	34,870,500,000	7,810,992,000	
		2 Meningkatnya jumlah penerima beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar										
		- SD/MI	Orang	14,565	14,565	14,565	14,565	14,565	14,565	14,565	16,313	
		- SMP/MTs	Orang	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152	5,152	5,770	
		- Siswa Berprestasi	Orang	119	119	119	119	119	119	119	155	
		3 Meningkatnya Jumlah beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi	Rp	1,369,160,000	1,437,618,000	1,506,076,000	1,574,534,000	1,632,992,000	1,711,450,000	1,711,450,000	1,779,908,000	
		4 Meningkatnya jumlah penerima beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi										
		Siswa dari keluarga tidak mampu										
		- SMA	Orang	1,129	1,152	1,174	1,197	1,219	1,242	1,242	1,264	
		- SMK	Orang	802	818	834	850	866	882	882	898	
		Siswa berprestasi	orang	91	100	109	118	127	137	137	146	
		5 Menurunnya siswa dropout										
		SD/MI	%	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
		SLTP/MTs	%	0.63	0.50	0.40	0.35	0.30	0.20	0.20	0.10	
		SMU/SMK/MA	%	0.59	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.20	
	2.6 Meningkatnya kreativitas siswa di semua jenjang pendidikan	1 Meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti kegiatan lomba kreatifitas di tingkat propinsi dan nasional										

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		Jumlah peserta di tingkat propinsi	siswa	285	304	326	346	459	480	480	490	
		Jumlah peserta di tingkat nasional	siswa	25	29	33	38	32	37	37	40	
	2.7 Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat	1 Meningkatkan kelembagaan teknis perpustakaan desa/kelurahan	buah	137	20	20	20	20	20	100	25	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2 Meningkatnya SDM pengelola perpustakaan desa/kelurahan	orang	111	20	20	20	20	20	100	25	
		3 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan desa/kelurahan	eksemplar	137,000	137,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	1,000	
		4 Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan umum	eksemplar	31,097	31,097	1,000	1,500	1,500	1,500	7,000	2,000	
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta pembiayaan yang terjangkau oleh masyarakat	3.1 Meningkatkan kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang didukung oleh kemandirian masyarakat	1 Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	60.11	62.09	64.07	66.05	66.03	70.00	70.00	70.00	Dinas Kesehatan
		2 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	61.29	63	65.09	66.99	68.9	70.00	70.00	75.00	
		3 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan.	%	80.0	90.0	95.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		4 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	41.73	46.33	50.93	55.53	60.13	60.5	60.5	60.0	
		5 Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	35	50	65	80	95	110	110	130	
		6 Jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum	sampel	20	5	10	10	15	20	60	70	
		7 Jumlah Puskesmas yang memiliki Water Test KIT	Puskesmas	-	2	4	6	8	10	10	12	
		8 Jumlah Desa yang di advokasi	Desa	15	20	40	65	100	111	351	351	
		9 Jumlah desa yang mendeklarasi STOP BABs (Buang Air Besar Sembarang)/ ODF = Open Defaction Free	Desa	-	3	9	19	32	47	47	50	
		10 Meningkatnya % keluarga menggunakan SPAL	%	17.60	32.10	36.60	41.10	45.60	50.00	50.00	50.00	
		11 Meningkatnya persentase tempat-tempat umum dan Industri (TTUI) yang memenuhi syarat kesehatan	%	48.80	54.50	61.30	68.00	73.71	80.00	80.00	80.00	
		12 Meningkatnya persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	68.95	71.10	73.40	75.60	77.81	80.00	80.00	90.00	
		13 Meningkatnya depot air minum yang mempunyai laik sehat	%	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	
		14 Meningkatnya bayi yang mendapat ASI Eksekutif	%	48.4	56.0	65.0	72.0	80.0	89.0	89.0	90.0	
		15 Meningkatnya persentase desa siaga Aktif Utama	%	31.62	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	80.0	85.0	
		16 Meningkatnya Rumah Tangga Sehat (RT ber-PHBS)	%	43.70	45.0	47.0	50.0	55.0	60.0	60.0	60.0	
		17 Meningkatnya strata Posyandu Purnama Mandiri	%	15	20	25	30	35	40	40	45	
		18 Meningkatnya Pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (Poskentren)	Pontren	8	18	33	53	78	108	108	108	
		19 Meningkatnya Bhakti Husada (SBH)	%	10	20	30	40	45	50	50	60	
	3.2 Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1 Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	%	85.8	80.0	85	90	95	100	100	100.00	Dinas Kesehatan
		2 Meningkatnya Cakupan Campak	%	90	90	90	90	90	90	90	90.00	
		3 Meningkatnya Cakupan DPT III	%	90	90	90	90	90	90	90	90	
		4 Meningkatnya Case Detection Rate TB	%	65	80	80	80	80	80	80	80	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		5 Meningkatnya kesembuhan penderita TBC BTA+	%	90	90	91	92	92	92	92	92	
		6 Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia < 15 tahun	Kasus	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	2/100000	
		7 Meningkatnya cakupan penemuan ISPA	%	40.82	85	85	85	85	85	85	85.00	
		8 Meningkatnya cakupan balita dengan pneumonia ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	
		9 Meningkatnya Kasus DBD tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		10 Meningkatnya Penyelidikan Epid DBD	%	85	100	100	100	100	100	100	100	
		11 Meningkatnya Angka bebas jentik	%	86	85	85	88	88	90	90	90	
		12 Menurunnya prevalensi HIV dan Sifilis pada kelompok resiko tinggi	Kasus	0.729	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
		13 Meningkatnya Cakupan klien yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		14 Meningkatnya Cakupan infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		15 Menurunnya prevalensi penderita kusta < 1/10.000 penduduk	%	0.09	<1/10000	<1/10000	<1/10000	<1/10000	<1/10000	<1/10000	<1/10000	
		16 Meningkatnya Cakupan penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)	%	90	90	92	95	95	95	95	95	
		17 Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		18 Menurunnya kasus rabies	%	0	0	0	0	0	0	0	0	
		19 Meningkatnya Cakupan kasus gigitan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		20 Menurunnya jumlah desa endemis tinggi malaria (high Case Incidence)	%	1	1	1	1	1	1	1	1	
		21 Meningkatnya pengobatan penderita malaria	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		22 Meningkatnya kasus filaria yang ditangani	%	83	83	85	85	85	90	90	90	
		23 Meningkatnya Cakupan penderita diare balita yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		24 Surveilans Penyakit Tidak Menular (Jantung Hipertensi, Diabetes Meilitus)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		25 Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3.3 Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi dan berkembangannya Tanaman Obat Keluarga	1 Meningkatnya persentase balita naik timbangannya (N/D)	%	80.43	82.5	85	87.5	90	92.5	92.5	95.00	
		2 Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat (D/S)	%	81.31	85	85	90	90	90	90	92.5	
		3 Menurunnya persentase balita BGM (KEP Gizi)	%	2.99	2.5	2.5	2	1.75	1.5	1.5	1	
		4 Meningkatnya persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A 2 kali/tahun	%	95.15	100	100	100	100	100	100	100	
		5 Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe	%	fe 1 - 86,7 Fe 3 = 74,83	90	90	90	90	100	100	100	
		6 Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MIPASI	%	74.90	100	100	100	100	100	100	100	
		7 Meningkatnya gizi buruk mendapat perawatan standar	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00	
		8 Menurunnya prevalensi balita gizi buruk	%	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.10	
		9 Desa/keluarga dengan KLB Gizi buruk dilaporkan dalam waktu < 24 jam	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015					
		10	Jumlah keluarga yang telah memanfaatkan toga	%	10.00	10	15	20	30	35	35	50.00		
	3.4 Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (nasional Rp. 9000,-/org/tahun) serta pengawasan obat dan makanan	1	Tersedianya Anggaran obat/kapita Rp 9000/orang/tahun	Rp	9,000.00	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	11,500	11,500	Dinas Kesehatan	
		2	36 obat esensial terpenuhi di semua kecamatan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		3	Meningkatnya ketersediaan OGB di sarana distribusi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		4	Meningkatnya Cakupan pengawasan obat yang beredar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		5	Meningkatnya cakupan pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif.	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		6	Cakupan pengawasan makanan hasil industri dan rumah makan	%	68.70	71.50	74.00	76.00	78.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
		7	Cakupan pengawasan makanan di sekolah	%	59.84	64.00	68.00	72.00	76.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
	3.5 Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan /spesialis yang bermutu	1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya	%	8,7	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	Dinas Kesehatan	
	3.6 Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit	1	Meningkatnya Puskesmas terakreditasi	%	0	5	10	15	20	25	25	30	Dinas Kesehatan	
		2	Meningkatnya Pelayanan pengobatan/perawatan	%	80	90	92.5	96	97.5	100	100	100	100	
		3	Meningkatnya Cakupan rawat jalan di puskesmas	%	15	20	30	40	50	60	60	70		
		4	Cakupan rawat inap di puskesmas	%	85	86	87	88	89	90	90	90		
		5	% pelayanan gangguan jiwa di sarana yankes umum	%	2	3	5	7	9	10	10	10		
		6	Perizinan/Akreditasi Sarana Yankesdas	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		7	% balai pengobatan (BP) berizin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		8	% Rumah Bersalin (RB) berizin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		9	% praktek dokter berizin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		10	% praktek dokter gigi berizin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		11	% bidan berizin	%	80	90	95	100	100	100	100	100	100	
		12	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D	buah	0	1	1	2	2	3	3	3	3	
		13	Pembangunan Rumah sakit Regional Type B	Buah	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
		14	Meningkatnya pelayanan RSUD Kabupaten Tasikmalaya											RSUD
		a	Pelayanan gawat darurat	%	-	50	60	75	90	100	100	100		
		b	Pelayanan rawat jalan	%	-	60	70	80	90	100	100	100		
		c	Pelayanan rawat inap	%	-	60	70	90	100	100	100	100		
		d	Pelayanan bedah sentral	%	-	-	-	50	60	80	80	90		
		e	Pelayanan persalinan, KIA, perinatologi, dan KB	%	-	40	50	80	90	100	100	100		
		f	Pelayanan perawatan intensif	%	-	-	-	50	70	90	90	90		
		g	Administrasi dan manajemen	%	-	60	70	80	90	100	100	100		
		h	Pelayanan rekam medik	%	-	60	70	80	90	100	100	100		
		i	Pelayanan farmasi	%	-	60	70	90	100	100	100	100		
		j	Pelayanan laundry dan CSSD	%	-	40	50	70	90	100	100	100		
		k	Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal	%	-	30	40	70	80	100	100	100		

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		l Pelayanan radiologi	%	-	40	60	80	90	100	100	100	
		m Pelayanan rehabilitasi medik	%	-	-	-	60	80	100	100	100	
		n Pelayanan gizi	%	-	60	80	90	100	100	100	100	
		o Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	%	-	50	60	80	90	100	100	100	
		p Pelayan patologi klinik	%	-	50	60	80	100	100	100	100	
		q Pelayan patologi anatomi	%	-	-	-	50	60	90	90	95	
		r Pelayan bank darah	%	-	-	-	60	75	80	80	90	
		s Pelayan sanitasi	%	-	40	50	75	90	100	100	100	
		t Pelayan ambulans / kereta jenazah	%	-	60	75	100	100	100	100	100	
		u Pencegahan dan pengendalian infeksi	%	-	50	60	80	100	100	100	100	
		v Penyelesaian pembangunan RSUD	%	-	30	60	80	90	100	100	100	
		w Peningkatan kelas RSUD menjadi kelas C	%	-	-	-	-	-	1	1	1	
	3.7 Meningkatkan jumlah, jenis, dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar	1 Seluruh Puskesmas memiliki satu dokter umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		2 Penambahan dokter gigi untuk memenuhi Puskesmas memiliki satu orang dokter gigi	%	60	65	70	75	80	85	85	85	
		3 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga bidan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		4 Seluruh desa tersedia bidan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		5 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga nutritionis	%	80	80	85	90	95	100	100	100	
		6 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga sanitarian	%	80	85	90	95	100	100	100	100	
		7 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga perawat	%	70	75	80	85	90	95	100	100	
		8 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga perawat gigi	%	80	85	90	95	100	100	100	100	
		9 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga epidemiologi	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
		10 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga analis kesehatan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
		11 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga penyuluh kesehatan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
		12 Seluruh Puskesmas tersedia tenaga kefarmasian	%	80	80	85	90	95	100	100	100	
		13 Idealnya ratio puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	1/41.250	1/39.285	1/37.250	1/35.869	1/34.375	1/30.000	1/30.000	1/30.000	
		14 Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di RSUD										RSUD
	a Tenaga dokter spesialis	orang	-	2	4	6	8	9	9	10		
	b Tenaga dokter umum	orang	-	9	13	15	17	20	20	20		
	c Tenaga dokter gigi	orang	-	1	2	2	2	2	2	2		
	d Tenaga perawat	orang	-	48	60	102	102	132	132	132		
	e Tenaga bidan	orang	-	12	12	18	18	18	18	18		
	f Tenaga kefarmasian	orang	-	4	4	4	4	4	4	4		
	g Tenaga kesehatan masyarakat	orang	-	3	3	4	4	4	4	4		
	h Tenaga sanitarian	orang	-	1	2	2	3	3	3	3		

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015				
		i	Tenaga gizi	orang	-	2	3	4	4	6	6	6	
		j	Tenaga keterampilan fisik	orang	-	4	5	6	6	8	8	8	
		k	Tenaga keterampilan medis	orang	-	10	12	14	14	15	15	15	
		l	Tenaga non kesehatan	orang	-	33	40	67	67	83	83	83	
		m	Tenaga rekam medis	orang	-	-	3	5	6	8	10	10	
	3.8 Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi	1	Menurunnya jumlah Kematian Bayi	Orang	454	453	452	451	450	449	449	440	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	12	12	12	12	12	10	10	9	
		2	Menurunnya jumlah kematian Balita	Orang	51	50	49	48	47	46	46	45	
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1000 balita	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu	Orang	46	45	44	43	42	41	41	38	
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	116	115	114	113	112	112	112	111	
		4	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	%	76.44	86	88	89	90	90	90	90	
		5	Meningkatnya pelayanan kesehatan antenatal (K4)	%	76.09	86	88	89	90	95	95	95	
		6	Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi 0-28 hari Neonatal (N2)	%	84.04	86	86	86	88	90	90	90	
		7	Meningkatnya cakupan bayi baru lahir/neonatus risti/komplikasi tertangani	%	15	65	70	75	80	85	85	85	
		8	Cakupan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi tertangani	%	18.53	63	67	71.5	75	80	80	80	
		9	Cakupan Pelayanan Nifas	%	84.03	86	87	88	89	90	90	90	
		10	Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	%	35.2	100	100	100	100	100	100	100	
		11	Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi	%	78.66	85	86	87	100	100	100	100	
		12	Cakupan Anak Balita	%	95	95	95	95	95	95	95	95	
		13	Meningkatnya Cakupan bayi BBLR yang ditangani	%	42.14	100	100	100	100	100	100	100	
		14	Cakupan peserta KB Aktif	%	69.08	70	70	70	70	70	70	70	
	15	Meningkatnya Cakupan penjarangan anak sekolah	%	91.19	100	100	100	100	100	100	100		
	16	Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	2	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	75		
	17	Pelayanan PONEK di RSUD	%	-	40	50	90	100	100	100	100	RSUD	
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, mandiri dan berbudaya	4.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	1	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	buah	80	87	90	93	95	105	105	115	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
		2	Jumlah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial										
			Korban tindak kekerasan (perempuan dan anak)	orang	32	35	38	42	46	51	51	60	
			Jumlah Lanjut Usia terlantar	orang	14,020	14,143	14,263	14,485	14,586	14,586	14,586	14,586	
			Jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani	orang	64	64	48	100	100	100	412	150	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		jumlah Penyandang cacat	orang	9,830	9,917	10,001	10,081	10,156	10,227	10,227	10,227	
		Jumlah Penyandang cacat yang ditangani	orang		300	300	300	300	300	1,500	300	
		Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA	orang	2,280	2,300	2,320	2,338	2,356	2,372	2,372	2,372	
		Jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani	orang	100	100	120	150	200	200	770	200	
		Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni	orang	18,212	18,372	18,528	18,677	18,817	18,948	18,948	18,948	
		Jumlah Keluarga berumah Tidak Layak Huni yang ditangani	orang	1,134	1,144	1,154	1,163	1,172	1,180	5,813	1,180	
		Orang dengan HIV/AIDS	orang	48	54	60	75	90	100	100	100	
		Jumlah Persediaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Bagi Eks Korban Bencana	Rumah	687	242	100	100	100	145	687	145	
		Jumlah Persediaan Bantuan tanggap darurat (Buffer Stock) per tahun										
			Sarden (kaleng)		3,600	3,852	4,122	4,411	4,720	20,705	4,720	
			Mie Instan (bungkus)		24,000	25,680	27,478	29,401	31,459	138,018	31,459	
			Beras (ton)		24	24	24	24	24	120	24	
			Kecap (botol)		3,600	3,852	4,122	4,411	4,720	20,705	4,720	
			Saus (botol)		3,600	3,852	4,122	4,411	4,720	20,705	4,720	
			Minyak Goreng (liter)		600	642	687	735	786	3,450	786	
			Gula Pasir (ton)		5	5	5	5	5	25	5	
		3 Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial										
		- Jumlah PKRI/Janda PKRI dan keluarga pahlawan	orang	3	3	3	3	3	3	3	3	
		- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSS) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Karang Taruna (KT) Organisasi Sosial (Oros)	orang	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307	
		- Tingkat Partisipasi Pilar Masyarakat / Relawan Dalam Penanggulangan Bencana	%	1,765	5	5	5	5	5	5	5	
	4.2 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja	1 Jumlah tenaga kerja yang terlatih di Balai Latihan Kerja per tahun	orang	204	240	400	400	400	400	1,840	400	
		2 Jumlah tenaga kerja bersertifikasi di Kab. Tasikmalaya	orang	204	240	400	400	400	400	1,840	400	
		3 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78.69	78.70	78.73	78.75	79.20	80.00	80.00	80	
		4 Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total	%	45.12	45.15	45.20	45.30	45.40	45.50	45.50	45.60	
		5 Meningkatnya jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	orang	982	1,282	1,682	2,082	2,532	3,032	3,532	3,032	
		6 Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang tertangani	buah	10	5	5	4	3	2	2	2	
		7 Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jamsostek	Orang	1,900	1,980	2,065	2,155	2,265	2,385	2,385	2,385	
		8 Meningkatnya Upah Kerja Sesuai dengan Ketentuan	%	82	87	89	91	95	100	100	100	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Uraian	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Indikator Capaian Sasaran				2011	2012	2013	2014	2015			
4.3 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk		1	Meningkatnya Prevalensi peserta KB aktif	%	68.85	68.91	68.94	68.98	69.01	69.04	69.04	69.10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2	Terbinanya Keluarga Pra Sejahtera dan KS1	KK	289,942	289,419	288,944	288,493	288,081	287,081	287,081	266,217	
		3	Menurunnya TFR	%	2.60	2.60	2.58	2.56	2.54	2.52	2.52	2.43	
		4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.88	0.88	0.85	0.80	0.75	0.70	0.70	0.69	
		5	Terbinanya Pasangan Usia Subur	Pasangan	374,515	385,947	397,447	408,947	420,447	431,947	431,947	432,005	
		6	Meningkatnya Jumlah Peserta KB Baru	Akseptor	66,860	83,270	83,880	84,490	85,100	85,710	85,710	85,926	
		7	Terbinanya Jumlah peserta KB aktif	Akseptor	257,868	265,937	274,006	282,075	290,144	298,213	298,213	298,517	
		8	Meningkatnya persentasi peserta KB Mandiri	%	34.40	37.77	41.14	44.51	47.88	47.90	47.90	48.01	
		9	Terbinanya Pos KB Desa	Orang	362	362	362	362	362	362	362	365	
		10	Terbinanya Sub Pos KB Desa	Orang	2,577	2,577	2,577	2,577	2,577	2,577	2,577	2,627	
		11	Terbinanya jumlah kelompok UPPKS aktif	Kelompok	742	742	742	742	742	742	742	745	
		12	Terbinanya jumlah kelompok BKB aktif	Kelompok	1,902	1,905	1,911	1,917	1,921	1,926	1,926	1,929	
		13	Terbinanya jumlah kelompok BKR aktif	Kelompok	852	827	867	872	879	883	883	885	
		14	Terbinanya jumlah kelompok BKL aktif	Kelompok	484	505	526	547	568	573	573	576	
4.4 Terwujudnya Data Kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayananan di bidang kependudukan		15	Meningkatnya sarana pelayanan klinik KB	KKB	125	149	149	149	149	149	149	152	Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja
		16	Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama wanita	Tahun	17	18	19	19	20	20	20	20	
		17	Transmigrasi Umum	KK	15	35	45	55	65	80	80	100	
		18	Transimigrasi Swakarsa Mandiri	KK	-	15	20	20	25	25	25	-	
		19	Jumlah transmigran yang mengikuti program transmigrasi	KK	95	125	130	140	155	165	165	185	
		20	Jumlah naskah MoU pelaksanaan transmigrasi	buah	1	2	3	4	5	6	6	6	
4.5 Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan		21	Jumlah warga di 2 UPT yang terlatih	orang	37	60	90	120	150	180	180	180	
		1	Meningkatnya Kepemilikan KTP	%	68.78	80	100	100	100	100	100	100	100
		2	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	%	30.37	34.56	38.56	42.46	46.27	49.89	49.89	53.51	
		3	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	-	50	100	100	100	100	100	100	
		4	Jumlah Kecamatan SIAK ON LINE dalam wilayah administrasi Kabupaten	buah	-	39	39	39	39	39	39	39	
4.5 Terwujudnya pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan		5	Data penduduk yang terkendali oleh sistem administrasi kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab.Tasikmalaya	orang	1,675,544	1,690,289	1,704,656	1,718,294	1,731,181	1,743,299	1,743,299	1,778,164	
		1	Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1.87	1.90	1.95	2.00	2.20	2.40	2.40	3	
		2	Meningkatnya angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	%	97.3	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	97.9	98	
		3	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan	%	72.9	75.0	77.5	80.0	82.5	85.0	85.0	86	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015				
		4	Meningkatnya jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi gender, perlindungan perempuan & anak	Orang	120	40	40	40	40	40	200	50	
		5	Meningkatnya jumlah aparat yang mengikuti keg. Forkom Gender	orang	26	26	26	26	26	26	130	26	
		6	Tersusunnya Profil Gender	Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	
		7	Jumlah kasus yang dapat ditangani oleh P2TP2	%	63	67.5	73	78	83	88	88	88	
		8	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan kader Posyandu	orang	99	10	10	10	10	10	50	20	
		9	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan kader PKK	orang	160	20	20	20	20	20	100	25	
		10	Jumlah tenaga medis / administrasi yang mengikuti sosialisasi sistem pencatatan & pelaporan kekerasan terhadap perempuan & anak	Orang	-	-	39	78	78	107	302	39	
		11	Jumlah aparat & unsur masyarakat yang mengikuti Kelompok Kerja PKTP (Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan)	Orang	-	-	30	30	30	30	120	30	
		12	Jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan & pelatihan keterampilan tata boga, menjahit, baki hantaran dll.	orang	230	20	20	20	20	20	100	20	
		13	Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA)	kelompok	2	2	2	2	2	2	10	10	
		14	Jumlah shelter / rumah aman bagi korban tindak kekerasan	Buah	-	-	1	-	-	-	1	1	
		15	Terbentuknya KLA (Kabupaten Layak Anak)	Kab	-	-	1	-	-	-	1	1	
		16	Jumlah desa yang mengikuti Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	desa	60	1	1	1	1	1	5	1	
		17	Meningkatnya prestasi dalam Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	-	5	4	3	2	1	1	1	
		18	Meningkatnya prestasi dalam Lomba Posyandu di Tingkat Provinsi Jawa Barat	Peringkat	-	5	4	3	2	1	1	1	
		19	Meningkatnya Tingkatan Posyandu sesuai kriteria										
			Terbinanya Posyandu Pratama	Posyandu	938	938	928	918	908	898	898	888	
			Terbinanya Posyandu Madya	Posyandu	847	847	847	847	847	847	847	847	
			Terbinanya Posyandu Purnama	Posyandu	272	272	282	292	302	312	312	322	
		20	Meningkatnya jumlah perempuan yang mengikuti pembinaan & pemanfaatan halaman pekarangan & pola hidup sehat	orang	6,000	6,100	6,200	6,300	6,400	6,500	6,500	100	
	4.6 Meningkatkan kualitas dan peran generasi muda dalam pembangunan daerah	1	Jumlah Karang Taruna	buah	351	351	351	351	351	351	351	351	Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
		2	Jumlah organisasi kepemudaan	buah	45	45	45	45	45	45	45	54	
		3	Jumlah pemuda pelopor pembangunan	orang	21	21	21	21	21	21	21	21	
	4.7 Meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga	1	Jumlah induk organisasi olahraga di kabupaten	buah	29	31	33	35	37	39	39	39	Bagian Kesra & Dinas Pendidikan
		2	Jumlah atlet yang dibina	orang	236	241	246	251	256	261	261	266	
		3	Jumlah kompetisi yang digelar	buah	12	12	13	13	14	14	14	14	
		4	Jumlah Medali yang diraih dalam:	buah									

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlakulkarimah, Berkualitas dan Mandiri

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		a. PORDA										
		- Emas	buah	17	18	19	20	21	22	23	24	
		- Perak	buah	12	14	16	18	20	22	24	26	
		- Perunggu	buah	16	19	22	25	28	31	31	34	
		b. PON										
		- Emas	buah	1	2	3	4	5	6	7	8	
		- Perak	buah	0	1	2	3	4	5	6	7	
		- Perunggu	buah	0	2	4	6	8	10	12	14	
		5 Jumlah atlet berprestasi	orang	46	48	50	52	54	56	58	60	
		6 Jumlah Lapangan Olah Raga (sepakbola, bola basket, volley, bulutangkis, tenis lapangan)										
		- Lapangan Bulutangkis	Buah	47	47	47	47	47	47	47	47	
		- Lapangan Sepakbola	Buah	357	357	357	357	357	357	357	357	
		- Lapangan Bola Voli	Buah	737	737	737	737	737	737	737	737	
		- Lapangan Bola Basket	Buah	49	49	49	49	49	49	49	49	
		- Lapangan Tenis	Buah	23	23	23	23	23	23	23	23	
	4.8 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah	1 Jumlah even seni dan budaya										Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		- Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kegiatan	3	3	10	12	14	12	12	14	
		- Pengiriman misi seni dan budaya	Kegiatan	3	6	8	8	8	10	10	12	
		2 Jumlah Sarana penyelenggaraan seni budaya										
		- Ssarana Penyelenggaraan Seni (Panggung Seni)	Buah	3	3	6	8	9	10	10	12	
		- Sarana Pengembangan Seni (Alat Seni)	Set	26	-	10	10	15	15	15	17	
		3 Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan										
		- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada	Buah	41	41	41	41	41	41	41	41	
		- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	Buah	8	-	10	13	17	20	20	20	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa	1.1 Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/ masyarakat	1 Meningkatnya produksi pertanian : padi (padi sawah dan padi gogo) dan palawija (jagung, kedelai kacang tanah, ubi kayu), sayur-sayuran (cabe merah, mentimun, tomat) dan buah-buahan : (manggis, salak, durian, pisang)	1.1.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1 Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Pemberdayaan kelompok tani/penangkar tanaman hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis	
					3 Pembinaan dan bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura buruh tani RTM di perdesaan	
					4 Pelatihan industri pertanian	
					5 Pemberdayaan UPTD Hortikultura pengadaan bibit	
					6 Pengembangan tanaman buah buahan (manggis dan lengkung) guna mendukung potensi jasper	
					7 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	
					8 Sekolah Lapang (SL) Hortikultura : SL PHT dan SL GAP/SOP Hortikultura da penataan SCM	
					9 Registrasi dan sertifikasi lahan komoditi unggulan hortikultura	
					2 Meningkatnya produktivitas pertanian:padi (padi sawah dan padi gogo) dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu), sayur-sayuran (cabe merah, mentimun, tomat) dan buah-buahan (manggis,salak,durian, pisang)	
2 Pengembangan Alsintan Sarana Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura						
3 Antisipasi Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)						
4 Pengembangan Data dan Informasi Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura						
5 Pengembangan Alsintan						

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					6 Bantuan Benih/Bibit dan Sarana Produksi	
					7 Mekanisasi Pertanian Pasca Panen	
					8 Peningkatan produktivitas ubi kayu	
					9 Pengembangan komoditas kacang tanah dan kacang hijau	
					10 Perluasan areal tanam di lokasi kehutanan dan perkebunan dalam mendukung swasembada pangan	
				3 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan hortikultura	1 Integrasi Tanaman Ternak, ompos dan Biogas	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Pengembangan Pertanian Padi Organik melalui Metode SRI	
					3 Pengembangan Desa PHT	
					4 Peningkatan produksi beras nasional melalui penerapan teknologi pupuk berimbang	
					5 Pembuatan demplot berbagai jenis varietas padi dan jagung hibrida serta varietas unggul kedele	
					6 Pengembangan kelompok penangkar benih padi dalam rangka pemasyarakatan benih unggul bermutu	
					7 Teknologi budidaya komoditi hortikultura ramah lingkungan	
					8 SLPTT, SL-SRI, SL Iklim, SL Konservasi, pelatihan pengolahan hasil pertanian	
				4 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1 Pengembangan Agribisnis Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Peningkatan Mutu Hasil Padi Organik	
					3 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura	
					4 Peningkatan pusat pertumbuhan jagung hibrida	
		3 Meningkatnya jumlah penyuluh pertanian yang tersertifikasi		5 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan	1 Pemantapan Balai Penyuluhan Sebagai Pusat Dinamika Pembelajaran Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Penumbuhan dan Pengembangan Pos Pelayanan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Desa	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					3 Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan Profesionalisme (Standar Kompetensi) Penyuluh Pertanian	
					4 Pengembangan Penyuluh Pertanian Swakarsa/Swadaya dan kaderisasi Petani Masa Depan	
		4 Meningkatnya luas areal pertanian ramah lingkungan		6 Pengembangan pertanian ramah lingkungan	1 Pengembangan Wilayah Padi Organik	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Berkelanjutan	
					3 Pengembangan Ekologi Berbasis Lahan	
					4 Pengendalian Organisme Tanaman Ramah Lingkungan (Agens Hayati)	
					5 Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan	
					6 Penyehatan lahan kering dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi padi gogo	
					7 Pengembangan sarana Prasarana dalam rangka mendukung tercapainya kecamatan wisata organik	
					8 Pengembangan sayuran organik (cabe, tomat, mentimun)	
		5 Tersedianya prasarana dan sarana (infrastruktur) pertanian		7 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1 Pengembangan Sarana Prasarana Kelembagaan Infrastruktur Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Pembangunan Lumbung Pangan dan Rumah Kompos	
					3 Pembangunan/rehabilitasi Gedung/Bangunan BPP	
					4 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	
					5 Fasilitasi alat panen komoditi hortikultura	
					6 Survei Investigasi Desigan (SID) Pencetakan Sawah Baru	
					7 Pencetakan sawah baru	
					8 Reklamasi lahan	
					9 Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan Alsintan : APPO, traktor, pompa air, hands sprayer, RMU	
		6 Meningkatnya Tingkat Kemampuan Kelompok Tani Berbasis Usaha Tanaman Pangan (Kelompok)		8 Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	1 Pengadaan Tanah untuk BPP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Beasiswa SPMA Negeri Tasikmalaya	
					3 Pemberdayaan Gapoktan, P3A, UPJA dan Kelompok Wanita Tani (KWT)	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					4 Peningkatan Akses Petani terhadap Sumberdaya Produktif Pertanian	
					5 Penguatan Kelompok Tani sebagai sentra Pembelajaran Agribisnis di Tingkat Kedusunan	
					6 Penguatan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai sentra Pembelajaran Agribisnis di Tingkat Perdesaan	
					7 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Penggarap (Buruh Tani)	
		7 Meningkatnya Populasi Ternak (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba dan Unggas), Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu), Produktivitas Ternak Unggulan (Sapi Potong dan Sapi Perah), Konsumsi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu) dan Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Peternakan (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)	1.1.2 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil peternakan	1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1 Pengembangan Agribisnis Peternakan	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
					2 Pengembangan Budidaya Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong	
					3 Pengembangan Budidaya Ternak Kambing, Domba dan Kelinci	
					4 Pengembangan Perbibitan Ternak di Pedesaan (Village Breeding Centre)	
					5 Pengembangan Sarana Prasarana Perbibitan Ternak	
					6 Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Pedesaan di Kawasan Peternakan	
					7 Pengembangan Unit Layanan Inseminasi Buatan (IB)	
					8 Pengembangan Budidaya Unggas di Perdesaan	
					9 Penjaringan dan Penyelamatan Ternak Betina Produktif	
					10 Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan untuk Rumah Tangga Miskin di Perdesaan	
			2 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan	
				2 Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Ternak		
			3 Peningkatan Ketahanan Pangan	1 Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan		
				2 Revitalisasi Rumah Potong Hewan		
				3 Fasilitasi Rumah Potong Unggas (RPU) Skala Kecil		

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					4 Penerapan Jaminan Keamanan Pangan	
					5 Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS)	
				4 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1 Revitalisasi Pasar Hewan Manonjaya	
					2 Pengembangan Sistem Informasi Pasar	
		8 Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pemanfaatan potensi pesisir dan laut, Sarana Prasarana Penangkapan, Penyerapan tenaga kerja dan Sarana Pemasaran hasil perikanan	1.1.3 Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perikanan dan kelautan	1 Pengembangan Budidaya Perikanan	1 Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
					2 Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul	
					3 Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar	
					4 Pengembangan Budidaya Perikanan Muara	
					5 Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan	
					6 Pengembangan Statistik Perikanan	
					7 Pengembangan Usaha Mina Pedesaan	
				2 Pengembangan Perikanan Tangkap	1 Pengembangan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
					2 Peningkatan Sarana dan Armada Penangkapan Ikan	
					3 Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap	
					4 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi Kelautan	
					5 Penyelesaian Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pamayangsari Cipatujah dan Nusa Manuk Cikalong	
				3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1 Pengembangan Usaha Mikro Pesisir	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
					2 Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat Pesisir	
		9 Ketersediaan informasi pariwisata (Booklet/leaflet/ kalender/peta)	1.1.4 Mengembangkan kawasan wisata dan budaya daerah	1 Pengembangan Pemasaran pariwisata	1 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata
		10 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya			2 Promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	
					3 Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		11 Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan		2 Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 Pengembangan obyek pariwisata unggulan daerah (antara lain Cipanas Galunggung, Pantai Bubujung, Sindangkerta dan Karangtawulan)	Dinas Pariwisata
		12 Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata (Perlengkapan ODTW)			2 Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	
					3 Pengembangan daerah tujuan wisata	
					4 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	
		13 Tingkat mutu dan pelayanan pariwisata (SDM)		3 Pengembangan Kemitraan	1 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Dinas Pariwisata
		14 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata (Kompepar)			2 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	
					3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	
		15 Jumlah unit usaha industri : Industri Kecil Industri Kecil Menengah	1.1.5 Mewujudkan sentra-sentra industri kecil dan menengah khususnya dalam bidang industri kreatif (batik, bordir, golok manonjaya, anyaman bambu)	1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 Fasilitas dan pemberian kemudahan bagi industri kecil dan menengah dalam izin usaha dan akses perbankan/permodalan	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
		16 Jumlah nilai Investasi			2 Peningkatan kualitas produk yang kompetitif	
		17 Jumlah tenaga Kerja Industri			3 Membangun kemitraan dengan industri besar dan memperluas akses pasar	
		18 Tingkat pelayanan terhadap industri kecil dan menengah		2 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1 Pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam bidang industri kecil dan menengah	
		19 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		3 Penataan struktur industri	1 Penyediaan sarana dan prasarana kluster industri	
		20 Pertumbuhan Industri			2 Pembinaan keterkaitan produksi dari industri hulu hingga ke hilir	
				4 Pengembangan sentra-sentra industri potensial	1 Penyediaan akses transportasi ke sentra-sentra industri potensial	
		21 Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL dan RTn-RHL) per tahun	1.1.6 Mengembangkan Penanganan Rehabilitasi Hutan, Lahan Kebun dan DAS	1 Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan Lahan	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					2 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL)	
		22 Berkurangnya Lahan Kritis		2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK)	
					2 Penghijauan Lingkungan	
					3 Pengembangan Kebun Bibit Rakyat	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					4 Rehabilitasi Daerah Sumber Mata Air (Catchment Area)	
		23 Meningkatnya masyarakat yang memahami mengenai dampak perusakan hutan		3 Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	1 Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan 2 bimbingan Teknis pengendalian kerusakan hutan dan lahan 3 Penanggulangan kerusakan/kebakaran hutan dan lahan 4 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	
		24 Meningkatnya hasil hutan kayu dan non kayu		4 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan dan lahan	1 Pengembangan hasil hutan non kayu 2 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan 3 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan , lahan 4 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 5 Pengembangan Agroforestry	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		25 Meningkatnya pelayanan tata usaha hasil hutan (retribusi angkutan kayu)	1.1.7 Peningkatan fungsi hutan, lahan dan kebun meliputi fungsi produksi (ekonomi), konservasi (ekologi) dan sosial (kesejahteraan)	1 Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	1 Penyusunan peraturan mengenai pengelolaan industri hasil hutan 2 Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 3 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan 4 Pembinaan dan Pengendalian usaha Bidang Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		26 Meningkatkannya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun		2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1 Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan	
		27 Meningkatnya Luas Lahan, Produksi, Produktivitas serta penyerapan tenaga kerja perkebunan			2 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 4 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 5 Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Pertanian/Perkebunan 6 Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Pertanian/Perkebunan 7 Pengembangan dan Rehabilitasi infrastruktur pertanian perdesaan	
		28 Terkendalinya serangan hama penyakit Penyakit Kehutanan/Perkebunan			8 Pengembangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama/Penyakit	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					9 Bimbingan Teknis Penanggulangan hama dan Penyakit	
		29 Meningkatnya Jumlah dan Kelas Kelompok Tani Kehutanan/Perkebunan	1.1.8 Memberikan kesempatan kepada aparat, petani dan pengusaha kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan	1 Peningkatan Kesejahteraan Petani	1 Pelatihan Petani dan Agribisnis	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					2 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani	
					3 Pemberdayaan petani dalam pembelajaran usaha Agribisnis berbasis Komoditas	
					4 Pemberdayaan Kelompok Tani di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan.	
		30 Meningkatnya jumlah petugas yang mengikuti Pelatihan Teknis		2 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/ Kehutanan	1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/Perkebunan	
					2 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	
		31 Tersedianya alat pengolahan produksi tepat guna (teh rakyat)	1.1.9 Pengembangan agribisnis yang berbasis perdesaan dan pemanfaatan SDA dan SDM	1 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan	1 Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					2 Pelatihan dan Bimbingan Teknis pengoperasionalan teknologi pertanian perkebunan tepat guna.	
	1.2 Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan berdasarkan potensi lokal	1 Terlaksananya proses perencanaan kawasan minapolitan Kabupaten Tasikmalaya	1.2.1 Pengembangan sentra komoditas unggulan dengan pendekatan kawasan	1 Pengembangan Budidaya Perikanan	1 Penyusunan Master Plan Minapolitan	Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
					2 Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan	
					3 Penetapan Kawasan Minapolitan Budidaya	
					4 Pengembangan Kawasan Minapolitan Budidaya	
					5 Monitoring dan Evaluasi	
				2 Pengembangan Perikanan tangkap	1 Penyusunan Master Plan Minapolitan	
					2 Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Minapolitan	
					3 Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap (Cipatujah)	
					4 Pengembangan Kawasan Minapolitan Tangkap	
					5 Monitoring dan Evaluasi	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		2 Terlaksananya proses perencanaan kawasan agropolitan		3 Pengembangan Usaha Agribisnis	1 Penyusunan Master Plan Agropolitan	Bappeda dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan	
					3 Penetapan Kawasan Agropolitan	
					4 Pengembangan Kawasan Agropolitan	
					5 Monitoring dan Evaluasi	
	1.3 Terwujudnya pasar agribisnis	1 Terlaksananya kegiatan promosi komoditas unggulan perkebunan	1.3.1 Meningkatkan akses pasar untuk produk-produk agribisnis	1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan (STA)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
					2 Promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan	
					3 Peningkatan akses petani terhadap informasi pasar, permodalan dan teknologi	
		2 Terlaksananya kegiatan promosi komoditas unggulan pertanian			4 Fasilitasi promosi komoditas unggulan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					5 Pengembangan pemasaran melalui 4P	
		3 Tersedianya infrastruktur pertanian : pasar agribisnis/terminal agribisnis			6 Pembangunan Sub Terminal Agribisnis	
					7 Pengembangan processing beras organik	
					8 Fasilitasi sarana panen dan pasca panen serta pengolahan hasil komoditi hortikultura	
					9 Fasilitasi gudang komoditi hortikultura	
					10 Kemitraan dan pemberdayaan kelembagaan pertanian	
		4 Meningkatnya jumlah usaha agribisnis di perdesaan (PUAP)	1.3.2 Menembangkan usaha agribisnis perdesaan berdasarkan potensi lokal dengan dukungan permodalan	1 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	1 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Perdesaan sesuai dengan potensi wilayah	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
					2 Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan	
					3 Fasilitasi kelompok-kelompok agribisnis	
					4 Pengembangan usaha pengolahan komoditas unggulan	
					5 Pendampingan usaha agribisnis	
					6 Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Perdesaan	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran					
2. Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.	2.1 Meningkatnya kemampuan dan peran koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah	1 Meningkatnya Jumlah koperasi baru per tahun	2.1.1 Mewujudkan KUMKM yang tangguh dan mandiri	1 Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi KUMKM	1 Fasilitasi pengembangan KUMKM	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan	
		2 Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat			2 Pengembangan sarana dan prasarana KUMKM		
		3 Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif			2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM		1 Fasilitasi dan pengembangan kemitraan usaha bagi KUMKM
		4 Meningkatnya Jumlah Koperasi					2 Pengembangan sarana promosi hasil produksi KUMKM
		5 Meningkatnya Jumlah Anggota					3 Penerapan Teknologi Tepat guna
		6 Meningkatnya Jumlah Modal					4 Pemberdayaan KUMKM yang menopang agribisnis
		7 Meningkatnya Jumlah Karyawan					5 Peningkatan kualitas SDM UMKM
		8 Meningkatnya Total aset					6 Pembentukan koperasi-koperasi baru khususnya untuk petani penggarap (buruh tani) di perdesaan
		9 Meningkatnya Volume usaha					6 Pembinaan dan pengawasan pengembangan koperasi
		10 Meningkatnya Laba					7 Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
		11 Meningkatnya Jumlah UKM					8 Fasilitasi pembiayaan KUMKM
			9 Penguatan kelembagaan KUMKM				
	12 Kontribusi keberadaan BUMD (PD. BPR) : a. Total Aset b. Kredit yang disalurkan. c. Rugi/laba	2.1.2 Mewujudkan PD. BPR yang berdayasaing dan sehat	1 Pengembangan jaringan dan permodalan PD. BPR	1 Peningkatan permodalan, kerjasama dan pembinaan SDM	Bag. Perekonomian & Penanaman Modal		
	13 Kontribusi keberadaan BUMD (PDAM) : a. Total Aset b. Air yang terjual c. Rugi/laba	2.1.3 Mewujudkan PDAM dan PDUP yang sehat	1 Pengembangan jaringan pelayanan	1 Peningkatan kerjasama dan pembinaan SDM			
	14 Kontribusi keberadaan PDUP : a. Total Aset b. Rugi/laba						
2.2 Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat	2.2 Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat	1 Meningkatnya distribusi pengadaan untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat dan barang penting lainnya lancar	2.2.1 Mengamankan jalur distribusi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya melalui pengawasan dan monitoring	1 Pengawasan barang beredar dan monitoring harga serta ketersediaan barang di pasar	1 Sosialisasi distribusi yang efektif dan efisien	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan	
		2 Meningkatnya pengawasan terhadap barang beredar	2.2.2 Menginformasikan arti pentingnya Undang- Undang Perlindungan Konsumen	1 Monitoring dan Pengawasan	1 Monitoring dan Pengawasan Barang beredar		
		3 Pelaku usaha, konsumen dan aparat pemerintah yang telah mengikuti sosialisasi perlindungan konsumen		2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1 Sosialisasi Perlindungan Konsumen bagi pelaku Usaha dan Konsumen		
		4 Jumlah peneraan UTTP dan BDKT	2.2.3 Menciptakan kelancaran Peneraan UTTP dan BDKT	1 Pengawasan dan pendampingan tera dan tera ulang alat UTTP	1 Pendampingan Pelaksanaan Tera / Tera Ulang alat UTTP dan BDKT serta pos ukur ulang		

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		5 Jumlah wajib daftar perusahaan	2.2.4 Mewujudkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendaftaran perusahaan kepada pelaku usaha	1 Pembinaan penyederhanaan pengisian formulir pendaftaran perusahaan	1 Sosialisasi kebijakan tentang wajib daftar perusahaan	
		6 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1 Perencanaan pembangunan pasar induk kabupaten dan pembangunan pasar agribisnis	
		7 Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang memadai	2.2.5 Pembinaan, penataan sarana dan prasarana perdagangan	1 Penyempurnaan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	1 Rehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan	
					2 Optimalisasi Manajerial Pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan	
		8 Volume dan nilai ekspor Kab.Tasikmalaya	2.2.6 Memberikan kemudahan prosedur ekspor dan impor	1 Peningkatan dan Pengembangan ekspor	1 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
		9 Laju Pertumbuhan ekspor Kab.Tasikmalaya			2 Membangun jejaring dengan eksportir	
					3 Sosialisasi Kebijakan Luar Negeri	
		10 Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kab.Tasikmalaya (PMA dan PMDN)	2.2.7 Menciptakan Peluang investasi bagi investor dan mengembangkan arus investasi	1 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan dan pengembangan Investasi	Bagian Perencanaan dan Penanaman modal
		11 Jumlah sarana promosi investasi (Temu investasi, pameran investasi) per tahun			2 Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan kepada investor meliputi :	
					- Profil potensi dan peluang investasi	
					- Sarana pendukung promosi	
					- Event promosi/pameran investasi	
					- Temu investasi/Temu usaha	
					- Pendataan di bidang penanaman modal	
					- Pengembangan sistem informasi	
		12 Laju pertumbuhan investasi		2 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1 Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Tasikmalaya	
					2 Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	
		13 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan	2.2.8 Mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu	1 Pelayanan Perizinan Terpadu	1 Penyusunan Grand Design PPT dan penguatan kelembagaan PPT	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
		14 Persentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan			2 Penyiapan dan peningkatan SDM Pelayanan perizinan	
					3 Peningkatan sarana dan prasana pelayanan perizinan	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					4 Pengembangan sistem informasi dan monitoring evaluasi pelayanan perizinan	
					5 Penyamaan persepsi dan komitmen PPT	
	2.3 Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif	1 Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang memadai	2.3.1 Menciptakan sarana perdagangan yang memadai untuk memperlancar aktifitas perdagangan	1 Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	1 Pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional (pasar kabupaten dan pasar desa)	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
					2 Relokasi Pasar	
					3 Penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima	
					4 Pembinaan dan Pengawasan Pasar	
3. Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas ekonomi, sosial, dan budaya serta merupakan <i>database</i> pengambilan kebijakan	3.1 Terwujudnya desa unggulan	1 Jumlah desa yang mendapatkan dana stimulan desa unggul dan mandiri	3.1.1 Mewujudkan desa unggul dan mandiri	1 Percepatan Pembangunan Perdesaan	1 Pendanaan gerakan membangun desa (GERBANG DESA) unggulan dan mandiri	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
	3.2 Terwujudnya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)	1 Meningkatnya jumlah desa yang memiliki BUMDES	3.2.1 Mengembangkan peran lembaga ekonomi perdesaan dalam pembangunan desa	1 Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	1 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	
					2 Fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif yang dikelola perempuan perdesaan	
	3.3 Terwujudnya Desa sebagai Pusat Pembangunan Daerah	1 Meningkatnya Prestasi dalam Lomba Desa	3.3.1 Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalm	1 Peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan	1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi perdesaan	
					2 Lomba Desa	
		2 Meningkatnya persentase lahan milik desa yang dikelola oleh petani penggarap (buruh tani)			3 Optimalisasi pengelolaan lahan milik desa oleh petani penggarap (buruh tani) untuk meningkatkan pendapatan buruh tani	
	3.4 Berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan	1 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan	3.4.1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Ketersediaan energi dan protein per kapita	1 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Bagian Ketahanan Pangan
		- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)		2 Penguatan cadangan pangan	1 Pengembangan lumbung pangan	
		- Tersedianya Lumbung Pangan Perdesaan			2 Bantuan Keuangan untuk Optimalisasi Ketahanan Pangan	
		- Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	3.4.2 Distribusi dan akses pangan	1 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	1 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	
		- Tersedianya peta rawan pangan		2 Stabilitas harga dan pasokan pangan	1 Informasi pasar	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		- Tersedianya petugas pengumpul data/informasi harga dan akses pangan	3.4.3 Penganekaragaman dan keamanan pangan	1 Skor pola pangan harapan (PPH)	1 Penetapan skor PPH	
				2 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
				3 Pengembangan kelompok usaha produktif	1 Fasilitasi pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif melalui pembinaan dan bantuan modal	
			3.4.4 Penanganan kerawanan pangan	1 Penanganan daerah rawan pangan	1 Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	
				2 Pengembangan desa mandiri pangan	1 Pengembangan desa mandiri pangan	
	3.5 Mempertahankan budaya gotong royong dalam penguatan pembangunan desa	1 Jumlah desa yang melaksanakan Pembangunan melalui Bhakti Siliwangi manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	3.5.1 Peningkatan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di perdesaan dalam pembangunan desa	1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2 Jumlah desa yang melaksanakan pembangunan melalui TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD)			2 Pelatihan ketrampilan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil	
					3. Pembangunan Desa melalui Padat karya	
		3 Meningkatnya jumlah Kelompok Simpan Pinjam melalui mekanisme kegiatan lumbung desa			4 Lumbung Desa	
		4 Meningkatnya jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)		2 Peningkatan peran perempuan di perdesaan	1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	
		5 Jumlah karang taruna yang aktif di perdesaan		3 Peningkatan peran pemuda dalam kewirausahaan di perdesaan	1 Pengembangan kapasitas karangtaruna dalam pembangunan perdesaan	
		6 Jumlah LPM			Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi permodalan bagi pemuda di perdesaan	
	3.6 Tersedianya data potensi desa	1 Jumlah Desa yang sudah memiliki profil desa	3.6.1 Pengembangan profil desa yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah	1 Pengembangan data / informasi / statistik desa	1 Pengumpulan, pengolahan, updating serta analisis data dan statistik desa	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa	1.1 Meningkatnya daya saing, produktivitas dan produksi usaha pertanian, industri kecil, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan pendapatan petani/masyarakat	1 Meningkatnya produksi pertanian : padi dan palawija (Padi gogo, palawija, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu), sayur-sayuran (cabe merah, mentimun, tomat) dan buah-buahan (manggis, salak, durian, pisang)										Dinas Pertanian Tanaman Pangan
		Padi	Ton GKG	873,541	719,828	724,117	727,810	731,523	735,253	735,253	742,605	
		- Padi sawah	Ton GKG	851,351	699,997	704,184	707,776	711,386	715,014	715,014	722,164	
		- Padi gogo	Ton GKG	22,190	19,831	19,933	20,034	20,137	20,239	20,239	20,441	
		- Padi organik (Bagian dari Padi sawah)	Ton GKG	31,412	60,990	61,789	62,589	63,391	64,186	64,186	64,827	
		Produksi (ton gkg)	Ton	873,541	719,828	724,117	727,810	731,523	735,253	735,253	742,605	
		Konsumsi Gabah (ton)	Ton	63,768.49	52,547.44	52,860.54	53,130.13	53,401.18	53,673.47	53,673	54,210.17	
		- Benih/bibit (0,9 % dari produksi)	Ton	7,861.87	6,478.45	6,517.05	6,550.29	6,583.71	6,617.28	6,617	6,683.45	
		- Pakan (0,44 % dari produksi)	Ton	3,843.58	3,167.24	3,186.11	3,202.36	3,218.70	3,235.11	3,235	3,267.46	
		- Bahan baku industri makanan (0,56% dari produksi)	Ton	4,891.83	4,031.04	4,055.06	4,075.74	4,096.53	4,117.42	4,117	4,158.59	
		- Tercecer (5,4 % dari produksi)	Ton	47,171.21	38,870.71	39,102.32	39,301.74	39,502.24	39,703.66	39,704	40,100.67	
		Gabah tersedia untuk konsumsi manusia (1-2)	Ton	809,772.51	667,280.56	671,256.46	674,679.87	678,121.82	681,579.53	681,580	688,394.84	
		Beras tersedia (konversi gabah ke beras 63,5 %)	Ton	514,205.54	423,723.15	426,247.85	428,421.72	430,607.36	432,803.00	432,803	437,130.72	
		Konsumsi Beras (ton)	Ton	194,184.72	192,772.84	194,376.14	195,890.81	197,326.37	198,680.86	198,681	200,114.06	
		- Konsumsi langsung (105,85 kg/kap/th)	Ton	177,370.20	178,917.09	180,437.84	181,881.42	183,245.51	184,528.20	184,528	185,819.89	
		- Pakan ternak/unggas (0,17%)	Ton	874.15	720.33	724.62	728.32	732.03	735.77	736	743.12	
		- Industri bahan makanan (0,60%)	Ton	3,085.23	2,542.34	2,557.49	2,570.53	2,583.64	2,596.82	2,597	2,622.78	
		- Susut/tercecer (2,5%)	Ton	12,855.14	10,593.08	10,656.20	10,710.54	10,765.18	10,820.08	10,820	10,928.27	
		Sisa beras/Surplus (ton)	Ton	320,020.82	230,950.32	231,871.71	232,530.91	233,280.99	234,122.14	234,122	237,016.66	
		Palawija										
		- Jagung	Ton	61,293	61,689	62,618	63,560	64,517	65,488	65,488	66,142	
		- Kedele	Ton	1,735	1,443	1,465	1,487	1,509	1,532	1,532	1,547	
		- Kacang tanah	Ton	81,115	8,561	8,689	8,820	8,953	9,088	9,088	9,178	
		- Ubi kayu	Ton	333,871	340,886	346,016	351,224	356,509	361,875	361,875	365,493	
		Sayuran										
		- Cabe merah	Ton	24,259	17,248	17,508	17,771	18,039	18,310	18,310	18,493	
		- Mentimun	Ton	18,235	13,853	14,062	14,273	14,488	14,706	14,706	14,853	
		- Tomat	Ton	9,752	4,098	4,160	4,222	4,266	4,350	4,350	4,393	
		Buah-buahan										
		- Manggis	Ton	13,507	21,830	22,828	23,171	23,520	23,874	23,874	24,112	
		- Salak	Ton	35,460	117,285	120,248	122,058	123,895	125,759	125,759	127,016	
		- Pisang	Ton	132,707	130,235	138,856	140,946	143,067	145,220	145,220	146,672	
		- Durian	Ton	3,418	3,540	3,593	3,647	3,702	3,758	3,758	3,795	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		2 Meningkatnya produktivitas pertanian : padi dan palawija (Padi gogo, palawija, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu), sayur-sayuran (cabe merah, mentimun, tomat) dan buah-buahan (manggis, salak, durian, pisang)										
		Padi										
		- Padi sawah	Kw/Ha	63.56	64.14	64.46	64.79	65.11	65.43	65.43	66.08	
		- Padi gogo	Kw/Ha	35.76	35.04	35.22	35.39	35.57	35.75	35.75	36.10	
		Palawija										
		- Jagung	Kw/Ha	58.64	60.22	60.52	60.82	61.13	61.43	61.43	62.08	
		- Kedele	Kw/Ha	14.34	12.65	12.61	12.68	12.74	12.80	12.80	36.10	
		- Kacang tanah	Kw/Ha	15.96	16.01	16.09	16.17	16.25	16.33	16.33	16.49	
		- Ubi kayu	Kw/Ha	198.29	199.43	200.43	201.43	202.44	203.45	203.45	205.48	
		Sayuran										
		- Cabe merah	Kw/Ha	163.93	165.53	166.36	167.19	168.03	168.87	168.87	170.55	
		- Mentimun	Kw/Ha	114.80	114.87	115.44	116.02	116.50	117.18	117.18	118.35	
		- Tomat	Kw/Ha	112.23	112.27	112.83	113.40	113.96	114.53	114.53	115.67	
		Buah-buahan										
		- Manggis	Kw/Ha	110.58	110.62	111.17	111.73	112.29	112.85	112.85	113.97	
		- Salak	Kw/Ha	122.30	123.53	124.15	124.77	125.39	126.02	126.02	127.28	
		- Pisang	Kw/Ha	277.84	283.40	284.82	286.24	287.67	289.11	289.11	292	
		- Durian	Kw/Ha	91.8	95.67	96.15	96.63	97.11	97.60	97.60	98.57	
		3 Meningkatnya jumlah Penyuluh Pertanian yang tersertifikasi :	sedang proses									
		- Penyuluh Pertanian Advisor		-	2	4	6	8	12	12	12	
		- Penyuluh Pertanian Supervisor	2	-	3	8	15	27	39	39	39	
		- Penyuluh Pertanian Fasilitator	1	-	6	14	25	40	78	78	78	
		4 Meningkatnya luas areal pertanian ramah lingkungan :										
		a. Padi SRI	Ha	5,539	8,300	8,400	8,500	8,600	8,700	8,700	8,800	
		b. Sayuran :										
		- Cabe	Ha	9	9	9	9	9	9	54	9	
		- Tomat	Ha	-	5	5	5	5	5	25	5	
		- Mentimun	Ha	-	5	5	5	5	5	25	5	
		5 Tersedianya prasarana dan sarana (infrastruktur) pertanian										
		- JITUT	Ha	200	350	650	1,000	1,400	1,900	1,900	2,090	
		- JIDES	Ha	850	950	1,450	2,000	2,580	8,430	8,430	9,273	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		- Jalan Usaha Tani (JUT)	Km	4	7	10	13	16	19	19	21	
		- Rumah kompos	Unit	11	21	26	31	36	41	41	45	
		- Sawah Baru	Ha	-	-	100	200	300	400	400	440	
		6 Meningkatnya Tingkat Kemampuan Kelompok Tani Berbasis Usaha Tanaman Pangan (Kelompok)	Kel.	1,758	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	1,805	
		- Pemula	Kel.	914	923	923	923	923	923	923	923	
		- Lanjut	Kel.	709	739	739	739	739	739	739	739	
		- Madya	Kel.	126	124	124	124	124	124	124	124	
		- Utama	Kel.	9	40	40	40	40	40	40	40	
		7 Meningkatnya Populasi Ternak (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba dan Unggas), Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu), Produktivitas Ternak Unggulan (Sapi Potong dan Sapi Perah), Konsumsi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu) dan Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Peternakan (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas)										Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
		a. Populasi Ternak										
		Sapi Potong	ekor	33,548	47,726	51,752	54,339	57,056	59,909	59,909	62,905	
		Sapi Perah	ekor	2,422	2,542	2,751	3,025	3,329	3,396	3,396	3,464	
		Kerbau	ekor	17,111	17,111	17,398	17,892	18,491	19,166	19,549	19,744	
		Kambing	ekor	68,021	69,363	71,837	74,598	78,134	82,041	82,041	84,502	
		Domba	ekor	271,191	273,835	282,555	302,062	328,123	344,529	344,529	361,755	
		Ayam Buras	ekor	1,664,912	1,713,509	1,768,830	1,837,802	1,912,003	1,988,483	1,988,483	2,087,907	
		Ayam Ras Pedaging	ekor	5,221,400	5,523,500	5,909,970	6,382,770	7,008,230	7,568,800	7,568,800	8,325,680	
		Ayam Ras Petelur	ekor	361,800	383,900	413,300	451,200	502,500	532,650	532,650	559,283	
		Itik	ekor	163,772	168,312	175,497	184,497	194,039	199,860	199,860	205,856	
		b. Produksi Hasil Ternak										
		Daging	ton	49,479.53	52,448.30	52,448.30	55,595.20	58,930.91	62,466.77	62,466.77	70,188.00	
		Telur	ton	8,215.94	8,544.58	9,057.25	9,618.80	10,244.03	10,930.38	10,930.38	11,684.57	
		Susu	ton	3,967.24	4,046.58	4,167.98	4,334.70	4,551.43	4,779.00	4,779.00	5,065.74	
		Kebutuhan Produk Hasil Ternak										
		Daging	ton	18,667.02	20,147.91	21,741.50	23,449.52	25,279.17	27,238.05	27,238.05	29,351.99	
		Telur	ton	8,026.48	8,501.31	9,002.25	9,527.98	10,079.41	10,657.46	10,657.46	11,270.32	
		Susu	ton	3,619.46	3,870.09	4,020.07	4,173.80	4,352.28	4,558.06	4,558.06	4,819.46	
		Kebutuhan harus dapat dipenuhi dari kab sendiri spt daging										
		Surplus/Defisit Daging	ton	30,812.51	32,300.39	30,706.80	32,145.68	33,651.74	35,228.72	35,228.72	40,836.01	
		Surplus/Defisit Telur	ton	189.46	43.27	55.01	90.82	164.62	272.91	272.91	414.25	
		Surplus/Defisit Susu	ton	347.78	176.49	147.91	160.90	199.15	220.95	220.95	246.28	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		c. Tingkat Konsumsi Hasil Ternak Perkapita										
		Daging	Kg/Kap/Thn	11.14	11.92	12.75	13.65	14.60	15.62	15.62	16.72	
		Telur	Kg/Kap/Thn	4.79	5.03	5.28	5.55	5.82	6.11	6.11	6.42	
		Susu	Kg/Kap/Thn	2.16	2.29	2.36	2.43	2.51	2.61	2.61	2.75	
		d. Produktivitas Ternak Unggulan Sapi Potong dan Sapi Perah										
		Jumlah Akseptor IB Sapi Potong	ekor	12,082	13,800	15,870	18,250	20,990	22,000	22,001	25,000	
		Jumlah Kelahiran IB Sapi Potong	ekor	6,968	8,004	9,205	10,585	12,174	12,760	12,761	14,500	
		Jumlah Akseptor IB Sapi Perah	ekor	1,353	1,421	1,492	1,567	1,645	1,727	1,728	1,800	
		Jumlah Kelahiran IB Sapi Perah	ekor	594	824	865	909	954	1,002	1,002	1,004	
		Produksi Susu Per Ekor Per Hari	Ltr/Ekor/Hari	11.80	12.15	12.52	12.89	13.28	13.68	13.68	14.09	
		e. Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Usaha Peternakan										
		Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	RTP	26,541	33,833	36,197	37,928	39,776	41,427	41,427	43,056	
		Ternak Kecil (Kambing, Domba, Kelinci)	RTP	67,842	68,640	70,878	75,332	81,251	85,314	85,314	89,252	
		Ternak Unggas (Ayam, Itik dan Aneka Unggas)	RTP	741,188	778,922	826,760	885,627	961,677	1,028,979	1,028,979	1,117,873	
		8 Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pemanfaatan potensi pesisir dan laut, Sarana Prasarana Penangkapan, Penyerapan tenaga kerja dan Sarana Pemasaran hasil perikanan										
		a. Produksi Ikan Budidaya										
		- Ikan Konsumsi hasil budidaya	ton	33,343.38	37,822.40	41,630.87	45,664.08	50,030.46	55,033.53	55,033.53	60,536	
		Ikan Gurame	ton	509.34	577.76	635.94	697.55	764.25	840.67	840.67	924.72	
		Ikan Nilem	ton	7,660.32	8,689.33	9,564.29	10,490.88	11,494.02	12,643.42	12,643.42	13,907.56	
		Udang Galah	ton	36.80	41.74	45.95	50.40	55.22	60.74	60.74	66.81	
		Lainnya (mas, tawes, nila dll)	ton	25,136.92	28,513.57	31,384.70	34,425.25	37,716.98	41,488.70	41,488.70	45,636.90	
		komoditi unggulan (nila, gurameh)										
		- Benih	Juta Ekor	1,898	2,467	3,208	4,170	5,421	7,047	7,047	8,456	
		b. Produksi Ikan Perairan Umum	ton	818.59	686	694	702	710	718	718	727	
		c. Produksi Ikan Laut	ton	883.41	897	908	919	930	941	941	952	
		Total Produksi Ikan Konsumsi	ton	35,045.38	39,405.40	43,232.87	47,285.08	51,670.46	56,692.53	56,692.53	62,215.00	
		Kebutuhan Ikan Konsumsi	ton	40,015.12	43,741.44	46,803.34	50,079.57	53,585.14	57,336.10	57,336.10	61,349.63	
		Ikan Gurame	ton	662.14	693.31	731.33	767.30	802.46	857.48	857.48	933.97	
		Ikan Nilem	ton	5,362.22	6,082.53	6,695.00	7,343.62	8,045.81	8,850.40	8,850.40	9,735.29	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		Udang Galah	ton	33.12	37.57	41.35	45.36	49.70	54.66	54.66	60.13	
		Lainnya (mas, tawes, nila dll)	ton	23,880.07	27,087.89	29,815.46	32,703.99	35,831.13	39,414.26	39,414.26	43,355.06	
		Kebutuhan benih ikan	Juta Ekor	1,329	1,727	2,245	2,502	3,253	3,876	3,876	4,651	
		Prosentase Pemanfaatan Potensi Laut	%	13.30	13.51	13.67	13.84	14.01	14.17	14.17	14.34	
		Surplus/Defisit Ikan Konsumsi	ton	(4,969.74)	(4,336.04)	(3,570.47)	(2,794.49)	(1,914.68)	(643.57)	(643.57)	865.37	
		Ikan Gurame	ton	(152.80)	(115.55)	(95.39)	(69.75)	(38.21)	(16.81)	(16.81)	(9.25)	
		Ikan Nilem	ton	2,298.10	2,606.80	2,869.29	3,147.26	3,448.20	3,793.03	3,793.03	4,172.27	
		Udang Galah	ton	3.68	4.17	4.59	5.04	5.52	6.07	6.07	6.68	
		Lainnya (mas, tawes, nila dll)	ton	1,256.85	1,425.68	1,569.23	1,721.26	1,885.85	2,074.43	2,074.43	2,281.85	
		Surplus/Defisit benih Ikan	Juta ekor	569	740	962	1,668	2,168	3,171	3,171	3,805	
		d. Penyerapan Tenaga Kerja										
		- Perikanan Budidaya	RTP	89,200	91,710	91,939	92,169	92,400	92,631	92,631	92,863	
		- Nelayan Perairan Umum	RTP	3,950	4,008	4,088	4,170	4,253	4,338	4,338	4,425	
		- Nelayan Laut	RTP	3,853	3,865	3,875	3,910	3,964	3,992	3,992	4,129	
		e. Jumlah Armada Penangkapan								-		
		- Kapal Motor (5 GT)	unit	-	2	4	6	8	10	10	12	
		- Perahu Motor Tempel	unit	149	187	212	237	262	287	287	302	
		- Perahu Tanpa Motor	unit	113	232	222	212	202	192	192	175	
		f. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	buah	1	2	2	3	3	4	4	4	
		g. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	buah	3	3	3	4	4	4	4	4	
		h. Jumlah alat tangkap										
		- Jaring Insang	pieces	9,959	10,341	11,042	11,740	12,400	13,140	13,140	14,253	
		- Pancing Rawai	basket	915	1,015	1,055	1,097	1,140	1,185	1,185	1,276	
		- Pintur	buah	1,726	2,126	2,317	2,525	2,752	2,999	2,999	3,213	
		9 Ketersediaan informasi pariwisata (Booklet/leaflet/ kalender/peta) per tahun	Paket	1,272	500	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	3,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		10 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab.Tasikmalaya per tahun	orang	632,643	670,601	676,928	683,254	689,580	695,907	695,907	702,234	
		- Wisatawan Nusantara	orang	624,743	662,228	668,475	674,722	680,970	687,217	687,217	693,465	
		- Wisatawan Mancanegara	orang	7,900	8,373	8,453	8,532	8,610	8,690	8,690	8,769	
		11 Tersedianya objek wisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	buah	8	8	9	10	11	12	12	13	
		12 Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata (Perlengkapan ODTW)	buah	3	3	4	5	6	7	7	7	
		13 Meningkatnya jumlah pemandu wisata (SDM)	orang	-	100	100	150	200	250	250	250	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		14 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata (Kompepar)	orang	309	329	349	349	349	349	349	400	
		15 Jumlah unit usaha industri :	unit	13,869	13,917	13,968	14,019	14,070	14,121	14,121	14,161	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		Industri Kecil	unit	13,853	13,901	13,949	13,997	14,045	14,093	14,093	14,130	
		- Industri Kecil Non Formal	unit	12,393	12,425	12,457	12,489	12,521	12,553	12,553	12,585	
		- Industri Kecil Non Formal Agro	unit	7,983	8,004	8,025	8,045	8,066	8,086	8,086	8,107	
		- Industri Kecil Non Formal Non Agro	unit	4,410	4,421	4,432	4,444	4,455	4,467	4,467	4,478	
		- Industri Kecil Formal	unit	1460	1476	1492	1508	1524	1540	1,540	1,545	
		- Industri Kecil Formal Agro	unit	584	590	597	603	610	616	616	618	
		- Industri Kecil Formal Non Agro	unit	876	886	895	905	914	924	924	927	
		Industri Kecil Menengah	unit	16	16	19	22	25	28	28	31	
		- Industri Kecil Formal Agro	unit	3	3	5	7	9	11	11	13	
		- Industri Kecil Formal Non Agro	unit	13	13	14	15	16	17	17	18	
		16 Jumlah nilai investasi industri	Rp 000,-	78,872,450	81,203,650	83,534,850	85,866,050	88,197,250	90,528,450	90,528,450	90,628,800	
		17 Jumlah tenaga Kerja industri kecil dan menengah :	orang									
		Industri Kecil	orang	15900	16160	16420	16680	16940	17200	17200	17210	
		Industri Kecil Menengah	orang	510	544	578	612	646	680	680	730	
		18 Tingkat pelayanan usaha IKM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		19 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7.35	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
		20 Pertumbuhan Industri	%	5	5.3	5.3	5.4	5.4	5.45	5.45	5.45	
		21 Tersusunannya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP-RHL dan RTn-RHL) per tahun	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		22 Berkurangnya Lahan Kritis	ha	10,974	9,499	8,024	6,549	5,074	3,599	3,599	2,124	
		a. Penanganan Lahan Kritis per tahun	ha	1,942	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	7,375	1,475	
		b. Rehabilitasi Sumber Mata Air per tahun	ha	595.9	100	100	100	100	100	500	95.9	
		23 Meningkatnya masyarakat yang memahami mengenai dampak perusakan hutan melalui penyuluhan per tahun	orang	35	40	45	50	55	60	250	66	
		24 Meningkatnya hasil hutan kayu dan non kayu										
		- Hutan Rakyat	Ha	38,729	40,204	41,679	43,154	44,629	46,104	46,104	47,579	
		- Produksi Kayu	m3	393,154	397,085	401,056	405,067	409,118	413,209	413,209	417,341	
		- Kapasitas Pabrik/Kebutuhan	m3	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	
		- Kekurangan/Kelebihan Pasokan	m3	(118,846)	(114,915)	(110,944)	(106,933)	(102,882)	(98,791)	(98,791)	(94,659)	
		- Jamur Kayu	Log	179,560	181,355.60	183,169.16	185,000.85	186,850.86	188,719.36	188,719.36	190,606.56	
			kg	89,780	90,678	91,585	92,500	93,425	94,360	94,360	95,503	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		- Lebah Madu	Stup	356	359.74	363.34	366.97	370.64	374.35	374.35	378.09	
			kg/ltr	233	236	238	240	243	245	245	247	
		- Bambu	Ha	5,166	5,217.79	5,269.97	5,322.67	5,375.90	5,429.65	5,429.65	5,484.00	
			batang	1,764,912	1,782,561	1,800,387	1,818,391	1,836,575	1,854,940	1,854,940	1,873,490	
		25 Meningkatnya pelayanan tata usaha hasil hutan (retribusi angkutan kayu)	unit	28,175	28,738.50	29,313.27	29,899.54	30,497.53	31,107.48	31,107.48	31,729.63	
		26 Meningkatnya Jumlah Produksi Bibit di UPTD Hutbun	bibit/pohon	200,000	210,000	220,000	230,000	240,000	250,000	250,000	260,000	
		27 a. Meningkatnya luas lahan komoditas unggulan produktif Perkebunan TM										Dishutbun
		- Kelapa	Ha	25,006	25,256	25,508.62	25,763.71	26,021.34	26,281.56	26,281.56	26,544.37	
		- T e h	Ha	6,651	6,718	6,784.69	6,852.53	6,921.06	6,990.27	6,990.27	7,060.17	
		- Kopi	Ha	970	980	989.50	999.39	1,009.39	1,019.48	1,019.48	1,029.67	
		- Cengkeh	Ha	1,463	1,478	1,492.41	1,507.33	1,522.40	1,537.63	1,537.63	1,553.00	
		- Karet	Ha	102	112	124.00	136.00	149.00	164.00	164.00	181.00	
		b. Meningkatnya Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan										
		- Kelapa	ton	24,513	24,758	25,005.71	25,255.77	25,508.33	25,763.41	25,763.41	26,021.04	
		- T e h										
		- Produksi	ton	10,220	10,322	10,425.42	10,529.68	10,634.97	10,741.32	10,741.32	10,848.74	
		- Kapasitas Pabrik Teh Rakyat	ton	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
		- Kelebihan/Kekurangan Produksi	ton	(7,780)	(7,678)	(7,575)	(7,470)	(7,365)	(7,259)	(7,259)	(7,151)	
		- Kopi	ton	998	1,008	1,018.06	1,028.24	1,038.52	1,048.91	1,048.91	1,059.40	
		- Cengkeh	ton	450	455	459.05	463.64	468.27	472.95	472.95	477.68	
		- Karet										
		- Produksi Karet Rakyat	ton	66	71.68	80.60	89.76	98.34	109.88	109.88	120.87	
		- Produksi Karet PBS	ton	934	1,067	1,200	1,350	1,519	1,709	1,709	1,709.00	
		- Jumlah Produksi Karet	ton	999.50	1,138.68	1,280.60	1,439.76	1,617.34	1,818.88	1,818.88	2,000.77	
		- Kapasitas Pabrik PBS	ton	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155	3,155.00	
		- Kelebihan/Kekurangan Produksi	ton	(2,155.50)	(2,016.32)	(1,874.40)	(1,715.24)	(1,537.66)	(1,336.12)	(1,336.12)	(1,154.23)	
		c. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan										
		- Kelapa (PSP.1,5 ton/ha/thn)	ton/Ha	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.03	1.04	
		- T e h (PSP.2 ton/ha/thn)	ton/Ha	1.54	1.55	1.57	1.58	1.60	1.61	1.61	1.63	
		- Kopi (PSP.1,3 ton/ha/thn)	ton/Ha	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.08	1.09	
		- Cengkeh (PSP. 0,3 ton/ha/thn)	ton/Ha	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	
		- Karet (PSP.1,3 ton/ha/thn)	ton/Ha	0.64	0.64	0.65	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja komoditi unggulan perkebunan	Orang	112,776	113,340	113,907	114,476	115,048	115,624	115,624	116,780	
		28 Terkendalnya serangan hama penyakit Penyakit Kehutanan/Perkebunan	ha	424.0	415.6	407.2	399.1	391.1	383.3	383.3	375.6	
		29 Meningkatnya Jumlah dan Kelas Kelompok Tani Kehutanan/Perkebunan	Kel									
		- Pemula	Kel	823	823	823	819	819	819	819	884	
		- Lanjut	Kel	255	255	255	257	257	257	257	259	
		- Madya	Kel	37	37	37	38	38	38	38	39	
		- Utama	Kel	4	4	4	5	5	5	5	6	
		30 Meningkatnya jumlah petugas yang mengikuti Pelatihan Teknis	orang	22	25	27	29	31	33	33	35	
		31 Tersedianya alat pengolahan produksi tepat guna (teh rakyat)	unit	33	34	35	36	37	38	38	39	
	1.2 Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan berdasarkan potensi lokal	1 Terlaksananya proses perencanaan kawasan minapolitan										Bappeda dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
		- Dokumen Masterplan	Dok	-	-	1	-	-	-	1	-	
		- Dokumen RPIJM	Dok	-	-	1	-	-	-	1	-	
		2 Terlaksananya proses perencanaan kawasan agropolitan										
		- Dokumen Masterplan	Dok	-	-	1	-	-	-	1	-	
		- Dokumen RPIJM	Dok	-	-	1	-	-	-	1	-	
	1.3 Terwujudnya pasar agribisnis	1 Terlaksananya kegiatan promosi komoditas unggulan perkebunan	Keg	1	1	1	1	1	1	5	1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		2 Terlaksananya kegiatan promosi komoditas unggulan pertanian	Keg	3	3	3	3	3	3	15	3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
		3 Tersedianya pasar/terminal agribisnis	Unit	-	-	-	1	-	-	1	1	
		4 Meningkatnya jumlah usaha agribisnis perdesaan (PUAP)	Gapoktan	40	40	50	70	74		351	-	
2. Meningkatkan peran lembaga perekonomian dan perdagangan tradisional.	2.1 Meningkatnya kemampuan dan peran koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah	1 Meningkatnya Jumlah koperasi baru per tahun	buah	26	12	14	16	18	21	21	23	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan,
		2 Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat	buah	117	128	137	145	152	160	160	162	
		3 Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif	buah	323	371	396	423	452	483	483	483	
		4 Meningkatnya Jumlah Koperasi	buah	664	676	690	706	724	745	745	745	
		5 Meningkatnya Jumlah Anggota	orang	148,617	149,360	150,106	151,606	152,364	153,125	153,125	153,125	
		6 Meningkatnya Jumlah Modal	Rp (000,-)	112,952,508	114,646,795	116,366,495	118,111,992	119,883,671	121,681,926	121,681,926	122,681,926	
		7 Meningkatnya Jumlah Karyawan	orang	1,517	1,547	1,582	1,621	1,664	1,713	1,713	1,783	
		8 Meningkatnya Total aset	Rp (000,-)	244,958,984	246,183,778	248,645,615	251,629,362	254,900,543	258,724,051	258,724,051	259,030,062	
		9 Meningkatnya Volume usaha	Rp (000,-)	141,980,329	142,690,230	144,117,132	145,846,537	147,888,380	150,106,705	150,106,705	152,106,705	
		10 Meningkatnya Laba	Rp (000,-)	5,499,336	5,581,076	5,692,697	5,835,014	6,126,764	6,463,736	6,463,736	6,873,500	
		11 Meningkatnya Jumlah UKM	Unit	27,586	29,138	30,595	32,125	33,731	35,418	35,418	35,418	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		12 Kontribusi keberadaan BUMD (PD. BPR) :										Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
		Total aset	Rp (000,-)	245,851,287	270,436,415.65	297,480,057.21	327,228,062.94	359,950,869.23	395,945,956.15	395,945,956.15	395,945,956.15	
		Kredit yang disalurkan	Rp (000,-)	196,378,866	216,016,752.35	237,618,427.59	261,380,270.35	287,518,297.38	316,270,127.12	316,270,127.12	316,270,127.12	
		Laba	Rp (000,-)	10,419,872	11,461,859.16	12,608,045.07	13,868,849.58	15,255,734.54	16,781,307.99	16,781,307.99	16,781,307.99	
		13 Kontribusi keberadaan BUMD (PDAM) :										
		Total aset	Rp (000,-)	23,472,229.56	25,819,452.52	28,401,397.77	31,241,537.55	34,365,691.30	37,802,260.44	37,802,260.44	37,802,260.44	
		Air yang terjual	Rp (000,-)	19,663,434.73	21,629,778.20	23,792,756.02	26,172,031.62	28,789,234.79	31,668,158.26	31,668,158.26	31,668,158.26	
		Laba	Rp (000,-)	2,278,696.77	2,506,566.45	2,757,223.09	3,032,945.40	3,336,239.94	3,669,863.93	3,669,863.93	3,669,863.93	
		14 Kontribusi keberadaan PDUP :										
		Total aset	Rp (000,-)	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	4,862,025	5,105,126	5,105,126	5,105,126	
		Laba	Rp (000,-)	250,000	262,500	275,625	289,406	303,877	319,070	319,070	319,070	
	2.2 Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat	1 Meningkatnya distribusi pengadaan untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat	Ton	1,044,323	1,094,323	1,148,095	1,194,018	1,241,778	1,291,449	1,291,449	1,317,278	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		2 Meningkatnya pengawasan terhadap barang beredar	Keg	3	2	3	4	6	6	6	6	
		3 Pelaku usaha, konsumen dan aparat pemerintah yang telah mengikuti sosialisasi perlindungan konsumen	orang	-	80	160	240	320	400	400	440	
		4 Pendampingan kegiatan pelaksanaan Tera/Tera ulang UTTP	Keg	39	39	39	39	39	39	39	39	
		5 Jumlah peneraan UTTP dan BDKT	Rp	42,632,150	55,599,160	58,379,118	61,298,074	64,362,978	67,581,126	67,581,126	68,932,748	
		6 Jumlah wajib daftar perusahaan	unit	651	684	718	753	790	829	829	846	
		7 Jumlah sarana dan prasarana promosi perdagangan yang memadai										
		- Rumah Tasik	unit	-	-	1	-	-	-	1	1	
		- Workshop Golok	unit	-	-	-	1	-	-	1	1	
		8 Volume dan nilai ekspor Kab.Tasikmalaya	US \$	3.617.967.24	3.690.326.58	3.764.133.11	3.839.415.77	3.916.20.08	3.994.528.16	3.994.528.16	4,074,419	
		9 Laju Pertumbuhan ekspor Kab.Tasikmalaya	%	2	2.5	3	3.5	4	4.5	4.5	5	
		10 Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kab.Tasikmalaya (PMA & PMDN) per tahun	Orang	50	-	100	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
		11 Jumlah promosi investasi (temu investasi dan pameran investasi) per tahun	Keg	2	2	2	2	2	2	10	2 / 10	
		12 Laju Pertumbuhan Investasi	%	9.25	10	11	12	13	14	14	14	
		13 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
		14 Prosentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
	2.3 Terwujudnya pasar tradisional yang nyaman dan representatif	1 Meningkatnya jumlah pasar tradisional yang memadai										Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		- Pasar Kabupaten	Buah	5	5	6	6	7	7	7	8	
		- Pasar Desa	Buah	67	67	72	77	82	87	87	92	
3. Menjadikan desa sebagai kesatuan komunitas ekonomi, sosial, dan budaya serta merupakan <i>data base</i> pengambilan kebijakan	3.1 Terwujudnya desa unggulan	1 Jumlah desa yang mendapatkan dana stimulan desa unggul dan mandiri per tahun	Desa	0	0	39	39	39	39	156	39	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
	3.2 Terwujudnya Badan usaha Milik Desa (BUMDES)	1 Meningkatnya jumlah desa yang memiliki BUMDES	buah	8	9	10	11	12	13	13	13	
	3.3 Terwujudnya Desa sebagai Pusat Pembangunan Daerah	1 Meningkatnya Prestasi dalam Lomba Desa	Keg	0	5	4	3	2	1	1	1	
		2 Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	Desa	33	36	39	42	45	48	48	51	
		3 Meningkatnya persentase lahan milik desa yang dikelola oleh petani penggarap (buruh tani)	%	-	-							Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB, dan Bagian Pemerintahan
		- Sawah (1.583 Ha)	%	-	-	15	20	25	30	30	30	
			Ha			237.45	316.6	395.75	474.9	474.9	474.9	
		- Kebun (6.846 Ha)	%	-	-	20	25	30	35	35	35	
			Ha			1369.2	1711.5	2053.8	2396.1	2396.1	2396.1	
		- Kolam (84 Ha)	%	-	-	5	10	15	20	20	20	
			Ha			4.2	8.4	12.6	16.8	16.8	16.8	
	3.4 Berkembangnya kelompok usaha mandiri di perdesaan	1 Meningkatnya kemandirian pangan, ketersediaan cadangan pangan, fasilitas lumbung pangan perdesaan, dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat										Bagian Ketahanan Pangan, Setda
		- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Gapoktan	6	3	3	3	3	3	21	3	
		- Tersedianya Lumbung Pangan Perdesaan	Poktan	20	15	10	10	10	10	75	10	
		- Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	desa/kelompok	46	40				40	126		
		- Tersedianya peta rawan pangan	paket	0	1				1	1	1	
		- Tersedianya petugas pengumpul data/informasi harga dan akses pangan	org	4	1	1	1	1	1	8	1	
	3.5 Mempertahankan budaya gotong royong dalam penguatan pembangunan desa	1 Meningkatnya Jumlah desa yang melaksanakan BSMSS Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa	Desa	10	11	12	13	14	15	15	16	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
		2 Meningkatnya Jumlah desa yang melaksanakan TMMD	Desa	5	0	6	0	7	0	13	8	
		3 Meningkatnya jumlah Kelompok Simpan Pinjam melalui mekanisme kegiatan lumbung desa	Kelompok	2	0	3	4	5	6	6	7	
		4 Meningkatnya jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Kelompok	12,860	12,865	12,870	12,875	12,880	12,885	12,885	12,890	
		5 Jumlah karang taruna	Desa	351	351	351	351	351	351	351	351	
		6 Jumlah LPM	Desa	351	351	351	351	351	351	351	351	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dan Keunggulan Agribisnis

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
	3.6 Tersedianya data potensi desa	1 Jumlah Desa yang sudah memiliki profil desa	Desa	351	351	351	351	351	351	351		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran							
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik	1.1 Tertatanya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik	1 Kesesuaian OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku	1.1.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1 Penataan Kelembagaan	1 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah serta Penyusunan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja	Setda (Bag.Organisasi)			
		2 Jumlah SKPD yang telah dianalisis beban kerjanya			2 Penyusunan Rincian tugas unit, uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada SKPD				
		3 Jumlah SKPD			3 Penyusunan rincian tugas unit, uraian jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada UPTD				
		4 Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas unit			4 Analisa beban kerja				
		5 Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian jabatan			5 Analisa Jabatan				
					6 Penyusunan formasi dan syarat jabatan Fungsional Angka kredit				
					7 Sosialisasi Kelembagaan perangkat daerah				
					6 Meningkatnya Jumlah SKPD yang bersertifikat ISO		2 Penataan Ketatalaksanaan	1 Penyusunan Pedoman Kerja, Tata Hubungan Kerja dan sistem koordinasi	Setda (Bag.Organisasi)
					7 Jumlah SOP yang sudah disusun SKPD			2 Penyusunan SPM dan SOP (Pedoman Pelayanan Kepada Masyarakat)	
					8 Urusan yg sdh diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yg diterbitkan oleh pemerintah			3 Sertifikasi ISO untuk SKPD	
								4 Sosialisasi ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	
	9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD, ILPPD, LKPJ berdasarkan PP no. 3 thn 2007	3 Peningkatan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD, ILPPD dan LKPJ)	Bag.Pemerintahan Setda, Bappeda					
	10 Meningkatnya Status kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat								
	11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja pemerintah daerah		4 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah		1 Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bag. Organisasi, dan Bag. Pemerintahan Setda			

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		12 Meningkatnya pelayanan publik di tingkat kecamatan			2 Peningkatan Kinerja Pemerintah Kecamatan	
					3 Survey indeks kepuasan masyarakat	
		13 Meningkatnya pelayanan publik di tingkat desa			4 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	
		14 Jumlah MOU Kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya		5 Peningkatan Kerjasama daerah	1 Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Berbagai Bidang Pembangunan	
		15 Jumlah MOU Kerjasama dengan pihak ketiga			2 Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ke tiga dalam Berbagai Bidang Pembangunan	
		16 Terealisasinya Hasil Evaluasi, Monitoring, dan Laporan Kegiatan secara Berkala		6 Pemantauan, Pengevaluasian serta Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah	1 Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Bag.Bina Program Setda
		17 Terealisasinya pengelolaan pembangunan				
	1.2 Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah peraturan daerah yang disusun	1.2.1 Penataan sistem hukum di daerah	1 Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Legisiasi rancangan peraturan perundang-undangan	Bag.Hukum Setda
		2 Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki efektivitas pemerintahan			2 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	
		3 Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan			3 Publikasi peraturan perundang-undangan	
		4 Jumlah Produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan				
		5 Jumlah penanganan perkara dengan pihak lain				
		6 Jumlah sosialisasi/penyuluhan hukum terhadap masyarakat.				
		7 Jumlah produk hukum yang aspiratif dan berpihak pada publik				
	1.3 Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel	1 Jumlah perda yang disetujui	1.3.1 Peningkatan kapasitas, fungsi dan peran lembaga legislatif	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD
		2 Jumlah perda inisiatif			2 Rapat-rapat pembahasan Ranperda	
		3 Meningkatkan fungsi pengawasan DPRD			3 Terlaksananya hearing / audiensi	
		4 Jumlah audensi/unjuk rasa/hearing di DPRD			4 Kunjungan kerja (reses), koordinasi dan konsultasi, study banding	
		5 Jumlah kegiatan reses				

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran					
	1.4 Terwujudnya keselarasan dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan kabupaten dgn pemerintah	1.4.1 Peningkatan koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah lainnya	Setda (Bag.Keuangan dan Bag Pemerintahan)	
		2 Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan daerah dgn Gubernur selaku Wakil Pemerintah			2 Dialog/audensi/konsultasi publik dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial dan kemasyarakatan		
					3 Kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja		
	1.5 Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	1.5.1 Peningkatan Administrasi Kearsipan Daerah	1 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1 Pembangunan database dan sistem kearsipan daerah	Kantor Perpustakaan dan Arsip	
		2 Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat			2 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		1 Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen / arsip daerah
		3 Penyelamatan Arsip In Aktip			3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen / arsip daerah
	1.6 Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai	1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD	1.6.1 Pemenuhan biaya rutin kebutuhan dasar operasional kerja SKPD	1 Pelayanan Administrasi perkantoran	1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Setda (Bag.Pemerintahan, Bag Umum)	
					2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		
					3 Penyediaan jasa jaminan barang milik		
					4 Penyediaan ATK		
					5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		
					6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan		
					7 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan		
					8 Penyediaan makanan dan minuman		
					9 Penyediaan jasa pengamanan kantor		
					10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		
				2 Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan pakaian dinas, lapangan, dan khusus beserta perlengkapannya		
					2 Pengadaan mesin atau kartu absensi		

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	1.6.2 Peningkatan sarana dan Prasarana Pemerintahan	1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Setda (Bag.Pemerintahan, Bag Umum)
					2 Pengadaan perlengkapan kantor	
					3 Pengadaan peralatan gedung kantor	
					4 Pengadaan meubelair	
					5 Pengadaan alat studio	
					6 Pengadaan komputer	
					7 Pengadaan rutin/berkala gedung kantor	
					8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
					9 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	
					10 Pengadaan alat komunikasi	
		3 Terbangunnya gedung kantor di Kawasan Pusat Pemerintahan			11 Pembangunan/pemeliharaan gedung kantor OPD	Bag Pemerintahan
		4 Tersedianya gedung/kantor kecamatan yang memadai			12 Pembangunan / pemeliharaan gedung kantor / aula kecamatan dan kantor / aula desa dan penataan halaman kantor	
		5 Tersedianya gedung/kantor desa yang memadai			13 Pengadaan perangkat komputer dan sarana penunjang lainnya untuk peningkatan pelayanan	
		6 Tersedianya Lahan utk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya		2 Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Pengadaan tanah	
				3 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
	1.7 Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan	1 Web Site milik pemerintah daerah sebagai layanan akses informasi publik	1.7.1 Peningkatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintahan	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	Kantor Litbang, , Bag.Humas, dan Dinas Perhubungan
		2 Adanya media informasi pemda yg dpt diakses oleh publik (Buletin dan Radio Pemda)			2 Peningkatan SDM dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		3 Jumlah pemberitaan di Media Cetak (Pusat, Regional, dan Lokal) dan Media Elektronik		2 Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1 Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat	
		4 Jumlah pemberitaan / siaran melalui RSPD				

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
1.8 Terwujudnya sistem Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah kajian isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dan ilmiah	1.8.1 Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan analisis terapan penyelenggaraan pemerintahan	1 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	1 Penelitian dan Pengembangan potensi daerah bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, tata ruang dan infrastruktur wilayah	Kantor Litbang	
				2 Jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian		
				3 Penyelenggaraan forum ilmiah dalam penguatan unsur penguasaan dan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi		
				4 Kajian terapan dan pengembangan teknologi tepat guna		
1.9 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan kedepan, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	1 Tingkat Ketersediaan data / statistik daerah	1.9.1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 Pengembangan data / informasi / statistik daerah	1 Pengumpulan, pengolahan, updating serta analisis data dan statistik daerah	Bappeda, BPS, Kantor Libang	
				2 Penyusunan Profil Daerah (Tasikmalaya Dalam Angka, PDRB dan IPM dll)		
	2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah		2 Perencanaan Pembangunan daerah	1 Pengembangan partisipasi masyarakat perumusan perencanaan pembangunan daerah		
				2 Pelaksanaan Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten		
	3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA			3 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan		
				4 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan		
	4 Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yg telah ditetapkan dengan Perbup			5 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		
				3 Pengembangan Wilayah Perbatasan	1 Koordinasi perencanaan Pengembangan wilayah perbatasan	
	5 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd			2 Penyusunan rencana pengembangan wilayah perbatasan		
				6 Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan Kab.Tasikmalaya dengan OPD		
7 Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan						

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		8 Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh		4 Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh	1 Penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	
					2 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
		9 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi		5 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam bidang ekonomi	
					2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
		10 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya		6 Perencanaan Sosial Budaya	1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam bidang sosial budaya	
					2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	
		11 Dokumen Masterplan pengembangan infrastruktur wilayah		7 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam	1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam	
		12 Dokumen Masterplan pengelolaan sumberdaya alam			2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam	
		13 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		8 Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	
					2 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	
	1.10 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Tingkat efisiensi realisasi belanja daerah, yang terdiri dari :	1.10.1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	1 Sosialisasi analisa standar belanja	DPPKAD
		a). Efisiensi Realisasi Belanja Daerah (dengan realisasi input ≤ 100% tercapai dan outcome ≥ 100%)			2 Penyusunan analisa belanja daerah	Bag. Bina Program
		b). Epektifitas Realisasi Belanja daerah (dengan realisasi input ≤ 100% tercapai dan outcome ≥ 100%)			3 Penyusunan standar satuan harga barang dan jasa	Bag. Umum
		2 Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan, meliputi :			4 Evaluasi dan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	DPPKAD
		a). Laporan Realisasi Anggaran (LRA),			5 Penyusunan Rancangan perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		b). Naraca			6 Penyusunan Rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
					7 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	
		c). Laporan Arus kas dan Catatan atas laporan keuangan			8 Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD	
		d). Laporan Realisasi Operasi (LRO)			9 Penyusunan Rancangan Perda KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	
		e). Laporan Penggunaan SILPA			10 Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan	
		f). Laporan Perubahan ekuitas			11 Penyusunan Ranperda tentang Perubahan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
		3 Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah			12 Pembinaan Administasi Pertanggungjawaban Keuangan untuk PP dan Bendahara SKPD	
as		4 Proporsi belanja yang dialokasikan ke desa			13 Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan SKPD	
		5 Nilai aset daerah		2 Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan Pembiayaan	1 Fasilitasi Penyelesaian Asset	
					2 Penertiban aset daerah	
		6 Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah			3 SIMDA Barang Milik Daerah	
					4 Sensus Barang Daerah	
					5 Sosialisai Pengelolaan barang milik daerah	
					6 Monev dan Penyusunan Barang milik daerah	
		7 Tingkat kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan pembangunan		3 Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	DPPKAD
					2 Asistensi penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran	
					3 Asistensi penyusunan rencana kerja anggaran APBD	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
					4 Asistensi penyusunan rencana kerja anggaran perubahan APBD	
		8 Terealisasinya target pendapatan asli daerah setiap tahun: a. Pajak daerah, b. Retribusi daerahc. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah		4 Peningkatan, Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan	1 Intensifikasi Pendapatan Daerah	
		9 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah			2 Penyusunan Rencana Perda tentang Retribusi Daerah	
		10 Rasio Realisasi PAD thd Anggaran Pendapatan			3 sosialisasi Pengalihan PBB dan BPHTB	
					4 Penertiban objek pajak daerah	
					5 Inhousetraining PBB dan BPHTB	
					6 Bintek pengelolaan PBB dan BPHTB	
				5 Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah	1 Pemeliharaan Basis Data PBB	
		11 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keungan Pemerintah Daerah yang Handal, Reliable, dan Relevan		6 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan berikutnya	
					2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
				7 Program peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	1 Updating Data Belanja Gaji SKPD	
		12 Tersusunnya APB Desa yang akuntabel		8 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyusunan APB Desa	
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja	2.1 Terpenuhinya kualitas / kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	1 Terpenuhinya keseimbangan rasio antara pegawai yang memenuhi kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada.	2.1.1 Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Diklatpim II, III dan IV	BKPLD
		- Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural			2 Diklat Prajabatan	
		2 - Rasio Jumlah CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan			3 Pemberian Bantuan Belajar / Stimulan Peningkatan Pendidikan Formal	
		3 - Peningkatan Pendidikan Formal PNS				

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		4 - Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan fungsional dengan jumlah jabatan fungsional		2 Pendidikan Kedinasan	1 Diklat Fungsional	
		5 - Jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis			2 Diklat Teknis	
		6 Jumlah Aparatur desa yang telah mengikuti diklat	2.1.2 Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa	3 Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah Desa	1 Diklat aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa	
		7 Jumlah aparatur desa yang mendapatkan insentif dan jaminan/asuransi kesehatan			2 Pemberian insentif dan tunjangan kesehatan bagi aparatur desa	DPPKAD
	2.2 Meningkatnya pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi	1 Tersusunnya pedoman penyusunan formasi dan pengadaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan (<i>rightsizing</i>)	2.2.1 Internalisasi dan penyempurnaan peraturan tentang perencanaan dan pengembangan karier	1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk perencanaan kebutuhan, rekrutmen, mutasi dan pengembangan pola karier	BKPLD
		2 Tersusunnya standar/pola pengembangan karier pegawai yang baku (PERDA/PERBUP)				
	2.3 Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta Terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif	1 Rasio penyelesaian proses administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan ketentuan perundang-undangan dalam kepegawaian.	2.3.1 Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pelayanan administrasi kepegawaian dana sistem manajemen kinerja kepegawaian	1 Fasilitas Purna Tugas PNS	1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun/Pengelolaan Pensiun	
		a. Rasio jumlah pegawai yang pensiun dengan jumlah SK Pensiun yang terbit				
		b. Rasio jumlah pegawai yang memenuhi syarat mengikuti ujian dinas dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas		2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pengiriman Peserta Ujian Dinas	
		c Rasio jumlah pegawai yang memenuhi syarat mengikuti ujian penyesuaian ijazah dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah			2 Pengiriman Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah	
		d Rasio jumlah pegawai yang mengajukan Karpeg, Karis dan Karsu dengan jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang terbit		3 Pelayanan Administrasi Kantor	1 Proses Administrasi Penerbitan Karpeg, Karis dan Karsu	
		e Rasio jumlah pegawai yang mengajukan ijin belajar dengan jumlah surat ijin belajar yang terbit			2 Proses Penerbitan Surat Ijin Belajar PNS	
		f Rasio jumlah pegawai yang mengajukan permohonan ijin kawin/cerai dengan surat rekomendasi ijin kawin/cerai yang terbit/penolakan			3 Proses Penanganan Rekomendasi Cerai PNS	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		g Rasio jumlah pegawai yang mengajukan perpindahan tempat kerja dengan jumlah pengajuan yang selesai diproses.			4 Proses Penanganan Perpindahan tempat kerja PNS	
		h Rasio jumlah pegawai yang akan diberi Kenaikan Gaji Berkala bagi pegawai yang memenuhi syarat dengan SK KGB yang terbit		4 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Penyelenggaraan Kenaikan Gaji Berkala PNSD	
		i Rasio jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk naik pangkat dengan SK Kenaikan Pangkat			2 Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat PNSD	
		j Rasio kesesuaian data kepegawaian dengan kondisi pegawai yang sebenarnya			3 Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (cepat, tepat dan akurat)	
		k Terselenggaranya Kegiatan seleksi pengadaan pegawai			4 Proses Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	
		2 Tersusunnya pedoman Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) (PERBUP)			5 Penyusunan pedoman Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator)	
		3 Terfasilitasinya penyusunan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) seluruh OPD			6 Sosialisasi Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator)	
		4 Tersusunnya pedoman mengenai mekanisme penilaian kinerja (PERBUP)			7 Penyusunan SOP (Standard Operasional Procedure) Penilaian Kinerja	
		5 Terfasilitasinya pelaksanaan mengenai mekanisme penilaian kinerja			8 Sosialisasi pelaksanaan mekanisme penilaian kinerja	
		6 Rasio jumlah Pegawai yang memenuhi syarat untuk diberi penghargaan dengan jumlah pegawai yang diusulkan diberi penghargaan			9 Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang Berprestasi	
		7 Tersusunnya pedoman penerapan sistem insentif (PERBUP)			10 Penyusunan Pedoman Penerapan Sistem Insentif	
		8 Terfasilitasinya pelaksanaan penerapan sistem insentif			11 Sosialisasi pelaksanaan sistem insentif	
		9 Pemrosesan Kasus-kasus Disiplin PNS			12 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	
3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	3.1. Mencegah terjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	3.1.1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Inspektorat
		2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah			2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	
		3 Pelaksanaan Tindak Lanjut dan pemutakhiran Data Temuan Hasil Pengawasan			3 Pelaksanaan tindak lanjut dan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan	
		4 Evaluasi Kinerja O P D			4 Evaluasi Kinerja O P D	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		5 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			5 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
		6 Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		2 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	1 Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	
		7 Partisipatif (jumlah) kelembagaan masyarakat terhadap pencegahan KKN	3.1.2 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan KKN	1 Pendidikan Anti KKN bagi masyarakat	1 Sosialisasi/kampanye ke masyarakat ttg anti KKN	
		8 Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilaksanakan	3.1.3 Penerapan Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Bina Program Setda
					2 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk LPSE dan ULP	
4. Terwujudnya Penegakan Perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	4.1 Meningkatnya Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat	1 Menurunnya Pelanggaran Perda	4.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran terhadap Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan Masyarakat	1 Peningkatan Penegakan Perda	1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat	Kantor Pol PP dan Kantor Kesbanglinmas
		2 Meningkatnya Operasi Penegakan Perda (Perda Pajak dan Retribusi, Perda Miras, Perda Perijinan, Perda PSK/WTS)			2 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat, dan pelaksanaan GDD (Gerakan Disiplin Daerah)	
					3 Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	
				2 Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat	1 Penyuluhan pencegahan berbagai macam penyakit masyarakat (Peredaran/penggunaan miras, prostitusi, perjudian, dll)	
		3 Jumlah pos induk/pos kamling di desa		3 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Penyiapan tenaga pengendali dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	
		4 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk			2 Pengembangan Pos jaga / ronda	
		5 Koordinasi Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Daerah			3 Pengendalian keamanan lingkungan	
		6 Menurunnya tindakan anarkis dan konflik			4 Peningkatan keamanan, pengawalan pejabat, dan tamu daerah	
		7 Jumlah Patroli Wilayah Pengamanan dan Pengawasan			5 Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu kada Bupati/Wakil Bupati	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		8 Pengamanan pemilu kada Bupati/Wakil Bupati			6 Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu kada Gubernur/Wakil Gubernur	
		9 Pengamanan pemilu kada Gubernur/Wakil Gubernur			7 Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Legislatip	
		10 Pengamanan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Legislatip			8 Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden	
		11 Pengamanan keamanan dan ketertiban pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden				
		12 Jumlah Satuan Linmas yang Aktif dan terlatih		4 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1 Pembentukan dan peningkatan kapasitas satuan keamanan lingkungan di masyarakat	
					2 Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kenyamanan dan Ketentraman	
		13 Pelatihan penanggulangan bencana		5 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
		14 Ketersediaan tempat penampungan sementara / evakuasi bagi korban bencana			2 Pengadaan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara/evakuasi bagi korban bencana alam	
		15 Ketersediaan Logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana			3 Pengadaan logistik dan obat-obatan di tempat penampungan sementara bagi korban bencana alam	
5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan	5.1 Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan	1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	5.1.1 Peningkatan pendidikan politik dan pengembangan wawasan kebangsanaan bagi masyarakat	1 Pendidikan Politik Masyarakat	1 Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat	Kantor Pol PP dan Kantor Kesbanglinmas
		a. Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati			2 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	
		b. Pemilu Kada Gubernur/Wakil Gubernur			3 Fasilitasi dan koordinasi forum-forum diskusi politik	
		c. Pemilu kada Legislatip			4 Penyusunan data base partai politik, ormas dan LSM	
		d. Pemilu Kada Presiden / Wapres				
		2 Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pemilu legislatip dan Pil Pres				
		3 Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pemilu Gubernur				

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		4 Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Pemilu Bupati				
		5 Jumlah orpol				
		6 Jumlah ormas / LSM				
		7 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa		2 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1 Fasilitasi pencapaian Halqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	
		8 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama			2 Seminar, sosialisasi, talkshow dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	
		9 Jumlah peserta Bintek ormas dan LSM			3 Sosialisasi, Diseminasi tentang perundang-undangan ormas dan LSM	
		10 Jumlah peserta orientasi deteksi dini			4 Bintek Ormas dan LSM	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik	1.1 Tertatanya kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan publik	1 Kesesuaian OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku	%	92% (yang belum sesuai Inspektorat dan Ketahanan Pangan)	92	100	100	100	100	100	100	Bagian Organisasi
		2 Jumlah SKPD yang telah dianalisis beban kerjanya	buah	0 (penataan kelembagaan belum didasarkan pada analisa beban kerja)	0	5	10	20	67	67	67	
		3 Jumlah SKPD	buah	65 (25 + 1 + 39)	65	67	67	67	67	67	67	
		4 Persentase SKPD yang telah memiliki uraian tugas unit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		5 Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian jabatan	unit	5	5	10	10	15	20	20	25	
		6 Meningkatnya Jumlah SKPD yang bersertifikat ISO	buah	0	0	0	1	1	2	2	2	
		7 Jumlah SOP yang sudah disusun SKPD	buah	2	2	5	8	11	14	14	14	
		8 Urusan yg sdh diterapkan SPM-nya berdasarkan pedoman yg diterbitkan oleh pemerintah	buah	0	-	3	5	9	13	13	13	
	9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD, ILPPD, LKPJ berdasarkan PP NO. 3 Thn 2007	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bagian Pemerintahan Setda, Bappeda
	10 Meningkatnya Status kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat	Rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	tinggi	
	11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja instansi pemerintah daerah	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bag. Organisasi Setda
	12 Meningkatnya pelayanan publik di tingkat kecamatan	Sangat Baik/Baik / Cukup/ Kurang	Jenis layanan publik yang dilaksanakan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati di Kecamatan sebanyak 129 jenis, baik itu perijinan, rekomendasi, fasilitasi. Sampai saat ini belum dilakukan survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Tingkat Kecamatan	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Bag. Pemerintahan dan Bag. Organisasi Setda
	13 Meningkatnya pelayanan publik di tingkat desa		Belum dilaksanakan survei kepuasan masyarakat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015					
		14 Jumlah MOU Kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya	buah	2	3	4	5	6	7	7	7			
		15 Jumlah MOU Kerjasama dengan pihak ketiga	buah	2	3	4	5	6	7	7	7			
		16 Terealisasinya Hasil Evaluasi, Monitoring, dan Laporan Kegiatan secara Berkala	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bag. Bina Program		
		17 Terealisasinya pengelolaan pembangunan	buah	105	105	105	105	105	105	105	105			
	1.2 Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah peraturan daerah yang disusun	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda	Bag. Hukum Setda		
		2 Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki efektivitas pemerintahan	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda			
			45 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	200 Perda	40 Perbup				
			292 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	150 Perda	300 Keppub				
		3 Jumlah regulasi yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda			
			45 Perbub	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	200 Perbup	40 Perbup				
			292 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	1500 Perda	300 Keppub				
		4 Produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda			
			45 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	200 Perbup	40 Perbup				
			292 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	1500 Keppub	300 Keppub				
		5 Jumlah penanganan perkara dengan pihak lain	buah	8	0	0	0	0	0	0	0		0	
		6 Jumlah sosialisasi/penyuluhan hukum terhadap masyarakat.	kali	15	10	10	10	10	10	50	10			
	7 Jumlah produk hukum yang aspiratif dan berpihak pada publik	buah	7 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	50 Perda	10 Perda				
		45 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	40 Perbup	200 Perbup	40 Perbup					
		292 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	300 Keppub	1500 Keppub	300 Keppub					
	1.3 Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel	1 Jumlah perda yang disetujui	buah	7	10	10	10	10	10	10	10	Sekretariat DPRD		
		2 Jumlah perda inisiatif	buah	0	2	3	3	3	3	3	3			
		3 Meningkatkan fungsi pengawasan DPRD	buah/kali	0	8	8	8	8	8	8	8			
		4 Jumlah audiensi/unjuk rasa/hearing di DPRD	kali	48	50	50	50	50	50	50	50			
		5 Jumlah kegiatan reses	kali	3	3	3	3	3	3	3	3			
	1.4 Terwujudnya keselarasan dan efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan kabupaten dgn pemerintah	kali	172	170	170	170	170	170	170	170	Bag. Keuangan dan Bag. Pemerintahan Setda		
		2 Penyelenggaraan konsultasi pemerintahan daerah dgn Gubernur selaku Wakil Pemerintah	kali	40	50	50	50	50	50	50	50			
	1.5 Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	1 Tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi kearsipan	SKPD	1	2	4	6	8	10	10	12	Kantor Arsip		
		2 Tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat	Paket	20	50	75	100	125	150	150	160			
		3 Penyelamatan Arsip In Aktip	SKPD	12	13	15	18	21	24	24	27			

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015				
1.6 Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai		1 Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	%	57.5	60	65	75	90	100	100	100	Setda Bagian Umum, Bag Pemerintahan	
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah	%	67.5	72.5	77.5	82.5	87.5	100	100	100		
		3 Terbangunnya gedung kantor di Kawasan Pemerintahan	buah	7	1	2	2	2	2	16	2	Bagian Pemerintahan dan Distarkim	
		4 Tersedianya gedung/kantor kecamatan yang memadai											
		- Kantor	Buah	Ktr dlm kondisi layak 18(46%) ktr memerlukan perbaikan sedang & brt 21,	20	5	5	5	4	39	39		
		- Aula	Buah	Aula kec dlm kondisi layak 17, yg mmrlukan prbaikan sdng & brt 16, yg blm mmiliki aula 6,	18	0	2	5	5	30	39		
		- Rumah Dinas	Buah	Rumh dns dlm knndisi ckp lyk 20, prl prbaikan brt & sdang 22	22	3	5	5	4	39	39		
		5 Tersedianya gedung/kantor desa yang memadai	Baik/kurang/baik/rusak	Kantor desa baik 126, kurang baik 123 dan rusak 102 unit	baik 126	baik 150	baik 200	baik 250	baik 351	baik 351	baik 351		
		6 Tersedianya Lahan utk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	Hektar		2	1	1	1	1	6	6		
1.7 Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan		1 Web Site milik pemerintah daerah (updating fitur)	paket	1	26	13	13	13	13	26	13	Kantor Litbang dan PDE, Bag.Humas	
		2 Adanya media informasi pemda yg dpt diakses oleh publik (Buletin Sukapura)	Exemplar	-	-	3000	4000	5000	6000	6000	6525		
		3 Jumlah pemberitaan di Media Cetak (Pusat, Regional, dan Lokal) dan Media Elektronik	buah	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6000	6525		
		4 Jumlah pemberitaan / siaran melalui (RSPD)	buah	0	200	225	250	275	300	300	300		
		5 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui											
		a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi	buah	5000	5400	5625	5850	6075	6300	6000	6525		
		b. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baligo	Exemplar	-	-	30	4000	5000	6000	6000	7000		
1.8 Terwujudnya sistem Penelitian dan Pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan		1 Jumlah kajian isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dan ilmiah	paket	8	12	16	20	24	28	28	32	Kantor Litbang	
1.9 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan kedepan, transparan, responsif, efisien, efektif akuntabel, partisipatif		1 Tingkat ketersediaan dan validitas informasi perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda, BPS	
		2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah (Peserta Musrenbang)	orang	353	360	360	360	360	360	360	360	Bappeda	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015				
	ereku, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		
		3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
		4 Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yg telah ditetapkan dengan Perbup	ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
		5 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPDP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		6 Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan Kab.Tasikmalaya dengan OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		7 Dokumen masterplan pengembangan wilayah perbatasan	buah	0	0	0	1	0	0	1	-	-	
		8 Dokumen Masterplan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh	buah	0	0	1	1	0	0	2	-	-	
		9 Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi	buah	1	0	1	0	0	0	1	-	-	
		10 Dokumen Masterplan pembangunan sosial budaya	buah	0	0	0	1	0	0	1	1	1	
		11 Dokumen Masterplan pengembangan infrastruktur wilayah	buah	0	0	1	0	0	0	1	-	-	
		12 Dokumen Masterplan pengelolaan sumberdaya alam	buah	0	0	0	1	0	0	1	-	-	
		13 Dokumen masterplan pembangunan daerah rawan bencana	buah	0	0	1	0	0	0	1	1	1	
		1.10 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Tingkat efisiensi realisasi belanja daerah, yang terdiri dari :										DPPKAD
	a. Efisiensi Realisasi Belanja Daerah (dengan realisasi input ≤ 100% tercapai dan outcome ≥ 100%)		%	92.36	92.5	92.75	93	93.3	93.7	94	94	94	
		b. Epektifitas Realisasi Belanja daerah (dengan realisasi input ≤ 100% tercapai dan outcome ≥ 100%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2 Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan, meliputi :											
		a). Laporan Realisasi Anggaran (LRA),	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		b). Naraca	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		c). Laporan Arus kas dan Catatan atas laporan keuangan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		d). Laporan Realisasi Operasi (LRO)	paket	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
		e). Laporan Penggunaan SILPA	paket	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
		f). Laporan Perubahan ekuitas	paket	-	-	-	1	1	1	1	1	1	
		3 Opini BPK terhadap Lapkeu Daerah	WDP/WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		4 Proporsi belanja yang dialokasikan ke desa	%	2.98	3.25	3.29	3.32	3.37	3.38	3.4	3.4	3.4	
		5 Nilai aset daerah	Rp	2,030,056,927,557	2,182,251,953,703	2,352,710,382,987	2,543,623,823,784	2,757,446,677,477	2,996,926,697,614	2,996,926,697,614	3,265,148,336,167	3,265,148,336,167	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		6 Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah	%	77.07	78.67	80.21	81.70	83.12	84.47	84.47	85.74	
		7 Tingkat kesesuaian antara penganggaran dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
as		8 Terealisasinya target pendapatan asli daerah setiap tahun: a. Pajak daerah, b. Retribusi daerah, c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	%	61.5	100	100	100	100	100	100	100	
		a. Pajak Daerah	%	95.80	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Retribusi daerah	%	94.08	95	100	100	100	100	100	100	
		c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	99.82	100	100	100	100	100	100	100	
		d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	%	22.13	100	100	100	100	100	100	100	
		9 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	1.05	0.09	1.05	1.14	1.23	1.32	1.32	1.41	
		10 Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	%	3.6	3.75	3.58	3.64	4.31	4.38	4.38	4.45	
		11 Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang Handal, Reliable, dan Relevan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		12 Tersusunnya APB Desa yang akuntabel	%	0	0	50	75	100	100	100	100	
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja	2.1	Terpenuhinya kualitas / kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya										BKPLD
		1 Terpenuhinya keseimbangan rasio antara pegawai yang memenuhi kompetensi dengan jumlah jabatan yang ada. - Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan struktural dengan jumlah jabatan struktural :										
		1) Eselon II	%	92.59	100	100	100	100	100	100	100	
		2) Eselon III	%	75.96	97.81	100	100	100	100	100	100	
		3) Eselon IV	%	32.44	33.66	100	100	100	100	100	100	
		2 - Rasio Jumlah CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	%	99.77	99.81	96.97	100	100	100	100	100	
		3 - Peningkatan Pendidikan Formal PNS										
		1) SD/Sederajat	Orang	335	331	327	323	319	315	315	311	
		2) SLTP/Sederajat	Orang	315	311	307	303	299	295	295	291	
		3) SLTA/Sederajat	Orang	2804	2801	2798	2794	2790	2786	2786	2782	
		4) D1	Orang	231	228	225	222	219	216	216	213	
		5) D2	Orang	3695	3691	3687	3684	3680	3676	3676	3672	
		6) D3	Orang	870	879	888	897	906	915	915	924	
		7) D4	Orang	17	14	13	12	11	10	10	9	
		8) S1	Orang	7497	7505	7518	7523	7531	7539	7539	7547	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		9) S2	Orang	428	432	436	440	444	448	448	452	
		10)S3	Orang	-	3	3	4	4	5	5	6	
		4 - Rasio pegawai yang memenuhi kompetensi jabatan fungsional dengan jumlah jabatan fungsional :										
		1) Guru	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2) Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		3) Fungsional lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	1000	
		5 - Jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Teknis	Orang	98	0	400	300	230	250	250	250	
		6 Jumlah Aparatur desa yang telah mengikuti diklat	Orang	116	66	60	60	60	60	422	60	Bag Pemerintahan Setda
		7 Jumlah aparatur desa yang mendapatkan jaminan/asuransi kesehatan	Orang	0	0	0	0	351	351	351	351	
		Jumlah insentif bagi aparatur desa (Kepala Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan, Kepala Dusun)	Rp.	11,095,200,000	12,244,800,000	15,809,400,000	15,809,400,000	15,809,400,000	15,809,400,000	15,809,400,000	15,809,400,000	
		Jumlah aparatur desa yang mendapatkan insentif (kades, kaur)	Orang	4458	4285	4454	4454	4454	4454	4454	4454	
	2.2	Meningkatnya pengembangan karier pegawai berbasis kompetensi	1 Tersusunnya pedoman penyusunan formasi dan pengadaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan (<i>rightsizing</i>)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1
			2 Tersusunnya standar/pola pengembangan karier pegawai yang baku (PERDA/PERBUP)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1
	2.3	Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta Terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif	1 Rasio penyelesaian proses administrasi kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan ketentuan perundang-undangan dalam kepegawaian.									
			a. Rasio jumlah pegawai yang pensiun dengan jumlah SK Pensiun yang terbit	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			b. Rasio jumlah pegawai yang memenuhi syarat mengikuti ujian dinas dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			c Rasio jumlah pegawai yang memenuhi syarat mengikuti ujian penyesuaian ijazah dengan jumlah pegawai yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			d Rasio jumlah pegawai yang mengajukan Karpeg, Karis dan Karsu dengan jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang terbit	%	724	100	100	100	100	100	100	100
			e Rasio jumlah pegawai yang mengajukan ijin belajar dengan jumlah surat ijin belajar yang terbit	%	448	100	100	100	100	100	100	100
			f Rasio jumlah pegawai yang mengajukan permohonan ijin kawin/cerai dengan surat rekomendasi ijin kawin/cerai yang terbit/penolakan	%	12	100	100	100	100	100	100	100

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		g Rasio jumlah pegawai yang mengajukan perpindahan tempat kerja dengan jumlah pengajuan yang selesai diproses.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		h Rasio jumlah pegawai yang akan diberi Kenaikan Gaji Berkala bagi pegawai yang memenuhi syarat dengan SK KGB yang terbit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		i Rasio jumlah pegawai yang memenuhi syarat untuk naik pangkat dengan SK Kenaikan Pangkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		j Rasio kesesuaian data kepegawaian dengan kondisi pegawai yang sebenarnya	%	54.97	70.69	100	100	100	100	100	100	
		k Terselenggaranya Kegiatan seleksi pengadaan pegawai	Keg	1	0	0	1	1	1	1	1	
		2 Tersusunnya pedoman Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) (PERBUP)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1	
		3 Terfasilitasinya penyusunan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) seluruh OPD	%	-	-	100	100	100	100	100	100	
		4 Tersusunnya pedoman mengenai mekanisme penilaian kinerja (PERBUP)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1	
		5 Terfasilitasinya pelaksanaan mengenai mekanisme penilaian kinerja OPD	%	-	-	100	100	100	100	100	100	
		6 Rasio jumlah Pegawai yang memenuhi syarat untuk diberi penghargaan dengan jumlah pegawai yang diusulkan diberi penghargaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		7 Tersusunnya pedoman penerapan sistem insentif (PERBUP)	buah	-	-	1	1	1	1	1	1	
		8 Terfasilitasinya pelaksanaan penerapan sistem insentif OPD	%	-	-	100	100	100	100	100	100	
		9 Pemrosesan Kasus-kasus Disiplin PNS	%	-	-	100	100	100	100	100	100	
3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme	3.1. Mencegah terjadinya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Obdit	168	142	142	142	142	142	142	142	Inspektorat
		2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	54	100	100	100	100	100	100	100	
		3 Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dan Pemutakhiran Data	%	46	100	100	100	100	100	100	100	
		4 Evaluasi Kinerja OPD	kali	1	1	1	1	1	1	5	1	
		5 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	kali	1	1	1	1	1	1	5	1	
		6 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	orang	11	10	10	10	10	10	50	10	
		7 Partisipatif (jumlah) kelembagaan masyarakat terhadap pencegahan KKN	buah	0	0	1	1	1	1	1		
		8 Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilaksanakan	paket	0	45	Pengadaan Barang/jasa dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai peraturan yang berlaku						
4. Terwujudnya Penegakan Perda, Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta	4.1 Meningkatnya Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta	1 Menurunnya Pelanggaran Perda / angka kriminalitas										Kantor Pol PP dan Kesbanglinmas
		Pencurian Berat	Kasus	43	41	39	37	35	33	33	31	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015				
Perlindungan Masyarakat	perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Pencurian Biasa	Kasus	8	7	6	5	3	3	3	1		
		Pencurian Kekerasan	Kasus	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
		Pencurian kendaraan bermotor	Kasus	44	42	40	38	36	34	34	32		
		Penggelapan	Kasus	2	1	0	0	0	0	0	0		
		Pembunuhan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Penipuan	Kasus	25	24	23	22	21	20	20	19		
		Uang Palsu	Kasus	1	0	0	0	0	0	0	0		
		Narkotika	Kasus	14	13	12	11	10	9	9	8		
		WTS	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Perkosaan	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Meningkatnya Operasi Penegakan Perda (Perda Pajak dan Retribusi, Perda Miras, Perda Perijinan, Perda PSK/WTS)	Keg	12	14	16	18	20	22	22	20	
		3	Jumlah pos induk/pos kamling di desa	buah	2,754	2,793	2,832	2,871	2,910	2,910	2,910	2,910	
		4	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	%	0.0073	0.0075	0.0080	0.0085	0,0090	0,0095	0,0095	0,0100	Per 10.000 penduduk
		5	Koordinasi Ketertiban, Kemanan dan Kenyamanan Daerah (pertemuan Kominda)	Kali	6	4	6	6	6	6	28	28	
		6	Menurunnya tindakan anarkis dan konflik	Kali	40	35	30	25	20	15	15	10	
7	Jumlah Satuan Linmas yang aktif dan terlatih	Orang	1001	140	390	390	390	390	2701	390	kesbang		
8	Patroli Wilayah Pengamanan dan Pengawasan	Keg	24	36	48	60	72	84	96	96	pol pp		
9	Pengamanan Pemilu Kada Bupati / Wakil Bupati	Keg	1	0	0	0	0	1	1	0	kesbang		
10	Pengamanan Pemilu Kada Gubernur / Wakil Gubernur	Keg	0	0	0	1	0	0	1	0			
11	Pengamanan Pemilu Legislatif	Keg	0	0	0	0	1	0	1	0			
12	Pengamanan Pemilu Kada Presiden/ Wakil Presiden	Keg	0	0	0	0	1	0	1	0			
13	Pelatihan penanggulangan bencana	keg	6	4	6	6	6	6	28	4			
14	Ketersediaan tempat penampungan sementara / evakuasi bagi korban bencana	Buah	0	1	2	3	4	5	5	6			
15	Ketersediaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana	paket	0	1	1	1	1	1	5	1			
5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pematapan wawasan kebangsaan	5.1 Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pematapan wawasan kebangsaan	1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu									Kantor Kesbanglinmas, KPU	
		a.	Pemilu Kada Bupati/Wakil Bupati	%	66,22 (2006)	66,92	0	0	0	0	66,92	70.05	
		b.	Pemilu Kada Gubernur/Wakil Gubernur	%	68,28 (2008)	0	0	69	0	0	69	0	
		c.	Pemilukada Legislatif	%	75,25 (2009)	0	0	0	70	0	70	0	
		d.	Pemilu Kada Presiden / Wapres	%	75,71 (2009)	0	0	0	70	0	70	0	
2	Kegiatan sosialisasi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden	Keg	0	0	0	1	0	0	1	0			

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 3 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Kondisi Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		3 Kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur	Keg	0	0	1	0	0	0	1	0	
		4 Kegiatan sosialisasi Pilbup	Keg	0	0	0	0	0	1	1	0	
		5 Jumlah Orpol,	Buah	29	29	29	29	29	29	29	34	
		6 Jumlah, Ormas / LSM	Buah	185	205	210	215	220	225	225	230	
		7 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan	orang	1500	1550	1850	2150	2450	2750	2750	2800	
		8 Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama	orang	750	750	1050	1350	1650	1950	1950	2250	
		9 Jumlah peserta bintek ormas/LSM	orang	250	250	350	500	650	800	800	950	
		10 Jumlah peserta orientasi deteksi dini	Orang	208	208	247	286	325	364	364	403	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran						
1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat	1.1. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Tersusunnya Dokumen RTRW	1.1.1 Menyelenggarakan Penataan ruang dengan peran aktif masyarakat	1 Perencanaan tata ruang	1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Bappeda		
		Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah						
		Prosentase Peta Analog RTRW :						
		- Kabupaten						
		- Kecamatan						
		- Desa						
		2 Jumlah RDTR Kawasan Strategis Kabupaten			2 Penyusunan RDTR Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, Kawasan Potensial, Wilayah Pesisir	Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
		3 Jumlah RTRK dan atau RTBL Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, potensial			3 Penyusunan RTRK dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, dan Kawasan Potensial			
		4 Jumlah RDTR Kawasan Perkotaan			4 Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan (PKL, PPK, PPL)			
		5 Jumlah Zoning Regulation yang dapat disusun			5 Penyusunan Zoning Regulation setiap blok peruntukan			
		6 Jumlah peran serta masyarakat dalam penataan ruang			6 Peran serta masyarakat dalam penataan ruang (Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)			
	1.2 Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten	1 Jumlah Perda rencana tata ruang	1.2.1 Pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.	1 Pengendalian pemanfaatan ruang	1 Penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang			
		2 Jumlah Juklak tentang rencana tata ruang.					2 Penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang	
		3 Jumlah Pedoman Operasional tentang pemanfaatan dan pengendalian tata Ruang					3 Penyusunan peraturan zonasi, dan penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.	
	1.3 Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah yang baik	1 Jumlah penyelenggaraan diseminasi dan sosialisasi penataan ruang	1.3.1 Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat	1 Pengendalian pemanfaatan ruang	1 Diseminasi dan sosialisasi peraturan tata ruang	Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
		2 Prosentase perwujudan Kawasan Lindung					2 Pemanfaatan ruang	1 Diseminasi dan sosialisasi rencana kawasan lindung, pemberian rekomendasi peruntukan ruang
		3 Prosentase perwujudan Kawasan Budidaya						2 Diseminasi dan sosialisasi rencana kawasan budidaya, pemberian rekomendasi peruntukan ruang

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		4 Jumlah permohonan peta dan perda penataan ruang			3 Peran serta dan pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang	
		5 Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang			4 Peran serta dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan ruang	
		6 Jumlah penerbitan permohonan perijinan (IMB)			5 Peran serta dan pemahaman masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	
	1.4 Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	1 Terselenggaranya Workshoop Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi perangkat pengendalian	1.4.1 Meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat	1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Penyusunan kebijakan dan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
					2 Pengawasan Pemanfaatan Ruang	
		2 Tersedianya tim monitoring yang bertugas mengawasi pemanfaatan ruang di lapangan			3 Peningkatan Peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tasikmalaya dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang	
		3 Tersedianya tim yang bertugas mengamankan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaat ruang			4 Peningkatan Peran Serta dan Pemahaman Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		4 Jumlah PPNS Penataan Ruang			5 Meningkatkan Kinerja Aparatur Penataan Ruang	
		5 Prosentase luas lahan kawasan pusat pemerintahan	1.4.2 Meningkatkan penyelenggaraan catur tertib pertanahan	1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan pusat pemerintahan	
		6 Prosentase jumlah penerbitan sertifikat tanah		2 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	2 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dengan memperhatikan pembangunan perdesaan	2.1 Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan	1 Jumlah Alokasi Dana Desa	2.1.1 Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan	1 Pembangunan Infrastruktur perdesaan	1 Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPMKB
		2 Panjang jalan desa yang dibangun / direhabilitasi			2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	
		3 Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan			3 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	
		4 Panjang saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi			4 Pembangunan irigasi perdesaan	
	2.2 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan yang tertib, aman dan nyaman	1 Jumlah dokumen perencanaan prasarana perdesaan (RPIJM : Jaringan Jalan, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	2.2.1 Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perdesaan, sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman.	1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Prasarana Dasar Permukiman Perdesaan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		2 Prosentase panjang Jalan Desa terhadap luas kawasan permukiman perdesaan			2 Peningkatan jalan poros desa yang menghubungkan PPL ke PPK	
		3 Prosentase cakupan pelayanan air bersih			3 Pembangunan prasarana air bersih perdesaan	
		4 Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah			4 Pembangunan septictank komunal	
		5 Prosentase produk sampah yang tertangani			5 Pembangunan tempat pembuangan dan pengelolaan sampah akhir	
		6 Jumlah dokumen perencanaan /penataan sarana permukiman perdesaan (Sarana Niaga, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Ruang Terbuka hijau)			6 Penyusunan rencana penataan sarana permukiman perdesaan	
		7 Prosentase cakupan pelayanan irigasi perdesaan			7 pembangunan/penataan ruang taman bermain dan tempat pemakaman umum	
		8 Jumlah saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi			8 Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perdesaan	
		9 Prosentase Panjang jalan desa yang dibangun dan atau direhabilitasi			9 Bantuan stimulan untuk pembangunan desa dan bantuan aspal	
					10 Bantuan stimulan pembangunan desa dan sosialisasi peraturan perundang-undangan sumberdaya air kepada masyarakat	
	2.3 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perkotaan yang tertib, aman dan nyaman	1 Jumlah dokumen perencanaan prasarana perkotaan (Jaringan Jalan, Air Bersih, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	2.3.1 Meningkatkan ketersediaan prasarana permukiman perkotaan, sehingga kualitas lingkungan aman dan nyaman.	1 Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dan DED Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan (PKL dan PPK)	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2 Prosentase luas Jalan Perkotaan terhadap luas kawasan permukiman perkotaan			2 Pembangunan/peningkatan jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten di PKL dan PPK	
		3 Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan			3 Pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan di PKL dan PPK	
		4 Prosentasi Penataan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan			4 Penataan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan	
		5 Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan		2 Lingkungan Sehat Perumahan	1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di wilayah Pusat Kegiatan Lokal (PKL dan PKL promosi)	
		6 Jumlah luas genangan banjir yang tertangani di wilayah perkotaan			2 Pembangunan Jaringan Drainase Kawasan Perkotaan (PKL dan PKLp)	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		7 Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan			3 Revitalisasi dan penataan TPPAS Nangkaleah	
		8 Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan			4 Rehabilitasi / pemeliharaan sistem jaringan air minum, dan fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air bersih	
		9 Prosentase luas cakupan pelayanan air minum terhadap luas wilayah perkotaan			5 Pengembangan sistem distribusi jaringan air bersih/air minum dan pembangunan SPAM IKK	
		10 Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sarana permukiman perkotaan (Sarana Niaga, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Ruang Terbuka hijau, Sosial Budaya)		3 Pengembangan Perumahan	1 Penyusunan rencana penataan sarana permukiman perkotaan	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		11 Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)		4 Pengelolaan Areal Pemakaman	1 pembangunan/penataan ruang taman bermain dan tempat pemakaman umum	
		12 Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran		5 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Pembangunan Hidran Kota, Pos Pemadam Kebakaran, pembinaan Satlakar	
	2.4 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat	1 Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah	2.4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan aman dan nyaman.	1 Program Pengembangan Perumahan	1 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) di PKL, PPK dan PPL	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2 Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah		2 Program Lingkungan sehat perumahan	1 Fasilitasi dan Koordinasi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	
		3 Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah			2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan /rehabilitasi rumah MBR	
		4 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/pembangunan baru			3 Pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat perumahan	
		5 Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih			4 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
		6 Berkurangnya Luas kawasan kumuh			5 Penataan lingkungan perumahan kumuh	
		7 Banyaknya lembaga keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk perbaikan perumahan		3 Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1 Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan	
		8 Jumlah rumah yang mendapat bantuan akibat bencana alam / sosial		4 Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran					
2.5 Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi antar wilayah		1 Terbangunnya jalan Ciawi-Singaparna	2.5.1 Peningkatan aksesibilitas / kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah	1 Pembangunan Jalan dan Jembatan	1 Penyelesaian pembangunan Jalan Ciawi-Singaparna	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		2 Terbangunnya Jalan alternatif Ciawi-Kadipaten			2 Rintisan Pembangunan Jalan Alternative Ciawi - Kadipaten		
		3 Jumlah jalan dan Jembatan Kabupaten Yang ditangani oleh Pembangunan Jembatan			3 Pembangunan jalan dan Jembatan Kabupaten		
		4 Terbangunnya jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna, Jembatan masuk RSUD dan Jembatan pada ruas jalan strategis Kabupaten			4 Pembangunan Jembatan Kabupaten Ruas jalan Ciawi-Singaparna, Jembatan Masuk RSUD dan Jembatan kabupaten pada Ruas jalan strategis.		
		5 Jumlah panjang kondisi jalan Kabupaten yang Mantap			5 Peningkatan Jalan Kabupaten, dengan prioritas poros Cibalong-Cipatujah dan poros Salopa-Cikalong		
		6 Panjang jalan yang ditangani melalui kegiatan rehabilitasi jalan			6 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten		
		7 Banyaknya jembatan yang ditangani melalui rehabilitasi jembatan			7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan Kabupaten		
		8 Persentasi penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat			2 Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan		1 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
2.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan		1 Jumlah Daerah Irigasi	2.6.1 Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Sumberdaya Air untuk Mendukung Pembangunan Bidang Pertanian dan Menjaga Ketersediaan Air Bagi Kehidupan Masyarakat	1 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1 Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
		2 Jumlah Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi			2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi		
		3 Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya.			2 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya		1 Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
		4 Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya yang terehabilitasi					2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
							3 Fasilitasi peningkatan kapasitas bendung Padawaras
		5 Jumlah Sumur Pantek/Bor			3 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		1 Pembuatan Sumur Pantek/Bor
6 Jumlah Penurapan Mata Air		2 Pemanfaatan dan Penurapan Mata Air					

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		7 Tersedianya Database Potensi Air Tanah dan Perencanaan Sumur Bor			3 Inventarisasi Potensi Air Tanah Dengan Metode Pengukuran Geolistrik	
		8 Tersedianya Database Pemetaan Hidrogeologi			4 Pemetaan Hidrogeologi	
		9 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah			5 Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air tanah	
	2.7 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1 tersedianya Perencanaan dan pembangunan Lokasi Terminal di Kabupaten Tasikmalaya	2.7.1 Peningkatan aksesibilitas / kemudahan pergerakan kegiatan antar wilayah untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah	1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan	1 Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan
		2 Perencanaan Lokasi Terminal Type B di Kabupaten Tasikmalaya			2 Study Kelayakan dan Penetapan Lokasi Terminal Type B di Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	
					3 Penyusunan DED Terminal Type B Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	
					4 Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Terminal Type B Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	
					5 Penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas Terminal Type B Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	
		3 Terbangunnya terminal tipe B Kabupaten Tasikmalaya			6 Pembangunan terminal tipe B Kabupaten Tasikmalaya	
		4 Perencanaan Lokasi Terminal Type C di Kabupaten Tasikmalaya			7 Study Kelayakan dan Penetapan Lokasi Terminal Type C di Kabupaten Tasikmalaya (Manonjaya , Cisayong, Salopa, Tanjungjaya, Cibalong , Bantarkalong, Cipatujah)	
					8 Penyusunan DED Terminal Type C di Kabupaten Tasikmalaya (Manonjaya, Cisayong, Salopa, Tanjungjaya, Cibalong, Bantarkalong, Cipatujah)	
					9 Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Terminal Type C di Kabupaten Tasikmalaya (Manonjaya , Cisayong, Salopa, Tanjungjaya, Cibalong , Bantarkalong, Cipatujah)	
					10 Penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas Terminal Type C di Kabupaten Tasikmalaya (Manonjaya , Cisayong, Salopa, Tanjungjaya, Cibalong , Bantarkalong, Cipatujah)	
		5 fasilitasi pembangunan Terminal khusus tambang			11 Fasilitasi pembangunan Terminal khusus tambang	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		6 Masterplan Parkir dan Penetapan Lokasi Parkir di Kabupaten Tasikmalaya			12 Penyusunan Masterplan Parkir dan Penetapan Lokasi Parkir di Kabupaten Tasikmalaya	
		7 Database tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Informasi dan Komunikasi			13 Survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Informasi dan Komunikasi	
		8 Data base Menara Telekomunikasi , lembaga penyiaran Swasta, Warung Telekomunikasi di 39 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya		2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana perhubungan	1 Penyusunan Database Menara Telekomunikasi , lembaga penyiaran Swasta, Warung Telekomunikasi di 39 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya	
		9 master plan perhubungan untuk infrastruktur komunikasi dan informatika di 39 kecamatan kabupaten tasikmalaya untuk implementasi e-government			2 Penyusunan master plan perhubungan untuk infrastruktur komunikasi dan informatika di 39 kecamatan kabupaten tasikmalaya untuk implementasi e-government	
		10 Tersedianya infrastruktur komunikasi dan informatika di Kompleks perkantoran pusat pemerintahan untuk implementasi e-government			3 Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika di Kompleks perkantoran pusat pemerintahan untuk implementasi e-government	
		11 Tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)		3 Program pengendalian dan pengamanan Lalu lintas	1 Pengadaan Penerangan Jalan Umum	
					2 Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	
					3 Pengadaan Warning Light dan Traffic Light	
					4 Pengadaan Marka Jalan	
					5 Pengadaan Traffic Cones	
					6 Pengadaan Guard Rail	
					7 Pengadaan Patok Pengaman	
					8 Pengadaan Reapeter	
		12 Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan bermotor Keliling		4 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1 Pengadaan Kendaraan Uji Keliling lengkap	
		13 Optimalisasi Terminal Kabupaten Tasikmalaya (Terminal Pagerageung, Ciawi, Rajapolah, Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Taraju, Bojonggambir, Sodonghilir, Sukaraja, Salawu, Cikatomas, Pancatengan, Cikalong, Tanjungjaya dan Cineam		5 Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	1 Pemeliharaan dan rehabilitasi Terminal Kabupaten Tasikmalaya (Terminal Pagerageung, Ciawi, Rajapolah, Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Taraju, Bojonggambir, Sodonghilir, Sukaraja, Salawu, Cikatomas, Pancatengan, Cikalong, Tanjungjaya dan Cineam)	
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berawasan lingkungan	3.1 Meningkatkan produktivitas sumberdaya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan / pencemaran lingkungan	1 Jumlah usaha penambangan yang dibina	3.1.1 Pengembangan usaha pertambangan yang berawasan lingkungan	1 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	1 Sosialisasi peraturan pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi
					2 Pembinaan teknis usaha pertambangan	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		2 Tersedianya database potensi mineral dan batu bara			3 Inventarisasi potensi sumber daya mineral dan batu bara	
		3 Jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit			4 Pembinaan dan Penertiban usaha pertambangan	
		4 Pembinaan dan pengawasan kegiatan reklamasi pasca penambangan			5 Pembinaan dan Pengembangan Pertambangan Umum	
		5 Terbangunnya Industri hasil Tambang			6 Fasilitasi Pembangunan Industri hasil Tambang	
		6 Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	3.1.2 Peningkatan kualitas lingkungan dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan	1 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Pemantauan kualitas lingkungan	Kantor Lingkungan Hidup
		7 Jumlah perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup			2 Koordinasi penertiban kegiatan yang berdampak pada lingkungan	
		8 Jumlah usaha/kegiatan pertambangan yang telah melakukan reklamasi			3 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
		9 Jumlah kajian di bidang Lingkungan Hidup			4 Pengelolaan B3 dan limbah B3	
		10 Jumlah kendaraan yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara			5 Koordinasi Penyusunan AMDAL	
		11 Jumlah industri yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara			6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	
		12 Jumlah tenaga pengawas pengendali pencemaran dan perusakan lingkungan			7 Pengkajian dan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif	
		13 Jumlah perusahaan yang memiliki ijin pengumpulan sementara limbah B3		2 Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1 Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumberdaya air	
					2 Peningkatan konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber-sumber air	
					3 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	
		14 Terbangunnya Taman Geologi Jasper di Kecamatan Pancatengah			4 Pembangunan Taman Geologi Jasper di Kecamatan Pancatengah	
		15 Jumlah Sumber mata air yang dikonservasi		3 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	1 Rehabilitasi hutan dan lahan	
					2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		16 Jumlah dan cakupan pengujian kualitas lingkungan		4 Peningkatan Pengendalian Polusi	1 Pengujian polusi udara, limbah padat dan limbah cair	
		17 Jumlah Ekowisata terbangun		5 Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	1 Pengembangan ekowisata di kawasan konservasi dan hutan wisata	
		18 Jumlah peraturan daerah pengelolaan RTH		6 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Penyusunan dan sosialisasi kebijakan, norma, standart dan prosedur pengelolaan RTH	
		19 Jumlah RTH			2 Pengembangan, Penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian RTH	
					3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	
4. Meningkatkan Ketersediaan Energi	4.1 Meningkatnya ketersediaan energi terutama untuk daerah perdesaan	1 Jumlah jaringan listrik yang dibangun	4.1.1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan dan Energi
		- JTM				
		- JTR				
		- Trafo				
		2 Jumlah Pelanggan listrik			2 Pengembangan Listrik Masuk Desa	
		3 Jumlah desa yang terjangkau pelayanan listrik			3 Listrik Masuk Desa	
		4 Jumlah penerangan Sarana umum			4 Pengadaan Penerangan Sarana Umum	
		5 Jumlah pengembangan sumber daya energi alternatif (biogas)			5 Pengembangan energi alternatif biogas	
		6 Jumlah Sumber Daya Energi Alternatif Mikro Hidro			6 Pengembangan energi alternatif Mikro Hidro	
		7 Tersedianya energi listrik di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Tasikmalaya			7 Penyediaan energi listrik kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya	
		- JTM				
		- JTR				
		- SKTM				
		- SKTR				
		- Trafo (630 KVA)				
		- Genset (630 KVA)				
		- Gardu Cantol (315 KVA)				
		- Rumah Gardu				
		- Rumah Genset				
		8 Pengembangan energi Geothermal Karaha Bodas			8 Fasilitasi Pengembangan Geothermal Karaha Bodas	

Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran				
		9 Tersedianya data base pemetaan jaringan distribusi listrik			9 Pemetaan Jaringan Distribusi Listrik	
5. Meningkatkan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	5.1 Terlaksananya mitigasi dan penanggulangan bencana alam	1 Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	5.1.1. Peningkatan Upaya Penanggulangan Bencana Alam	1 Penanggulangan Bencana Alam	1 Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2 Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana alam			2 Pengadaan sarana dan prasarana mitigasi bencana alam	
		3 Jumlah TAGANA			3 Pelatihan Penanggulangan bencana alam	
		4 Tersedianya Dokumen Mitigasi Bencana Alam Kab Tasikmalaya			4 Penyusunan Dokumen Mitigasi Bencana alam	
					5 Penanggulangan Bencana Alam	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015				
1. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat	1.1 Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan	1 Tersusunnya Dokumen RTRW		1	-	-	-	-	1	1		Bappeda	
		Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah	Buah										
		Prosentase Peta Analog RTRW :											
		- Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		- Kecamatan	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100	
		- Desa	%	0	-	10	20	30	40	40	40	50	
		2 Jumlah RDTR Kawasan Strategis Kabupaten	KSK	0	-	2	6	10	13	13	13	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	
		3 Jumlah RTRK dan atau RTBL Kawasan Strategis, Kawasan Cepat tumbuh, potensial	RTR	1	1	2	3	4	5	5	5		
		4 Jumlah RDTR Kawasan Perkotaan	KP	1	4	5	6	7	8	8	8		
		5 Jumlah Zoning Regulation yang dapat disusun	ZR	3	3	5	7	9	11	11	11		
		6 Jumlah peran serta masyarakat dalam penataan ruang	Kegiatan	10	9	15	12	12	12	60	10		
1.2 Meningkatnya pengaturan rencana tata ruang wilayah yang konsisten		1 Jumlah Perda rencana tata ruang	Buah Perda	2	3	5	8	10	12	12	15		
		2 Jumlah Juklak tentang rencana tata ruang.	Buah Perbup	1	1	1	3	5	7	7	9		
		3 Jumlah Pedoman Operasional tentang pemanfaatan dan pengendalian tata Ruang	Buah	-	-	-	1	2	3	3	3	5	
1.3 Meningkatnya pembinaan tata ruang wilayah yang baik		1 Jumlah penyelenggaraan diseminasi dan sosialisasi penataan ruang	kegiatan	6	3	3	3	3	3	15	3		
		2 Prosentase perwujudan Kawasan Lindung	%	30	32	34	36	38	40	40	41		
		3 Prosentase perwujudan Kawasan Budidaya	%	40	45	50	55	60	65	65	65	65	
		4 Jumlah permohonan peta dan perda penataan ruang	Orang	0	75	75	75	75	75	75	375	75	
		5 Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang	Pemohon	4500	4850	5100	5350	5600	5850	5850	5900	5900	
		6 Jumlah penerbitan permohonan perijinan (IMB)	Pemohon	-	500	1000	1500	2000	2500	2500	2500	500	
1.4 Meningkatnya pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah		1 Terselenggaranya Workshoop Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang bagi perangkat pengendalian	kegiatan	0	3	3	3	3	3	15	3		
		2 Tersedianya tim monitoring yang bertugas mengawasi pemanfaatan ruang di lapangan	Tim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		3 Tersedianya tim yang bertugas mengamankan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaatan ruang	Tim	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4 Jumlah PPNS Penataan Ruang	Orang	0	2	4	6	8	10	10	10	10	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		5 Prosentase luas lahan kawasan pusat pemerintahan	%	80	85	90	95	100	100	100	100	
		6 Prosentase jumlah penerbitan sertifikat tanah	%	40	45	50	55	60	65	65	65	
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dengan memperhatikan pembangunan perdesaan	2.1 Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk memajukan perekonomian di wilayah perdesaan	1 Jumlah Alokasi Dana Desa	Desa	351	351	351	351	351	351	351	351	Dinas Tarkim, Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPMKB
		2 Panjang jalan desa yang dibangun / direhabilitasi	km	107	150	150	150	200	200	200	200	
		3 Jumlah cakupan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	%	10	20	30	40	50	60	60	70	
		4 Panjang saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi	meter	750	1500	2000	2500	3000	3000	3000	1000	
		5 Prosentase cakupan pelayanan irigasi perdesaan	%	20	25	30	35	40	45	45	50	
		6 Jumlah saluran irigasi perdesaan yang dibangun / direhabilitasi	buah	50	52	54	56	58	60	60	62	
	2.2 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perdesaan yang tertib, aman dan nyaman	1 Jumlah dokumen perencanaan prasarana perdesaan (RPIJM : Jaringan Jalan, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	Dokumen	0	1	5	9	13	17	17	17	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2 Prosentase panjang Jalan Desa terhadap luas kawasan permukiman perdesaan	%	15	18	21	24	27	30	30	35	
		3 Prosentase cakupan pelayanan air bersih	%	35	40	45	50	55	60	60	65	
		4 Prosentase cakupan penduduk yang terlayani prasarana pengelolaan air limbah	%	5	10	15	20	25	30	30	35	
		5 Prosentase produk sampah yang tertangani	%	26	29	32	35	38	41	41	44	
		6 Jumlah dokumen perencanaan/penataan sarana permukiman perdesaan (Sarana Niaga, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Ruang Terbuka hijau)	Dokumen	-	-	1	2	3	4	4	4	
	2.3 Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman perkotaan yang tertib, aman dan nyaman	1 Jumlah dokumen perencanaan prasarana perkotaan (Jaringan Jalan, Air Bersih, Air Limbah, Drainase, Persampahan)	Dokumen	2	3	4	5	6	7	7	7	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2 Prosentase luas Jalan Perkotaan terhadap luas kawasan permukiman perkotaan	%	20	21	22	23	24	25	25	27	
		3 Prosentase luas Jalan Lingkungan terhadap luas wilayah perkotaan	%	25	28	31	34	37	40	40	43	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		4 Prosentasi Penataan dan Pembangunan Kawasan Fungsional Ibukota Pemerintahan	%	5	5	15	25	35	45	45	65	
		5 Prosentase luas cakupan pelayanan prasarana air limbah terhadap luas wilayah perkotaan	%	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5	52.5	54	
		6 Jumlah luas genangan banjir yang tertangani di wilayah perkotaan	%	0	0	5	10	15	20	25	30	
		7 Prosentase luas cakupan pelayanan persampahan terhadap luas wilayah perkotaan	%	35	40	45	50	55	60	60	65	
		8 Prosentase cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk perkotaan	%	40	45	50	55	60	65	65	70	
		9 Persentase luas cakupan pelayanan air minum terhadap luas wilayah perkotaan	%	38	40	42	44	46	48	48	50	
		10 Jumlah dokumen perencanaan/ penataan sarana permukiman perkotaan (Sarana Niaga, Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, Ruang Terbuka hijau, Sosial Budaya)	Dokumen	0	1	2	3	4	5	5	5	
		11 Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Pemakaman Umum)	Lokasi	4	5	6	7	8	9	9	9	
		12 Tingkat pelayanan terhadap bahaya kebakaran	%	-	10	15	20	25	30	30	35	
	2.4 Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana perumahan yang layak huni serta sehat	1 Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah	Paket Dokumen	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Tata Ruang dan Permukiman
		2 Prosentase jumlah rumah layak huni terhadap total jumlah rumah	%	60	65	70	75	80	85	85	85	
		3 Prosentase jumlah rumah tidak layak huni terhadap total jumlah rumah	%	25	30	35	40	45	50	50	55	
		4 Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/pembangunan baru	Unit	-	150	300	450	600	750	750	150	
		5 Prosentase Jumlah rumah yang menggunakan air bersih	%	38	42	46	50	54	58	58	60	
		6 Berkurangnya jumlah titik kawasan kumuh	Titik Kawasan	5	4	4	3	2	2	2	2	
		7 Banyaknya lembaga keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk perbaikan perumahan	Buah	4	6	8	10	12	14	14	14	
		8 Jumlah rumah yang mendapat bantuan akibat bencana alam / sosial	Unit	450	150	100	100	100	100	550	100	
	2.5 Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi antar wilayah	1 Terbangunnya jalan Ciawi-Singaparna	%	50	55	60	65	70	100	100	100	
		2 Terbangunnya jalan alternatif Ciawi-Kadipaten	%	0	-	-	-	-	10	10	30	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		3 Kondisi jalan kabupaten :	km	1303.323	1303.323	1303.323	1303.323	1303.323	1303.323	1303.323	1303.323	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		1. Kondisi Baik.	km	340.855	370.855	410.855	450.855	490.855	530.855	530.855	550.85	.
		2. Kondisi sedang	km	270.958	160.958	130.958	100.958	70.958	40.958	40.958	39.958	
		3. Kondisi rusak ringan	km	269.635	369.635	379.635	389.635	399.635	409.635	409.635	410.64	
		4. Kondisi rusak berat	km	421.875	401.875	381.875	361.875	341.875	321.875	321.875	301.875	
		Kondisi jembatan kabupaten :	buah	392	435	435	435	435	435	435	435	
		1. Kondisi Baik.	buah	337	339	345	350	355	360	360	364	
		2. Kondisi sedang	buah	11	10	9	8	7	6	6	6	
		3. Kondisi rusak ringan	buah	23	20	17	15	13	11	11	10	
		4. Kondisi rusak berat	buah	21	66	64	62	60	58	58	55	
		4 Jumlah pembangunan jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna, Jembatan masuk RSUD da Jembatan pada ruas jalan strategis Kabupaten	buah	11	19	22	25	28	28	28	30	
		5 Panjang peningkatan jalan	km	30	30	30	35	35	40	170	40	
		6 Panjang jalan yang ditangani melalui kegiatan rehabilitasi jalan	km	75	45	45	50	50	50	240	50	
		7 Banyaknya jembatan yang ditangani melalui rehabilitasi jembatan	buah	2	1	5	5	5	5	21	5	
		8 Persentasi penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	%	20	20	20	20	20	20	20	20	
	2.6 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengairan	1 Jumlah Daerah Irigasi	buah	276	276	276	276	276	276	276	276	Dinas Bina Marga dan Pengairan
		1. Jumlah DI yang dikelola oleh Kabupaten (layanan luas areal s/d 1.000ha)	buah	264	264	264	264	264	264	264	264	
		2. Jumlah DI yang dikelola oleh Propinsi (lintas kabupaten)	buah	10	10	10	10	10	10	10	10	
		3. Jumlah DI Strategis	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	
		2 Jumlah Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	buah DI	30	30	30	30	30	30	30	30	
		3 Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya.	buah	5	5	5	5	5	5	5	5	
		4 Jumlah embung, dan bangunan penampung air lainnya yang terehabilitasi	buah	5	5	5	5	5	5	5	5	
		5 Jumlah Sumur Pantek/Bor	unit	31	36	41	46	51	56	56	30	Dinas Pertambangan dan Energi
		6 Jumlah Penurapan Mata Air	buah	4	6	8	10	12	14	14	10	
		7 Tersedianya Database Potensi Air Tanah dan Perencanaan Sumur Bor	desa	22	27	32	37	42	47	47	35	
		8 Tersedianya Database Pemetaan Hidrogeologi	Kec	4	7	10	13	16	19	19	15	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		9 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengguna Air Tanah	Kec	12	14	16	18	20	22	22	20	
	2.7 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1 Tersedianya Dokumen Perencanaan Untuk Penetapan Lokasi Terminal di Kabupaten Tasikmalaya	dokumen	-	-	2	4	6	8	8	8	Dinas Perhubungan
		2 Dokumen Perencanaan Lokasi Terminal Type B di Kabupaten Tasikmalaya	dokumen	-	-	1	-	0	0	1	-	
		3 Pembangunan Terminal Type B Kabupaten Tasikmalaya	unit	-	-	-	1	-	-	1	-	
		4 Dokumen Perencanaan Lokasi Terminal Type C di Kabupaten Tasikmalaya	dokumen	-	-	1	2	2	2	7	-	
		5 fasilitasi pembangunan Terminal khusus tambang	Unit	-	-	-	1	-	-	1	-	
		6 Masterplan Parkir dan Penetapan Lokasi Parkir di Kabupaten Tasikmalaya	buah	-	-	1	-	-	-	1	-	
		7 Database tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Informasi dan Komunikasi	dokumen	-	0	0	1	0	0	1	-	
		8 Database Menara Telekomunikasi , lembaga penyiaran Swasta, Warung Telekomunikasi di 39 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya	buah	-	-	1	-	-	-	1	-	
		9 Master plan perhubungan untuk infrastruktur komunikasi dan informatika di 39 kecamatan kabupaten tasikmalaya untuk implementasi e-government	buah	-	-	-	1	-	-	1	-	
		10 Tersedianya infrastruktur komunikasi dan informatika di Kompleks perkantoran pusat pemerintahan untuk implementasi e-government	%	-	10	20	30	40	50	50	60	
		11 Tersedianya sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) :										
		- Penerangan Jalan Umum	buah	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2250	2250	
		- Rambu Rambu Lalu Lintas	buah	300	400	500	600	700	800	800	800	
		- Warning Light dan Traffic Light	buah	4	9	14	19	24	29	29	33	
		- Marka Jalan	meter	-	-	100	200	300	400	400	400	
		- Traffic Cones	buah	100	100	200	300	400	500	500	550	
		- Guard Rail	meter	100	500	1000	1500	2000	2500	2500	2500	
		- Patok Pengaman	buah	-	-	100	200	300	400	400	450	
		- Reapeter	buah	-	-	1	-	-	-	1	-	
		12 Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan bermotor Keliling	paket	1	0	0	0	1	1	3	-	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		13 Optimalisasi Terminal Kabupaten Tasikmalaya (Terminal Pagerageung, Ciawi, Rajapolah, Cipatujah, Bantarkalong, Karangnunggal, Taraju, Bojonggambir, Sodonghilir, Sukaraja, Salawu, Cikatomas, Pancatengan, Cikalong, Tanjungjaya dan Cineam	buah	-	-	1	4	4	6	15	3	
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berawasan lingkungan	3.1 Meningkatnya produktivitas sumberdaya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan	1 Jumlah usaha penambangan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertambangan dan Energi
		2 Tersedianya database potensi mineral dan batu bara	Kec	3	13	23	33	39	39	39	40	
		3 Jumlah Ijn Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit	buah	80	60	60	60	60	60	60	60	
		4 Jumlah hasil produksi pertambangan umum	Rp.	306,594,100	316,575,000	332,403,750	349,023,938	366,475,134	384,798,891	384,798,891	404,038,836	
		5 Pembangunan Industri Tambang di Kec. Cipatujah : - Terbangunannya Industri Pengolahan Mineral Logam (Mengacu Pada UU No. 4 Th. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)	Unit	-	-	-	-	1	-	1	-	
		6 Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	buah	105	110	115	120	125	130	130	135	Kantor Lingkungan Hidup
		7 Jumlah perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	buah	105	110	115	120	125	130	130	135	
		8 Jumlah usaha/kegiatan pertambangan yang telah melakukan reklamasi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
		9 Jumlah kajian di bidang Lingkungan Hidup	buah	8	14	16	18	20	22	22	24	
		10 Jumlah kendaraan yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara	buah	100	100	100	100	100	100	100	100	
		11 Jumlah industri yang sudah memiliki hasil tes uji emisi udara	buah	2	4	6	8	10	12	12	14	
		12 Jumlah tenaga pengawas pengendali pencemaran dan perusakan lingkungan	buah	1	2	3	4	5	6	6	8	
		13 Jumlah perusahaan yang memiliki ijin pengumpulan sementara limbah B3	buah	1	1	-	-	-	-	1	1	
		14 Terbangunnya Taman Geologi Jasper di Kecamatan Pancatengah	%	-	-	-	30	60	80	80	100	
		15 Jumlah Sumber mata air yang dikonservasi	buah	5	-	10	15	20	25	25	27	

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		16 Jumlah dan cakupan pengujian kualitas lingkungan	Buah									
		- Kualitas air	sungai	10	10	10	10	10	10	10	10	
		- Kualitas udara (bergerak)	titik	1	5	5	5	5	5	5	5	
		17 Jumlah Ekowisata terbangun	buah	1	-	1	-	-	1	2	3	
		18 Jumlah peraturan daerah pengelolaan RTH	buah	-	-	-	1	1	-	2	-	
		19 Jumlah RTH	kawasan	1	2	4	6	8	10	10	10	
4. Meningkatkan Ketersediaan Energi	4.1 Meningkatnya ketersediaan energi terutama untuk daerah perdesaan	1 Jumlah jaringan listrik yang dibangun										Dinas Pertambangan dan Energi
		- JTM	M	102,734	1,892	9,082	10,500	9,094	7,369	37,937	6,026	
		- JTR	M	164,737	15,714	28,340	2,644	41,715	50,236	138,649	27,343	
		- Trafo	buah	49	8	11	12	12	8	51	10	
		2 Jumlah Pelanggan listrik	KK	248	1,594	1,455	1,639	2,241	2,056	8,985	1,095	
		3 Jumlah desa yang terjangkau pelayanan listrik	desa	351	351	351	351	351	351	351	351	
		4 Jumlah Penerangan Sarana umum	unit	98	100	150	170	180	200	200	200	
		5 Jumlah pengembangan sumber daya energi alternatif (biogas)	unit	348	15	15	20	20	20	90	20	
		6 Jumlah Sumber Daya Energi Alternatif Mikro Hidro	unit	4	5	6	7	8	9	9	9	
		7 Tersedianya energi listrik di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Tasikmalaya										
		- JTM	M	295	-	1500	-	-	-	1795	-	
		- JTR	M	345	1420	-	-	-	-	1765	-	
		- SKTM	M	-	-	400	-	-	-	400	-	
		- SKTR	M	-	-	-	3200	-	-	3200	-	
		- Trafo (630 KVA)	buah	-	2	-	-	-	-	2	-	
		- Genset (630 KVA)	buah	-	-	1	-	-	-	1	-	
		- Gardu Cantol (315 KVA)	buah	1	-	-	-	-	-	1	-	
		- Rumah Gardu	buah	-	1	-	-	-	-	1	-	
		- Rumah Genset	unit	-	1	-	-	-	-	1	-	
		8 Pengembangan Geothermal Karaha Bodas oleh PT. Pertamina Geothermal Energi di Karaha Bodas Kecamatan Kadipaten Kab. Tasikmalaya :	kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9 Tersedianya database pemetaan jaringan distribusi listrik	Kec	33	2	4	-	-	-	39	-	
5. Meningkatkan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	5.1 Terlaksananya mitigasi dan penanggulangan bencana alam	1 Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	SKPD	0	1	-	-	-	-	1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2 Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana alam	Paket	0	1	1	1	1	1	5	-	
		3 Jumlah TAGANA	orang	104	104	114	124	134	144	144	150	Dinsosdukaker

TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011 - 2015

Visi : Kabupaten Tasikmalaya yang Religius Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis, dan Berbasis Perdesaan

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang

Tujuan	Sasaran		Satuan	Kondisi Awal (2010)	Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)					Target Akhir RPJMD	Target Tahun 2016	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Uraian	Indikator Capaian Sasaran			2011	2012	2013	2014	2015			
		4 Tersedianya Dokumen Mitigasi Bencana Alam Kab Tasikmalaya	dokumen	0	1	-	-	-	-	1	-	

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM